



PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2016-2021



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

(RPJMD)

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai akibat adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, diperlukan penyesuaian nomenklatur indikator sasaran, penyesuaian penempatan program, dan perubahan indikator sasaran program;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 214), diubah dan ditambah satu ayat sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - i. BAB IX : Penutup

- (2) Dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan RPJMD dibutuhkan perubahan sasaran strategis, program dan indikator kinerja yang berfungsi mempertajam pencapaian tujuan RPJMD, dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT: (8/182/2018)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR
3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021**

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, dan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah, harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang memuat antara lain visi, misi, dan program Bupati terpilih serta harus selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJM Daerah disusun dengan mekanisme pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan melibatkan unsur masyarakat, Perangkat Daerah, dan pihak legislatif. Oleh karena itu, sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD, terlebih dahulu telah dilakukan musyawarah dan pembahasan secara substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dikonsultasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mendapatkan klarifikasi dan masukan.

Secara substantif RPJMD memuat :

- a) Pendahuluan;
- b) Gambaran umum kondisi daerah;
- c) Gambaran keuangan daerah
- d) Permasalahan dan Isu Strategis
- e) Visi, Misi, tujuan dan sasaran;
- f) Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- g) Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i) Penetapan Indikator Kinerja Daerah;

Sedangkan dilihat dari fungsinya, RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD; pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; pengalokasian anggaran pada Perangkat Daerah; dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. Oleh karena itu, untuk memberikan dasar hukum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 231



PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 - 2021



DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
Daftar Diagram dan Daftar Gambar		vii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
	1.5. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-19
	2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-30
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-57
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-10
	3.3. Kerangka Pendanaan	III-12
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
	4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
	4.2. Isu-Isu Strategis Daerah	IV-6
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
	5.1. Visi RPJMD 2016-2021	V-1
	5.2. Misi RPJMD 2016-2021	V-4
	5.3. Tujuan dan Sasaran	V-8
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
	6.1. Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
	6.2. Pelaksanaan Arah Kebijakan Tahunan	VI-12
	6.3. Prioritas Pembangunan Daerah	VI-14
	6.4. Penyelarasan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi 2016-2021 dengan RPJMD Kab. Pesisir Selatan 2016-2021	VI-18
	6.5. Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan dan Rencana Sistem Perkotaan	VI-19
	6.6. Kawasan Perbatasan dengan Kabupaten Lain	VI-27
	6.7. Pembangunan Kawasan Perdesaan	VI-27
	6.8. Kebijakan Pembangunan Lintas Perangkat Daerah	VI-28
	6.9. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif	VI-28
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
	8.1. Indikator Kinerja Utama	VIII-1
	8.2. Indikator Kinerja Kunci... ..	VIII-2
BAB IX	PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Luas Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan	II-1
Tabel	2.2.	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Pesisir Selatan	II-4
Tabel	2.3.	Jenis Tanah di Kabupaten Pesisir Selatan	II-5
Tabel	2.4.	Nama-Nama Sungai, Lokasi dan Panjangnya di Kabupaten Pesisir Selatan	II-6
Tabel	2.5.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan	II-7
Tabel	2.6.	Jenis dan Penyebaran Resiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-7
Tabel	2.7.	Tingkat Resiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan	II-8
Tabel	2.8.	Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan Tahun 2010-2015...	II-11
Tabel	2.9.	Luas Hutan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.....	II-12
Tabel	2.10.	Daftar Nama Pulau-Pulau di Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-13
Tabel	2.11.	Perwilayahan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan	II-15
Tabel	2.12.	Jumlah Daya Tarik Wisata Pada Setiap DUPK di Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-15
Tabel	2.13.	Potensi Pertambangan di Kabupaten Pesisir Selatan	II-17
Tabel	2.14.	Data Terpilih Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2010-2015	II-18
Tabel	2.15.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010-2015	II-18
Tabel	2.16.	Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015	II-19
Tabel	2.17.	Perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015.....	II-21
Tabel	2.18.	Perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK 2010) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015	II-21
Tabel	2.19.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015	II-22
Tabel	2.20.	Struktur Perekonomian Pesisir Selatan Berdasarkan Proporsi PDRB Lapangan Usaha Tahun 2011-2015.....	II-22
Tabel	2.21.	Perbandingan PDRB Perkapita Pesisir Selatan dan Sumatera Barat Tahun 2011-2015.....	II-23
Tabel	2.22.	Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015.....	II-23
Tabel	2.23.	Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015.....	II-24
Tabel	2.24.	Penumpukan Dana Oleh Bank-Bank di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Keadaan Akhir Bulan Tahun 2012-2016.....	II-24
Tabel	2.25.	Perkembangan Keuangan, Asuransi, dan jasa Perusahaan Tahun 2012-2016.....	II-25
Tabel	2.26.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2011-2015.....	II-27
Tabel	2.27.	Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011-2015.....	II-28
Tabel	2.28.	Pengelolaan Aset Budaya Pesisir Seltan Tahun 2011-2015.....	II-30
Tabel	2.29.	Perkembangan Pemuda dan Olah Raga Pesisir Selatan Tahun 2011-2015.....	II-30

Tabel	2.30.	Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan Tahun 2011-2015.....	II-32
Tabel	2.31.	Perkembangan Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2011-2015.....	II-33
Tabel	2.32.	Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Tahun 2011-2015.....	II-34
Tabel	2.33.	Perkembangan Cakupan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011-2015.....	II-35
Tabel	2.34.	Panjang dan Kondisi Jalan di Pesisir Kabuapten Pesisir Selatan Tahun 2015.....	II-36
Tabel	2.35.	Daftar Jaringan Induk Menurut Permukaan Tahun 2015.....	II- 36
Tabel	2.36.	Daftar Jalan Jaringan Induk Menurut Kondisi Tahun 2015.....	II- 37
Tabel	2.37.	Jumlah Jembatan Pada Ruas Jalan Negara Tahun 2013-2015.....	II-37
Tabel	2.38.	Jumlah Jembatan Pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2012-2015....	II-37
Tabel	2.39.	Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015.....	II-38
Tabel	2.40.	Perkembangan Kinerja Urusan Kententraman, KetertibaanUmum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 210-2015.....	II-39
Tabel	2.41.	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Wajib Sosial Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-40
Tabel	2.42.	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015.....	II-40
Tabel	2.43.	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015.....	II-41
Tabel	2.44.	Perkembangan Indikator Urusan Pangan Tahun 2011-2015.....	II-42
Tabel	2.45.	Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Tahun 2011-2015..	II-43
Tabel	2.46.	Perkembangan Indikator Urusan Hidup Tahun 2011-2015.....	II-43
Tabel	2.47.	Perkembangan Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015.....	II-44
Tabel	2.48.	Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2011-2015.....	II-45
Tabel	2.49.	Perkembangan Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2011-2015.....	II-45
Tabel	2.50.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2011-2015.....	II-46
Tabel	2.51.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2015	II-47
Tabel	2.52.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2015.....	II-48
Tabel	2.53.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2011-2015.....	II-48
Tabel	2.54.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun2011-2015.....	II-49
Tabel	2.55.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Statistik Tahun 2011-2015.....	II-49

Tabel	2.56.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Kebudayaan Tahun 2011-2015.....	II-50
Tabel	2.57.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perpustakaan Tahun 2011-2015.....	II-50
Tabel	2.58.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perikanan Tahun 2011-2015.....	II-51
Tabel	2.59.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Pariwisata Tahun 2011-2015.....	II-52
Tabel	2.60.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Pertanian Tahun 2011-2015.....	II-52
Tabel	2.61.	Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Plawija.....	II-53
Tabel	2.62.	Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Buah-Buahan.....	II-53
Tabel	2.63.	Produktivitas dan Pertumbuhan Produktivitas Perkebunan Tahun 2010-2016.....	II-54
Tabel	2.64.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Kehutanan Tahun 2011-2015.....	II-55
Tabel	2.65.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan ESDM Tahun 2011-2015.....	II-55
Tabel	2.66.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perdagangan Tahun 2011-2015.....	II-56
Tabel	2.67.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perindustrian Tahun 2011-2015.....	II-56
Tabel	2.68.	Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Transmigrasi Tahun 2011-2015.....	II-57
Tabel	2.69.	Perkembangan Pengeluaran Perkapita dan Produktivitas Total Daerah Tahun 2011-2015.....	II-58
Tabel	2.70.	Perkembangan Indikator Terkait Aksesibilitas Wilayah Tahun 2011-2015.....	II-59
Tabel	2.71.	Perkembangan Fasilitas Bank dan Non Bank Tahun Tahun 2011-2015.....	II-60
Tabel	2.72.	Jumlah Sambungan PDAM Tahun 2012-2014.....	II-60
Tabel	2.73.	Jumlah Sarana Perekonomian Tahun 2011-2015.....	II-61
Tabel	2.74.	Perkembangan Fasilitas Listrik dan Telpon Tahun 2011-2015.....	II-61
Tabel	2.75.	Perkembangan Indikator Pendukung Iklim Investasi Tahun 2011-2015.....	II-62
Tabel	2.76.	Angka Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2011-2014.....	II-63
Tabel	2.77.	Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011-2014.....	II-63
Tabel	3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015	III-4
Tabel	3.2.	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	III-9
Tabel	3.3.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2015	III-1
Tabel	3.4.	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2015	III-11
Tabel	3.5.	Komposisi Penutup Riil Anggaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2015	III-11
Tabel	3.6.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2015	III-12

Tabel	3.7.	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	III-14
Tabel	3.8.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021	III-16
Tabel	5.1.	Proyeksi Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 (sebelum perubahan)	V-2
Tabel	5.2.	Proyeksi Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021(setelah penyesuaian)	V-4
Tabel	5.3	Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.....	V-13
Tabel	6.1.	Visi, Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	VI-8
Tabel	6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan	VI-12
Tabel	6.3.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Pesisir Selatan	VI-18
Tabel	6.4.	Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan	VI-24
Tabel	6.5.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pesisir Selatan	VI-29
Tabel	7.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pesisir Selatan	VII-1
Tabel	8.1.	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	VIII-1
Tabel	8.2.	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	VIII-4

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	2.1.	LuasTanam Perkebunan Rakyatdi Kabupaten Pesisir Selatan	II-11
Diagram	2.2.	Perkembangan IPM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015	II-19
Diagram	2.3.	Perkembangan IPM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015	II-26
Diagram	2.4.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat tahun 2011-2015	II-27
Diagram	2.5.	Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat tahun 2011-2015	II-29
Diagram	2.6.	Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Selatan (ekor) Tahun 2011-2015	II-54
Diagram	2.7.	Populasi Daging Kabupaten Pesisir Selatan (kg) Tahun 2011-2015	II-54
Diagram	5.1.	Tren Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumbar dan Pesisir Selatan Tahun 2001 - 2017	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1.	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya	I-7
Gambar	2.1.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan	II-1
Gambar	2.2.	Peta Kawasanhutan Kabupaten Pesisir Selatan	II-12



PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 - 2021



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk merumuskan agar pembangunan tersebut sesuai dengan tujuannya, maka setiap daerah perlu membuat perencanaan pembangunan, yakni suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Renana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dokumen ini dibuat sebagai manifestasi atas mandat pembangunan daerah yang disusun oleh Kepala Daerah terpilih, yang di dalamnya memuat visi dan misi kepala daerah tatkala yang bersangkutan hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yang dimaknai pula sebagai pengejawantahan atas janji politik kepala daerah dimaksud kepada masyarakat di wilayahnya.

Dengan telah dilantiknya Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, SH. MH dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 2016 yang lalu, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2016 – 2021 sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah terpilih yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”, dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam beberapa tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 -2021, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan asumsi kerangka prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta adanya dinamika yang terjadi pada tingkat regional, nasional maupun global. Selain itu, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 yang telah dilakukan, Pemerintah Daerah memandang perlu dilakukan revisi terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang didasari oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan nasional berupa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diteruskan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini berakibat terjadinya terjadi pengalihan kewenangan dan perubahan pada Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD).
2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas No.050/4936/SJ dan No.0430/M.PPN/12/2016 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019.
3. Indikator dan target outcome dari beberapa program serta kinerja daerah yang tertuang pada RPJMD masih belum terukur secara kuantitatif sehingga sulit untuk mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam SAKIP, LAKIP, LKPJ LPPD dan laporan kinerja lainnya. Untuk itu perlu dilakukan perubahan metodologi penghitungan indikator kinerja sesuai dengan kesanggupan pencapaian daerah.
4. Rancangan Perubahan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030 yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur ruang dan pola ruang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dilakukan mengacu kepada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, antara lain:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Pengganti Permendagri Nomor 5 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bappenas No.050/4936/SJ dan No.0430/M.PPN/12/2016 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015 – 2019;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

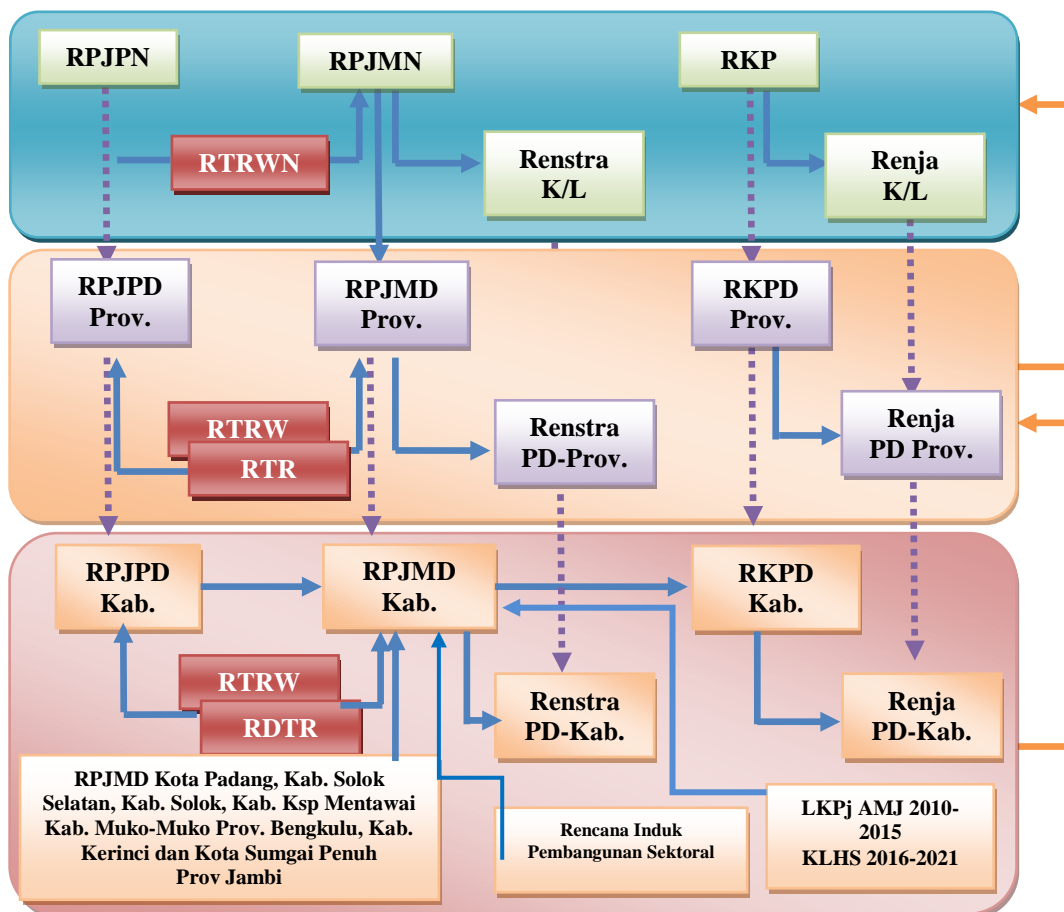
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD memiliki nilai strategis dalam pembangunan suatu daerah. Sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005–2025, RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019, serta mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015, serta memperhatikan RPJMD Kota Padang dan rancangan RPJMD Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
2. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah mengintegrasikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011) dan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008).
3. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan memperhatikan dan telah diselaraskan dengan beberapa Rencana Induk pembangunan sektoral seperti Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten, Rancangan Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten dan Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.
6. Selain itu, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016- 2021 juga memperhatikan beberapa dokumen lainnya antara lain:
 - a. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016- 2021.
 - b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Bupati Tahun 2010-2015.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah untuk menyempurnakan dokumen RPJMD yang menjadi dokumen yang digunakan sebagai pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Dunia Usaha serta Masyarakat Umum untuk Pembangunan Daerah. RPJMD menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

1.4.2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah:

- 1) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan Program Prioritas dan Kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya.
- 2) Sebagai gambaran umum tentang kondisi daerah pada tahun perencanaan dan kondisi yang diinginkan pada akhir masa jabatan.
- 3) Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja 5 (lima) tahunan Pemerintah Daerah.
- 4) Mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- 5) Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016- 2021 terdiri dari 9 (sembilan) bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
	2.3 Aspek Pelayanan Umum
	2.4 Aspek Daya Saing Daerah
Bab III	Gambaran Keuangan Daerah
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
	3.3. Kerangka Pendanaan
Bab IV	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
	4.1 Masalah Pembangunan
	4.2 Isu-Isu Strategis
Bab V	Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran
	5.1 Visi
	5.2 Misi
	5.3 Tujuan dan Sasaran
Bab VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
	6.1 Strategi dan Arah Kebijakan
	6.2 Pelaksanaan Arah Kebijakan Tahunan
	6.3 Prioritas Pembangunan Daerah
	6.4 Penyelarasan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021
	6.5 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan dan Rencana Sistem Perkotaan
	6.6 Kawasan Perbatasan dengan Kabupaten Lain
	6.7 Pembangunan Kawasan Perdesaan
	6.8 Kebijakan Pembangunan Lintas Perangkat Daerah
	6.9 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Bab VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Bab VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
	8.1 Indikator Kinerja Utama
	8.2 Indikator Kinerja Kunci
Bab IX	Penutup



PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 - 2021



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

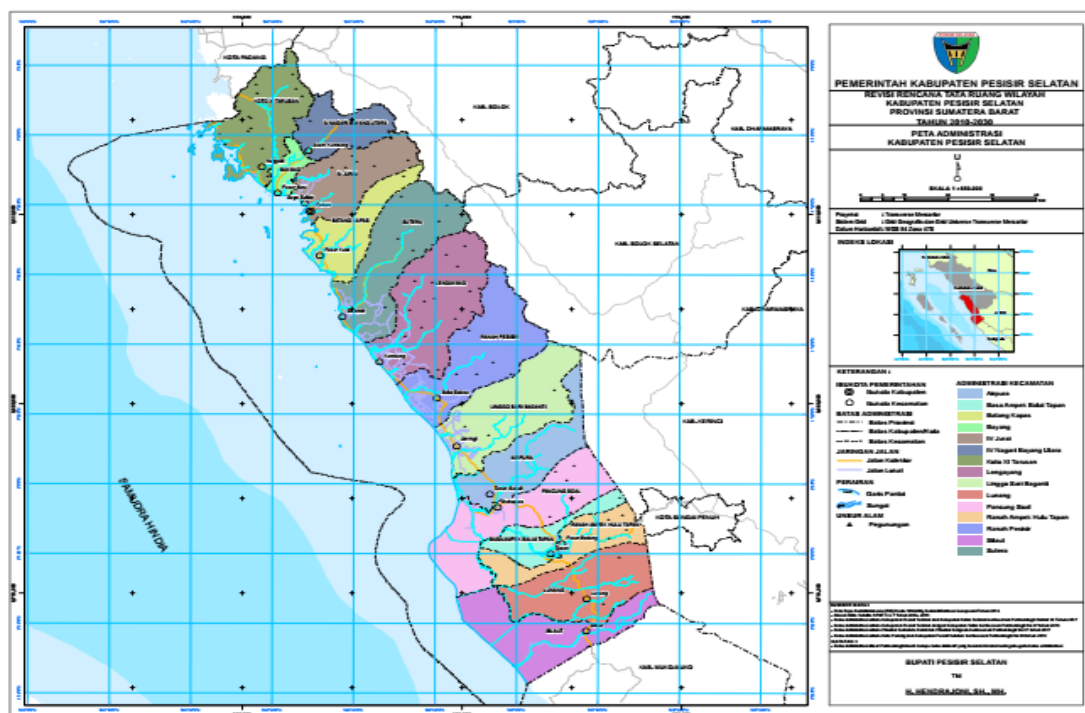
2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan berada pada 0°59'-2° 28,6' Lintang Selatan dan 100°19'-101°18' Bujur Timur, memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Provinsi Bengkulu
- Sebelah Utara : Kota Padang
- Sebelah Timur : Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Berdasarkan administrasi, Kabupaten Pesisir Selatan terbagi ke dalam 15 wilayah Kecamatan dengan 182 Nagari.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan



Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Nagari	Jumlah Kampung
		(Km ²)	%		
Silaut	Silaut	466,45	7,71	10	27
Lunang	Lunang	456,73	7,55	10	28
Basa Ampek Balai tapan	Tapan	187,46	3,10	10	20
Ranah IV Hulu Tapan	Pasar Beriang	281,96	4,66	10	20
Pancung Soal	Inderapura	547,41	6,28	10	24
Airpura	Tamuan	380,10	5,46	10	20
Linggo Sari Baganti	Air Haji	557,66	9,22	16	43
Ranah Pesisir	Balai Selasa	562,44	9,30	10	27
Lengayang	Kambang	632,96	10,46	9	45
Sutera	Surantih	569,81	9,42	12	32
Batang Kapas	Pasar Kuok	277,54	4,59	9	29
IV Jurai	Salido	368,19	6,09	20	52
Bayang	Pasar Baru	80,92	1,34	17	45
IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	242,33	4,01	6	17
Koto XI Tarusan	Nanggalo	437,37	7,23	23	51
Pesisir Selatan		6.049,34	100,00	182	480

Sumber : Hasil Perhitungan Ulang Berdasarkan Penegasan Batas Wilayah Pesisir Selatan

2.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit dengan ketinggian berkisar 0-1000 m dari permukaan laut, memiliki 47 buah pulau serta dialiri sebanyak 22 sungai. Kondisi permukaan lahan Kabupaten Pesisir Selatan dewasa ini adalah sebagian besar lahan hutan yaitu 66.01 persen dan 33.92 persen areal penggunaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya.

Kondisi topografi wilayah memiliki keberagaman kemiringan lereng berkisar antara 0-40 persen dan > 40 persen. Klasifikasi Kemiringan lereng meliputi:

- 1) Kemiringan 0 – 2% yang merupakan kemiringan datar, terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas 181.654 Ha (31,59%).
- 2) Kemiringan 2 – 15% yang merupakan kemiringan agak landai, terdapat dikecamatan Lunang Silaut, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kecamatan Pacung Soal, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Sutera,

Kecamatan Batang Kapas, dan Kecamatan Koto XI Tarusan, dengan luas 5.102 Ha (0,89%).

- 3) Kemiringan 15 – 25% yang merupakan kemiringan Landai terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaen Pesisir Selatan, dengan luas 24.562 Ha (4,27%).
- 4) Kemiringan 25 – 40% yang merupakan kemiringan agak curam terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaen Pesisir Selatan, dengan luas 59.436 Ha (10,34%).
- 5) Kemiringan > 40% yang merupakan kemiringan curam terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas 304.235 Ha (52,91%).

Fisiografi wilayah terbentuk dari perpaduan antara proses patahan pegunungan Bukit Barisan ke arah barat dan proses aluvial marine. Dari sisi geologis daerah ini termasuk pinggir dari patahan semangko yang membujur dari utara ke selatan. Lahan dengan kemiringan yang terjal dan lahan rawa disepanjang pantai mendominasi daerah ini. Oleh karena itu luas daratan yang dapat dibudidayakan relatif sempit.

2.1.3 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung berawan dan musim hujan. Puncak curah hujan maksimum terjadi sekitar bulan Januari dan November. Sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan September. Suhu minimum terjadi antara bulan April sampai dengan Juni dan suhu maksimum terjadi antara bulan Januari dan Oktober dengan temperatur suhu udara berkisar antara 22° C– 28° C dan 23° C–32° C serta kelembaban rata-rata 80 persen. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun tanpa ada bulan-bulan kering dengan jumlah hari hujan berkisar antara 13-15 hari perbulan.

Secara lebih rinci banyaknya hari hujan dan curah hujan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016

No.	Bulan	Banyaknya Hari Hujan(hari)	Banyaknya curah Hujan (mm)
1.	Januari	112.0	2485.0
2.	Februari	90.0	2145.0
3.	Maret	96.0	2323.0
4.	April	104.0	2003.0
5.	Mei	67.0	1491.0
6.	Juni	55.0	1045.0
7.	Juli	67.0	1326.0
8.	Agustus	56.0	892.0
9.	September	86.0	1163.0
10.	Oktober	94.0	2389.0
11.	November	101.0	1466.0
12.	Desember	107.0	1528.0

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka 2017

2.1.4 Kondisi Geologi

Jenis tanah di Pesisir Selatan terdiri dari tanah organosol, alluvial, regosol, andosol, podsolik, dan latosol. Tanah organosol disebut juga sebagai tanah gambut, tersusun dari timbunan bahan organik dengan ketebalan sangat bervariasi, mulai dari 50 cm sampai 5 meter di atas permukaan tanah.

Jenis tanah yang paling dominan di Pesisir Selatan adalah tanah latosol seluas 188,153 Ha (32,72%) dan tanah andosol seluas 181.399 Ha (31,55%). Secara garis besar tanah di Pesisir Selatan Terdiri dari:

1. Jenis tanah alluvial adalah tanah dengan derajat keasaman (PH) yang rendah, kejenuhan basa rendah, struktur tanah kurang baik, dan rasio kualitas unsur hara yang terdapat di dalam tanah yang bervariasi, digunakan sebagai lahan padi sawah, palawija, nanas, dan tanaman tanaman lainnya.
2. Jenis tanah regosol merupakan tanah dengan kandungan bahan organik yang rendah, selain itu tanah ini juga peka terhadap erosi, cocok dipakai sebagai lahan untuk tanaman tembakau, tebu, palawija dan sayur sayuran.
3. Jenis tanah andosol merupakan tanah yang kesuburan kimianya rendah, namun memiliki kemampuan menahan air yang baik, cocok bila ditanam padi sawah. Selain padi tanah ini cocok untuk penanaman sayur sayuran, buah, bunga, teh, kopi, dan lain-lain.

4. Jenis tanah podsolik memiliki ciri khas pada warnanya. Faktor pembatas pada tanah podsolik merah kuning adalah adanya lapisan pada yang dangkal, konkresi zat besi, defisiensi unsur hara mikro serta pH tanah yang rendah (tanah masam) cocok untuk tanaman ubi rambat, tembakau, buah buahan dan karet.
5. Jenis tanah latosol merupakan tanah dengan status nutrisi yang rendah, selain itu, kandungan bahan organik pada tanah ini juga sedikit. Dapat disebut tanah ini mirip dengan Andosol, digunakan untuk penanaman kelapa sawit, coklat, kopi, teh dan karet.

Tabel 2.3
Jenis Tanah di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Kecamatan	Jenis Tanah					
		Organosol	Alluvial	Regosol	Andosol	Podsolik	Latosol
1.	Koto XI Tarusan	-	144	-	12.384	-	11.764
2.	Bayang	-	4.932	-	3.600	-	-
3.	IV Nagari Ba		11.232	-	-	23.829	7.502
4.	IV Jurai	-	1.800	-	14.040	-	21.540
5.	Batang Kapas	-	2.656	-	14.616	-	18.635
6.	Sutera	-	5.976	-	14.720	-	23.869
7.	Lengayang	-	6.624	-	34.076	-	18.360
8.	Ranah Pesisir	-	6.556	-	26.885	-	22.998
9.	Linggo Sari Baganti	-	7.088	-	17.964	-	6.489
10.	Air Pura	4.644	10.440	4.860	19.282	-	34.784
11.	Pancung Soal						
12.	Basa IV Balai	6.012	648	-	10.728	43.270	7.092
13.	Ranah IV Hulu						
14.	Lunang	31.174	-	12.204	13.104	21.348	15.120
15.	Silaut						
TOTAL		41.830	58.096	17.064	181.399	88.447	188.153

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030

2.1.5 Kondisi Hidrologi

Pesisir Selatan memiliki 22 sungai besar dan sungai kecil yang merupakan bagian dari sistem jaringan sungai yang dipengaruhi oleh kondisi topografi dan struktur fisiografi yang terpapar dari timur ke barat. Rata-rata sungai yang berada di Pesisir Selatan hulunya berasal dari Kabupaten Solok Selatan dan kawasan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) serta Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan debit rata-ratanya 29,696 m³/dtk (tahun 2008) dengan luas 6.232,02 km².

Selain dari sungai sebagai sumber daya air, potensi ketersediaan air tanah cukup memadai, yaitu 9.420,44 juta m³.

Batang Tarusan merupakan Sungai terpanjang dengan panjang aliran sungai 437 km yang melalui Kecamatan Koto XI Tarusan. Sedangkan sungai terpendek adalah Batang Painan dengan panjang aliran sungai 13,61 Km yang melalui Kecamatan IV Jurai.

Tabel 2.4
Nama-Nama Sungai, Lokasi dan Panjangnya
Di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	Batang Tarusan	Koto XI Tarusan	437
2	Batang Bayang	Bayang	134
3	Batang Lumpo	IV Jurai	47.5
4	Batang Salido	IV Jurai	29
5	Batang Painan	IV Jurai	13
6	Batang Jalamu	Batang Kapas	85
7	Batang Tartak Tompatih	Batang Kapas	71
8	Batang Koto Gunung	Batang Kapas	85
9	Batang Surantih	Sutera	171
10	Batang Amping Parak	Sutera	85
11	Batang Kambang	Lengayang	59
12	Batang Lakitan	Lengayang	70
13	Batang Pelangai	Ranah Pesisir	83
14	Batang Aia Haji	Linggo Sari Baganti	62.9
15	Batang Punggasan	Linggo Sari Baganti	58.3
16	Batang Bantaian	Linggo Sari Baganti	46.6
17	Batang Inderapura	Pancung Soal	174.4
18	Batang Betung	Basa IV Balai Tapan	115
19	Batang Tapan	Basa IV Balai Tapan	175
20	Batang Lunang	Lunang	133.4
21	Batang Sindang	Lunang	71
22	Batang Silaut	Silaut	200

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

2.1.6 Tutupan Lahan dan Penggunaan Lahan

Berdasarkan data hasil pengolahan citra Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Tutupan Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh hutan primer yakni seluas 302.233 hektar atau sekitar 49,94% luas wilayah, perkebunan seluas 100.083 hektar (16,54%), kebun kelapa sawit seluas 62.982 hektar (10,40%) dan lainnya dengan proporsi dibawah 10%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Porsi (%)
1.	Hutan Bakau/Mangrove	245,43	0.04
2.	Hutan Primer	302.124,78	49.94
3.	Hutan Sekunder	23.474,71	3.87
4.	Hutan Rawa Primer	928,05	0.15
5.	Hutan Tanaman Rakyat	17.749,44	2.93
6.	Ladang	29.249,41	4.85
7.	Pasir/Bukit Pasir Darat	637,41	0.10
8.	Perkebunan	100.119,64	16.54
9.	Perkebunan Kelapa Sawit	62.982,04	10.40
10.	Permukiman	6.270,97	1.03
11.	Sawah	25.764,73	4.25
12.	Semak Belukar	32.157,18	5.31
13.	Sungai	3.230,18	0.53
JUMLAH		604.933,94	100,00

Sumber : RBI Skala 1:50.000 dan interpretasi citra Spot 6 dan 7 tahun 2016 Kabupaten Pesisir Selatan

2.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Ditinjau dari kondisi Geografis, Geologis dan Hidrometeorologis, Kabupaten Pesisir Selatan termasuk wilayah yang berpotensi mengalami bencana. Adapun potensi bencana yang dimaksud adalah:

Tabel 2.6
Jenis dan Penyebaran Resiko Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Lokasi Bencana	Gempa	Tsunami	Banjir	Longsor	Puting Beliung	Gunung Api	Kebakaran
1	Koto XI Tarusan	√	√	√	√			√
2	Bayang	√	√	√				√
3	Bayang Utara	√			√			√
4	IV Jurai	√	√		√			√
5	Batang Kapas	√	√	√				√
6	Sutera	√	√	√				√
7	Lenggayang	√	√	√				√
8	Ranah Pesisir	√	√	√				√
9	Linggosaribaganti	√	√	√	√			√
10	Pancung Soal	√	√	√	√			√
11	Airpura	√	√	√				√
12	BAB Tapan	√		√			√	√
13	RAHUL Tapan	√		√			√	√
14	Lunang	√		√				√
15	Silaut	√	√	√				√

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2015

Tabel 2.7
Tingkat Resiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jenis Bahaya	Bahaya		Kerentanan		Kapasitas		Resiko	
		Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat
1.	Banjir	0,782	Tinggi	0,686	Tinggi	0,249	Rendah	0,734	Tinggi
2.	Gelombang ekstrim dan abrasi	0,756	Tinggi	0,549	Sedang	0,255	Rendah	0,683	Tinggi
3.	Gempa bumi	0,531	Sedang	0,748	Tinggi	0,262	Rendah	0,664	Sedang
4.	Kekeringan	0,659	Sedang	0,903	Tinggi	0,225	Rendah	0,772	Tinggi
5.	Cuaca ekstrim	0,817	Tinggi	0,746	Tinggi	0,229	Rendah	0,776	Tinggi
6.	Tanah longsor	0,561	Sedang	0,617	Sedang	0,237	Rendah	0,638	Sedang
7.	Kebakaran hutan	0,615	Sedang	0,770	Tinggi	0,225	Rendah	0,715	Tinggi
8.	Tsunami	0,893	Tinggi	0,683	Tinggi	0,284	Rendah	0,752	Tinggi
9.	Epidemi wabah penyakit	0,333	Rendah	0,726	Tinggi	0,210	Rendah	0,576	Sedang
10.	Gagal teknologi	0,333	Rendah	0,761	Tinggi	0,210	Rendah	0,585	Sedang

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2018

a. Gempa Bumi dan Tsunami

Secara umum wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di wilayah seismik aktif yaitu pertemuan antara dua lempeng tektonik aktif euroasia dan indo-australia. Berdasarkan catatan sejarah dan pendapat kalangan ahli gempa menyatakan bahwa periode ulang gempa besar dikawasan zona subduksi Mentawai berada pada kisaran 170 hingga 200 tahun sekali. Selain terletak diantara dua lempeng tektonik aktif, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan juga terimbas efek dari adanya jalur patahan aktif di Sumatera yaitu Patahan Semangka. Sebagai konsekuensi dari letak geografis tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bahaya gempa bumi dan tsunami. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, gempa bumi yang menimbulkan efek masif kerusakan terjadi pada tahun 2007 dan 2009. Berdasarkan riset terakhir para ahli terhadap kondisi zona subduksi Mentawai diketahui bahwa tumbukan lempeng euroasia dan indo-australia telah terkunci (tidak bergerak lagi), sehingga potensi gempa berskala besar yang berimbas pada daerah di sekitarnya sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Selain kerusakan akibat gempa, hal lain yang menjadi ancaman adalah terjadinya tsunami yang diprediksi akan menyapu kawasan pantai hingga radius 5 (lima) kilometer dari bibir pantai.

b. Banjir

Kerentanan bencana lain yang mengancam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah potensi terjadinya banjir, baik banjir biasa maupun banjir bandang. Khusus untuk banjir bandang, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang banyak dialiri sungai-sungai besar. Secara historis tipikal daerah dataran rendah Pesisir Selatan yang terletak di sepanjang pantai dan pada umumnya merupakan lembah, diyakini oleh para ahli merupakan endapan aluvial akibat adanya banjir purba pada masa lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk dataran yang menyerupai kipas (kipas aluvial).

c. Tanah Longsor

Kabupaten Pesisir Selatan berada pada daerah perbukitan dengan kemiringan yang cukup curam $\pm 50\%$ dari luas wilayah, dengan struktur tanah yang sangat rawan terhadap longsor. Beberapa hal yang dapat menyebabkan tanah longsor antara lain :

- a. Tingginya curah hujan
- b. Penebangan pohon yang sembarangan
- c. Peladangan yang sembarangan dan berpindah – pindah
- d. Pembabatan hutan yang tidak semestinya
- e. Tidak ditanaminya kembali hutan yang telah gundul (reboisasi)

d. Abrasi Pantai dan Sungai

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berada di sepanjang pantai Sumatera ± 234 km dan kemiringan pinggir pantai sangat curam dengan gelombang pasang yang cukup tinggi sehingga sangat berpotensi terhadap abrasi pantai. Akibat dari terjadinya abrasi pantai tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan terhadap pemukiman masyarakat yang berada disepanjang pantai, dengan perbedaan ketinggian antara permukaan laut dengan pemukiman masyarakat sangat kecil yaitu ± 3 m. Abrasi pantai adalah bencana alam yang terjadi di wilayah sekitar pantai yang diakibatkan oleh :

- a. Adanya perubahan musim
- b. Tingginya gelombang pasang

- c. Berkurangnya kawasan hijau disepanjang garis pantai (hutan bakau)
- d. Permukiman penduduk yang semakin dekat dengan pinggir pantai

e. Kebakaran

Pemukiman penduduk dan lahan perkebunan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sering terjadinya kebakaran. Faktor utama tingginya tingkat kebakaran antara lain ;

- ⊙ Padatnya rumah penduduk dengan akses jalan yang tidak memadai dalam melakukan pemadaman api pada beberapa titik-titik lokasi dikecamatan.
- ⊙ Rata-rata rumah dan pertokoan tidak melakukan pemeriksaan ulang atau penggantian instalasi listrik baru rumah atau pertokoan yang pemakaiannya lebih dari 15 tahun.
- ⊙ Kebakaran hutan disebabkan masih tradisionalnya masyarakat kita dalam pembukaan lahan baru dengan cara pembakaran dan beberapa wilayah yang mempunyai lahan - lahan gambut.

f. Angin Badai dan Puting Beliung

Kerentanan bencana lain yang mengancam adalah potensi terjadinya angin badai dan puting beliung. Secara historis tipikal daerah dataran rendah Pesisir Selatan yang terletak di sepanjang pantai dan pada umumnya merupakan lembah, diyakini masyarakat sering terjadinya bencana angin badai dan puting beliung pada masa lalu.

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Kondisi georafis Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan suatu anugerah bagi masyarakat karena didalamnya terkandung berbagai kekayaan alam yang berpotensi untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi alam tersebut memiliki perat strategis dalam upaya pengembangan wilayah. Beberapa potensi daera utama yang memberi kontribusi besar bagi pengembangan wilayah dan pembangunan antara lain potensi lahan untuk pertanian, keindahan alam untuk pariwisata, potensi perairan untuk perikanan dan potensi hutan yang sangat luas.

Lahan Pertanian

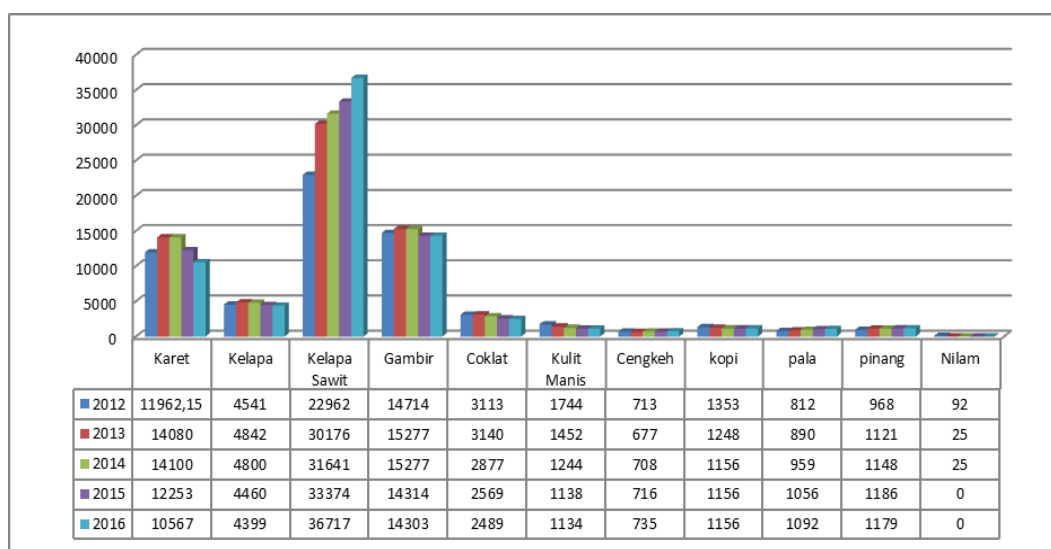
Apabila kita cermati data pada Tabel 2.5, terlihat bahwa sekitar 18,06 persen lahan di Pesisir Selatan merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian yang terdiri dari sawah, kebun dan tegal. Dari potensi lahan untuk pertanian tersebut, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan telah menghasilkan komoditi utama dari sektor pertanian berupa hasil tanaman pangan (padi dan jagung), hasil tanaman hortikultura (cabe, bawang merah, palawija dan buah-buahan) serta hasil tanaman perkebunan (gambir, kelapa, kelapa sawit, kakao, karet, pala, kopi dan cengkeh). Luas kawasan untuk pertanian disajikan pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.8
Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan Tahun 2010-2015

No	Jenis Sawah dan Luas (Ha)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Irigasi	22.406	22.612	22.878	20.834	20.827	21.438
2	Tadah Hujan	7.127	7.452	7.356	8.834	9.742	9.397
3	Pasang Surut	-	-	200	356	235	70
4	Lebak	1.242	1.011	661	320	308	320
Total		30.775	31.075	31.095	30.344	31.112	31.225

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, 2015 dan 2016

Diagram 2.1
Luas Tanam Perkebunan Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan (Ha)



Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, 2017

Kehutanan

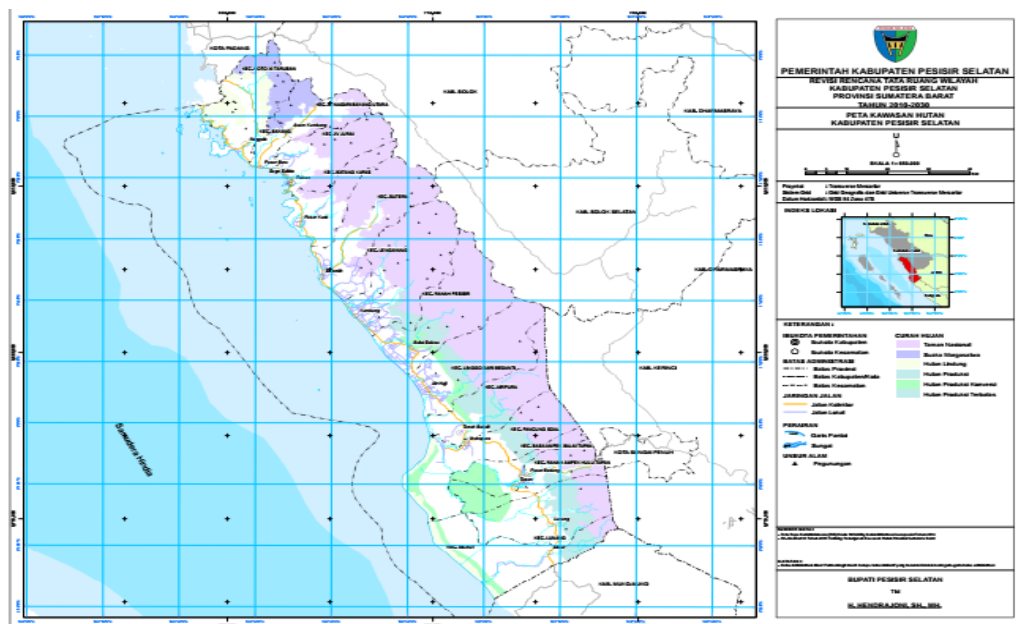
Pesisir Selatan merupakan daerah yang di satu sisinya ditutupi oleh hutan dan sisi lainnya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Lebih kurang 74% dari luas wilayahnya merupakan hutan, yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW). Hutan TNKS merupakan bagian terbesar, yaitu sebesar 51,01%, sedangkan sisanya adalah hutan produksi, hutan lindung, dan hutan suaka alam wisata dengan luas yang hampir sama seperti terlihat pada tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9
Luas Hutan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

No	Jenis Kawasan	Luas Area (km ²)	%
A.	Kawasan Hutan	381,15	65,77
1.	Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) dan CB	295,63	51,01
2.	Hutan Lindung (HL)	23,1	3,99
3.	Hutan Produksi (HP)	5,3	0,91
4.	Hutan Produksi Konversi (HPK)	25,38	4,38
5.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	31,74	5,48
B.	Area Penggunaan Lain	198,36	34,23
Jumlah/ Total		574,99	100,00

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, 2017

Gambar 2.2
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pesisir Selatan



Kawasan Pesisir, Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki garis pantai yang sangat panjang yaitu sekitar 234 km yang membentang dari Nagari Sungai Pinang di Kecamatan Koto XI Tarusan (berbatasan dengan Kota Padang) sampai dengan nagari Sambungo di Kecamatan Silaut (berbatas dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu). Dari 15 kecamatan di Pesisir Selatan, 12 diantaranya merupakan kecamatan yang memiliki wilayah pesisir pantai. Tiga kecamatan yang tidak memiliki kawasan pesisir yaitu Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Lunang. Selain itu, Pesisir Selatan juga memiliki potensi pulau-pulau kecil yang tersebar di beberapa wilayah pantai kecamatan sebanyak 53 buah pulau.

Potensi alam di wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil memberikan banyak manfaat bagi masyarakat karena sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber mata pencarian seperti untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya laut, pembibitan ikan, jasa pariwisata bahari serta sebagai kawasan konservasi alam berupa hutan mangrove dan terumbu karang.

Tabel 2.10
Daftar Nama Pulau-Pulau di Kabupaten Pesisir Selatan

NOMOR PULAU		NAMA PULAU		Luas Pulau (Ha)
Survei	Kemendagri	Survei (Nama Pulau Setempat)	Surat DEPDA GRI No. 125.1/236/PUM	
1	5	P. Aua Gadang	P. Aur Gedang	68,86 ha
2	6	P. Aua Ketek	P. Aur Kecil	19,17 ha
3	7	P. Babi	P. Babi	96 ha
4	171	P. Babi Ketek	<i>Tidak bernama</i>	
5	12	P. Baringin	P. Baringin	
6	15	P. Batu Ajuang	P. Batuajung	
7	169	P. Batu Ajuang Ketek	<i>Tidak bernama</i>	
8	174	P. Batu Badatuih	<i>Tidak bernama</i>	
9		P. Batu Basanggua*)	<i>Tidak ada</i>	
10	16	P. Batu Dandang Selatan	P. Batudandang	
11		P. Batu Dandang Utara*)	<i>Tidak ada</i>	
12	184	P. Batu Gadang	<i>Tidak bernama</i>	
13	31	P. Batu Karet	P. Cingkuk Kecil	1,50 ha
14	88	P. Batu Nago	P. Nago	
15		P. Batu Puti*)	<i>Tidak ada</i>	
16	147	P. Batu Rakik-Rakik	P. Sihowai	
17	170	P. Batu Rimau	<i>Tidak bernama</i>	
18	23	P. Bintangua	P. Bintanggor	
19	30	P. Cingkuak	P. Cingkuk Besar	5
20	32	P. Cubadak	P. Cubadak	705
21	177	P. Dandang Ketek	<i>Tidak bernama</i>	
22	35	P. Gosong Ampiang Parak	P. Gosong	

NOMOR PULAU		NAMA PULAU		Luas Pulau (Ha)
Survei	Kemendagri	Survei (Nama Pulau Setempat)	Surat DEPDA GRI No. 125.1/236/PUM	
23		P. Gosong Mamacah*)	Tidak ada	
24	39	P. Karabak Gadang	P. Karaba Gedang	24,84
25	40	P. Karabak Ketek	P. Karaba Kecil	5
26	43	P. Karanggo	P. Karanganggo	
27	47	P. Kasiak	P. Karsik	
28	173	P. Kasiak Batu Putih	Tidak bernama	
29	55	P. Katangkatang	P. Katangkatang	
30	63	P. Kumbang	P. Kumbang	
31	168	P. Labuhansundai	Tidak bernama	
32	71	P. Lauik	P. Laut	
33	181	P. Lauik Selatan	Tidak bernama	
34	183	P. Lauik Tengah	Tidak bernama	
35	182	P. Lauik Utara	Tidak bernama	
36	80	P. Marak	P. Marak	256
37	90	P. Nibuang	P. Nibung	
38	89	P. Nibuang Selatan	P. Nibung	
39	91	P. Nibuang Utara	P. Nibung	
40	94	P. Nyamuak	P. Nyamuk	9
41	96	P. Pagang	P. Pagang	32
42	106	P. Panyu	P. Panyo	
43	132	P. Setan Ketek	P. Setan Kecil	
44	191	P. Setan Ketek Selatan	Tidak bernama	
45	190	P. Setan Ketek Tengah	Tidak bernama	
46	189	P. Setan Ketek Utara	Tidak bernama	
47	142	P. Sibonta	P. Sibuntar	
48	171	P. Sironjong	P. Sironjong	
49	172	P. Sironjong Gadang	P. Sironjong Gedang	11
50	173	P. Sironjong Ketek	P. Sironjong Kecil	1,5
51	159	P. Sumangki	P. Simangke	
52	176	P. Sumangki Ketek	Tidak bernama	
53	194	P. Taraju	P. Traju	1

Potensi Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor andalan Kabupaten Pesisir Selatan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian lebih oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini guna mendukung amanat Nawacita RPJMN 2015-2019, yaitu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan dimensi pembangunan sektor unggulan pariwisata. Kabupaten Pesisir Selatan yang baru saja keluar dari daerah tertinggal, menyadari besarnya potensi dan perlunya pengelolaan pariwisata yang baik.

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025, bahwa secara perwilayahan, destinasi pariwisata dibagi menjadi 4 (empat) destinasi utama pariwisata kabupaten (DUPK), seperti terlihat pada Tabel 2.11 dibawah ini.

Tabel 2.11
Perwilayahan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan

WILAYAH DESTINASI	Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK)	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK)
DUPK Carocok dan Sekitarnya	Carocok Painan, Kecamatan IV Jurai	Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera	-
DUPK Mandeh dan Sekitarnya	Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan	Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara	-
DUPK Pasir Putih dan Sekitarnya	Pasir Putih, Kecamatan Lengayang	Kecamatan Ranah Pesisir	Kecamatan Linggosari Baganti
DUPK Rumah Gadang Mandeh Rubiah dan Sekitarnya	Rumah Gadang Mandeh Rubiah, Kecamatan Lunang	Kecamatan Airpura, Kecamatan Silaut, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa IV Balai Tapan	Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Ka. Pessel Tahun 2015-2025

Beragam potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan, seperti wisata alam, budaya, lingkungan dan hasil buatan manusia (*event*) perlu dikembangkan guna menunjang dan meningkatkan perekonomian daerah. Sebaran daya tarik wisata dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12
Jumlah Daya Tarik Wisata Pada Setiap DUPK di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Wilayah Destinasi	Daya Tarik Wisata			
		Wisata Alam	Wisata Budaya	Wisata Hasil Buatan Manusia	Wisata Lingkungan
1.	DUPK Carocok dan Sekitarnya	21	1	2	-
2.	DUPK Mandeh dan Sekitarnya	15	4	2	-
3.	DUPK Pasir Putih dan	6	2	-	-
5.	DUPK Rumah Mande Rubiah & Sekitarnya	2	3	-	1

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025

Pada wilayah DUPK Carocok dan sekitarnya terdapat destinasi seperti Pulau Cingkuak, Pulau Karabak, Pulau Kasiak, Air Terjun Timbulun, Pantai Carorok Painan, Puncak Langkisau, Pantai Salido, Benteng Peninggalan Portugis, Makam Madame Van Kempen, Event Festival Langkisau dan beberapa atraksi wisata, seperti banana boat, jet ski dan lain-lain. di wilayah DUPK Mandeh dan

sekitarnya terdapat destinasi yang sudah banyak dikenal masyarakat seperti Pulau Cubadak (Kawasan Mandeh), Pulau Sironjong Ketek, Pulau Sirinjong Gadang, Air Terjun Bayang Sani, Jembatan Akar dan lain-lain. Di wilayah DUPK Pasir Putih dan sekitarnya terdapat beberapa destinasi yang menarik masyarakat untuk berwisata seperti Pasir Putih Kambang, Pantai Sumedang, Air Terjun Sei Liku, Air Terjun Palangai Gadang, Pulau Beringin, Pulau Gosong, Rumah Percetakan Uang, dan lain-lain. Sedangkan di wilayah DUPK Rumah Gadang Mande Rubiah dan sekitarnya terdapat destinasi, diantaranya: Rumah Gadang Mande Rubiah, Istana Inderapura, Makam Bundo Kandung, Makam Cindua Mato, Taman Nasional Kerinci Seblat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah pantai yang sangat panjang dan mempunyai pulau-pulau kecil. Garis pantai dan pulau-pulau kecil merupakan wisata bahari yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata alam. Dari empat DUPK yang ada, DUPK Carocok dan sekitar sudah mulai tumbuh wisata bahari atau event-event bahari seperti memancing, diving, snorkling dan event bahari lainnya, namun pada DUPK lainnya masih belum berkembang.

Potensi Pertambangan

Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada konsep pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Potensi pertambangan Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya belum digali dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini memerlukan kajian dan analisis secara mendalam. Selain itu kebijakan pemerintah daerah tentang perizinan meliputi kelembagaan, pelayanan, dan ketepatan waktu sangat diperlukan. Data potensi pertambangan di Pesisir Selatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Potensi Pertambangan di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jenis Barang Tambang	Lokasi Kecamatan
1	Andesit	Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti
2	Basalt	Sutera
3	Batu Setengah Permata	Pancung Soal
4	Batu Bara	IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Ranah Pesisir, Basa IV Balai, Tapan, Pancung Soal, Ranah IV Hulu, Lunang
5	Batu gamping	Koto XI Tarusan
6	Batu pasir	Sutera
7	Diorit	Batang Kapas, Ranah Pesisir
8	Emas	IV Jurai
9	Granitis	IV Jurai, Koto XI Tarusan, Batang Kapas, Lengayang, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa IV Balai Tapan, Ranah IV Hulu, Lunang
10	Kaolin	Ranah Pesisir
11	Kuarsit	Koto XI Tarusan
12	Pasir Besi	Pancung Soal
13	Pasir Kuarsa	Koto XI Tarusan
14	Sirtu	Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Ranah Ampek Hulu, Lunang
15	Tanah Liat	Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Basa Ampek Balai, Ranah Ampek Hulu, Lunang, Silaut
16	Tanah Urug	Koto XI Tarusan, IV Jurai, Ranah Ampek Hulu
17	Tawas	Bayang
18	Toseki	Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Lengayang

Sumber : Dinas Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral tahun 2014

2.1.9 Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010, total penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 berjumlah 429.246 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 212.228 jiwa dan perempuan 217.018 jiwa. Tahun 2016 penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 453.822 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 225.040 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 228.782 jiwa. Sebaran penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Data Terpilah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Menurut Kecamatan Tahun 2010-2015

No.	Kecamatan	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1.	Silaut	15.643	14.807	15.805	14.963	6.806	6.427	6.929	6.355	7.170	6.566	7.381	6.750
2.	Lunang					10.057	9.715	9.986	9.636	10.250	9.879	10.470	10.078
3.	BAB Tapan	12.804	12.938	12.937	13.074	6.588	6.706	6.502	6.610	6.609	6.715	6.688	6.788
4.	RAH Tapan					6.884	6.907	6.960	6.975	7.130	7.139	7.269	7.270
5.	Pancung Soal	18.681	18.321	18.875	18.514	12.360	12.065	12.367	12.061	12.663	12.334	12.902	12.459
6.	Air Pura					7.454	7.369	7.450	7.353	7.621	7.517	7.760	7.645
7.	Lingo Sari Baganti	21.105	21.214	21.324	21.437	21.959	21.753	21.711	21.798	22.011	22.077	22.212	22.252
8.	Ranah Pesisir	14.605	15.484	14.757	15.647	14.494	15936	14.659	15.532	14.74	15.609	14.779	15.618
9.	Lengayang	25.194	26.429	25.456	26.707	25.234	27.191	25.410	26.631	25.609	26.807	25.688	26.860
10.	Sutera	22.911	23.108	23.149	23.351	24.037	23.978	23.842	24.025	24.262	24.418	24.571	24.699
11.	Batang Kapass	15.119	15.710	15.276	15.8755	15.227	16.107	15.265	15.846	15.387	15.954	15.440	15.990
12.	IV Jurai	21.392	21.910	21.614	22.141	22.098	22.723	22.060	22.569	22.381	22.875	22.603	23.075
13.	Bayang	17.605	19.092	17.788	19.293	17.018	19.530	17.635	19.108	17.735	19.193	17.753	19.192
14.	IV Nag. Bayang Utara	3.467	3.809	3.503	3.849	3.265	3.836	3.471	3.808	3.489	3.82	3.492	3.822
15.	Koto XI Tarusan	23.702	24.196	23.948	24.451	24.016	24.538	23.854	24.332	24.024	24.476	24.085	24.505
Total		212.228	217.018	214.431	219.307	217.497	224.603	218.101	222.639	221.095	225.384	223.093	227.093

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka berbagai tahun penerbitan

Bila dilihat dari kelompok umur rata-rata pertambahan penduduk paling besar adalah usia 60 - 64 tahun sebesar 51.67 persen, diikuti dengan usia 55 - 59 tahun sebesar 24.09 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.15

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010 -2015

Klpk Umur	Jumlah Penduduk					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0 - 4	44.512	39.702	45.525	47.526	47.667	47.310
5 - 9	47.850	47.029	44.733	46.288	46.845	47.250
10 - 14	48.473	49.156	46.582	44.767	45.000	45.210
15 - 19	38.104	41.970	42.623	39.546	40.050	40.340
20 - 24	28.272	27.588	34.876	31.499	31.457	31.380
25 - 29	32.511	32.425	33.203	32.917	33.346	33.396
30 - 34	32.396	32.452	33.201	32.006	32.257	32.463
35 - 39	29.260	30.271	30.999	30.341	30.538	30.613
40 - 44	26.504	27.084	27.654	27.973	28.532	28.912
45 - 49	23.899	24.360	24.837	24.723	25.116	25.446
50 - 54	23.499	23.972	22.723	24.204	24.498	24.736
55 - 59	18.040	19.186	18.759	20.531	21.326	21.868
60 - 64	11.874	12.847	12.242	15.080	16.128	17.109
65 - 69	8.207	8.683	8.545	8.456	8.681	9.019
70 - 74	15.451	16.616	15.599	14.883	7.205	7.256
TT/ 75+	394	394	N/A	N/A	7.833	7.878
Jumlah	428.852	433.735	442.100	442.681	446.479	450.186

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka berbagai tahun penerbitan

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

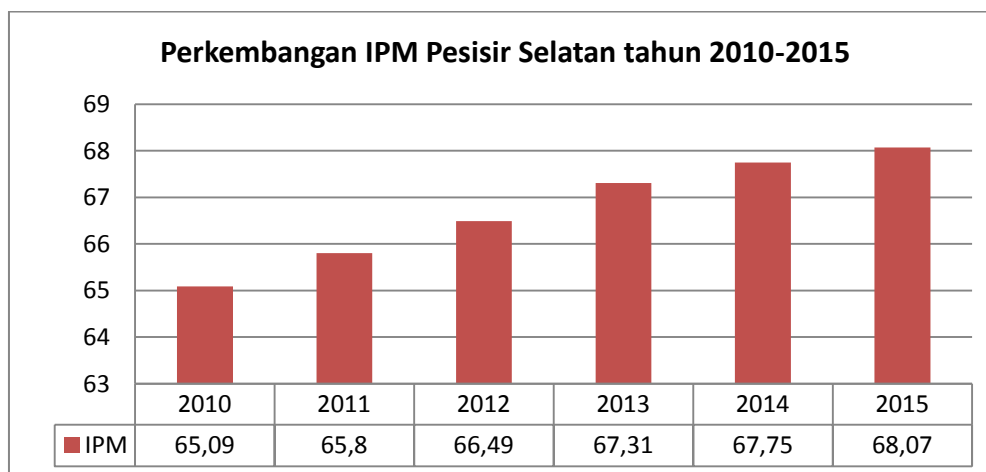
Kesejahteraan masyarakat dapat direpresentasikan dari baik atau buruknya tingkat pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan. Indikator yang biasa digunakan untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terbentuk dari empat komponen utama yaitu: (1) Usia Harapan Hidup, (2) Harapan Lama Sekolah, (3) Rata-Rata Lama Sekolah dan (4) Pengeluaran Perkapita. Dalam rentang waktu tahun 2010-2015, IPM Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkat secara konsisten dari 65,09 pada tahun 2010 menjadi 68,07 di tahun 2015. Perkembangan ini dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.16
Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2010-2015

Tahun	Usia Harapan Hidup (thn)	Harapan Lama Sekolah (thn)	Rata-Rata Lama Sekolah (thn)	Pengeluaran Perkapita Rp/Org/Th	IPM
2010	69,23	10,84	7,34	7.840.750	65,09
2011	69,3	10,97	7,57	7.980.160	65,80
2012	69,36	11,09	7,79	8.131.430	66,49
2013	69,43	11,22	8,05	8.232.910	67,31
2014	69,46	13,02	8,1	8.367.940	67,75
2015	69,96	13,04	8,11	8.412.000	68,07

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2015

Diagram 2.2
Perkembangan IPM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2015



2.2.1 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar ekonomi di daerah tersebut tumbuh dan seberapa besar masyarakatnya menikmati pertumbuhan tersebut secara berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan akan menimbulkan jurang disparitas yang semakin tajam akibat kue pembangunan hanyadinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja. Berikut dijelaskan beberapa indikator yang menunjukkan capaian kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dari tahun 2011 sampai 2015 berfluktuasi yaitu 5,78 persen tahun 2011 dan naik menjadi 5,80 persen tahun 2014 dan pada tahun 2015 turun menjadi 5,73 persen.

Hal ini disebabkan karena situasi ekonomi global dan nasional yang sangat dinamis, menyebabkan turunnya nilai tukar rupiah dan ekspor sedangkan investasi tidak meningkat. Selain itu daya beli masyarakat menurun akibat melonjaknya harga bahan pokok dan kebijakan pemerintah. Naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan mengakibatkan lemahnya perputaran ekonomi daerah yang berdampak tidak bergairahnya pasar sehingga menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Bila dilihat dari struktur perekonomian Pesisir Selatan, Terdapat 4 sektor sebagai penyumbang tertinggi pada PDRB Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor konstruksi dan industri pengolahan. Rata-rata dalam rentang tahun 2011-2015, keempat sektor tersebut menyumbang porsi PDRB sebesar 41,44 persen (sektor pertanian), 11,11 persen (sektor perdagangan, 9,14 persen (sektor konstruksi) dan 8,44 persen (sektor industri pengolahan). Data perkembangan struktur perekonomian dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015

Lapangan Usaha		Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.434.141,60	2.721.269,20	3.048.631,50	3.387.973,17	3.797.816,89	4.306.538,15
B	Pertambangan dan Penggalian	241.283,50	264.069,10	287.764,50	331.852,41	366.466,97	410.697,02
C	Industri Pengolahan	514.434,20	592.119,60	639.512,70	680.612,05	744.837,12	815.580,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.246,20	2.338,70	2.254,90	2.526,73	3.248,98	4.671,92
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.403,20	4.619,70	4.982,40	5.400,57	5.982,60	6.682,60
F	Konstruksi	516.336,00	578.079,30	647.988,40	766.674,33	855.297,89	979.644,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	670.913,90	753.094,00	817.063,60	893.459,21	995.905,20	1.143.239,44
H	Transportasi dan Pergudangan	200.199,70	225.581,80	256.630,40	293.222,38	335.069,69	365.501,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	60.595,30	67.383,70	75.625,60	82.184,92	92.996,53	109.088,28
J	Informasi dan Komunikasi	348.004,80	386.824,80	442.040,90	484.088,12	526.511,70	550.727,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	134.002,60	151.847,10	170.920,20	189.313,45	208.910,16	232.379,68
L	Real estat	83.839,20	91.473,60	99.542,50	109.662,17	126.388,84	141.345,40
M, N	Jasa Perusahaan	3.247,10	3.574,50	3.882,10	4.388,12	4.856,09	5.428,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	402.711,90	451.964,30	504.845,60	558.169,31	578.845,38	597.716,36
P	Jasa Pendidikan	150.460,60	167.701,60	193.412,60	228.648,47	258.429,50	298.586,34
Q	Jasa Kesehatan dan dan Kegiatan Sosial	69.109,30	77.452,60	91.259,10	104.220,04	116.577,50	124.611,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya	58.505,10	65.029,10	72.623,80	86.121,79	95.651,99	104.731,46
Total PDRB		5.894.434,20	6.604.422,70	7.358.980,80	8.208.517,24	9.113.793,03	10.197.170,34

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2015 dan 2017

Tabel 2.18
Perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK 2010)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015

Lapangan Usaha		Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.434.141,60	2.572.934,50	2.697.592,50	2.797.604,40	2.952.748,20	3.116.574,26
B	Pertambangan dan Penggalian	241.283,50	249.788,60	258.656,10	272.890,13	283.480,60	296.634,08
C	Industri Pengolahan	514.434,20	545.460,80	585.415,80	613.718,77	652.490,92	681.307,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.246,20	2.362,00	2.485,30	2.184,43	2.437,18	2.541,86
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.403,20	4.668,60	4.950,60	5.160,90	5.379,00	5.603,92
F	Konstruksi	516.336,00	548.660,60	587.116,40	661.833,83	701.764,15	744.812,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	670.913,90	714.134,20	760.394,50	817.247,13	888.870,62	941.562,63
H	Transportasi dan Pergudangan	200.199,70	212.917,60	229.783,70	250.617,54	272.286,63	294.012,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	60.595,30	63.722,80	66.777,90	68.340,68	70.823,89	75.857,71
J	Informasi dan Komunikasi	348.004,80	367.028,50	407.726,60	448.398,50	475.114,70	515.866,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	134.002,60	141.425,40	152.385,60	162.643,66	167.161,73	173.522,26
L	Real estat	83.839,20	88.271,50	93.241,20	98.770,36	104.642,28	110.703,39
M, N	Jasa Perusahaan	3.247,10	3.421,90	3.609,20	3.808,52	4.013,55	4.230,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	402.711,90	426.790,90	429.268,90	441.958,18	447.415,88	462.302,57
P	Jasa Pendidikan	150.460,60	158.575,70	173.471,80	187.883,71	199.842,26	216.159,02
Q	Jasa Kesehatan dan dan Kegiatan	69.109,30	72.893,00	80.078,10	85.826,12	92.456,62	99.175,46
R,S,T,U	Jasa Lainnya	58.505,10	61.929,20	64.728,70	68.081,62	71.608,24	75.347,33
Total PDRB		5.894.434,20	6.234.985,80	6.597.682,90	6.986.968,48	7.392.536,45	7.816.214,05

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2015 dan 2017

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015

Lapangan Usaha		Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,70	4,84	3,71	5,55	5,55
B	Pertambangan dan Penggalian	3,52	3,55	5,50	3,88	4,64
C	Industri Pengolahan	6,03	7,33	4,83	6,32	4,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,16	5,22	(2,85)	11,57	4,29
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,03	6,04	4,25	4,23	4,18
F	Konstruksi	6,26	7,01	12,73	6,03	6,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,44	6,48	7,48	8,76	5,93
H	Transportasi dan Pergudangan	6,35	7,92	9,07	8,65	7,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,16	4,79	2,34	3,63	7,11
J	Informasi dan Komunikasi	5,47	11,09	9,98	5,96	8,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,54	7,75	6,73	2,78	3,81
L	Real estat	5,29	5,63	5,93	5,95	5,79
M, N	Jasa Perusahaan	5,38	5,47	5,52	5,38	5,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,98	0,58	2,96	1,23	3,33
P	Jasa Pendidikan	5,39	9,39	8,31	6,36	8,16
Q	Jasa Kesehatan dan dan Kegiatan Sosial	5,47	9,86	7,18	7,73	7,27
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,85	4,52	5,18	5,18	5,22
Total PDRB		5,78	5,82	5,90	5,80	5,73

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2015 dan 2017

Tabel 2.20
Struktur Perekonomian Pesisir Selatan Berdasarkan Proporsi PDRB
Lapangan Usaha Tahun 2011-2015

Lapangan Usaha		Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,20%	41,43%	41,27%	41,67%	41,65%	41,44%
B	Pertambangan dan Penggalian	4,00%	3,91%	4,04%	4,02%	4,14%	4,02%
C	Industri Pengolahan	8,97%	8,69%	8,29%	8,17%	8,06%	8,44%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04%	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%	0,04%
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
F	Konstruksi	8,75%	8,81%	9,34%	9,38%	9,42%	9,14%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,40%	11,10%	10,88%	10,93%	11%	11,11%
H	Transportasi dan Pergudangan	3,42%	3,49%	3,57%	3,68%	3,71%	3,57%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,02%	1,03%	1,00%	1,02%	1,09%	1,03%
J	Informasi dan Komunikasi	5,86%	6,01%	5,90%	5,78%	5,53%	5,82%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,30%	2,32%	2,31%	2,29%	2,33%	2,31%
L	Real estat	1,39%	1,35%	1,34%	1,39%	1,42%	1,38%
M, N	Jasa Perusahaan	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,84%	6,86%	6,80%	6,35%	6,00%	6,57%
P	Jasa Pendidikan	2,54%	2,63%	2,79%	2,84%	2,93%	2,75%
Q	Jasa Kesehatan dan dan Kegiatan Sosial	1,17%	1,24%	1,27%	1,28%	1,26%	1,24%
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,98%	0,99%	1,05%	1,05%	1,06%	1,03%
Total PDRB		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2015 dan 2017

PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi persatuan penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Pesisir Selatan secara konsisten mengalami peningkatan dari 15,19 juta Rupiah pada tahun 2011, menjadi 22,65 juta Rupiah pada tahun 2015. Angka tersebut masih berada di bawah PDRB Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 24,06 juta Rupiah di tahun 2011 dan menjadi 34,41 juta Rupiah pada tahun 2015.

Tabel 2.21
Perbandingan PDRB Perkapita Pesisir Selatan dan Sumatera Barat
Tahun 2011-2015

PDRB perkapita (ADHB)	2011	2012	2013	2014	2015
Sumatera Barat dalam juta Rupiah	24,06	26,29	28,99	32,13	34,41
Pesisir Selatan dalam juta Rupiah	15,19	16,77	18,54	20,41	22,65

Sumber : BPS, *Pesisir Selatan Dalam Angka 2015 dan Perubahan RPJMD Provinsi Sumbar 2016-2021*

Laju Inflasi

Inflasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 sampai 2015 cukup berfluktuasi dengan nilai rata-rata 6,82 persen. Secara umum laju inflasi Pesisir Selatan (mengacu pada inflasi tahunan Kota Padang) hampir sama dengan inflasi Sumatera Barat, namun jauh lebih tinggi dari laju inflasi nasional. Perbandingan laju inflasi Pesisir Selatan dengan laju inflasi Sumatera Barat dan nasional, tersaji pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2010-2015

Laju Inflasi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
Sumatera Barat	7,84	5,37	4,16	10,87	11,58	1,08	6,82
Pesisir Selatan	7,84	5,37	4,16	10,87	11,90	0,85	6,83
Nasional	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	8,36	6,69

Sumber : Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Barat, Agustus 2016*

Ketimpangan Pendapatan

Indikator yang menggambarkan ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah adalah Indeks Gini atau biasa disebut dengan Gini Ratio. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Indeks Gini bernilai 0, menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, sedangkan Indeks Gini bernilai 1, menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Dalam rentang waktu tahun 2011-2015, Indeks Gini Pesisir Selatan telah menunjukkan nilai yang baik dimana nilai Gini Ratio tidak pernah melebihi nilai 0,3 dan performanya lebih baik dari Indeks Gini nasional dan Sumatera Barat. Perbandingan Indeks Gini Pesisir Selatan dengan Sumatera Barat dan Nasional tersaji pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2011-2015

Indeks Gini	2011	2012	2013	2014	2015
Nasional	0,410	0,410	0,413	0,406	0,408
Sumatera Barat	0,353	0,363	0,363	0,334	0,343
Pesisir Selatan	0,260	0,280	0,260	0,290	0,280

Sumber : BPS, *Pesisir Selatan Dalam Angka 2016*

Perbankan dan Keuangan

Pelayanan perbankan di wilayah kabupaten Pesisir Selatan dapat berasal dari Bank Pemerintah seperti Bank Mandiri, BRI, dan Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah Pesisir Selatan) maupun bank swasta lainnya. Jumlah perbankan di Kabupaten Pesisir Selatan seperti pada tabel 2.24 berikut ini:

Tabel 2.24
Penumpukkan Dana oleh Bank-Bank di Kabupaten Pesisir
Selatan Menurut Keadaan Akhir Bulan Tahun 2012-2016

Tahun	Giro	Deposito	Tabungan	Jumlah
2010	83,507,369	75,410,000	237,107,104	432,024,473
2011	9,661.230	131,564,700	277,751,257	505,928,187
2012	1,065,342,538	1,257,915,964	3,047,522,620	5,370,781,122
2013	131,333,570	126,056,670	419.490.363	676,880,603
2014	127,884,072	168,383,090	471,245,693	639,628,783
2015	169.773.611	213.958.894	462.670.000	846.402.505
2016	170.342.538	174.138.410	609.520.420	954.001.359

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2010-2016 terjadi peningkatan penumpukan dana oleh bank. Pada tahun 2010 jumlah penumpukan dana oleh bank sebesar Rp. 432,024,473,000,- sedangkan pada tahun 2016 penumpukan dana oleh bank meningkat menjadi Rp. 954.001.359,- baik yang berasal dari giro, deposito maupun tabungan.

Tabel 2.25
Perkembangan Keuangan, Asuransi, dan
Jasa Perusahaan Tahun 2012-2016

Keadaan Tahun	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Rp. (Juta)
2012	155.995
2013	166.452
2014	171.175
2015	596.567
2016	189.463
Jumlah	1.279.652

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

2.2.1 Aspek Kesejahteraan Sosial

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dari waktu ke waktu memperlihatkan perbaikan yang signifikan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator pembangunan yang terus meningkat kinerjanya seperti menurunnya jumlah angka kemiskinan, menurunnya pengangguran serta semakin meningkatnya cakupan pelayanan dasar di bidang pendidikan, dan kesehatan. Selain itu sendi-sendi kehidupan bermasyarakat juga semakin baik yang ditopang oleh semakin meningkatnya peran pemangku adat, tokoh ulama serta semakin terbukanya peluang bagi generasi muda untuk berperan dalam pembangunan. Beberapa indikator yang mendeskripsikan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dijelaskan di bawah ini.

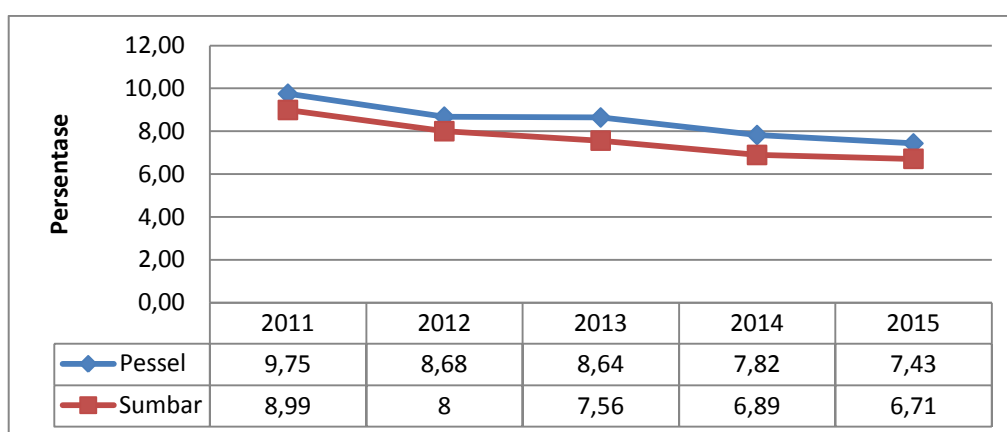
Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang memiliki nilai potensi yang lebih

tinggi. Salah satu ukuran kemiskinan dilihat dari garis kemiskinan yang menunjukkan jumlah rupiah minimum yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Pendapatan penduduk miskin dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 28,44 persen. Dengan naiknya pendapatan penduduk miskin maka penduduk yang berada di atas garis kemiskinan juga meningkat pada tahun 2015 menjadi 92,57 persen dari awalnya sebesar 90,25 persen pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan telah adanya komitmen pemerintah daerah yang mengarahkan berbagai program sebagai bagian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, sanitasi, bantuan pembangunan rumah tidak layak huni dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram 2.2.

Diagram 2.3
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Pesisir Selatan dan Sumatera Barat Tahun 2011-2015



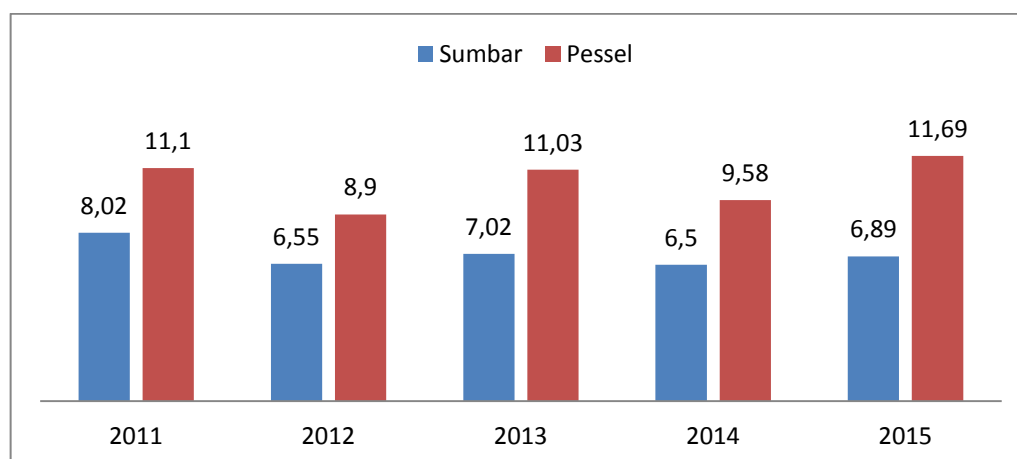
Sumber : BPS, *Pesisir Selatan Dalam Angka 2015 dan Perubahan RPJMD Provinsi Sumbar 2016-2021*

Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Pada tahun 2015, angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 0,90 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 56,74 persen sedangkan rasio penduduk yang bekerja 0,883 dengan artian sebesar 88,3 persen penduduk Kabupaten Pesisir Selatan bekerja dengan tingkat pengangguran

terbuka sebesar 11,69 persen. Sementara itu, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 0,89. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka di Pesisir Selatan berfluktuasi setiap tahunnya dan masih lebih tinggi dari tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadikan masalah ketenagakerjaan dan pengangguran sebagai salah satu permasalahan utama daerah yang disebabkan oleh masih lemahnya daya saing sumber daya manusia serta masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

Diagram 2.4
Perbandingan Tingkat pengangguran Terbuka Pesisir Selatan dan Sumatera Barat Tahun 2011-2015



Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2016 dan Perubahan RPJMD Provinsi Sumbar 2016-2021

Tabel 2.26
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2011-2015

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angkatan Kerja	348.723	178.279	173.096	185.773	176.530
	- Bekerja	155.054	162.406	153.999	167.977	155.894
	-Pengangguran	193.669	15.873	19.097	17.796	20.636
2	Bukan Angkatan Kerja	123.460	122.128	130.761	121.325	134.578
	- Sekolah	32.434	35.251	32.358	33.041	30.477
	- Lainnya	91.026	86.877	98.403	88.284	104.101
	Jumlah	472.183	300.407	303.857	307.098	311.108

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2016

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf dari tahun ketahun terus memperlihatkan kinerja yang lebih baik, dimana pada tahun 2011 hanya 95,01 persen penduduk yang telah melek huruf, namun dengan interfensi pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan maka pada tahun 2015, angka tersebut meningkat menjadi 98,12 persen. Artinya tidak sampai 2 persen penduduk di tahun 2015 yang buta huruf.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami peningkatan secara konsisten dari semula 7,57 tahun pada 2011, meningkat menjasi 8,11 tahun pada tahun 2015. Perkembangan Angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah terseaji pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2011-2015

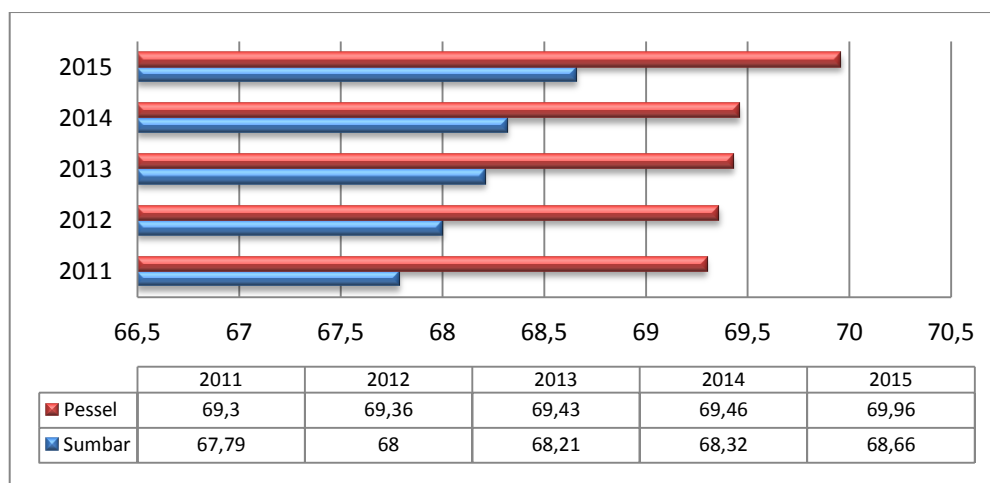
Capaian Bidang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Melek Huruf (persen)	95,01	96,00	96,56	97,41	98,12
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,57	7,79	8,05	8,10	8,11

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2016

Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, UHH telah mencapai 69,30 tahun dan terus meningkat menjadi 69,96 tahun pada tahun 2015. Knerja UHH tersebut sedikit lebih tinggi dari capaian UHH Provinsi Sumatera Barat dimana pada tahun 2011 sebesar 67,79 tahun dan tahun 2015 menjadi 68,66 tahun. Perbandingan UHH masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dengan UHH Provinsi Sumatera Barat, tersaji pada Diagram 2.4.

Diagram 2.5
Perbandingan Usia Harapan Hidup Pesisir Selatan dan Sumatera Barat Tahun 2011-2015



Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2016

2.2.2 Aspek Seni Budaya dan Olah Raga

Budaya merupakan sebuah *integible asset* suatu bangsa. Suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter yang baik yang ditunjukkan oleh setinggi apa budaya masyarakatnya. Semakin berbudaya masyarakatnya maka akan semakin tinggi peradabannya dan akan cenderung semakin maju bangsa tersebut. Hal ini juga berlaku untuk sebuah daerah atau kabupaten. Perwujudan budaya suatu daerah dapat dilihat dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang dianut, adat istiadat serta ragam kesenian lokal yang berkembang,

Selain itu, dari sisi kebudayaan, kemajuan kehidupan sosial juga tercermin dari perilaku generasi muda. Karena itu sangat diharapkan berkembang generasi muda yang gemar berperilaku hidup sehat, gemar berolah raga dan berprestasi

Seni dan Budaya

Sebagai bagian dari masyarakat minangkabau, masyarakat Pesisir Selatan terkenal dengan budaya minang dengan keragaman budaya lokal yang khas. Beberapa hasil kreasi budaya Pesisir Selatan yang terkenal antara lain Tradisi Balimau Paga, Tari Rampak, serta Seni Rabab Pasisie. Pengelolaan aset Pesisir Selatan tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.28
Pengelolaan Aset Budaya Pesisir Selatan Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	14	14	14	13	13
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	-	-	-	56
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	-	-	-	13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kab. Pessel

Kepemudaan dan Olah Raga

Perkembangan prestasi generasi muda Pesisir Selatan baik dalam bidang organisasi serta bidang olah raga dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pemuda Pesisir Selatan selalu aktif dalam pemilihan Pemuda Pelopor, Pemuda Maritim serta pemilihan Duta Wisata. Dalam bidang olah raga, beberapa cabang olah raga sangat identik dengan Pesisir Selatan diantaranya paralayang, sepak takraw, sepak bola, bersepeda dan lain-lain.

Tabel 2.29
Perkembangan Pemuda dan Olah Raga Pesisir Selatan Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase organisasi pemuda yang aktif	-	5	7	8,5	10
Persentase wirausaha muda	0,5	2	7	15	20
Jumlah atlet berprestasi	-	-	-	1	1
Jumlah prestasi olahraga	1	1	3	4	5
Jumlah organisasi olahraga	15	21	26	37	40
Jumlah kegiatan kepemudaan	8	12	17	21	30

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kab. Pessel

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Analisis kinerja atas aspek pelayanan umum dilakukan terhadap beberapa indikator pelayanan urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan.

2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan sektor sangat menentukan kualitas suatu daerah. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu daerah, keberhasilan

pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan daerah. Secara umum pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan generasi masa depan yang berkualitas yang dapat menghadapi kompetisi global.

Kualitas layanan bidang pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan fokus pada pemenuhan cakupan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk akses pendidikan, di Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap tingkat pendidikan (dasar dan menengah). Berdasarkan data tahun 2015, terlihat APM SD/MI/Paket A telah mencapai 99,22 persen dari semula tahun 2011 98,22 persen. Sementara itu APM SMP/MTs/Paket B meningkat menjadi 89,90 persen pada tahun 2015 dari semula 84,79 persen tahun 2011 dan APM SMA/MA/Paket C juga meningkat menjadi 66,45 persen di tahun 2015 dari semula 77,82 persen pada tahun 2011.

Seiring dengan meningkatnya APM dan APK, Angka Putus Sekolah juga menunjukkan kinerja yang semakin baik dimana setiap tahun menunjukkan penurunan jumlah angka putus sekolah. Angka Putus Sekolah SD, SMP dan SMA berkurang dari semula 0,13 persen, 0,23 persen dan 0,32 persen pada tahun 2011, menjadi 0,07 persen, 0,12 persen dan 0,16 persen pada tahun 2015. Hal dikarenakan adanya program wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak usia sekolah yang diterapkan di Pesisir Selatan dan juga ditunjang dengan pemberian beasiswa bagi anak-anak miskin yang tidak mampu serta program retriwal bagi anak-anak putus sekolah.

Untuk mendukung perbaikan kualitas pendidikan, juga telah dilakukan perbaikan kondisi sarana dan prasarana sekolah baik berupa pembangunan dan rehab ruang kelas, penambahan mobiler, penambahan koleksi perpustakaan serta pembangunan jamban bagi siswa. Dari tahun 2011 sampai 2015 kondisi gedung sekolah yang baik untuk SD/MI mengalami peningkatan dari semula 86,00 persen menjadi 94,52 persen. Sementara untuk SMP dan SMA, dari tahun 2011 sampai 2014 mengalami peningkatan dari 92 persen menjadi 96,67 persen, namun pada tahun 2015 kembali tujrun menjadi 87,50 persen. Penurunan ini kemungkinan karena tidak validnya data akibat masa transisi perpindahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ke provinsi.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Sat	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini	%	39,81	40,51	41,31	42,21	42,2
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) :						
	- SD/MI/Paket A	%	124,98	124,92	124,92	124,94	124,22
	- SMP/MTs/Paket B	%	98,15	98,42	98,90	98,97	101,01
	- SMA/SMK/MA/Paket C	%	74,29	82,97	83,03	83,21	92,52
3	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	- SD/MI/Paket A	%	98,22	98,87	98,91	98,96	99,12
	- SMP/MTs/Paket B	%	84,79	85,14	86,86	87,13	89,9
	- SMA/SMK/MA/Paket C	%	66,45	69,5	72,08	73,24	77,82
4	Angka Partisipasi Sekolah						
	- SD/MI/Paket A (7-12 tahun)	%	98,33	98,99	99,04	99,1	99,1
	- SMP/MTs/Paket B (13 - 15 tahun)	%	84,9	85,26	86,99	87,27	87,27
	- SMA/SMK/MA/Paket C	%	66,56	69,62	72,21	73,38	73,38
5	Angka Putus Sekolah (APS)	%					
	- SD/MI	%	0,13	0,11	0,1	0,07	0,07
	- SMP/MTs	%	0,23	0,19	0,16	0,11	0,12
	- SMA/SMK/MA	%	0,32	0,25	0,2	0,15	0,16
6	Angka Kelulusan (AL)						
	- SD/MI	%	99,5	99,58	99,43	99,86	99,99
	- SMP/MTs	%	99,94	99,94	99,41	99,98	99,05
	- SMA/SMK/MA	%	98,33	97,4	99,35	74,47	100
7	Angka Melanjutkan						
	- SD/MI ke SMP/MTs	%	95	94,45	95	96,4	96,45
	- SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	91	90,25	90	91,55	91,82
8	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	%	86	85,98	99,61	92,21	94,52
9	Sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	92	91,16	92,74	96,67	87,5
10	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	76,11	75,48	74,76	73,95	73,38
11	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	24,91	24,28	23,56	22,75	22,75
12	Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar	%	455,4	454,63	453,75	452,76	454,45
13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	457,09	456,32	455,44	454,45	454,45
14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	0,016	0,015	0,016	0,015	0,03
15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah menengah	%	0,97	0,97	0,98	0,98	0,72
16	Angka melek huruf penduduk usia 15 - 24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	95,01	96	96,56	97,41	98,12
17	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	%	74,02	75,81	79,37	84,9	90,25

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel

b. Urusan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas sangat dibutuhkan guna menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki layanan dengan meningkatkan cakupan layanan di seluruh kecamatan serta meningkatkan kualitas layanan baik dari segi sarana prasarana, ketersediaan sumber daya manusia serta kualitas pelayanan dari SDM medis itu sendiri.

Derajat Kesehatan Masyarakat

Dari berbagai upaya perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2015 terjadi peningkatan kinerja atas derajat kesehatan masyarakat diantaranya angka kematian ibu turun menjadi 55,2 (per 100.000 kelahiran hidup), angka kematian bayi turun menjadi 4,6 (per 1.000 kelahiran hidup) dan angka kematian balita turun menjadi 5 (per 1.000 kelahiran hidup).

Tabel 2.31
Perkembangan Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kematian ibu (Per 100.000 KH)	108	106	71	69,4	55,2
2	Angka kematian bayi (Per 1.000 KH)	12	11	9	4,6	4,6
3	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	N/A	13	9	5	5
4	Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	11,7	10,4	8,3	8,9	6,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pessel

Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Untuk lebih meningkatkan akses pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan baik pada pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah posyandu, puskesmas dan rumah sakit serta klinik kesehatan yang setiap tahun terus meningkat kinerjanya. Rasio posyandu persatuan balita tahun 2011 sebanyak 18,4 semakin membaik pada tahun 2015 menjadi 14,34. Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk juga mengalami sedikit peningkatan cakupan layanan dari 0,248 pada tahun 2011 menjadi 0,241 pada tahun 2015. Begitu juga dengan rasio dokter persatuan penduduk yang mengalami

peningkatan kinerja dari semula 0,194 pada tahun 2011 menjadi 0,093 pada tahun 2015.

Tabel 2.32
Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Posyandu per satuan Balita	18,4	18,7	18,7	18,7	14,34
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk	0,248	0,245	0,246	0,243	0,241
3	Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk					
4	Rasio Dokter persatuan Penduduk	0,194	0,081	0,095	0,116	0,093
5	Rasio Tenaga Medis persatuan Penduduk	2,00	1,95	1,71	1,73	0,51
6	Cakupan komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	71,1	58,32	70,2	74,39	85,5
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	86,6	87,92	90,2	94,1	88,8
8	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	86,6	84,6	85	89,81	87
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	96	94	94	95,04	96,4
11	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	50,58	60,4	56,4	-	65
13	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	55,71	67,41	92,46	83,11	87,12
14	Cakupan Puskesmas (%)	17,73	17,92	18,54	18,54	50
15	Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
16	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	2,14	2,85	2,21	2,94	2,14
18	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
19	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	75,8	78,5	94	87,82	88,8
20	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	35,4	21,6	88,2	44,44	53,5
21	Cakupan pelayanan anak balita (%)	N/A	33,6	66,8	70,1	49,9
22	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	N/A	11,7	2,7	0,5	0,9
23	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	100
24	Persentase peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD (%)	0	0	0	0	85

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pessel

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus memperlihatkan kinerja yang semakin baik meskipun belum seluruh infrastruktur dasar dapat dipenuhi sesuai SPM.

Tabel 2.33
Perkembangan Cakupan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)	763,29	857,73	866,41	931,14	798,49
2	Persentase Jalan Kabupaten dengan kondisi mantap (baik + sedang) (%0	65,25	67,22	67,59	68,19	42,88
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	41,83	42,93	44,07	45,23	46,42
4	Panjang kerusakan sungai dan pantai yang tertangani dan sungai yang dinormalkan (km)	5,7	6,4	6,9	9,2	13,7
5	Luas genangan air yang dikeringkan (ha)	430	491	516	534	613
6	Persentase jumlah penduduk yang terlayani pengelolaan persampahan (%)	60	70	80	80	90
7	Panjang jalan dilalui roda 4 (km)	661.28	661.28	775.30	661.28	1.924
8	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
9	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	45	48,3	51,2	52,7	55,4
10	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	90	93	94	93	96
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
12	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,78	2,81	2,91	2,67	2,83
13	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah per HPL/HGB	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03

Sumber : Dinas PUTR, Dinas PSDA dan Dinas Perkimtan Kab. Pessel

Pada tabel di atas terlihat panjang jalan kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 4,61 persen atau 0,92 persen setiap tahun. Untuk Panjang jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 telah meningkat 38,19 persen setiap tahun. Irigasi kondisi baik untuk menunjang sektor pertanian juga meningkat sebesar 10,97 persen (2,19 persen setiap tahun) dari tahun 2011-2015

dan untuk kerusakan sungai dan pantai yang sudah dinormalkan meningkat sebesar 28,07 persen setiap tahunnya dan luas genangan yang dikeringkan juga meningkat sebesar 42,56 persen 8,51 persen setiap tahunnya yang berdampak pada berkurangnya daerah banjir di Kabupaten Pesisir Selatan. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor sudah mencapai 96 persen. Hal ini diharapkan dapat mengurangi daerah rawan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan.

Layanan infrastruktur daerah juga tidak terlepas dari adanya jalan dan jembatan Nasional dan Provinsi di Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut disajikan data jalan dan jembatan Nasional dan Provinsi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.34
Panjang dan Kondisi Jalan Di Pesisir Selatan Tahun 2015

Status Kewenangan	Kondisi jalan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
Jalan Negara	148.1	70.25	28.6	4	250.95
Jalan Provinsi	35.7	27.06	6.14	1.5	70.4
Jalan Kabupaten	580.87	262.61	641.45	848.25	2333.18

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2016

Tabel 2.35
Daftar Jalan Jaringan Induk Menurut Permukaan Tahun 2015

No	Kecamatan	Panjang Jalan Menurut Permukaan								Panjang Jalan (Km)
		Aspal		Kerikil		Tanah		Beton		
		(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	
1	KOTO XI TARUSAN	47.70	36.72%	18.70	14.40%	29.60	22.79%	33.90	26.10%	129.90
2	BAYANG	74.70	58.91%	9.10	7.18%	23.10	18.22%	19.90	15.69%	126.80
3	BAYANG UTARA	7.20	18.00%	3.50	8.75%	15.40	38.50%	13.90	34.75%	40.00
4	IV JURAI	85.30	56.58%	4.20	2.79%	45.85	30.41%	15.40	10.22%	150.75
5	BATANG KAPAS	45.90	41.77%	14.90	13.56%	20.20	18.38%	28.90	26.30%	109.90
6	SUTERA	73.60	36.40%	62.50	30.91%	61.90	30.61%	4.20	2.08%	202.20
7	LENGAYANG	85.51	32.37%	60.80	23.02%	83.89	31.76%	33.95	12.85%	264.15
8	RANAH PESISIR	66.40	44.09%	49.55	32.90%	22.05	14.64%	12.60	8.37%	150.60
9	LINGGO SARI BAGANTI	87.96	40.44%	46.85	21.54%	74.59	34.29%	8.10	3.73%	217.50
10	AIRPURA	24.40	15.72%	72.40	46.65%	49.30	31.77%	9.10	5.86%	155.20
11	PANCUNG SOAL	16.58	15.30%	47.90	44.20%	40.10	37.00%	3.80	3.51%	108.38
12	BASA AMPEK BALAI	16.40	24.12%	32.10	47.21%	16.50	24.26%	3.00	4.41%	68.00
13	RANAH IV HULU TAPAN	6.50	11.25%	17.20	29.76%	31.20	53.98%	2.90	5.02%	57.80
14	LUNANG	23.90	7.64%	78.60	25.11%	208.70	66.68%	1.80	0.58%	313.00
15	SILAUT	31.30	13.10%	106.00	44.35%	100.90	42.22%	0.80	0.33%	239.00
TOTAL		693.35	29.72%	624.30	26.76%	823.28	35.29%	192.25	8.24%	2333.18

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.36
Daftar Jalan Jaringan Induk Menurut Kondisi Tahun 2015

No	Kecamatan	Panjang Jalan Menurut Kondisi								Panjang Jalan (Km)
		Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat		
		(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	
1	KOTO XI TARUSAN	67.80	52.19%	10.80	8.31%	22.40	17.24%	28.90	22.25%	129.90
2	BAYANG	84.80	66.88%	8.60	6.78%	16.00	12.62%	17.40	13.72%	126.80
3	BAYANG UTARA	7.20	18.00%	3.80	9.50%	14.60	36.50%	14.40	36.00%	40.00
4	IV JURAI	94.40	62.62%	3.40	2.26%	20.75	13.76%	32.20	21.36%	150.75
5	BATANG KAPAS	50.00	45.50%	10.90	9.92%	35.70	32.48%	13.30	12.10%	109.90
6	SUTERA	44.10	21.81%	15.10	7.47%	79.50	39.32%	63.50	31.40%	202.20
7	LENGAYANG	105.46	39.92%	48.20	18.25%	45.29	17.15%	65.20	24.68%	264.15
8	RANAH PESISIR	65.55	43.53%	31.95	21.22%	47.00	31.21%	6.10	4.05%	150.60
9	LINGGO SARI BAGANTI	67.26	30.92%	17.25	7.93%	99.99	45.97%	33.00	15.17%	217.50
10	AIRPURA	53.70	34.60%	16.70	10.76%	43.30	27.90%	41.50	26.74%	155.20
11	PANCUNG SOAL	16.98	15.67%	12.80	11.81%	37.40	34.51%	41.20	38.01%	108.38
12	BASA AMPEK BALAI	10.40	15.29%	6.30	9.26%	8.10	11.91%	43.20	63.53%	68.00
13	RANAH IV HULU TAPAN	4.50	7.79%	4.00	6.92%	11.00	19.03%	38.30	66.26%	57.80
14	LUNANG	59.80	19.11%	0.00	0.00%	51.50	16.45%	201.70	64.44%	313.00
15	SILAUT	96.50	40.38%	9.90	4.14%	90.80	37.99%	41.80	17.49%	239.00
TOTAL		828.45	35.51%	199.70	8.56%	623.33	26.72%	681.70	29.22%	2333.18

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.37
Jumlah Jembatan pada Ruas Jalan Negara Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah	Panjang(m)
2013	126	3344.70
2014	126	3345.30
2015	126	3345.30

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2016

Tabel 2.38
Jumlah Jembatan pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah	Panjang(m)
2012	24	416.20
2013	24	416.20
2014	24	416.20
2015	24	416.20

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2016

Dari segi peningkatan lingkungan sehat, meningkat sebesar 50 persen (10 persen setiap tahun) untuk penduduk yang terlayani pengelolaan persampahan dan penduduk yang berakses terhadap air minum juga mengalami peningkatan sebesar 8,42 persen (1,68 persen per tahun). Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan, perdesaan mencapai 81,63

persen. Pada tahun 2015, untuk penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebanyak 3 unit.

Sementara itu, dalam hal penataan ruang, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luasan hutan yang sangat besar sehingga bila dilihat dari ketersediaan ruang terbuka hijau sebenarnya Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki luasan sekitar 69,90 persen. Namun bila dikaji berdasarkan definisi operasional aspek fokus dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, suatu daerah harus memiliki 20 persen Ruang Terbuka Hijau. Dari tahun 2011 sampai 2015 ratio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah. Dengan definisi operasional ini, rasio RTH Kab. Pesisir Selatan adalah sebesar 0,02 persen dengan luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan adalah 2 persen.

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Layanan urusan wajib perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dalam waktu lima tahun terus mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.39. Hal ini menunjukkan bahwa layanan urusan wajib perumahan rakyat dan kawasan permukiman sudah cukup baik perkembangannya. Di Kabupaten Pesisir Selatan kawasan kumuh pada umumnya berada di daerah pinggiran pantai yang sampai pada tahun 2015 sebesar 12,88 persen. Untuk selanjutnya, penataan kawasan kumuh akan lebih ditingkatkan karena kawasan kumuh identik dengan tingkat kesehatan yang berdampak pada penurunan derajat kesehatan masyarakat dan nilai harapan hidup.

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Rumah tangga berakses air bersih	%	75,29	76,75	78,41	79,94	81,63
2	Rumah tangga bersanitasi	%	-	-	72,66	73,55	62,70
3	Li ngkungan permukiman kumuh	%	-	-	12,88	12,88	12,88
4	Rumah layak huni	Unit	93,436	95,237	95,637	96,689	96,689**

Sumber : Aspek Fokus Kabupaten Pesisir Selatan

** Data sangat sementara

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dengan 6 (enam) Indikator (1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, (2) Cakupan Patroli petugas Satpol PP, (3) Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), (4) Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) di Kabupaten, (5) Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten, (6) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.40.

Tabel 2.40
Perkembangan Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2010-2015

No	Urusan/Indikator	Sat	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	-	1,980	1,961	2,056	1,920	2,262	1,850
2	Cakupan Patroli petugas Satpol PP	Kali /h	1	1	1	1	1	1
3	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	87%	89%	91%	93%	94%	95%
4	Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) di Kabupaten	%	0.023	0.023	0.022	0.022	0.022	0.018
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	Kali /h	5	5	5	5	5	5
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15	15	15	15

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan, 2015

f. Urusan Sosial

Pemenuhan layanan Urusan Sosial sebagai salah satu urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dilihat pada Tabel tabel 2.41. Dari data terlihat bahwa, sarana dan prasarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi dalam lima tahun terakhir tidak ada perubahan sampai pada tahun 2015 jumlahnya sebanyak 9 unit, sedangkan PMKS yang memperoleh bantuan meningkat menjadi 12.271 Orang dari tahun 2010 sebanyak 12.271 orang.

Tabel 2.41
Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Wajib Sosial
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan / tertangani (jiwa)	9.706	9.511	9.511	9.712	12.271
2	Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan soaial (unit)	11	11	10	10	9
3	Persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	52	66	76	79	83
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	68	71	68	68	74

Sumber : Dinas Sosial, PP & PA Kabupaten Pesisir Selatan, 2015

2.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja dan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), merupakan indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey, berdasarkan table 2.42.

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	87.65	87.50	87.28	60,43	56,74
2	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	%	2 kasus	2 kasus	1 kasus	N/A	N/A
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66.32	59.42	55.66	60.43	56,74
4	Pencari kerja yang ditempatkan	%	184 org	224 org	181 org	210 org	94 org
5	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	1.03	0.90	0.89	N/A	N/A

Sumber data: Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Secara umum memperlihatkan pesentase yang menurun dari tahun 2010 sampai tahun 2015, sedangkan indikator Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun semakin menurun dari 0,0% menjadi 0,0%, hal ini menunjukkan semakin menurunnya terjadi sengketa antara pengusaha dan pekerja. Pencari kerja yang

ditempatkan memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan, namun pada tahun 2015 menunjukkan persentase yang menurun dari 184 orang menjadi 94 orang.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan peningkatan sebesar 7,87 persen dari tahun 2011 sampai 2015. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dan partisipasi angkatan kerja perempuan juga meningkat sebesar 15,07 persen dan 1,40 persen yang bekerja pada lembaga pemerintah, swasta maupun usaha sendiri. Hal ini dapat menggambarkan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah cukup memadai, namun rasio KDRT perlu lebih diperhatikan karena mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8,13	8,47	8,59	8,77	8,77
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	62,29	63,39	91,41	71,68	71,68
3	Rasio KDRT	-	-	0,0028	0,0092	0,0092
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	89,97	90,11	71,68	91,23	91,23
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	N/A	N/A	93	100	100

Sumber : Dinas Sosial, PP & PA Kabupaten Pesisir Selatan, 2015

c. Urusan Pangan

Pelayanan Urusan Pangan memperlihatkan perkembangan yang cukup baik, hal ini ditunjukkan oleh adanya regulasi ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur ketersediaan dan distribusi bahan pangan di daerah, untuk ketersediaan pangan utama pada tahun 2015 sebesar 132,13 kg/jiwa/thn yang artinya rata-rata ketersediaan pangan utama yang dikonsumsi masyarakat sebesar 132,13 kg/jiwa/thn. Ketersediaan pangan ini dapat menurun dipengaruhi oleh produksi, bencana dan ekspor pangan ke luar daerah.

Sedangkan untuk ketersediaan energi dan protein menunjukkan peningkatan sebesar 25,80 persen dan 0,29 persen. Untuk konsumsi energi dan protein menunjukkan peningkatan yang pada tahun 2015 capaiannya telah melebihi target yang ditetapkan yaitu masing-masing sebesar 2.320 kkal/kap/hari dari target minimal 2.150 kkal/kap/hari dan 59,20 gram/kap/hari dari target 57,00 gram/kap/hari. Untuk bahan pangan yang aman dikonsumsi perlu mendapatkan perhatian karena mengalami penurunan sebesar 0,53 persen dan tidak mencapai target di tahun 2015 yaitu 76 persen. Untuk stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen memperlihatkan peningkatan yang cukup baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.44.

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Urusan Pangan Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Regulasi Ketahanan Pangan	-	-	1	1	1
2	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/thn)	157,05	154,99	154,72	174,26	132,13
3	ketersediaan energi (kkal/kap/hari) minimal 2.400	2.984	3.387	3.497	3.733	3.754
4	ketersediaan protein (gram/kap/hari) minimal 63,00	83,49	72,94	80,1	75,07	83,73
5	Tingkat Kecukupan konsumsi pangan					
	- Konsumsi energi (kkal/kap/hari) minimal 2.150	1.846,9	-	1.721,30	2.095,70	2.320
	- Konsumsi protein (gram/kap/hari) minimal 57	50,40	-	43,2	56,4	59,2
6	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen					
	- Harga gabah (Rp/Kg)	3.149	3.000	3.056	4.337	4.054
	- Harga beras (Rp/Kg)	5.898	6.500	6.875	7.900	7.848
7	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen	18,26	4,78	4,04	10,69	12,9
8	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	-	75	83,3	87,5	74,6

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, 2015

d. Urusan Pertanahan

Pada umumnya tanah di Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh tanah ulayat dan jika pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan yang memerlukan tanah masyarakat harus melalui transaksi jual beli. Dari tahun 2011 sampai 2015 telah 88,8 persen luas lahan yang telah memiliki sertifikat dan 66,66 kasus tanah negara yang telah diselesaikan dan untuk penyelesaian ijin lokasi

telah 100 persen. Penggunaan tanah ini pada umumnya digunakan untuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.45.

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase luas lahan bersertifikasi (%)	58,8	58,8	45,59	7,9	88,8
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (kasus)	-	100	77,7	100	66,66
3	Penyelesaian izin lokasi (izin)	100	100	84,62	84,62	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Pesisir Selatan, 2017

e. Urusan Lingkungan Hidup

Dalam rentang tahun 2010-2015, Kabupaten Pesisir Selatan telah mendapatkan Piagam Adipura sebanyak 2 kali yaitu tahun 2011 dan 2013 yang pemantauannya dilaksanakan di Kota Painan (Salido dan Sago). Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah menyadari pentingnya lingkungan yang bersih yang ditandai dengan pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat tahun 2011. Untuk penegakan hukum di bidang lingkungan, juga telah meningkat dari semula hanya 3 kasus yang ditangani di tahun 2011 menjadi 10 kasus pada tahun 2015.

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	%	100	100	50	50	100
2	Penegakan hukum lingkungan	Kasus	3	2	5	3	10
3	Perolehan Piala Adipura	-	1	-	1	-	-

Sumber : Aspek Fokus Pesisir Selatan, 2010-2015

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak sipil dan hak dasar penduduk salah satunya melalui pemberian

identitas penduduk. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan KTP bagi penduduk di atas umur 17 tahun dengan cakupan penerbitan KTP meningkat sebesar 79,56 persen setiap tahun dengan rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk pada tahun 2015 adalah 0,660 yang artinya 66 persen penduduk telah memiliki KTP dari jumlah penduduk usia 17 atau yang telah menikah yang wajib memiliki KTP. Sedangkan untuk penerbitan akte kelahiran meningkat sebesar 15,13 persen (3,03 persen setiap tahunnya). Demikian juga dengan ketersediaan database kependudukan skala kabupaten, dan penerapan KTP nasional berbasis NIK sudah tersedia, dan ini menunjukkan bahwa tertib administrasi dukcapil dan kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan telah semakin mambaik.

Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Urusan Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.66
2	Rasio Bayi berakte kelahiran	%	0.62	0.66	0.70	0.74	0.79	0.81
3	Pasangan berakte nikah	Pasangan	357,214	367,384	378,284	386,690	391,058	257,739
4	Kepemilikan KTP	Orang	357,214	367,384	378,284	386,690	391,058	391,058
5	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	Penduduk	173.11	194.96	202.86	216.24	219.91	224,46
6	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber : Aspek Fokus Pesisir Selatan, 2010-2015

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memperlihatkan indikator-indikator pelaksanaan pembangunan selama tahun 2011-2015 dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini ditandai meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat sebesar 40 persen (8,20

persen pertahun) dan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat meningkat sebesar 16,67 persen (3,33 persen pertahun).

Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	1.97	2.63	3.29	3.95	4,00
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	680	680	680	680	680
3	PKK aktif	%	76.18	76.47	77.21	79.41	85,00
4	Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100
5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Rupiah	37.00	37.50	39.00	40.00	40.00
6	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Kelompok	5.6	5.7	5.7	5.9	5.9*

Sumber : Aspek Fokus Pesisir Selatan, 2010-2015

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2011-2015, sudah mengalami kemajuan cukup berarti. Pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 0,95 persen tahun 2011 menurun menjadi 0,83 persen tahun 2015. Rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami penurunan dari 1,93 persen tahun 2011 menjadi 1,68 persen tahun 2015. Hal ini disebabkan karena rasio akseptor KB, persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,95	0,92	0,86	0,86	0,83
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,93	2,85	2,77	2,69	2,61
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,93 (2)	1,78 (2)	1,78 (2)	1,58 (2)	1,68 (2)
4	Rasio Akseptor KB	75,69	74,98	71,55	74,49	N/A
5	Cakupan peserta KB aktif	0,75	0,74	0,71	0,74	0,67

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
6	Persentase Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	37,34	34,94	30,7	29,7	68,7
7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun (%)	75,68	74,98	71,55	74,49	67,22
8	Cakupan apangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	2,71	2,01	2,13	3,34	1,06
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	24,32	25,01	22,54	26,22	32,78
10	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	33,33	35,1	37,76	30,42	27,45
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	24,32	25,01	22,54	26,22	32,78
12	Cakupan anggota bina keluarga balitas (BKB) ber-KB	n/a	26,22	45,68	43,71	43,76
13	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	n/a	27,43	30,36	29,48	29,48
14	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	n/a	18,39	25,93	24,68	24,68
15	Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	65	67	67	68	69

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Pesisir Selatan

i. Urusan Perhubungan

Perkembangan pelayanan urusan perhubungan yang menunjukkan peningkatan dimana dalam rentang tahun 2011 sampai 2015 terjadi peningkatan jumlah arus penumpangan umum sebesar 0,39 persen. Jumlah uji KIR angkutan umum terus meningkat pesat setiap tahunnya sebesar 38,33 persen.

Tabel 2.50
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.280.322	1.298.002	1.235.967	1.297.763	1.285.300
2	Jumlah uji KIR angkutan Umum	3.413	3.935	5.390	5.867	9.954
3	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (angkutan umum)	3	3	3	3	3
4	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	16,2	4,33	20,8	0	0
5	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
6	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (RP)	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
7	Pemasangan rambu-rambu per tahun (unit)	60	78	100	116	180
8	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,08	0,069	0,064	0,062	0,06
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	1.280.322	1.298.002	1.235.967	1.297.763	1.285.300
10	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	155.978	167.285	148.237	140.056	124.148
11	Jumlah halte	25	25	25	25	25
12	Jumlah dermaga/tambatan kapal	0	0	0	0	1
13	Jumlah terminal	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Jumlah jaringan operator di Kabupaten Pesisir Selatan tidak mengalami penambahan atau stagnan, demikian juga dengan website dan milik pemerintah daerah, namun pada indikator jumlah surat kabar nasional/ lokal berfluktuasi, sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses internet meningkat sebesar 81,82 persen dan penduduk yang menggunakan HP/telepon meningkat sebesar 85 persen.

Tabel 2.51
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah jaringan komunikasi	Operator	5	5	5	5	5	5
2	Rasio wartel/ warnet terhadap penduduk	%	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Media	9	9	9	10	11	11
4	Jumlah penyiaran radio/ TV Lokal	Lembaga	3	3	3	3	3	3
5	Web site milik Pemerintah Daerah	Ada/ Tidak	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan

k. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rentang tahun 2011 sampai 2015, koperasi aktif meningkat dari semula 35 persen menjadi 50 persen. Begitu juga dengan koperasi yang aktif melaksanakan RAT meningkat dari semula 25 persen menjadi 35 persen.

Sementara itu, UMKM persentasenya menurun dari semula 99,7 persen menjadi 99,4 persen.

Tabel 2.52
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Koperasi (unit)	353	354	286	295	299
2	Persentase koperasi aktif (%)	35	40	45	47	50
3	persentase koperasi aktif yang melakukan RAT (%)	25	28	30	33	35
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99,7	99,65	99,6	99,5	99,4

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan

l. Urusan Penanaman Modal

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat dari tahun 2011 sebanyak 4 perusahaan menjadi 14 perusahaan di tahun 2015. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat sebesar 25 persen dan daya serap tenaga kerja meningkat 6,35 persen.

Tabel 2.53
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	4	5	6	8	9
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (milyar Rp)	50	55	58	60	63
3	Rasio daya serap tenaga kerja	31,5	32	32,5	33	33,5
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	80	86	88	90	92

Sumber : Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan

m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga ada tahun 2011-2015 memperlihatkan kinerja yang baik dimana indikator kinerja pelayanan mengalami peningkatan. Kegiatan kepemudaan yang semula hanya dilaksanakan sebanyak 8 kali, pada tahun 2015 meningkat menjadi 30 kali. Jumlah gedung olah raga juga meningkat dari semula(tahun 2011) 5 unit, menjadi 12 unit pada tahun 2015. Jumlah klub olah raga juga meningkat dari 25 klub menjadi 42 klub.

Tabel 2.54
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Pemuda dan Olah Raga
Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	8	12	17	21	30
2	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	1	1	1	1	1
3	Jumlah Klub Olahraga	25	25	34	39	42
4	Jumlah Gedung Olahraga	5	7	8	10	12

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pesisir Selatan

n. Urusan Statistik

Perkembangan dari indikator urusan statistik, secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan daerah, hal ini tercermin dari tersedianya buku Kabupaten Dalam Angka dan buku PDRB setiap tahunnya. Sedangkan untuk ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi belum tersedia.

Tabel 2.55
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Statistik Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	belum	belum	belum	belum	belum
2	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku “PDRB “	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan

o. Urusan Persandian

Selama tahun 2011-2015, belum ada perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dan ini akan ditindaklanjuti.

p. Urusan Kebudayaan

Untuk urusan kebudayaan, dalam periode 2011-2015, beberapa indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya dan jumlah gedung kesenian stagnan dan tidak berubah. Sementara itu jumlah grup kesenian mengalami penurunan dari semula 70 unit menjadi 66 unit di tahun 2016.

Tabel 2.56
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Kebudayaan Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	1	1	1
2	Jumlah Grup Kesenian	70	63	63	63	66
3	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

q. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan, berdasarkan indikator yang ada tahun 2011-2015, menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perpustakaan dan jumlah kunjungan ke perpustakaan yang meningkat masing-masing sebesar 25,23 persen dan 2,05 dengan jumlah rata-rata kunjungan perpustakaan pertahun 270 orang dengan rasio perpustakaan persatuan penduduk 139 orang. Bila dilihat dari ketersediaan buku diperpustakaan juga mengalami peningkatan setiap tahun sebesar 361,88 persen dari 1.275 buku menjadi 5.889 buku tahun 2015.

Tabel 2.57
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perpustakaan Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Perpustakaan	321	343	361	389	402
2	jumlah pengunjung perpustakaan daerah pertahun (org)	3.175	2.095	5240	1049	3240
3	Jumlah Koleksi judul buku perpustakaan (jenis)	1275	1888	2621	2621	5889
4	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	137	209	84	426	139
5	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	265	175	437	87	270

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Pesisir Selatan

r. Urusan Kearsipan

Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku maupun digital dan peningkatan SDM pengelola arsip belum ada dari tahun 2011 sampai 2015. Kedepannya hal ini perlu lebih diperhatikan karena ketersediaan arsip secara baku sangat penting.

2.3.2 Urusan Pilihan

a. Urusan Perikanan

Sampai dengan tahun 2016, Pemerintah Kabupaten masih melaksanakan Urusan Kelautan dan Perikanan dan setelah itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, urusan Kelautan beralih menjadi kewenangan provinsi. Produksi perikanan yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari semula 33.557 ton di tahun 2011, menjadi 46.713 ton di tahun 2015. Sementara itu, tingkat konsumsi ikan meningkat sebesar 13,33 persen dari 30 kg/org/kapita tahun 2011 menjadi 34 kg/org/kapita tahun 2015.

Tabel 2.58
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perikanan Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi perikanan (ton)	33.557	37.694	44.280	45.870	46.713
2	Peningkatan Produksi perikanan					
	- Budidaya (ton)	2.660	5.485	8.520	11.852	10.327
	- Tangkap (ton)	30.897	32.209	35.759	37.555	36.720
3	Konsumsi Ikan (kg/org/kapita)	30	31	32	33	34
4	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	120	135	140	170	185
5	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	16.779	18.847	22.140	22.870	23.356

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan

b. Urusan Pariwisata

Selama tahun 2011-2015, angka kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Peningkatan yang cukup pesat terjadi pada tahun 2013 ke 2014 dari 525 wisman menjadi 1.551 wisman. Sedangkan untuk wisatawan nusantara setiap tahun meningkat yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 sebanyak 587.633 wisnu menjadi 1.544.684 wisnu tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan karena Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk memajukan kawasan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lama tinggal wisatawan berkisar 1 sampai 3 hari. Dengan meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan maka pendapatan daerah di bidang pariwisata juga meningkat dari 238.760.000,- tahun 2013 menjadi 1.793.500.000,- tahun 2015, yang telah melampaui target yaitu Rp.1.5000.000.000. Dengan lama tinggal wisatawan di Pesisir Selatan berkisar 2-3 hari.

Tabel 2.59
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Pariwisata Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kunjungan wisata (orang)	144.066	307.146	588.159	1.556.235	2.001.600
	- wisatawan mancanegara (orang)	431	476	525	1.551	1.600
	- wisatawan nusantara (orang)	143.635	306.670	587.633	1.544.684	2.000.000
2	Lama Tinggal Wisatawan (Hari) :					
	- wisatawan mancanegara (Hari)	n/a	n/a	n/a	2	3
	- wisatawan nusantara (Hari)	n/a	n/a	n/a	1	2
3	PAD sektor pariwisata (juta Rp)	90,01	213,48	238,76	1.582,62	1.793,50

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pesisir Selatan

c. Urusan Pertanian

Selama periode tahun 2011-2015, nilai PDRB sektor Pertanian terus meningkat, namun kontribusinya terhadap perekonomian daerah semakin lama semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri dan jasa terus memperlihatkan peran dimana hasil produksi pertanian sudah mulai diolah sebelum dikonsumsi oleh masyarakat.

Tabel 2.60
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Pertanian Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	41,2	41,43	41,27	41,67	41,65
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	19,07	18,62	19,22	N/A	N/A
3	Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	14,43	14,78	14,54	15,09	15,61
4	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	13,79	14,12	14,22	13,92	13,23
5	Produktifitas padi per hektar (kw/ha)	46,66	48,37	49,09	51,38	50,92
6	Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	N/A	1,22	18,52	2,27	46,51
7	Cakupan Pengawasan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (%)	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan

Tabel 2.61
Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)						Produksi (Ton)						Produktifitas Rata-rata		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2013	2014		2015	2016
1	Padi	53335	53445	54038	54868	61061	62327	53096	25295	249352	261394	269363	313705	317383	270231	5,02
2	Jagung	961	9359	12008	13248	14208	12916	19846	55213	83844	9903	105036	107695	108894	158160	6,78
3	Ubi	404	345	374	384	420	433	253	7477	7763	8453	9682	1338	15263	9892,64	23,94
4	Ubi Jalar	84	87	104	67	58	24	12	688	741	1.303	1166	1141	1657	410,01	21,42
5	Kacang Kedelai	284	303	23	85	163	0	0	383	505	35	128	247	0	0	1,52
6	Kacang tanah	934	784	798	459	330	275	182,6	1497	1598	1039	1102	516	495	335,98	1,71
7	Kacang Hijau	178	214	166	112	61	44	30,4	286	299	191	131	71	51	35,38	1,16

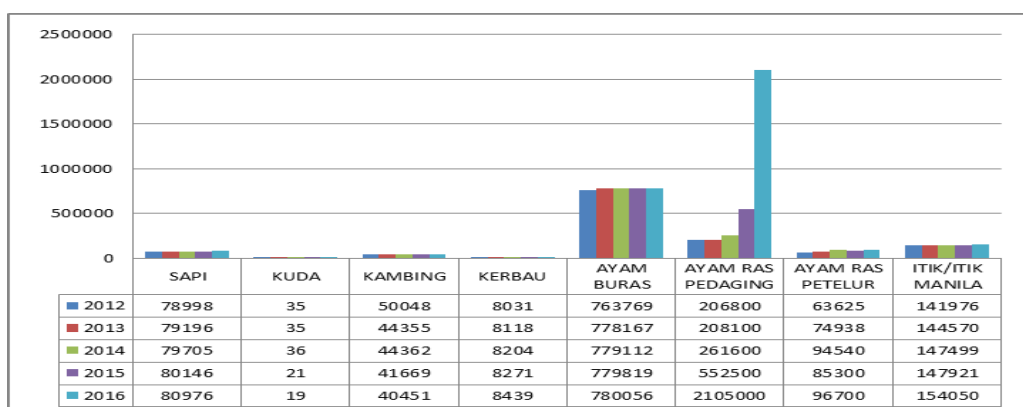
Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, 2017

Tabel 2.62
Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Buah-Buahan

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)								Produksi (Ton)						Produktif rata-rata (Ton/ Ha)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	Sayuran															
1	Cabe	343	348	280	312	302	338	350	615	3084	2394,75	2522	2276	2583,8	4473	9,01
2	Terong	205	165	191	196	164	175	156	614	1435	1753	2329	1692	1707	2596	11,43
3	Mentimun	171	153	189	235	195	186	153	1947	1858	2283	3222	3245	3010	2265	14,64
4	Bawang Merah	31	31	49	34	66	31	155	126	235	371,47	271	501,5	242,7	968	7,03
5	Bayam	121	103	104	82	133	123	117	518	453	520	411	665	636	592	5,05
6	Kangkung	132	119	118	106	160	144	139	559	616	633,48	550	800	735	695	5,12
	Buah-Buahan															
1	Semangka	711	518	522	461	306	559	543	11771	9287	9310,99	9110	7020	10857	10900	19,74
2	Rambutan	14406	48806	10879	15178	24927	30736	16387	1144	8603,2	12143	12143	19941	27804	30706	1,05
3	Mangga	28742	81326	33910	22736	22601	15633	18724	125	4816	27039,9	18190	18161	27509	37858	1,13
4	Durian	25002	58509	46340	30689	40049	33896	9225	15650	7023	59508,2	41924,3	48059	48763	16033	1,34
5	Pisang	532699	573224	270487	213466	217613	170789	155925	6911	11956	81115,6	64039,8	65285	172818	146279	0,52
6	Jeruk	63073	52775	18229	14770	15162	13634	21762	167	324	10553	11807	15162	5187	2177	0,54
7	Duku	0	1970	2197	928	913	7074	1049	0	115	1105,7	742,4	730	6141	892	0,79
8	Belimbing	531	1287	858	585	589	451	415	11	50	336,18	263,25	299	323	210	0,49
9	Salak	63940	75300	19743	10240	14453	13078	3375	1781	873	2566,59	1331,2	1879	2508	487	0,14
10	Mannggis	2540	65261	6707	6707	7007	14299	6880	229	564	384	604	631	1496	6192	0,22
11	Pepaya	16700	22023	6517	7387	7892	6162	4452	234	558	2568	2773,5	3161	7319	6280	0,68
12	Alpukat	1611	2111	1850	1138	1108	947	1388	24	61	514,52	455,2	444	551	555	0,39
13	Mannggis			428	4832	7007	14299	6880			3841,2	4349	6307	14961	6192	1,07
14	Tomat			14	8	1	2	-			1400	810	50	20	-	91,2

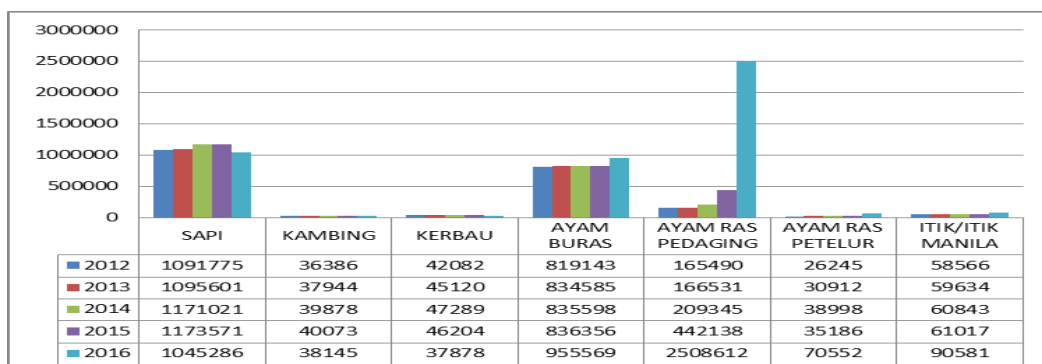
Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, 2017

Diagram 2.6
Populasi Ternak di Kabupaten Pesisir Selatan (ekor) Tahun 2012-2016



Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, 2017

Diagram 2.7
Produksi Daging di Kabupaten Pesisir Selatan (kg) Tahun 2012-2016



Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, 2017

Tabel 2.63
Produktivitas dan Pertumbuhan Produktivitas Perkebunan Tahun 2010-2016

No	Jenis Komoditi	Produktifitas (Ton/ Ha) Tahun							Produksi Rata- Rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Karet	0,47	1,05	0,88	0,76	0,83	0,83	0,96	0,85
2	Kelapa	1,04	1,10	1,11	1,09	0,80	0,87	0,88	0,95
3	Kelapa Sawit	1,05	1,57	2,19	1,98	2,11	3,78	3,75	2,76
4	Gambir	0,44	0,53	0,38	0,39	0,35	0,38	0,47	0,38
5	Kakao	0,57	0,69	0,80	0,81	0,71	0,55	0,45	0,67
6	Kulit Manis	0,17	1,08	1,01	1,27	1,15	0,97	0,96	1,07
7	Cengkeh	0,05	1,12	0,12	0,14	0,51	0,44	0,44	0,33
8	Kopi	0,69	0,76	0,84	1,07	0,60	0,70	0,70	0,78
9	Pala	0,31	0,19	0,26	0,25	0,28	0,16	0,17	0,22
10	Pinang	0,55	1,22	0,97	0,84	0,48	0,46	0,20	0,59

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, 2017

d. Urusan Kehutanan

Sampai dengan tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan masih melaksanakan Urusan Kehutanan. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dalam skala luas dari tahun 2011-2015, terus menerus mengalami peningkatan yakni 0,27 persen tahun 2010 meningkat menjadi 0,91 persen tahun 2013, serta indikator kerusakan hutan semakin berkurang yakni 27,55 persen tahun 2011 berkurang menjadi 0,04 persen pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kerusakan hutan dalam pembangunan daerah selama kurun waktu tersebut dapat ditekan. Di sisi lain, indikator kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB semakin kurang dalam periode waktu yang sama dari 0,42 persen tahun 2010 turun menjadi 0,39 persen tahun 2013.

Tabel 2.64
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Kehutanan Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	0.91	0.73	0.91	-	-
2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	27.55	27.55	0.19	0.04	0.04
3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0.42	0.41	0.39	-	-

Sumber : Aspek Fokus Pesisir Selatan, 2010-2015

e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2011-2015 berfluktuasi meningkat sebesar 35,19 persen dari 59,08 persen tahun 2011 menjadi 79,87 persen tahun 2015. Sedangkan untuk rasio ketersediaan daya listrik yang artinya penggunaan listrik di Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan kebutuhan listrik berkisar 0,11 sampai 0,13 persen dari tahun 2011 sampai 2015.

Tabel 2.65
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan ESDM Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	59,08	62,88	77,09	38	79,87
2	Rasio ketersediaan daya listrik	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11
3	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1.65	1.62	1.57	1,55*	1,54*

Sumber : Aspek Fokus Pesisir Selatan, 2010-2015

f. Urusan Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB memperlihatkan peningkatan sebesar 4,98 persen dari tahun 2011 sampai 2015.

Tabel 2.66
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perdagangan Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	11,45	11,52	11,56	11,96	12,02

Sumber : Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan

g. Urusan Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen dari tahun 2011 sampai 2015. Sedangkan pertumbuhan industri juga meningkat sebesar 17,09 persen dan pekerja di sektor industri juga meningkat sebesar 15,13 persen. Sementara itu, cakupan Bina Kelompok Pengrajin 0,02 persen.

Tabel 2.67
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perindustrian Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	8,74	8,87	8,78	8,81	8,79
2	Pertumbuhan industri	1,58	1,67	1,73	1,79	1,85
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	0,03	0,06	0,01	0,02	0,02
4	Persentase tenaga kerja sektor industri	6,28	6,58	6,88	7,18	7,23
5	Produk IKM yang berkualitas (bersertifikat) (unit)	2	5	3	5	0

Sumber : Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan

h. Urusan Transmigrasi

Perkembangan Urusan Transmigrasi memperlihatkan indikator transmigrasi swakarsa yang stagnan dari tahun 2011-2015 dengan artian tidak mengalami perubahan yaitu 21 persen yang berlokasi di Kecamatan Lunang dan Silaut dengan jumlah 2.830 KK/9447 jiwa.

Tabel 2.68
Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Transmigrasi
Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Transmigran swakarsa	%	21	21	21	21	21

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Pesisir Selatan

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah “kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional”. Dan untuk meningkatkan daya saing daerah ada dua strategi untuk mengembangkan daya saing yaitu:

1. Dengan memproduksi barang dan jasa (*goods and services*) yang dibutuhkan oleh manusia dengan tingkat permintaan yang tinggi (*high demand*), dimana barang dan jasa tersebut sudah diproduksi oleh bangsa-bangsa lain, tetapi dengan sentuhan teknologi dan etos kerja yang lebih baik, maka suatu daerah akan mampu memproduksi barang dan jasa tersebut lebih kompetitif dibandingkan dengan yang telah dihasilkan oleh produsen terdahulu. Barang dan jasa yang kompetitif adalah yang kualitasnya unggul, harganya relatif murah dan pasokan (*delivery*)nya dapat memenuhi kebutuhan serta selera (*preference*) konsumen baik di pasar domestik maupun global (Porter, 2009).
2. Dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, tetapi karena kondisi alam atau faktor lainnya, bangsa-bangsa lain tidak bisa menghasilkannya atau hanya sedikit bangsa yang dapat memproduksinya (*blue ocean strategy*).

Aspek daya saing daerah juga merupakan salah satu aspek yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, spesifikasi dan keunggulan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa indikator utama yaitu aspek kemampuan ekonomi daerah,

fasilitas wilayah atau infrastruktur dan iklim berinvestasi. Indikator utama tersebut diuraikan pada bagaian-bagian sebagai berikut.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu cara menilai kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan mencermati daya beli masyarakatnya. Semakin tinggi daya beli, biasanya semakin baik kemampuan ekonominya. Daya beli dapat diukur dengan pengeluaran perkapita. Dari tahun 2012-2015 pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita mengalami peningkatan sebesar 7,48 persen (1,87 persen setiap tahunnya). Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat telah baik. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa juga meningkat. Selain itu, produktivitas total daerah juga mengalami peningkatan sebesar 44,28 persen setiap tahun.

Tabel 2.69
Perkembangan Pengeluaran Perkapita dan Produktivitas Total Daerah
Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	-	382.144	436.455	407.795	410.741
2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	-	291.353	275.943	343.785	259.952
3	Produktivitas Total Daerah	12,75	13,18	14,37	39,74	44,28

Sumber : BPS Kab. Pesisir Selatan 2016

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas dalam bentuk fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak publik untuk menunjang fungsi pembentukan wilayah dan kota, yaitu pemenuhan tenaga listrik, transportasi, penyediaan air, serta pembuangan limbah dalam rangka memfasilitasi kepentingan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur merupakan konsep fisik yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat umum dalam ranah sosial dan ekonomi. Apabila dilihat dari segi mikro, infrastruktur berperan dalam penyediaan aset fisik yang direncanakan dan dirancang dalam suatu proses dan sistem yang relevan, sehingga dapat memenuhi pelayanan publik. Sedangkan fasilitas adalah tempat untuk menampung kepentingan masyarakat berupa fisik

dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat publik. Fasilitas harus dirancang dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam penyediaan produk dan jasa berkualitas tinggi dengan biaya dan sumber daya yang minimal.

Penyediaan fasilitas wilayah/infrastruktur dipengaruhi oleh beberapa indikator sebagai berikut:

a. Aksebilitas Wilayah

Aksesibilitas wilayah dilihat dari rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya berkisar 1 km jalan dilalui maksimal oleh 2 kendaraan. Hal ini mengindikasikan bahwa jalan kepadatan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah. Sedangkan untuk jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan yang melalui dermaga/bandara/terminal mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Tabel 2.70
Perkembangan Indikator Terkait Aksesibilitas Wilayah
Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,08	0,069	0,064	0,062	0,06
2	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum (org)	1.089.156	1.110.937	888.739	916.521	2.188.805
3	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun (org)	1.228.393	1.501.176	1.579.455	1.845.671	3.921.472

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2016

b. Penataan Ruang

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diindikasikan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Pada tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Perda RTRW ini merupakan pedoman pelaksanaan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

c. Fasilitas Bank dan Non Bank

Ketersediaan bank di Kabupaten Pesisir Selatan meningkat sebesar 48 persen dari tahun 2011 sampai 2015 yang terdiri dari bank pemerintah, swasta dan bank perkreditan rakyat. Untuk perusahaan asuransi tidak mengalami peningkatan sebanyak 3 buah yaitu asuransi bumi putera, BPJS dan prudential.

Tabel 2.71
Perkembangan Fasilitas Bank dan Non Bank Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang-Cabangnya	25	30	35	37	37
2	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan cabang-cabangnya	2	2	2	2	2

Sumber : Aspek Fokus Pesisir Selatan, 2010-2015

d. Ketersediaan Air Bersih

Permintaan air bersih oleh masyarakat dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari tahun 2011 sampai 2015 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (PDAM) meningkat sebesar 88,97 persen.

Tabel 2.72
Jumlah Sambungan PDAM Tahun 2010-2014

NO	LANGGANAN						
	KECAMATAN	UNIT PELAYANAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	Koto XI Tarusan	Barung-BarungBalantai	-	-	172	207	213
		Tarusan	-	-	-	783	924
2	Bayang	PasarBaru	-	-	1,312	1.558	1.621
3	IV Jurai	Lumpo	-	-	45	365	391
		Painan	-	-	3,258	4.424	4.800
4	BatangKapas	Pasar Kuok	-	-	540	790	790
		Tuik	-	-	261	451	481
5	Sutera	Surantih	-	-	663	875	1895
6	Lengayang	Kambang	-	-	267	563	799
7	RanahPesisir	BalaiSelasa	-	-	576	1.054	1.399
8	Linggo Sari Baganti	Air Haji	-	-	533	780	722
9	PancungSoal	Inderapura	-	-	552	1.054	1.096
10	BAB Tapan	Tapan	-	-	108	856	856
11	LunangSilaut	Lunang	-	-	-	117	147
JUMLAH			-	-	8.287	13.877	15.395

Sumber : PDAM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

e. Sarana Perekonomian

Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui pembangunan sarana perekonomian seperti pasar dan menumbuhkan usaha kerakyatan seperti koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta jasa pendukung pariwisata seperti hotel dan restoran.

Tabel 2.73
Jumlah Sarana Perekonomian Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pasar Kecamatan (unit)	10	10	10	10	10
2.	Pasar Nagari (unit)	36	36	36	36	36
3.	Jumlah koperasi (unit)	374	284	286	295	295
4.	Jumlah UMKM (unit)	1014	4454	4440	4440	4440
5.	Ketersediaan Restoran	46	46	83	44	40
6.	Ketersediaan Penginapan	21	25	26	27	23

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pesisir Selatan

f. Fasilitas Listrik dan Telepon

Penggunaan listrik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya pengguna listrik PLN setiap tahunnya sebesar 35,19 persen. Sedangkan untuk rasio elektrifikasi berkisar 0,11 yang artinya daya listrik yang tersedia hanya dapat menampung 11 persen terhadap pengguna listrik. Begitu juga dengan penggunaan HP/telepon, pada umumnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan telah menikmati kemajuan teknologi melalui penggunaan Handphone untuk berkomunikasi dengan peningkatan sebesar 30 persen dari tahun 2011-2015.

Tabel 2.74
Perkembangan Fasilitas Listrik dan Telepon Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11
2	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	59,08	62,88	77,09	38	79,87
3	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	40	45	55	66	74

Sumber : Aspek Fokus Pesisir Selatan, 2010-2015

2.4.3 Iklim Berinvestasi

Kondisi yang kondusif, aman dan tertib pada suatu daerah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Perlu adanya upaya untuk menarik minat investor berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu dengan cara memperbaiki iklim berinvestasi dimana hal ini merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurunnya angka kriminalitas dan lebih singkatnya waktu penyelesaian dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya yaitu lamanya proses perijinan dan ketersediaan regulasi yang mendukung iklim perizinan.

Tabel 2.75
Perkembangan Indikator Pendukung Iklim Investasi Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Kriminalitas	4,14	1,42	1,63	2,8	4,49
2	Lamam Proses Perijinan (hari)	5	5	5	5	5
3	Jumlah Perda yang Mendukung iklim perizinan	2	2	2	2	2

Sumber : Aspek Fokus Pesisir Selatan, 2010-2015

2.4.4 Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu daerah yaitu ketersediaan sumber daya manusia karena sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas. Di Kabupaten Pesisir Selatan, rasio lulusan S1/S2/S3 terus mengalami peningkatan sebesar dari semula tahun 2011 sebesar 42,58 persen menjadi 59,01 persen di tahun 2015.

Sementara itu rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 mencapai angka 92,12 persen. Hal ini berarti, bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 92 orang usia belum produktif (usia 0-4 tahun) dan usia tidak produktif (65 ke atas). Demikian juga di tahun 2015, rasio ketergantungan 57,26 persen yang artinya setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 57 orang usia belum produktif dan usia tidak produktif. Hal ini

menunjukkan rasio ketergantungan penduduk mengalami penurunan sebesar 37,84 persen.

Tabel 2.76
Angka Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2011 – 2014

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan (%)
	0-14 tahun	15-64 tahun	≥ 65 tahun	
2011	123,460	155,054	19,369	92,12
2012	122,128	162,406	15,873	84,97
2013	130,761	153,999	19,097	97,31
2014	121,625	167,977	17,796	83,00

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka diolah Bappeda, 2018

2.4.5 Keuangan Daerah

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan kinerja. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan yang diterima dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 70,71 persen. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan selalu mencari sumber-sumber pendapatan yang dapat digali pemasukan keuangan daerah baik dari pajak, maupun retribusi. Untuk transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Pesisir Selatan telah mendapatkan WTP mulai dari tahun 2013 sampai 2015. dan diharapkan kedepannya pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik.

Tabel 2.77
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011 – 2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA (%)	7,04	6,73	9,82	11,02	11,35
3	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	7,04	6,73	9,82	11,02	11,35
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	8,79	6,13	5,51	4,56	4,08
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	1,26	3,54	3,83	5,84	7,22
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	1,37	1,34	1,4	1,44	1,52
		2,62	2,65	1,69	2,66	2,64
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	0,04	0,03	4,17	4,22	4,67
8	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
9	Peningkatan PAD (Milyar Rp)	N/A	40,255	47,627	86,700	108,501
10	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	N/A	4,61	4,65	7,38	7,87

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018



PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 - 2021



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen pembangunan daerah. Periode 2011 hingga 2015 tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih rinci diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya di ubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada tahun 2013 Kementerian Dalam Negeri mengundang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 secara signifikan berpengaruh terhadap Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebelum dikeluarkannya Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual, pemerintah daerah menyajikan 4 (empat) jenis Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Mulai tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyajikan 7 (tujuh) jenis Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasioanal (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Perubahan SAL (LPSAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perubahan peraturan ini berimbas pada sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi 2 komponen besar, yakni pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah. Melalui kebijakan pengelolaan pendapatan daerah secara tepat, maka pendapatan daerah

Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil mencapai rata-rata peningkatan 15,08% per tahun. Langkah-langkah perubahan kearah yang lebih baik selalu dilakukan, hal ini disebabkan karena tuntutan aturan yang lebih tinggi maupun inovasi dari pemerintah daerah. Sebagai akibat aturan yang lebih tinggi yaitu terjadinya perubahan kewenangan daerah di sisi pendapatan dimana dilimpahkannya PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah pada Tahun 2014. Berikut ini diuraikan kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara lebih mendalam.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan mengalami peningkatan dari Rp.791.605.916.579,69 pada tahun 2011 menjadi Rp.1.376.803.899.873,07 pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 73,93% sejak tahun 2011.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Realisasi PAD tahun 2011 berjumlah Rp.30.280.287.003,69 dan pada tahun tahun 2015 berjumlah Rp.107.992.020.496,07. Terjadi peningkatan PAD secara rerata pertahun sebesar 39,46%.

Peningkatan yang signifikan ini disebabkan adanya perubahan mendasar pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah khususnya terhadap optimalisasi realisasi PAD. Sebelum tahun 2013, pemerintah daerah belum sepenuhnya menerapkan pendapatan dengan azas bruto sehingga pendapatan dicatat hanya sebesar nilai bersih. Adanya arus kas masuk tanpa melalui mekanisme APBD ini sangat rawan terjadinya kebocoran. Selain itu, pada Tahun 2014 terjadi

pengalihan kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Meminimalisir kebocoran pendapatan daerah merupakan salah satu upaya intensifikasi guna meningkatkan PAD. Disamping itu, memperbanyak frekuensi pembinaan baik terhadap SDM pengelola PAD maupun terhadap masyarakat agar taat dan sadar pajak, dan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Selain intensifikasi juga dilakukan ekstensifikasi PAD dengan menggali potensi PAD serta wajib pajak baru.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan yang kontribusinya paling besar dalam mendanai pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Hampir 80% Dana Perimbangan berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari tiga komponen yakni Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

DAU merupakan komponen paling besar kontribusinya, yakni sekitar 85% dari total Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Pesisir Selatan. DAU dibagikan kedaerah berdasarkan formula yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu faktor yang jadi pertimbangan besaran DAU adalah kebutuhan dasar yakni gaji PNSD yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Total Dana Perimbangan Tahun 2011 Rp.619.588.789.543,00 meningkat menjadi Rp.931.058.539.525,00 pada tahun 2015, atau mengalami peningkatan secara rerata sebesar 10,78% per tahun.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dana kontinjensi atau penyeimbang dan dana bagi hasil pajak provinsi. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini, secara umum juga mengalami peningkatan. Lain lain Pendapatan Daerah yang sah pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp.141.736.840.033,00, pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp.337.753.339.852,00. Peningkatan ini karena meningkatnya Dana Sertifikasi Guru PNSD, Dana Desa, dan pada Tahun 2015 Kabupten Pesisir Selatan

mendapat Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.22.693.355.000,- yang tertampung dalam nomor rekening Dana Penyesuaian Otonomi Khusus karena prestasinya diberbagai bidang, salah satunya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014. Realisasi Pendapatan Daerah secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rata – Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata (%)
1	Pendapatan	791.605,916,580	872.300,636,280	1.024,915,513,557	1.174,349,091,058	1.376,803,899,873	12,89
1.1	Pendapatan Asli Daerah	30,280,287,004	40,254,884,212	47,626,528,302	86,699,821,743	107,992,020,496	26,26
	1.1.1 Pajak Daerah	6,628,723,644	7,026,802,565	12,418,256,331	15,591,934,037	14,420,455,234	15,33
	1.1.2 Retribusi Daerah	4,731,304,484	6,482,533,375	20,920,191,547	43,132,513,939	6,061,833,271	-116,00
	1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3,993,379,906	3,747,133,749	4,313,117,904	3,878,435,555	4,107,566,970	0,23
	1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	14,926,878,970	22,998,414,523	9,974,962,520	24,096,938,212	83,402,165,020	8,56
1.2	Dana Perimbangan	619,588,789,543	711,834,651,068	805,702,229,695	885,519,612,210	931,058,539,525	
	2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	28,008,619,543	32,252,077,068	29,399,335,695	23,969,053,210	21,475,887,525	-7,70
	2.2 Dana Alokasi Umum	514,113,570,000	609,139,244,000	689,380,494,000	753,984,939,000	784,825,492,000	9,93
	2.3 Dana Alokasi Khusus	77,466,600,000	70,443,330,000	86,922,400,000	107,565,620,000	124,757,160,000	10,49
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	141,736,840,033	120,211,101,000	171,586,755,560	202,129,657,105	337,753,339,852	
	1.3.1 Hibah			135,524,200	5,384,875,300	11,118,638,870	75,78
	1.3.2 Dana Darurat						
	1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	25,543,420,793	28,491,778,000	32,132,105,000	41,048,464,805	48,396,204,982	14,65
	1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	113,599,779,240	91,719,323,000	126,206,867,000	142,408,212,000	278,238,496,000	15,92
	1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	2,593,640,000		13,112,259,360	13,288,105,000		1,32

N	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	518,157,002,388	571,854,656,195	617,455,022,705	692,929,022,376	796,509,876,519.85	11.38%
	1 Belanja Pegawai	468,886,134,621	522,400,431,765.00	563,484,885,317.00	631,022,604,843	670,687,052,428.00	9.39%
	2 Belanja Bunga					326,798,951.74	0.00%
	3 Belanja Subsidi						0.00%
	4 Belanja Hibah	1,334,446,000	5,169,110,000.00	7,776,255,900	7,054,464,490	31,019,597,178.00	167.06%
	5 Belanja Bantuan Sosial	4,926,830,850	795,950,000.00	1,328,900,000	2,688,449,000	57,500,000.00	-3.11%
	6 Belanja Bantuan Keuangan	39,380,825,920	40,604,357,830.00	41,422,819,413	48,717,722,328	91,125,838,396.01	27.45%
	7 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	284,029,997	284,030,000.00	284,027,475	283,272,575	1,227,746,566.10	83.29%
	8 Belanja Tidak Terduga	3,344,735,000	2,600,776,600.00	3,158,134,600	3,162,509,140	2,065,343,000.00	-8.84%
B	Belanja Langsung	270,914,979,725	287,512,454,430	367,509,253,165	450,270,474,672	563,343,758,700.97	20.42%
	1 Belanja Pegawai	17,090,826,650	11,709,543,100	20,643,680,210	38,172,605,956	51,100,385,845.00	40.90%
	2 Belanja Barang dan Jasa	123,667,504,154	146,449,301,650	178,963,738,848	197,528,109,931	235,125,085,840.00	17.51%
	3 Belanja Modal	130,156,648,921	129,353,609,680	167,901,834,107	214,569,758,785	277,118,287,015.97	21.53%
	Jumlah Belanja	789,071,982,113	859,367,110,625	984,964,275,870	1,143,199,497,048	1,359,853,635,220.82	14.65%

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan

Peningkatan pendapatan daerah yang cukup besar dari tahun ke tahun disatu sisi memberikan harapan terhadap sustainabilitas pembiayaan pembangunan, namun perlu dicermati sejauhmana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Suatu daerah otonom harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah mandiri ditandai dengan berkurangnya ketergantungan keuangan terhadap pusat. Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Derajat otonomi fiskal menunjukkan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Ada 6 kriteria dalam menilai derajat otonomi fiskal:

- a) 0,00% - 10,00% dinilai sangat kurang
- b) 10,01% - 20,00% dinilai kurang
- c) 20,01% - 30,00% dinilai sedang
- d) 30,01% - 40,00% dinilai cukup
- e) 40,01% - 50,00% dinilai baik
- f) 50,01% - ke atas dinilai sangat baik.

Analisa lebih lanjut terhadap perkembangan Pendapatan Daerah periode 2011–2015 dapat diperoleh informasi mengenai derajat otonomi fiskal Kabupaten Pesisir Selatan. Tahun 2014 secara rerata nasional, derajat otonomi fiskal sebesar 17,30% dan Sumatera Barat sebesar 14,48% sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan berada pada angka 7,38% di tahun 2014 dan 7,84% pada tahun 2015 atau jauh dari rerata nasional dan Provinsi Sumatera Barat, dan masuk kriteria sangat kurang.

b. Belanja Daerah

Alokasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada APBD terus mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2011 belanja daerah berjumlah Rp.789.071.982.113,00, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp.1.359.853.635.220,82, terjadi peningkatan rata-rata pertahun sebesar 14,63%.

Secara umum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan rerata persentase Belanja Langsung lebih tinggi dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung. Hal ini bentuk keberpihakan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pelayanan publik selalu meningkat dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan persentase Belanja Gaji Pegawai dibandingkan total Belanja Daerah selalu memperlihatkan kecenderungan turun setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2011 Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp.468.886.134.621,00 atau 59,42% dibanding total Belanja Daerah menjadi Rp.670.687.052.428,00 atau 49,32% dari total Belanja Daerah.

Terdapat Belanja yang signifikan kenaikannya seperti Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan diwajibkannya Daerah untuk *sharing* dana dalam penyelenggaraan tersebut merupakan penyebab utama meningkatnya Belanja Hibah pada Tahun 2015, yakni sebesar Rp.22,289,820,178.00 untuk KPUD dan sebesar Rp.3,729,777,000.00 untuk Panwaslu.

Sedangkan kebijakan Pemerintah Pusat yang secara bertahap mewujudkan satu desa satu milyar mengakibatkan Belanja Bantuan Keuangan yang dialokasikan untuk pemerintah desa juga meningkat. Dialihkannya Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Pemerintah Daerah juga merubah besaran dana Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, sehingga mulai Tahun 2015 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap belanja ini.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah Laporan Keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban.

Berdasarkan Neraca Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 terlihat bahwa komposisi Aset Tetap jauh lebih besar dibandingkan Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Lainnya, yaitu dengan perbandingan 91,60%, 6,07%, 1,51%, dan 0.85%. Seiring meningkatnya aktivitas investasi jangka panjang dan peningkatan jumlah Kas dan Piutang, komposisi Aset Tetap mengalami penurunan terhadap Total Aset pada Tahun 2014, yaitu menjadi 88,26%, dan komposisi Aset Lancar meningkat menjadi 9,33%, Investasi Jangka Panjang naik menjadi 2,06%, dan Aset Lainnya mengalami penurunan 0,35%.

Peningkatan Piutang secara signifikan terjadi pada tahun 2014 karena adanya pelimpahan Piutang PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan seiring dengan pengalihan kewenangan pemungutan. Aset yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan peningkatan cukup berarti, yaitu dari Rp.1.128.988.526.945 pada tahun 2010 menjadi

Rp.1.740.772.449.572 pada tahun 2014, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 54,19%. Peningkatan aset Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan karena meningkatnya Belanja Modal dari tahun ke tahun, terutama pada aset Gedung dan Bangunan, Jalan, irigasi dan Jaringan, dan Tanah. Pada Tabel 3.2 terlihat Neraca Kabupaten Pesisir Selatan periode 2010 hingga 2014.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	1,128,988,526,945	1,068,737,113,074	1,348,179,902,534	1,425,714,800,056	1,740,772,449,572	0.12
1.1	ASET LANCAR	68,527,088,267	60,165,981,044	74,836,436,800	113,507,371,559	162,442,095,534	0.27
1.1.1	Kas	57,246,579,842	56,590,549,431	40,476,696,393	60,484,790,780	130,320,476,685	0.34
1.1.2	Investasi Jangka Pendek			25,000,000,000	40,000,000,000	-	
1.1.3	Piutang (NRV)	6,320,900,959	417,004,723	2,919,880,816	8,750,980,564	18,158,625,143	2.04
1.1.4	Persediaan	4,959,607,466	3,158,426,890	6,439,859,591	4,271,600,215	13,962,993,706	0.65
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	17,034,716,757	18,068,306,278	20,257,339,093	26,285,817,036	35,806,343,531	0.21
1.2.1	Investasi NonPermanen (NRV)	4,469,352,847	4,502,942,368	4,196,538,514	4,084,016,457	3,778,542,952	(0.04)
1.2.2	Investasi Permanen	12,565,363,910	13,565,363,910	16,060,800,579	22,201,800,579	32,027,800,579	0.27
1.3	ASET TETAP	1,034,217,782,203	984,915,861,844	1,189,981,154,053	1,283,501,346,412	1,536,413,782,599	0.11
1.3.1	Tanah	59,012,810,813	61,553,283,991	63,950,285,911	68,638,054,241	199,864,533,935	0.52
1.3.2	Peralatan dan Mesin	192,622,127,554	210,106,473,398	170,548,552,333	189,287,931,811	219,428,503,905	0.04
1.3.3	Gedung dan Bangunan	281,825,250,096	318,300,691,511	481,580,727,063	566,056,800,093	616,880,397,580	0.23
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	797,821,252,597	844,212,522,751	864,030,382,118	970,771,778,832	1,083,139,211,090	0.08
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	26,004,716,993	28,550,239,033	53,659,329,291	56,374,146,504	58,820,639,597	0.27

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada Tahun 2013 pemerintah daerah menerapkan penganggaran menggunakan azas bruto pada pendapatan daerah, dimana sebelumnya untuk pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dianggarkan hanya sebesar pendapatan bersih, hal ini tidak mencerminkan anggaran dan realisasi pendapatan yang sesungguhnya dan rentan terhadap kebocoran. Berikut ini diuraikan kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara lebih mendalam.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2013 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp.563.484.885.317,- atau 57,21%, Tahun 2014 Rp.631.022.604.843,- atau 55,20% dari Belanja Daerah, dan Tahun 2015 sebesar Rp.670.687.052.428,- atau 49,30% dari Belanja Daerah.

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dianggarkan pada belanja tidak langsung yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan PNS dan Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja operasional Bupati dan hasil pungutan pajak daerah.

Tabel 3.3
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2015

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Daerah	Persentase %
2013	563,484,885,371.00	984,964,275,870.00	57.21%
2014	631,022,604,843.00	1,143,199,497,048.00	55.20%
2015	670,687,052,428.00	1,359,853,635,220.82	49.32%

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan jika dilihat dari tahun 2012-2015 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tergambar pada pendapatan yang mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2015.

Tabel 3.4
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2015

No	Uraian	2013	2014	2015
1	Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi:	1,024,915,513,557	1,174,349,091,058	1,386,226,827,237
2	Belanja Daerah	984,964,275,870	1,143,199,497,048	1,360,363,424,511
3	Pengeluaran Pembiayaan	6,381,206,567	9,826,000,000	15,489,000,000
	Surplus/(defisit)	33,570,031,120	21,323,594,010	10,374,402,726

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 3.5
Komposisi Penutup Riil Anggaran
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2015

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	67,040,476,296	108,127,034,862	146,015,405,496
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	14,126,835,000
5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	112,522,057	36,681,600	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	2,793,593,590	7,690,885,138	1,757,362,605

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan

Penerimaan Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit riil, karena Penerimaan Pembiayaan lebih besar daripada defisit maka hal ini menyebabkan terdapatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Tabel 3.6
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013 -2015

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah SiLPA	100.623.369.600		1.56.394.663.221.85
2	Pelampauan Penerima PAD	951.682.813.26	14.096.659.061,07	14.046.659.061,07
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	NA	NA	NA
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain pendapatan Daerah yang sah	NA	NA	NA
5	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat lainnya	NA	NA	NA
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai akhir Tahun Belum Terselamatkan.	NA	NA	NA
7	Kegiatan Lanjutan	9.102.008.420.98	60.117.349.550.02	60.117.340.550.02

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan visi yang telah ditetapkan, maka untuk lima tahun kedepan diperlukan peningkatan pendapatan daerah yang lebih besar. Peningkatan ini sangat dimungkinkan karena kinerja keuangan daerah selama periode 2016 – 2021 memperlihatkan kecenderungan semakin baik. Oleh sebab itu berdasarkan potensi yang dimiliki dan untuk memastikan kemampuan keuangan daerah, perlu dibuat proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja wajib mengikat serta belanja prioritas.

Terkait dengan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2016 – 2021, Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah lebih difokus untuk mencari potensi pendapatan baru dengan target perolehannya serta meminimalisir kebocoran dalam pemungutan dengan berpedoman pada aturan perundangan serta evaluasi perolehan pendapatan tahun lalu. Untuk mendukung kebijakan tersebut, maka dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan. Intensifikasi dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain : a). Melakukan Sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak dan masyarakat dengan cara

melakukan tatap muka, pertemuan dengan wajib pajak dan masyarakat, membuat selebaran, spanduk dan billboard dan sarana lainnya, membuat edaran ke media massa baik cetak maupun elektronik; b). Meningkatkan pelayanan dengan cara meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya aparatur, berpenampilan yang simpatik dan ramah tamah kepada wajib pajak, melaksanakan pelayanan yang tertib, cepat dan lancar, menumbuhkan dan membina kejujuran petugas untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur, serta menyediakan sarana dan prasarana operasional di kantor maupun sarana transportasi bagi petugas yang beroperasi dilapangan.

Sedangkan untuk kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan antara lain; Melakukan pendataan dan penyaringan wajib pajak baru, Melakukan kajian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, Melakukan penggalian wajib pajak/ wajib retribusi daerah baru yang tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha serta, Melakukan pendataan terhadap potensi riil penerimaan dari objek pajak/retribusi sehingga terdapat data base yang akurat, mendata administrasi dan sistem pengelolaan pendapatan daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan unsur lainnya yang terkait, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tabel 3.10 memperlihatkan bahwa proyeksi pendapatan daerah selama 2016-2021 akan meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan tersebut terutama pada PAD sebesar 7,5% yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah. Hasil perhitungan ini belum mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari daerah ke propinsi atau pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Tabel 3.7.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
	PENDAPATAN	1.457.940.856.819	1.454.900.875.816	1.540.659.920.714	1.594.925.895.000	1.672.070.165.368	1.757.785.479.991
A.	Pendapatan Asli Daerah	108.915.294.014	116.095.536.070	124.930.201.275	134.440.216.371	144.677.507.599	155.698.023.169
	- Pajak Daerah	13.712.844.000	14.505.585.689	15.593.504.625	16.763.017.472	18.020.243.783	19.371.762.066
	- Retribusi Daerah	5.315.801.100	12.265.364.000	13.185.266.300	14.174.161.273	15.237.223.368	16.380.015.121
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	5.075.232.597	5.100.000.000	5.610.000.000	6.171.000.000	6.788.100.000	7.466.910.000
	- Lain2 Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	84.811.416.317	84.224.586.372	90.541.430.350	97.332.037.626	104.631.940.448	112.479.335.982
B.	Dana Perimbangan	1.138.073.082.431	1.127.878.194.000	1.164.446.632.700	1.202.432.383.986	1.233.065.611.062	1.264.639.762.261
	- Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	18.097.698.530	22.540.647.000	24.794.711.700	27.274.182.870	30.001.601.157	33.001.761.272
	- DAU	853.086.114.000	838.100.134.000	859.052.637.350	880.528.953.284	902.542.177.116	925.105.731.544
	- DAK	266.889.269.901	267.237.413.000	280.599.283.650	294.629.247.833	300.521.832.789	306.532.269.445
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	210.952.480.374	210.927.145.746	251.283.086.739	258.053.294.643	294.327.046.707	337.447.694.562
	- Pendapatan Hibah	19.000.000.000	9.000.000.000	9.363.600.000	9.550.872.000	9.741.889.440	9.926.727.229
	- Bagi Hasil Pajak Propinsi	52.656.790.000	50.521.191.746	75.817.622.739	53.597.932.323	55.205.870.293	56.862.046.402
	- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	117.965.690.000	151.405.954.000	141.558.828.000	169.870.593.600	203.844.712.320	244.613.654.784
	- Bantuan Keuangan dari Propinsi	21.330.000.000	0	24.543.036.000	25.033.896.720	25.534.574.654	26.045.266.147
	Belanja Tidak Langsung	1.065.494.012.875	960.954.398.241	995.113.457.587	1.047.713.407.194	1.108.118.703.318	1.176.487.274.317
1	Belanja Pegawai	840.217.673.506	699.336.395.742	713.323.123.657	727.589.586.130	742.141.377.853	756.984.205.410
2	Belanja Bunga	2.810.847.752	9.000.000.000	5.116.767.857	2.558.383.929	1.279.191.964	639.595.982
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	13.748.440.000	11.983.300.000	2.756.250.000	2.849.062.500	3.038.765.625	3.190.703.906
5	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000	255.025.000	257.575.250	260.151.000	262.752.513
6	Belanja Bantuan Keuangan	2.036.077.534	4.266.008.558	2.443.293.041	2.931.951.649	3.518.341.979	4.222.010.375
7	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	205.043.594.583	233.668.693.941	268.718.998.032	309.026.847.737	355.380.874.898	408.688.006.132
8	Belanja Tidak Terduga	1.437.379.500	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	Belanja Langsung	614.829.672.166	619.182.571.989	568.942.506.359	581.347.402.431	594.268.952.789	605.634.937.375
1	Belanja Pegawai	57.284.282.531	72.061.914.342	41.228.540.174	42.765.396.379	43.348.358.271	44.948.809.019

No	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
2	Belanja Barang dan Jasa	273.549.058.000	261.603.088.164	227.920.518.228	228.316.544.139	230.141.859.509	329.037.175.871
3	Belanja Modal	283.996.331.635	285.517.569.483	299.793.447.957	310.265.461.913	320.778.735.009	231.648.952.485
Total		1.680.323.685.041	1.580.136.970.230	1.564.005.963.946	1.629.060.809.626	1.702.387.656.107	1.782.122.211.692
C	Pembiayaan Pengeluaran	20.785.000.000	52.188.000.000	55.771.200.000	58.518.320.000	46.584.694.000	34.108.928.700
1	Pembentukan dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.785.000.000	23.888.000.000	27.471.200.000	30.218.320.000	32.484.694.000	34.108.928.700
3	Pembayaran Pokok Utang	0	28.300.000.000	28.300.000.000	28.300.000.000	14.100.000.000	0
4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
Total (A+B+C)		1.143.563.295.406	1.085.204.312.583	1.092.113.197.761	1.148.997.123.573	1.198.051.755.589	1.255.545.012.036

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya, Dana Perimbangan diproyeksikan akan dapat tumbuh setiap tahunnya yang terdiri dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU, DAK dan DAK Non Fisik. Sedang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Dana Hibah, Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Dana Penyesuaian Otonomi Khusus.

Tabel di atas juga memperlihatkan proyeksi belanja daerah selama periode 2016-2021. Sesuai dengan asumsi proyeksi pendapatan, maka proyeksi belanja tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk membiayai belanja tersebut. Secara nominal kelihatan masih besar belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung, hal ini disebabkan karena pada komponen belanja tidak langsung terdapat belanja pegawai, belanja bantuan keuangan yang harus dipenuhi sebesar 10% dan belanja Hibah. Hasil perhitungan ini belum mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari daerah ke propinsi atau pusat.

Tabel di atas menggambarkan proyeksi surplus/ defisit, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa setiap tahun diproyeksikan mengalami defisit karena belanja lebih besar dari pendapatan, namun dapat ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).

Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah seperti Bank Nagari, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penyertaan modal merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan merupakan komponen pengeluaran pembiayaan.

SILPA diproyeksikan setiap tahun mengalami penurunan, diharapkan terdapat penurunan sebagai implementasi serapan anggaran semakin tinggi. Dan diharapkan menutup defisit akibat dari belanja lebih besar dari pendapatan serta pengeluaran pembiayaan yang merupakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah serta pembayaran pokok Utang pada PIP/SMI.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicapai Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode 2010 – 2015 serta perubahan peraturan yang berlaku khususnya tentang pajak dan retribusi daerah dan perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Tabel 3.8
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Proyeksi				
		2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)
1	PENDAPATAN	1.454.900.875.816	1.540.659.920.714	1.594.925.895.000	1.672.070.165.368	1.757.785.479.991
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	SiLPA	114.386.709.414	102.948.038.473	92.653.234.625	76.902.184.739	58.445.660.402
	Total Penerimaan	1.569.287.585.230	1.619.827.163.946	1.687.579.129.626	1.748.972.350.107	1.816.231.140.393
	Dikurangi					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.085.204.312.583	1.092.113.197.761	1.148.997.123.573	1.198.051.755.589	1.255.545.012.036
5	Kapasitas riil kemampuan keuangan	484.083.272.647	527.713.966.185	538.582.006.052	550.920.594.518	560.686.128.356

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan



PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 - 2021



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Empat Masalah Pokok Daerah

Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Pesisir Selatan daerah maju, sejahtera dengan basis ekonomi pangan dan pariwisata, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dihadapkan pada masalah pokok yaitu: (1). Masih rendahnya daya saing daerah, (2) Menurunnya pemahaman nilai-nilai adat dan agama dalam masyarakat (3) daerah rawan bencana (4) Masih lemahnya sendi-sendi perekonomian daerah.

Rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah rendah saat sumber daya manusia dan produk hasil bumi serta olahan dari Kabupaten Pesisir Selatan kalah saat bersaing dengan manusia dan produk-produk dari daerah lain. Dengan kata lain *competitive advantage* daerah relatif rendah sehingga sulit berkompetitif di era persaingan global. Globalisasi dan era digital menuntut sumber daya manusia yang unggul dan kreatif serta mampu membuat terobosan-terobosan baru. Di era ini kita dituntut tidak hanya menawarkan produk namun lebih dari itu kita mesti mampu menawarkan solusi. Untuk itu menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan generasi yang berdaya saing terlebih dalam menyongsong bonus demografi yang sebentar lagi akan kita hadapi.

Lunturnya pemahaman nilai-nilai adat dan agama dalam masyarakat. Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian dari masyarakat minang kabau yang terkenal religius dan teguh memegang adat istiadat saat ini dihadapkan dengan tantangan yang berat. Seiring dengan perubahan zaman maka generasi saat ini tengah mengalami pergeseran nilai-nilai khususnya terkait adat, budaya dan agama. Sehingga falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi kearifan lokal masyarakat minang kabau saat ini semakin tergerus oleh zaman. Akibatnya pemahaman dan pengamalan prinsip ABS-SBK dalam masyarakat semakin menurun dan semakin

mengkhawatirkan. Lembaga adat dan agama sebagai supra struktur sosial dalam masyarakat seolah-olah kehilangan peran fungsi.

Daerah rawan bencana. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah pesisir pantai yang membentang sepanjang 234,2 km di pesisir barat pulau Sumatera. Posisi daerah yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia serta letak geografis wilayah yang berada dekat patahan lempeng bumi dan jalur cincin api, menyebabkan Kabupaten Pesisir Selatan sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan gelombang tsunami. Di belahan timur kabupaten, membentang gugusan bukit barisan yang kaya akan sumber air yang mengalir melalui sungai-sungai besar. Topografi daerah yang berbukit-bukit dengan jenis tanah cenderung labil menyebabkan ancaman bencana longsor dan banjir menjadi permasalahan rutin yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Belum lagi pada beberapa kawasan hutan dengan tanah bergambut yang sering menimbulkan ancaman kebakaran hutan di setiap musim kemarau.

Lemahnya sendi-sendi perekonomian daerah. Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Daerah belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud (tangible) maupun bersifat non-fisik (intangible), bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu semangat dan paradigm baru dalam memperbaiki tata kelola daerah melalui pembangunan yang berkualitas melalui transformasi ekonomi daerah. Tidak ada pilihan lain selain melakukan transformasi ekonomi yang selama ini sangat bergantung pada sektor tradisional untuk beralih ke sektor industry dan jasa

4.1.2. Permasalahan Sektoral Daerah

Terdapat beberapa permasalahan dan kendala dalam pembangunan yang sifatnya strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Permasalahan tersebut antara lain:

a. Urusan Pendidikan

Untuk urusan pendidikan, saat ini masih menghadapi tantangan berupa belum tuntasnya program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang terindikasi dari rata-rata lama sekolah masih 8,13 tahun. Selain itu, akses terhadap layanan pendidikan masih belum terwujud secara maksimal yang terindikasi dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun masih 90,18%. Dengan demikian masih 10% usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar. Dan hal yang tak kalah pentingnya adalah masih kurangnya jumlah dan kualitas SDM tenaga pendidik sehingga berimbas pada rendahnya daya saing siswa.

b. Urusan Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga medis yang terbatas masih menjadi kendala yang utama dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Rasio rumah sakit persatuan penduduk (1:450.186) serta rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk (1:25.000) mencerminkan masih kurangnya sarana layanan kesehatan tersebut. Keterbatasan Sumber Daya Kesehatan (SDK) menjadi faktor penghambat lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah alat kesehatan yang terbatas, masih kurangnya tenaga penunjang medis serta jumlah tenaga medis dan jumlah dokter spesialis menyebabkan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan irigasi yang saat ini banyak mengalami kerusakan sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi masyarakat. Perlu intervensi dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Pesisir Selatan yang membutuhkan investasi yang sangat besar.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Saat ini masih terdapat rumah tangga yang mendiami rumah tidak layak huni. Selain itu masih diperlukan perhatian khusus terhadap pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat yang saat ini masih belum optimal..

e. Sosial

Masih terbatasnya akses pelayanan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta belum optimalnya pemanfaatan data terpadu dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam penanganan masalah sosial serta kinerja Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis menyelenggarakan urusan sosial belum mampu menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawanan secara signifikan.

f. Urusan Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi tenaga kerja yang rendah mencerminkan rendahnya daya saing tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan masih rendahnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi ini maka berarti terbatas pula jumlah kesempatan kerja yang ada.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Adanya kecenderungan penurunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masalah ini terindikasi dari swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang semakin rendah. Hal ini diduga salah satunya disebabkan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat belum berjalan sebagaimana seharusnya.

h. Urusan Perhubungan

Saat ini ketersediaan moda transportasi publik yang layak dan nyaman di Pesisir Selatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Hal ini terlihat dengan masih maraknya transportasi tanpa izin seperti travel liar, ojek dan becak motor

i. Urusan Penanaman Modal

Keinginan investor untuk melakukan investasi di Pesisir Selatan masih rendah. Hal ini terkait dengan masih minimnya ketersediaan infrastruktur, regulasi, sarana dan prasarana pendukung bagi berinvestasi.

j. Urusan Perpustakaan

Budaya baca dan literasi masyarakat yang masih belum baik. Hal ini ditandai dengan rendahnya daya baca masyarakat. Karena itu perlu gerakan terpadu untuk menggalakan budaya literasi dan budaya baca masyarakat semenjak usia dini.

k. Urusan Perikanan

Sebagian besar masyarakat yang bermata pencarian sebagai nelayan adalah masyarakat miskin dan tidak masuk dalam kelompok. Sementara paket bantuan yang diberikan biasanya diserahkan kepada kelompok. Maka tentu saja nelayan miskin tersebut jarang mendapatkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Kesulitan benih pada pembudidaya serta harga pakan yang relatif mahal. Selain itu, nilai tambah dari komoditi perikan juga masih rendah karena sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk barang mentah.

l. Urusan Pariwisata

Secara umum pada urusan pariwisata menghadapi tantangan berupa terbatasnya sarana dan prasarana pendukung wisata, belum adanya sinergitas antara sector-sektor produktif dengan sektor pariwisata, disamping masih belum berkembangnya ekonomi kreatif. Untuk mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan peran serta aktif masyarakat dan pihak swasta karena

terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah baik secara finansial maupun SDM.

m. Urusan Pertanian

Terbatasnya penguasaan teknologi budidaya dan pasca panen oleh petani menyebabkan nilai produksi dan produktifitas komoditi hasil pertanian masih relatif rendah. Untuk mempercepat desiminasi teknologi ke petani masih terkendala oleh keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian.

n. Urusan Perdagangan

Keberadaan sebagian pasar rakyat yang kondisinya memprihatinkan dan jauh dari kenyamanan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah. karena itu, program revitalisasi pasar rakyat akan menjadi prioritas Pemerintah daerah pada tahun 2016-2021

4.2. Isu-Isu Strategis Daerah

Analisa lingkungan strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi Pesisir Selatan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun mendatang (2016-2021). Identifikasi dan analisa lingkungan internal Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun mendatang (2016-2021). Berdasarkan analisa isu strategis dan juga mempertimbangkan dan memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian 17 Goals of Sustainable Development Goals (SDGs), maka dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penataan dan kualitas penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik.

Kualitas penyelenggaraan pemerintah dapat tercermin dari transparansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk meningkatkan transparansi perlu didukung oleh penggunaan teknologi secara optimal. Perlu peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government). Dengan penyelenggaraan e-government maka pihak-pihak berkepentingan akan dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah dengan mudah, murah, cepat dan transparan. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan dasar

Semangat otonomi daerah tidak hanya dimaknai dengan peningkatan kewenangan daerah dalam mengatur pemerintahannya namun juga terkandung di dalamnya semangat peningkatan layanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu pemerintah kabupaten pesisir selatan berkomitmen untuk lebih meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat guna terpenuhinya standar pelayanan minimum terutama terkait urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu pelayanan Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sosial. Untuk memberi nilai tambah lebih bagi masyarakat, komitmen pemenuhan layanan juga mencakup terhadap hak-hak sipil masyarakat khususnya terkait dokumen kependudukan dan pencatan sipil.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Manusia merupakan sentral dari pembangunan. Hakikat dari pembangunan adalah mengubah suatu kondisi menuju kondisi yang lebih baik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang nota bene adalah manusia

yang berperan sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri. Namun terkadang sering terjadi fokus perhatian pada pembangunan pada infrastruktur fisik menjadikan kita abai terhadap pembangunan manusia itu sendiri. Tantangan ke depan makin berat karena era revolusi industri 4.0 telah semakin memperlihatkan eksistensinya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur maupun masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pembangunan manusia di Kabupaten Pesisir Selatan akan diarahkan kepada penumbuhan SDM yang memiliki kompetensi, berkarakter, kreatif, inovatif, sehat lahir dan batin serta mampu beradaptasi dengan masyarakat global. Untuk itu, peran dari sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan menjadi sangat strategis.

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah

Peningkatan kemandirian ekonomi dapat dilakukan dengan menemukani sumber-sumber potensi sumber daya lokal yang ada. Potensi ekonomi kreatif cukup besar untuk diolah secara lebih intensif. Peningkatan perekonomian akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup.

Peningkatan kemandirian ekonomi ini dapat dilakukan melalui pengembangan berbagai sektor, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lain-lain. Potensi pengembangan ekonomi melalui pariwisata mempunyai daya ungkit yang cukup besar dengan didukung sektor pertanian, perdagangan dan industri kreatif untuk peningkatan kesejahteraan. Selain itu, penguatan kapasitas ekonomi mikro kecil juga harus menjadi fokus perhatian sehingga diharapkan semakin banyak tumbuh wirausaha-wirausaha kreatif dan mandiri.

5. Meningkatkan penataan dan penyediaan infrastruktur daerah

Penataan dan penyediaan infrastruktur baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial merupakan aspek utama dalam peningkatan dan

pemerataan pembangunan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan yang utama untuk menggerakkan roda perekonomian. Penyediaan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, drainase dan pengolahan limbah sangat penting sebagai penunjang perekonomian. Penyediaan Infrastruktur sosial seperti prasarana pelayanan sosial juga sangat penting dalam upaya penurunan kemiskinan.

6. Meningkatkan pengamalan agama dan nilai-nilai kearifan lokal

Perubahan sikap mental dan budaya masyarakat, revitalisasi kelembagaan agama dan kelembagaan sosial masyarakat sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya akan dapat dicapai melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini sangat penting dalam mencegah merebaknya kenakalan remaja, penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkoba terutama dikalangan generasi muda sebagai penerus bangsa.

7. Penurunan angka kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 merupakan keempat tertinggi setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman. Secara posisi relatif, tingkat kemiskinan Pessel berada diatas propinsi dan dibawah nasional. Penurunan tingkat kemiskinan ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun penurunan tersebut mengalami perlambatan.

Kecenderungan kemiskinan di Kabupaten. Pesisir Selatan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya rendahnya kemampuan, kurangnya kesempatan, kurangnya jaminan serta kurang berdaya. Untuk itu perlu upaya-upaya yang lebih intensif, koordinatif, dan komprehensif guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.

8. Mitigasi dan penanggulangan bencana

Kabupaten Pesisir Selatan sangat rawan terhadap berbagai bencana, sehingga kondisi ini berpotensi menghambat atau mengganggu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena secara

psikologis akan memberikan sentimen negatif terhadap investasi. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut perlu perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat terhadap upaya-upaya mitigasi dan manajemen kebencanaan. Upaya mitigasi dan manajemen bencana lebih berfokus pada penyiapan seluruh stakeholder untuk selalu siaga dan tanggap terhadap bencana disamping juga penguatan terhadap upaya-upaya tanggap darurat serta pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana.

9. Pengarusutamaan gender

Kesenjangan gender tampak terjadi di berbagai bidang pembangunan. Dalam bidang pendidikan, misalnya, menurut Susenas 1997 diperoleh data, penduduk perempuan yang berpendidikan tinggi sekitar 2,7%, lebih sedikit ketimbang laki-laki yang mencapai 3,34%. Selain itu, representasi penduduk perempuan yang buta huruf mencapai 14,46%, sementara laki-laki hanya 6,6%. Dalam Susenas 1999. Untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah atau lebih dikenal dengan pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki:

- memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan;
- berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan;
- mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan
- memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan

Isu pemanasan global seolah menyadarkan kita bahwa pembangunan yang kita lakukan hendaknya memperhatikan proses keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Untuk keperluan pembangunan kita terus mengeksploitasi sumber daya alam dengan membabi buta dan abai akan keberlangsungan hidup anak cucu di masa yang akan datang.

Karena itu, tak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam setiap aktifitas yang kita lakukan sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terus dipelihara. Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup harus menjadi isu utama dalam pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan berbasis daya dukung dan daya tampung



PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 - 2021



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi RPJMD 2016-2021

Visi Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR
SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN
SEJAHTERA”.**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Mandiri** : kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul** : masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis** : suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera** : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 (sebelum perubahan) terdapat proyeksi dan asumsi indikator makroekonomi dan kesejahteraan sosial sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Proyeksi Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021(sebelum perubahan)

No	Indikator	Baseline	Proyeksi					
		-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kapasitas Fiskal	0.33	0.49	0.58	0.69	0.77	0.85	1.01
2	IPM	68,07	68.68	69.3	69.92	70.55	71.19	71.83
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,73	5,89	6,08	6,27	6,46	6,64	6,82
5	PDRB harga konstan (Rp.Triliun)	7,82	8,28	8,76	9,31	9,92	10,57	11,30
6	PDRB Harga Berlaku (Rp.Triliun)	9,94	11,03	12,25	13,60	15,09	16,76	18,61
7	Tingkat Pengangguran (%)	11,69	9,58	5,95	5,70	5,50	5,30	5,00
8	Tingkat Kemiskinan (%)	7,70*	7,62	7,47	7,01	6,57	6,15	5,75

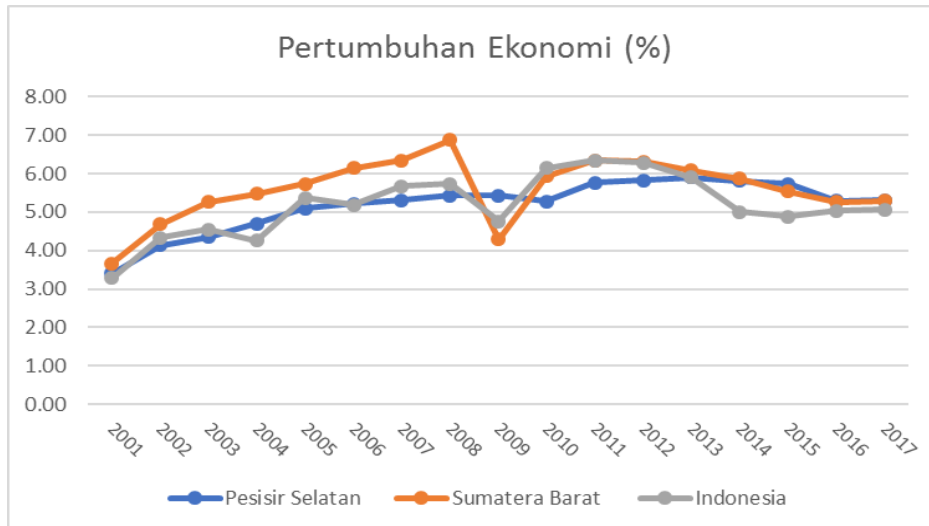
Mengamati realisasi pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan sendiri yang relatif lebih rendah dari target, perlu dilakukan penyesuaian terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut. Pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2014 mengalami perlambatan. Perlambatan tersebut berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat termasuk Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga proyeksi yang terdapat dalam RPJMD sudah tidak relevan lagi dan perlu direvisi.

Pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan dalam dua dekade terakhir umumnya mengikuti trend pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat. Jika terjadi perlambatan perekonomian nasional, maka biasanya juga terjadi perlambatan perekonomian daerah. Diagram di bawah memperlihatkan kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan sejak tahun 2013 hingga sekarang. Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan yang dialami secara nasional.

Meskipun demikian, terlihat mulai adanya perbaikan pertumbuhan mulai tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan hingga 2015, lalu mulai meningkat lagi di tahun 2016 dan 2017. Sementara itu perekonomian Sumatra Barat (termasuk Pesisir Selatan) mulai mengalami peningkatan pertumbuhan di tahun 2017. Diperkirakan akan terjadi peningkatan pertumbuhan

di tahun 2018 dan seterusnya. Namun peningkatan tersebut diperkirakan tidak sampai melebihi 6%.

Diagram 5.1
Tren Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumbar dan
Pesisir Selatan Tahun 2001 - 2017



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pesisir Selatan	3.40	4.14	4.35	4.70	5.10	5.22	5.31	5.42	5.44	5.28	5.77	5.82	5.9	5.81	5.73	5.3	5.31
Sumatera Barat	3.66	4.69	5.26	5.47	5.73	6.14	6.34	6.88	4.28	5.94	6.34	6.31	6.08	5.88	5.53	5.27	5.29
Indonesia	3.29	4.34	4.55	4.26	5.37	5.19	5.67	5.74	4.77	6.14	6.35	6.28	5.90	5.01	4.88	5.03	5.07

Sumber: BPS diolah

Pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan pada tahun 2018 sampai 2020 diperkirakan hanya pada level 5,5% dan meningkat sedikit ke 5,6% pada tahun 2021. Proyeksi tersebut berbasis kepada pertumbuhan sektor-sektor perekonomian. Proyeksi pertumbuhan dibawah 6% tersebut didasarkan kepada relatif rendahnya pertumbuhan sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan.

Meskipun demikian, terdapat sektor yang diperkirakan tumbuhan di atas 6%, antara lain sektor perdagangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, dan sektor informasi dan komunikasi. Pertumbuhan tersebut tentunya akan mengadakan pertumbuhan pariwisata. Sementara itu sektor konstruksi dan jasa-jasa yang juga diperkirakan tumbuh di atas 6% didorong oleh permintaan terhadap jasa dan pertumbuhan penduduk.

Berbasis pada analisis dan proyeksi pertumbuhan sektor-sektor, maka dilakukan penghitungan ulang dan penyesuaian terhadap proyeksi beberapa indikator makro yang lebih realistis. Hasil penyesuaian terseaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Proyeksi Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021(Hasil Penyesuaian)

No	Indikator	Baseline	Realisasi		Target			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kapasitas Fiskal	0,33	0,49	0,58	0,69	0,77	0,85	1,01
2	IPM	68,07	68,39	68,74	69,55	70,07	70,58	71,10
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,73	5,30	5,33	5,47	5,50	5,53	5,59
5	PDRB harga konstan (Rp.Triliun)	7,82	8,28	8,67	9,15	9,66	10,20	10,78
6	PDRB Harga Berlaku (Rp.Triliun)	9,86	10,69	12,52	12,82	14,05	15,76	16,71
7	Tingkat Pengangguran (%)	11,69	9,44*	5,95	5,89**	5,70	5,60	5,50
8	Tingkat Kemiskinan (%)	8,46	7,92	7,79	7,18	6,85	6,52	5,19

Keterangan: *) = angka proyeksi karena tidak ada publikasi BPS tahun 2016 terkait pengangguran

***) = realisasi 2018

Sumber data: Data diolah

5.2. Misi RPJMD 2016 - 2021

Misi pembangunan 2016-2021 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi 2021 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera. Misi pembangunan 2016-2021 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan. Usaha-usaha Perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut.

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Penjelasan masing-masing Misi :

1. Misi Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu : (1) reformasi birokrasi, (2) SDM yang bersih dan responsif dan (3) peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi yang dimaksud dalam misi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju aparatur yang bersih dan responsif dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang termasuk mengenai besaran anggaran pembangunan.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dimaksud dalam misi ini adalah upaya pemerintahan daerah untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti kependudukan (akta kelahiran, KTP, KK), dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya.

Capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan misi ini adalah terciptanya sumber daya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi. Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting. SDM berkualitas hanya dapat terbentuk dengan kondisi kesehatan prima. Kesehatan yang prima tentunya akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berbuat lebih banyak dan lebih produktif.

2. Misi Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu infrastruktur perekonomian, infrastruktur sosial dan sektor unggulan daerah.

Infrastruktur perekonomian yang dimaksud pada misi ini adalah pembangunan infrastruktur fisik untuk mendukung kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat dalam mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis. Pembangunan infrastruktur perekonomian menggunakan prinsip berkelanjutan melalui penerapan infrastruktur hijau sehingga manfaatnya tidak hanya untuk kekinian tetapi juga masa yang akan datang (pembangunan infrastruktur tidak bertabrakan dengan lingkungan dan ekosistem)

Infrastruktur sosial yang dimaksud dalam misi ini adalah infrastruktur terkait kebutuhan sosial masyarakat diantaranya infrastruktur pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi termasuk infrastruktur non fisik dalam bentuk kelembagaan dan sistem yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Sektor unggulan daerah yang dimaksud dalam misi ini adalah perekonomian masyarakat yang memberikan kontribusi PDRB terbesar (sektor unggulan) yaitu pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta industri pengolahan.

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.

Misi ini mengandung dua kata kunci yaitu (1) mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dan (2) mengembangkan nilai budaya ABS-SBK.

Yang dimaksud dengan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dalam misi ini adalah adanya saling menghargai dalam hal membangun hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia.

Yang dimaksud dengan nilai budaya ABS-SBK merupakan perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara yang menjadi nilai substantif dalam pelaksanaan pembangunan. Nilai substantif tersebut yakni nilai *kebenaran, kejujuran, keadilan* yang indikator pengamalannya terekam dalam praktek ibadah, pola pandang dan karakter masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu (1) meningkatkan produksi; (2) peningkatan nilai tambah; dan (3) pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan produksi yang dimaksud dalam misi ini adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, serta peternakan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dapat dicapai melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien dan skala ekonomi, dengan cara diantaranya:

(1). Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi yang digunakan; (2). Ekstensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara memperluas atau menambah faktor produksi; (3). Diversifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis dan keanekaragaman produksi; dan (4). Rasionalisasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan nilai tambah yang dimaksud dalam misi ini meliputi peningkatan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, serta pariwisata. Peningkatan nilai tambah dikategorikan menjadi dua yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Nilai tambah pengolahan meliputi kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja. Nilai tambah untuk pemasaran meliputi harga output produksi, upah tenaga kerja, harga bahan baku dan nilai input selain bahan baku dan tenaga kerja. Peningkatan nilai tambah dapat dicapai melalui (1) Meningkatkan mutu produksi dengan mengolah produk menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi; (2). Menumbuhkan unit-unit pengolahan dan pemasaran produksi; (3). Mengefisiensikan biaya pengolahan; dan (4). Memperpendek mata rantai pemasaran.

Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dalam misi ini adalah dalam rangka mewujudkan transformasi struktur ekonomi melalui peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah yang secara terus menerus dari hulu sampai hilir dengan pengembangan Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Misi kelima memuat dua kata kunci yaitu (1) peran struktur sosial; dan (2) pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang

Peran struktur sosial yang dimaksud dalam misi ini merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku dalam masyarakat. Peran struktur sosial ditujukan untuk memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis.

Pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan indikator berfungsinya peran struktur sosial. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

5.3. Tujuan Dan Sasaran

5.3.1 Tujuan

Memperhatikan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan di atas, maka tujuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode 2016-2021 adalah :

Misi Pertama	: Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi pertama adalah :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja.

Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang ditargetkan tahun 2021 berkategori Baik dengan target skor sebesar 61.

Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi kedua adalah :

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan berkualitas.

Keberhasilan tujuan ini direpresentasikan dari indikator kinerja yaitu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan yang ditargetkan tahun 2021 sebesar 5,59 persen.

Misi Ketiga : Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ketiga adalah :

Terwujudnya perubahan sikap mental masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial dan budaya

Keberhasilan tujuan ini direpresentasikan dari dua indikator kinerja yaitu:

Penurunan kasus konflik antar aliran kepercayaan yang ditargetkan tahun 2021 hanya terjadi 1 (satu) potensi konflik.

Misi Eempat : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mendedepankan pembangunan berkelanjutan

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi keempat adalah :

Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing.

Keberhasilan tujuan ini direpresentasikan dari indikator kinerja yaitu nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHB) yang ditargetkan tahun 2021 sebesar Rp. 16,71 trilyun atau PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) yang ditargetkan tahun 2021 sebesar Rp. 10,78 trilyun.

Misi Kelima : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi kelima adalah :

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan taat hukum.

Keberhasilan tujuan ini direpresentasikan dari indikator kinerja yaitu penurunan angka kriminalitas yang ditargetkan tahun 2021 kecil dari 6,77 persen.

5.3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Misi Pertama : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi pertama adalah :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja, serta pelayanan publik yang prima.

Sasaran:

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang berkinerja, akuntabel dan bebas KKN.
- b. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar.

Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi kedua adalah :

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan berkualitas.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan.
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial secara berkelanjutan dan menurunkan ketimpangan.

Misi Ketiga : Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ketiga adalah :

Terwujudnya perubahan sikap mental masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial dan budaya

Sasaran :

- a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama.
- b. Lestarnya nilai-nilai adat dan budaya daerah.

Misi Keempat : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi keempat adalah :

Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing.

Sasaran :

- a. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan
- b. Meningkatnya peran pengolahan dan pemasaran terhadap ekonomi daerah
- c. Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi Utama Wisata Bahari di Sumatera Barat

Misi Kelima : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi kelima adalah :

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan taat hukum.

Sasaran :

- a. Terwujudnya peran pemerintah dan struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat.
- b. Meningkatnya kapasitas organisasi dan kelembagaan masyarakat.

Selanjutnya indikator dan target kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 untuk setiap misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5.3
Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Capaian		Target			Kondisi Akhir (2021)	
						2016	2017	2018	2019	2020		
VISI:												
MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA												
1	Misi 1: Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat											
1.1		<u>Tujuan 1.1</u> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	n/a							61
		<u>Sasaran 1.1.1</u> Terwujudnya Pemerintahan yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN	1. Penilaian LKD (opini BPK)	tanpa satuan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	C	CC	B	BB	BB	BB	BB	A
			3. Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3006	3037	3130	3180	3230	3300	3350	
			4. Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	2	2	2	3	3	3	4	
		<u>Sasaran 1.1.2</u> Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan masyarakat	tanpa satuan	n/a	C	B	B	B	B	B	
			2. Umur Harapan Hidup	tahun	69,96	70,11	70,23	70,30	70,40	70,50	70,60	
			3. Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,11	8,12	8,40	8,43	8,46	8,49	8,52	

No	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Capaian		Target			Kondisi Akhir (2021)
						2016	2017	2018	2019	2020	
			4. Harapan Lama Sekolah	tahun	n/a	13,34	13,40	13,46	13,52	13,58	13,64
			5. Peringkat UN Sekolah Dasar se Sumbar	-		19	18	Lima besar	Lima besar	Tiga besar	Tiga besar
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah											
2.1		Tujuan 2.1 Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan berkualitas	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	5,73						5,6
		Sasaran 2.1.1: Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan	Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)	tanpa satuan	5,61	6,10	5,95	5,90	5,85	5,80	5,75
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial Secara Berkelanjutan dan Menurunkan Ketimpangan	1. Gini Rasio	tanpa satuan	0,4	0,35	0,3	0,28	0,26	0,25	0,25
			2. Persentase akses sanitasi layak	persen	62,70	63,76	63,80	73,13	74,68	75,16	75,29

No	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Capaian		Target			Kondisi Akhir (2021)
						2016	2017	2018	2019	2020	
			3. Persentase penduduk berakses air minum/bersih	persen	81,63	85,37	89,29	91,02	92,47	96,16	97,71
			4. Rasio rumah layak huni	Tanpa satuan	n/a	n/a	0,2134	0,2173	0,2211	0,2233	0,2255
3	Misi 3: Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK										
3.1.		<u>Tujuan 3.1:</u> Terwujudnya perubahan sikap mental masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial dan budaya	Penurunan kasus konflik antar aliran kepercayaan	Kasus tahun	8						1
		<u>Sasaran 3.1.1:</u> Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	1. Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif	%	n/a	22,30	65,62	67,58	69,55	71,51	73,48
			2. Persentase potensi zakat yang dikelola BAZ	%	65	70	75	80	85	90	95
		<u>Sasaran 3.1.2:</u> Lestarinya Nilai-Nilai Adat dan Budaya Daerah	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Gotong-Royong	tanpa satuan	n/a	n/a	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi

No	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Capaian		Target			Kondisi Akhir (2021)
						2016	2017	2018	2019	2020	
			2. Jumlah Kekayaan Budaya yang dilestarikan	unit	0	0	1	2	4	5	6
4	Misi 4: Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan										
4.1		<u>Tujuan 4.1:</u> Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing	Nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHB)	trilyun Rp	9,87						16,71
		<u>Sasaran 4.1.1:</u> Meningkatnya produktifitas sektor pertanian/ perkebunan/ peternakan serta kelautan dan perikanan	Nilai PDRB Sektor Pertanian	trilyun Rp.	3,12	3,18	3,35	3,47	3,63	3,79	3,96
		<u>Sasaran 4.1.2:</u> Meningkatnya peran pengolahan dan pemasaran terhadap ekonomi daerah	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasar atas harga konstan)	%	8,06	8,80	8,93	9,03	9,13	9,23	9,33
			2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (harga konstan)	%	11,00	12,20	12,41	12,59	12,77	12,95	13,13
		<u>Sasaran 4.1.3:</u> Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi destinasi utama wisata bahari di	1. Jumlah kunjungan wisatawan	orang	2.001.600	2.201.680	2.401.750	2.601.800	2.801.850	2.901.900	3.002.000

No	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Capaian		Target			Kondisi Akhir (2021)
						2016	2017	2018	2019	2020	
		sumatera Barat	2. Lama tinggal wisatawan	hari	n/a	n/a	1,25	1,25	1,3	1,3	1,3
5	Misi 5: Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang										
5.1		<u>Tujuan 5.1:</u> Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan taat hukum	Penurunan angka kriminalitas	%	6,77						4,49
		<u>Sasaran 5.1.1:</u> Terwujudnya peran pemerintah dan struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat	1. Persentase penanganan kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparat	persen	n/a	70	75	85	100	100	100
			2. Persentase kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan	persen	70	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
		<u>Sasaran 5.1.2:</u> Meningkatnya kapasitas organisasi dan kelembagaan masyarakat	1 . Persentase Lembaga . Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	%	51,5	56,45	65,05	70,43	75,81	81,18	86,56
			2. Jumlah Dasa Wisma Maju	unit	n/a	n/a	470	545	645	720	870

Sumber data : data diolah, 2018



PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 - 2021



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Misi I : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja.

Sasaran 1: Terwujudnya Pemerintahan yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN

Strategi :

1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah
3. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah
4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi

Arah Kebijakan :

1. Mempertahan opini BPK
2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
3. Menciptakan perencanaan yang partisipatif, aplikatif dan terintegrasi
4. Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan fungsi perangkat daerah

Sasaran 2: Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Mempercepat dan memperdekat pelayanan bagi masyarakat

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dasar

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan di seluruh bidang
2. Mengupayakan pemekaran kabupaten, kecamatan dan nagari
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar serta rujukan
4. Meningkatkan upaya pencegahan penularan penyakit melalui promosi budaya hidup sehat
5. Memperluas akses dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah
6. Mengembangkan pendidikan non formal dan informal
7. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
8. Menyediakan bantuan beasiswa SMA dan Perguruan Tinggi

Misi II : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah

Tujuan : Terenuhinya kebutuhan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan

Strategi :

1. Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata
2. Pembangunan jaringan irigasi baru dan / atau peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang sudah
3. Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
4. Mengembangkan transportasi dan jaringan komunikasi
5. Penanganan pengurangan risiko bencana
6. Meningkatkan kenyamanan dan ketersediaan barang kebutuhan konsumen bertransaksi di pasar

Arah Kebijakan :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan
2. Membangun dan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada serta ditunjang dengan meningkatkan pengelolaan sistim irigasi partisipatif
3. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan
4. Menyediakan fasilitas terminal yang layak
5. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan
6. Pengembangan jaringan transportasi
7. Memantapkan manajemen penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana rakyat (*quick win*)

Sasaran 2 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial Secara Berkelanjutan dan Menurunkan Ketimpangan

Strategi :

1. Peningkatan akses layanan untuk sistem pengolahan limbah
2. Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih
3. Penataan kawasan kumuh perkotaan
4. Meningkatkan jumlah rumah layak huni

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan akses layanan air limbah domestik dan non domestik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan limbah
3. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum
4. Mempercepat pemerataan sarana dan prasarana di Pesisir Selatan
5. Meningkatkan pembangunan perumahan dan pemukiman

Misi III : Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK

Tujuan : Terwujudnya perubahan sikap mental masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial dan budaya

Sasaran 1: Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama

Strategi :

1. Meningkatkan pemahaman ajaran agama dan falsafah ABS-SBK
2. Penguatan Peran ulama, niniak mamak, bundo kanduang, cendikiawan dalam pengembangan dan penerapan nilai-nilai ABS-SBK

Arah Kebijakan :

1. Revitalisasi penerapan nilai-nilai ABS-SBK di masyarakat
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama, lembaga sosial keagamaan dan lembaga adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat
3. Peningkatan pelaksanaan event-event keagamaan, seni dan budaya

Sasaran 2: Lestarinya nilai-nilai adat dan budaya daerah

Strategi :

1. Pengarusutamaan gerakan kebudayaan yang dimulai dari anak usia sekolah dan generasi muda.
2. Menggalakkan budaya gotong-royong dalam masyarakat
3. Memberi sentuhan ekonomi kreatif terhadap kreasi adat dan budaya daerah.
4. Pengembangan Pusat Budaya Lokal

Arah Kebijakan :

1. Menggali ragam budaya daerah dan kearifan lokal masyarakat Pesisir Selatan.
2. Melaksanakan bulan bakti gotong-royong secara berkala.
3. Melestarikan kekayaan dan warisan budaya tak benda serta situs-situs sejarah di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Mempromosikan ragam kekayaan budaya Pesisir Selatan sampai ke dunia internasional.

Misi IV: Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan

Tujuan : Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing

Sasaran 1: Meningkatnya produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan

Strategi :

1. Mengembangkan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan menerapkan teknologi tepat guna.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan.

Arah Kebijakan :

1. Penguatan agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) yang mencakup: mesin, peralatan pertanian, pupuk, bibit dan lain-lain;
2. Pengembangan usaha tani/pertanian primer (*on-farm agribusiness*) yang mencakup usaha: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan;
3. Penguatan agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) yang meliputi: industri-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor;
4. Penguatan jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis) dalam bentuk perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
5. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
6. Peningkatan diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan

Sasaran 2 : Meningkatnya peran pengolahan dan pemasaran terhadap ekonomi daerah

Strategi :

1. Mengembangkan sentra industri pengolahan dan pusat perdagangan lokal
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan sentra IKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk
2. Pembangunan sentra IKM
3. Revitalisasi Pasar tradisional
4. Pembinaan Kelembagaan koperasi dan UMKM
5. Pengembangan kerjasama dan kemitraan koperasi dan UMKM dengan lembaga ekonomi lainnya

Sasaran 3: Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi Utama Wisata Bahari di Sumatera Barat

Strategi :

1. Mengembangkan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan kepariwisataan.
2. Memperkuat diferensi dan bauran pemasaran wisata.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan sarana penunjang pariwisata.
2. Perluasan jaringan promosi dan pemasaran wisata.
3. Pengembangan industri penunjang pariwisata.
4. Peningkatan kapasitas pelaku jasa wisata.
5. Memperbanyak jenis event-event wisata.

Misi V : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang

Tujuan : Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan taat hukum

Sasaran 1: Terwujudnya peran pemerintah dan struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat

Strategi:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengurangan gangguan trantibum, kejahatan dan kriminalitas
2. Memperkuat peran kelembagaan adat, pendidikan dan keagamaan dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat berolah raga dan mendukung olah raga berprestasi

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi trantibmastibum, kejahatan dan kriminalitas
2. Peningkatan peran LKAAM, KAN, dan MUI dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang
3. Peningkatan peran sekolah dan guru dalam mencegah penggunaan obat terlarang pada siswa.
4. Gerakan bugar berolah raga

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas organisasi dan kelembagaan masyarakat

Strategi :

1. Memperkuat peran kelembagaan pemberdayaan masyarakat disetiap nagari
2. Memperkuat peran serta keluarga dalam pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat berolah raga

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan pemahaman kelembagaan masyarakat terhadap fungsi strategisnya dalam pembangunan.

2. Peningkatan peran masyarakat sipil
3. Peningkatan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan
4. Pemasyarakat olahraga

Selanjutnya hubungan antara visi, misi tujuan, sasaran dan strategi dapat dilihat pada table 6.1

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Pesisir Selatan

VISI :		
”Terwujudnya Masyarakat kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri Unggul, Agamis dan Sejahtera”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat		
Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja.	Sasaran 1.1: Terwujudnya Pemerintahan yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN	1. Strategi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
		2. Strategi meningkatkan kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah
		3. Strategi memantapkan pelaksanaan otonomi daerah
	Sasaran 1.2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik
		2. Strategi mempercepat dan memperdekat pelayanan bagi masyarakat
		3. Strategi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		4. Strategi meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dasar

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah		
Tujuan 2: Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan berkualitas	Sasaran 2.1: Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan	1. Strategi meningkatkan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata
		2. Strategi pembangunan jaringan irigasi baru dan / atau peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang sudah ada
		3. Strategi tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
		4. Strategi mengembangkan transportasi dan jaringan komunikasi
		5. Strategi penanganan dan pengurangan resiko bencana
		6. Strategi penataan kawasan kumuh perkotaan
		7. Strategi meningkatkan kenyamanan dan ketersediaan barang kebutuhan konsumen bertransaksi di pasar
	Sasaran 2.2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial dan Menurunkan Ketimpangan	1. Strategi menumbuhkembangkan lembaga penunjang ekonomi

Misi 3 : Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS- SBK		
Tujuan 3: Terwujudnya perubahan sikap mental masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial dan budaya	Sasaran 3.1: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	1. Revitalisasi penerapan nilai-nilai ABS-SBK di masyarakat
		2. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama, lembaga sosial keagamaan dan lembaga adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat
		3. Peningkatan pelaksanaan event-event keagamaan, seni dan budaya
	Sasaran 3.1: Lestarinya nilai-nilai adat dan budaya daerah	1. Pengarusutamaan gerakan kebudayaan yang dimulai dari anak usia sekolah dan generasi muda.
		2. Menggalakkan budaya gotong-royong dalam masyarakat
		3. Memberi sentuhan ekonomi kreatif terhadap kreasi adat dan budaya daerah
4. Pengembangan Pusat Budaya Lokal		

Misi 4 : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan		
Tujuan 4: Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing	Sasaran 4.1: Meningkatnya produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan	1. Strategi mengembangkan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan menerapkan teknologi tepat guna
		2. Strategi meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan
	Sasaran 4.2: Meningkatnya peran pengolahan dan pemasaran terhadap ekonomi daerah	1. Strategi mengembangkan sentra industri pengolahan dan pusat perdagangan lokal
		2. Strategi Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan
	Sasaran 4.3: Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi Utama Wisata Bahari di Sumatera Barat	1. Strategi Mengembangkan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan kepariwisataan
		2. Memperkuat diferensi dan bauran pemasaran wisata
Misi 5 : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang		
Tujuan 5: Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan taat hukum	Sasaran 5.1: Terwujudnya peran pemerintah dan struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat	1. Strategi meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengurangan gangguan trantibmastibum, kejahatan dan kriminalitas

		2. Strategi memperkuat peran kelembagaan adat dan keagamaan dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang
	Sasaran 5.2: Meningkatnya kapasitas organisasi dan kelembagaan masyarakat	1. Strategi memperkuat kelembagaan dan jaringan serta kebijakan daerah yang responsif terhadap HAM
		2. Strategi mengembangkan pendidikan politik berbasis kearifan lokal
		3. Strategi meningkatkan kesadaran masyarakat berolahraga

6.2. Pelaksanaan Arah Kebijakan Tahunan.

Arah kebijakan pembangunan per tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Pesisir Selatan

Arah Kebijakan					
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Tahun 2016 merupakan tahun penyelesaian target dan capaian pembangunan yang belum tercapai pada tahun sebelumnya, dan pada tahun ini disusun RPJMD Tahun 2016-2021. Untuk lebih optimalnya pelaksanaan RPJMD 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RPJMD telah mempedomani Undang-undang Nomor 23 tahun	Fokus utamanya adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pembangunan diikuti dengan lanjutan pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan target RPJMD tahun 2017. Selanjutnya Pemerintah Daerah telah menginventarisir komoditi unggulan daerah yang akan dijadikan komoditi yang mempunyai daya saing dan menciptakan nilai tambah dalam pengembangan	Terjadinya peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi dan sosial budaya serta keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan sudah didasari dengan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya dengan kearifan local sebagai upaya	Munculnya kawasan-kawasan industri berskala rumah tangga dan industri kecil ssebagai upaya lanjutan peningkatan nilai tambah dari produk unggulan daerah. Peningkatan sektor ekonomi ini seiring dengan peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat dan peningkatan layanan terhadap investasi yang	Kebijakan pembangunan tahun ini tentunya lebih difokuskan pada upaya untuk melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi tahun sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 sudah terlaksananya pelayanan kepada masyarakat, berkembangnya perekonomian masyarakat dengan tetap mengedepankan	Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 untuk menyelesaikan target program yang belum dicapai. Pada tahun ini merupakan masa transisi kepemimpinan daerah karena kepala daerah sekarang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari tahun 2021. Dengan demikian arah

Arah Kebijakan					
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan melakukan sinkronisasi pelaksanaan RPJMD melalui pembentukan Organisasi Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tahun ini diharapkan menjadi awal yang sangat baik dalam hal terjadinya sinkronisasi perencanaan dengan organisasi pelaksana pembangunan serta sejalan dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.	ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Disamping itu, pemerintah juga mengupayakan peran struktur sosial lebih optimal dalam pembangunan	pembangunan mental dan reformasi birokrasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	mendukung perkembangan sektor pariwisata daerah. Pada tahun ini juga merupakan tahun evaluasi pertengahan RPJMD tahun 2016-2021 untuk mengetahui sejauhmana upaya yang dilakukan pemerintah terhadap target RPJMD serta permasalahan dan dapat merumuskan solusi yang efektif untuk menyelesaikan target RPJMD, dan tentunya dapat dilakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.	pembangunan berkelanjutan, meningkatnya peran serta masyarakat dan berkurangnya tingkat kriminalitas dan kejahatan ditengah-tengah masyarakat	pelaksanaan pembangunan yang sudah dipersiapkan dalam periode terakhir RPJMD 2016-2021 akan dilaksanakan oleh kepala daerah berikutnya.

6.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Rumusan visi dan misi kepala daerah untuk 5 tahun mendatang dijabarkan dan diimplementasikan secara operasional kedalam 10 prioritas pembangunan yang telah disinkronkan dengan Nawacita yang tertuang dalam RPJMN serta RPJMD Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Prioritas 1 : Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat;

Prioritas Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat diarahkan untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama serta menanamkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) harmonisasi dan toleransi hidup beragama, 2) sikap mental dan perilaku yang memiliki iman dan taqwa, 3) rasa cinta dan rasa memiliki terhadap budaya dan kearifan lokal, 4) penguatan peran lembaga adat dan lembaga agama, 5) pengamalan dan pemahaman terhadap ajaran agama.

Prioritas 2 : Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, salah satunya yaitu dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan untuk 5 tahun kedepan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan, infrastruktur dan mutu pendidikan. Melalui prioritas tersebut diharapkan akan terwujud: 1) peningkatan angka partisipasi pendidikan diantaranya, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah, 2) menerapkan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, 3) peningkatan kapasitas tenaga pendidik, 4) meningkatnya kualitas layanan pendidikan, 5) meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan, 6) meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, 7) terwujudnya pendidikan berkarakter.

Prioritas 3 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan;

Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan tatanan hidup masyarakat yang sehat dengan gizi seimbang, hal ini dapat terlaksana melalui upaya-upaya diantaranya peningkatan pelayanan, infrastruktur dan kualitas SDM kesehatan. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, 2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) perbaikan status gizi masyarakat, 4) menurunnya tingkat kematian ibu dan bayi, 5) meningkatnya angka harapan hidup, 6) meningkatnya pengendalian terhadap penyakit menular, 7) meningkatnya upaya penyehatan lingkungan.

Prioritas 4 : Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing;

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan pangan seperti beras masih sangat tinggi. Pemerintah berupaya agar ketergantungan tersebut dapat berkurang dengan melakukan kebijakan meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga dimaksudkan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat agar mengkonsumsi bahan pangan yang beranekaragam dan lebih bergizi. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi keanekaragaman pangan yang berbasis komoditi lokal, namun, potensi ini belum semuanya tergali secara optimal yang akhirnya berdampak pada upaya menambah nilai produk primer karena belum mencukupinya kapasitas produksi yang diolah menjadi barang industri. Untuk itu, dalam 5 tahun mendatang prioritas peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal diarahkan untuk mewujudkan: 1) meningkatnya daya saing produk industri pangan, 2) berkembangnya penganekaragaman konsumsi pangan dengan komoditi lokal, 3) penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 4) meningkatkan kesempatan kerja pada sektor industri pangan.

Prioritas 5 : Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata;

Prioritas peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk mengembangkan objek-objek wisata utama, strategis dan potensial seperti Kawasan Mandeh, Jembatan Akar, Carocok Painan, Batu Nago, Pasir Putih Kambang dan Mandeh Rubiah menjadi objek wisata yang menarik. Dengan pengembangan pariwisata ini diharapkan: 1) peningkatan perekonomian masyarakat, 2) tumbuh dan berkembangnya objek-objek wisata yang potensial, 3) terbukanya lapangan kerja di sektor pariwisata, 4) mewujudkan Pesisir Selatan sebagai tujuan wisata utama di Sumatera Barat, 5) pemasaran objek-objek wisata baik didalam maupun diluar negeri.

Prioritas 6 : Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis;

Prioritas pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada dikawasan pedesaan dan kawasan-kawasan potensial, yang memberikan nilai tambah kepada daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Melalui prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) terbangunnya infrastruktur publik, 2) adanya akses air bersih dan sanitasi, 3) munculnya kawasan strategis yang bernilai ekonomi, 4) meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Prioritas 7 : Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan;

Prioritas pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian dan daya dukung sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan sehingga potensi sumberdaya yang sudah ada dapat dipertahankan untuk usaha ekonomi masyarakat. Dengan prioritas ini diharapkan : 1) terbangunnya sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat, 2) terwujud konservasi sumberdaya alam, 3) pengendalian kerusakan lingkungan, 4) penurunan pencemaran lingkungan, dan 5) terpeliharanya kearifan lingkungan.

Prioritas 8 : Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka Pengangguran dan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar;

Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara intensif. Melalui prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran 2) terlaksananya program perlindungan sosial, 3) pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, 4) meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro, 5) meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Prioritas 9 : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima;

Prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima didalam pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Melalui reformasi birokrasi ini akan terwujud: 1) tata pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan bebas KKN, 2) terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, 3) terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 4) terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, dan 5) terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

Prioritas 10 : Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang.

Prioritas pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang diarahkan untuk memperkuat struktur sosial dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas serta peredaran obat-obat terlarang dilingkungan masyarakat. Diharapkan melalui prioritas ini akan terwujud : 1) kuatnya kelembagaan dan jaringan serta kebijakan daerah terhadap gender dan HAM, 2) pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha, 3) meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, 4) terciptanya keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat, 5) munculnya generasi muda yang mandiri dan berprestasi.

6.4. Penyelarasan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pesisir Selatan merupakan satu kesatuan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dokumen RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJMN Tahun 2015-2021 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Penyelarasan dokumen RPJMD Pesisir Selatan ini dilakukan terhadap 3 Dimensi prioritas pembangunan Nasional dan 10 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.3

Tabel 6.3
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Prioritas Pembangunan Nasional Berdasarkan 3 Dimensi Pembangunan	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan
1.	Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat a. Pendidikan b. Kesehatan c. Perumahan d. Mental dan Karakter	a. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat d. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	a. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat b. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat d. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang e. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima
2.	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan a. Kedaulatan Pangan b. Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan c. Kemaritiman dan Kelautan	a. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis b. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	a. Peningkatan ekonomi pangan berbasis ekonomi lokal yang berdaya saing b. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan c. Pengembangan kawasan

No	Prioritas Pembangunan Nasional Berdasarkan 3 Dimensi Pembangunan	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan
	d. Pariwisata dan Industri	c. Pengembangan kemaritiman dan kelautan d. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi e. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	perdesaan dan kawasan ekonomi strategis d. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan
3	Dimensi pemerataan dan kewilayahan a. Antar kelompok Pendapatan b. Antar wilayah: (Desa, Pinggiran, Luar Jawa, Kawasan Timur)	Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran

Sumber : RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

6.5. Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan dan Rencana Sistim Perkotaan

Rencana sistem perkotaan Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari dari 3 (tiga) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), 4 (empat) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan 18 (delapan belas) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). . Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan akan dilaksanakan, meliputi :

1. Pengembangan dan Penataan Pusat Kegiatan Lokal

A. PKL Kota Tapan

Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKL Tapan terdiri dari terminal regional B, pelabuhan laut regional/ lokal, pasar lokal, rumah sakit umum dari tipe B, serta prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum, tempat pembuangan akhir sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT).

Pengembangan PKL Kota Tapan yang dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan
- b. Pengembangan perumahan formal, swadaya dan PNS
- c. Peningkatan dan rehabilitasi pusat perdagangan di Pasar Tapan
- d. Pembangunan RS Tipe B Tapan

- e. Peningkatan sistem penyediaan air minum baik secara kuantitas maupun kualitas.
- f. Pengembangan kawasan hutan rakyat
- g. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- h. Pengembangan kawasan perkebunan
- i. Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- j. Pengembangan kawasan budidaya perikanan
- k. Pengembangan Kawasan pertambangan
- l. Pengembangan Industri mikro, kecil dan menengah
- m. Pengembangan industri rumah tangga

B. PKL Kota Painan

Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKL Painan terdiri dari terminal regional B, pelabuhan laut regional/ lokal, pasar lokal, rumah sakit umum dari tipe B, serta prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum, tempat pembuangan akhir sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT).

Pengembangan PKL Kota Painan dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan
- b. Pengembangan perumahan formal, swadaya dan PNS.
- c. Peningkatan dan rehabilitasi pusat perdagangan di Pasar Painan dan Pasar Sago
- d. Peningkatan pelayanan Pelabuhan Mandeh
- e. Pengembangan pelabuhan wisata Mandeh, Sungai Nyalo, Carocok dan Pulau Cingkuak
- f. Peningkatan pelayanan RS Tipe B Painan
- g. Peningkatan sistem penyediaan air minum baik secara kuantitas maupun kualitas.
- h. Pengembangan sistim drainase perkotaan
- i. Pengembangan Sarana Perguruan Tinggi
- j. Pengembangan kawasan hutan rakyat

- k. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- l. Pengembangan kawasan perkebunan
- m. Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- n. Pengembangan kawasan perikanan tangkap
- o. Pengembangan kawasan Minapolitan Mandeh
- p. Pengembangan Industri mikro, kecil dan menengah
- q. Pengembangan industri rumah tangga
- r. Pengembangan destinasi utama wisata Carocok dan Mandeh
- s. Peningkatan Pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap
- t. Pengembangan Kawasan Strategis Panasahan Carocok - Bukik Langkisau (PACARBULAN)
- u. Pembangunan RTH / Taman Kota

C. **PKL Kota Kambang**

Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKL Kambang terdiri dari terminal regional B, pelabuhan laut regional/ lokal, pasar lokal, rumah sakit umum dari tipe B, serta prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum, tempat pembuangan akhir sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT).

Pengembangan PKL Kota Kambang dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
- b. Penyusunan RDTR Kambang
- c. Pengembangan perumahan Formal, Swadaya dan PNS.
- d. Peningkatan dan rehabilitasi pusat perdagangan di Pasar Kambang
- e. Pembangunan Terminal Tipe C Kambang
- f. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum baik secara kuantitas maupun kualitas.
- g. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal
- h. Pengembangan sistem drainase perkotaan
- i. Pengembangan kawasan hutan rakyat

- j. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- k. Pengembangan kawasan perkebunan
- l. Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- m. Pengembangan kawasan peternakan
- n. Pengembangan kawasan perikanan tangkap
- o. Pengembangan kawasan Budidaya perikanan
- p. Pengembangan Industri mikro, kecil dan menengah
- q. Pengembangan destinasi utama wisata Pasir Putih

2. Pengembangan dan Penataan PPK Tarusan, Pasar Baru, Inderapura dan Lunang

Perwujudan pengembangan PPK Tarusan, Pasar Baru, Inderapura dan Lunang dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan
- b. Penyusunan RDTR kawasan
- c. Pengembangan perumahan formal, swadaya dan PNS.
- d. Peningkatan dan rehabilitasi Pasar
- e. Pembangunan Terminal Tipe C
- f. Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum massal
- g. Pembangunan Rumah Sakit kelas C
- h. Pembangunan TPS 3R
- i. Peningkatan sistem penyediaan air minum baik secara kuantitas maupun kualitas.
- j. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal
- k. Pengembangan sistim drainase perkotaan
- l. Pengembangan kawasan hutan rakyat
- m. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- n. Pengembangan kawasan perkebunan
- o. Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
- p. Pengembangan kawasan peternakan
- q. Pengembangan kawasan perikanan tangkap
- r. Pengembangan kawasan budidaya perikanan

- s. Pengembangan industri mikro, kecil dan menengah
- t. Pengembangan industri rumah tangga
- u. Pengembangan destinasi wisata
- v. Pembangunan RTH

3. Pengembangan dan Penataan PPL Barung-Barung Balantai, Asam Kumbang, Lumpo, Pasar Kuok, Surantih, Amping Parak, Koto Baru, Lubuk Sariak, Lakitan, Balai Salasa, Air Haji, Muaro Sakai, Sindang, Silaut, Kumbang, Tamuan, Pasar Beriang dan Punggasan.

Perwujudan pengembangan PPL Barung-Barung Balantai, Asam Kumbang, Lumpo, Pasar Kuok, Surantih, Amping Parak, Koto Baru, Lubuk Sariak, Lakitan, Balai Salasa, Air Haji, Muaro Sakai, Sindang, Silaut, Kumbang, Tamuan, Pasar Beriang dan Punggasan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. Pengembangan kawasan hutan rakyat
- b. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- c. Pengembangan kawasan perkebunan
- d. Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
- e. Pengembangan kawasan peternakan
- f. Pengembangan kawasan perikanan tangkap
- g. Pengembangan kawasan budidaya perikanan
- h. Pengembangan industri mikro, kecil dan menengah

4. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Kabupaten Pesisir Selatan 1 (satu) dari 10 (sepuluh) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di Sumatera Barat yaitu KPPN Pesisir Selatan dan sekitarnya.

Selain itu untuk pengembangan pariwisata di kabupaten Pesisir Selatan, telah dibagi perwilayahan Destinasi Pariwisata sesuai dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025 sebagai berikut:

Tabel 6.4
Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

Wilayah Destinasi	Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK)	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK)
DUPK Carocok dan Sekitarnya	Carocok Painan, Kecamatan IV Jurai	Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera	-
DUPK Mandeh dan Sekitarnya	Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan	Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara	-
DUPK Pasir Putih dan Sekitarnya	Pasir Putih, Kecamatan Lengayang	Kecamatan Ranah Pesisir	Kecamatan Linggo Sari Baganti
DUPK Rumah Gadang Mandeh Rubiah dan sekitarnya	Rumah Gadang Mandeh Rubiah, Kecamatan Lunang	Kecamatan Airpura, Kecamatan Silaut, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa IV Balai Tapan	Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025

6. Pengembangan Akses Mitigasi Bencana melalui Pembukaan Jalan Kambang - Muara Labuah.

Akses jalan Kambang - Muara Labuah sangat penting bagi Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan karena sarat dengan nilai historis serta untuk mitigasi bencana alam. Pesisir Selatan yang berhadapan dengan Samudera Hindia, rawan terhadap bencana gempa bumi, longsor dan tsunami. Berdasarkan pengalaman, akses jalan nasional terputus karena rusak oleh gempa atau banjir. Akibatnya, sebagian daerah terisolir karena tidak ada lagi jalan masuk. Selain itu, kawasan yang dilalui ruas jalan ini, membutuhkan jalan yang bisa dimanfaatkan untuk jalur evakuasi karena daerah tersebut berupa hamparan yang sangat rawan terhadap ancaman tsunami.

7. Pemekaran Kabupaten, Kecamatan dan Nagari.

Panjang daerah Pesisir Selatan yang mencapai lebih dari 200 km, menyebabkan rentang kendali pemerintah kabupaten menjadi panjang. Masyarakat atau aparaturnya akan kesulitan berurusan dengan pemerintah

kabupaten karena faktor jarak tersebut. Kalau dilihat dari esensinya, salah satu maksud pelaksanaan otonomi daerah adalah mendekatkan jarak antara pemerintah dengan masyarakat atau meringkas rentang kendali pemerintahan. Dengan dimekarnya Kabupaten Pesisir Selatan akan mempermudah urusan masyarakat, mengefisienkan urusan pemerintahan, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia, dan akan menggairahkan kegiatan ekonomi di pusat pemerintahan baru. Adapun wilayah yang termasuk kedalam rencana pemekaran kabupaten baru adalah kecamatan Air Pura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.

Pemekaran Kecamatan masih dimungkinkan untuk dilaksanakan terutama untuk Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan IV Jurai, dan Kecamatan Lengayang. Pemekaran kecamatan ini akan dimulai dengan pemekaran Nagari yang ditujukan untuk mempercepat dan memperdekat pelayanan kepada masyarakat.

8. Penambahan Luas Areal Penggunaan Lain (APL)

Luas areal penggunaan Lain di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini masih sangat terbatas. Secara existing persentase penggunaan lahan sebagian besar berupa kawasan konservasi (TNKS), hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi. Hal ini memerlukan perhatian pemerintah daerah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang membutuhkan lahan garapan sebagai sumber kehidupan masyarakat.

9. Kawasan Pengembangan Ekonomi

Kawasan pengembangan ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah meliputi pengembangan kawasan ekonomi khusus, pengembangan produksi (agropolitan, minapolitan, dll) dan kawasan industri dimaksudkan untuk mempercepat transformasi ekonomi.

- a. Pengembangan ekonomi khusus (KEK) direncanakan untuk pengembangan KEK Pariwisata di Kecamatan Koto XI Tarusan dan

- pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.
- b. Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggosari Baganti. Pengembangan kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera, Lengayang dan Linggosari Baganti.
 - c. Pengembangan Sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan dan Ranah IV Hulu Tapan.
 - d. Kawasan perkebunan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.
 - e. Kawasan Industri meliputi industri kerajinan dan agroindustri yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah.
 - f. Kawasan agroindustri meliputi kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang, Pancung Soal, Lunang dan Silaut.

Kawasan ekonomi memerlukan dukungan aksesibilitas transportasi darat dan transportasi laut. Pengembangan transportasi laut untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam kedaulatan maritim. Pengembangan transportasi laut di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dengan mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Panasahan Carocok Painan sebagai pelabuhan pengumpan regional yang difungsikan untuk mendukung Pelabuhan Teluk Bayur.

10. Pengembangan Kecamatan Bayang Utara Sebagai Sentral Pertanian Organik

Beras merupakan kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia. Ia sulit digantikan dengan pangan jenis lain seperti umbi-umbian, jagung dan

gandum. Bukan berarti mengesampingkan pangan lain. Tapi, beras, pangan yang pengelolaannya lebih unggul.

Jika kita mencermati data konsumsi beras di Indonesia berdasarkan data yang dilansir Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) 87,63 kg pertahun atau 240 gr perhari. Kedua berdasarkan data BPS/Kemendag 114 Kg per tahun atau 312 gr per tahun atau 340 gr per hari dan yang keempat dan yang keempat dari BPS 139 per hari atau 380 gr perhari

Data diatas sangat jelas kebutuhan beras di Kabupaten Pesisir Selatan sangat banyak, sehubungan dengan hal itu KKI Warso, PPO Santiago, KPA Winalsa dengan bantuan MCA-1 Indonesia mendampingi masyarakat dalam budidaya padi organik pada Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di Nagari Pancung Taba, Kecamatan VI Nagari Bayang Utara.

6.6. Kawasan Perbatasan dengan Kabupaten Lain

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Kabupaten Solok Selatan, kabupaten Solok dan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan sebagai berikut :

- a. Pengembangan infrastruktur wilayah dan fasilitas umum
- b. Pengembangan potensi ekonomi berupa sumberdaya alam, wisata dan sumber ekonomi lainnya dilakukan melalui kerjawasam wilayah perbatasan

6.7. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.

Prinsip dan tujuan pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan prinsip partisipatif, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan

mengintegrasikan berbagai kebijakan rencana program dan kegiatan para pihak pada kawasan.

Prioritas pembangunan kawasan perdesaan adalah pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi pengembangan kawasan berbasis sapi potong di Kecamatan Sutera, pengembangan kawasan desa wisata di kawasan wisata bahari terpadu Mandeh, pengembangan kawasan perdesaan berbasis sentra peternakan dan pengembangan kawasan perdesaan lainnya.

6.8. Kebijakan Pembangunan Lintas Perangkat Daerah

Pembangunan lintas satuan kerja dibutuhkan untuk program-program prioritas yang memerlukan dukungan yang bersifat holistik dan integratif dengan melibatkan beberapa Perangkat Daerah atau lintas bidang pembangunan.

Pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD tahun 2016-2021 diimplementasikan oleh Perangkat Daerah sebagai perpanjangan Pemerintah Daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan (masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat, Lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan lain-lain).

6.9. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan secara hirarkhis ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan program pembangunan daerah. Program-program tersebut, yang diklasifikasikan menurut bidang pembangunan, merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan Bupati dan Wakil bupati. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dikelompokkan dikelompokkan berdasarkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat langsung pengaruhnya terhadap pencapaian Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati. Berikut ini disajikan tabel program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif.

Tabel. 6.5
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Pesisir Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /inpac/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Periode RPJMD			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
MISI 1: Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat																			
Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja																			
Sasaran 1.1: Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN																			
				Penilaian LKD (opini BPK)		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
				Kualitas Pemranan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		CC		B		BB		BB		BB		A		A	
				Skor Nilai LPPD		3037		3130		3180		3230		3300		3350		3350	
				Level Maturitas SPIP		2		2		3		3		3		4		4	
3	01	01	xx	Program Pengembangan Data/Informasi															
							136.431,69												966.813
				Persentase tingkat integrasi data pembangunan	80%	85%		90%		90%		95%		95%		95%		95%	
3	01	01	xx	Program Kerjasama Pembangunan															
							34.027,61												34.027,61
				jumlah dokumen kerjasama yang disusun	1 dok	1 dok												1 dok	
3	01	01	xx	Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah															
							181.755,27												1.251.371
				Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang selaras	40%	50%		60%		70%		80%		90%		100%		100%	
3	01	01	xx	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah															
																			450.000,00
				Jumlah SDM perencana yang berkompetensi	50					50		50		50		50		250	
3	01	01	xx	Program Perencanaan Pembangunan Daerah															
							1.312.611,68												12.532.366
				Persentase perencanaan yang selaras	25	33		66		100		100		100		100		100	
3	01	01	xx	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi															
							574.031,24												2.373.684,59
				Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang selaras	25	33		66		100		100		100		100		100	
3	01	01	xx	Program Perencanaan Pembangunan Sosial															
							123.244,01												2.107.804,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Pembangunan Sosial Budaya	Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya yang selaras	25	33		66		100		100		100		100		100		Bapedalibang		
3	01	01	xx	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA			618.141,28		179.634,59		184.125,45		188.728,59		193.446,81		198.282,98	1.562.359,70		
				Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang selaras	25	33		66		100		100		100		100		Bapedalibang		
3	01	01	xx	Program Pengembangan Wilayah Strategis			4.087.442,04		3.049.254,34		3.125.485,69							10.262.182,07	Dinas PU TR	
				Jumlah kawasan strategis yang dibangun		2 kawasan		2 kawasan												
3	01	02	xx	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		96,15	189.870,77		377.306,61		386.739,28		396.407,76		406.317,95		416.475,90	2.173.118	BPKD, BAPEN, seluruh PD,	
				Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu		90%		90%		90%	-	90%		90%		90%		90%		-
				Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun		4		4		4	-	4		4		4		24		-
				Jumlah laporan AKIP yang disusun		2		3		1	-	1		1		1			-	15 Kec
3	01	02	xx	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			3.757.839,97		4.510.374,40		4.623.133,76		1.803.249,74		1.828.249,74		1.828.249,74	18.351.097	BPKD	
				Dokumen APBD dan P. APBD tepat waktu		4		4		4	-	4		4		4		24		
				KUA dan PPAS APBD/P. APBD tepat waktu						4		4		4		4		16		
				Persentase penyelesaian administrasi keuangan sesuai SOP		100%		100%		100%	-	100%		100%		100%		100%		
				Persentase perangkat daerah yang tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)		75%		75%		75%	-	75%		75%		75%		75%		
				Persentase aset Setda yang terkelola dengan baik		80%		80%	175.000,00	85%	179.375,00	85%	225.000,00	90%	250.000,00	100%	250.000,00	100%		1.079.375
				persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10,00		10,00		10,00	-	10,00		10,00		10,00		60	-	Badan Pendapatan, Kecamatan
				Jumlah dokumen kajian standarisasi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD yang disusun															-	Sekwan
3	01	02	xx	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota			227.689,93		586.245,15		600.901,28		587.649,78		592.649,78		599.114,78	3.194.251	BPKD	
				Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah		90%		90%		90%	-	90%		90%		90%		90%		-
3	01	02	xx	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan			287.340,73		244.356,73		250.465,65		252.110,00		249.850,00		254.700,00	1.538.823		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Nagari		90%		90%		90%	-	90%		90%		90%		90%	-	BPKD dan kecamatan		
3	01	02	xx	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari			7.946,75		67.910,00		69.607,75						145.464,50			
				persentase nagari yang dibina dalam pengelolaan keuangan	50	70		75		80							80		Kecamatan	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			428.411,28		321.411,99		329.447,29		337.683,47		346.125,56		354.778,70		2.117.858	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur							-								-	
3	01	03	xx	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur			1.732.183,28		2.403.101,18		2.463.178,71		2.524.758,18		2.587.877,13		2.652.574,06		14.363.672,54	
				Persentase tingkat kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawain (Aspek Syarat dan Prosedur)	10%	10%		10%		15%	-	15%		15%		15%		80%	BKPSDM	
				Pemeringkatan Kompetensi Camat	6 besar Tk. Prop	6 besar Tk. Prop		6 besar Tk. Prop		6 besar Tk. Prop	-	6 besar Tk. Prop		6 besar Tk. Prop		6 besar Tk. Prop		6 besar Tk. Prop		-
3	01	04	xx	Program Pendidikan Kedinasan			1.263.328,07		1.323.984,30		1.357.083,91		1.185.000,00		1.185.000,00		1.185.000,00		7.499.396,29	
				Persentase Pejabat Struktural Eselon II dan III yang telah mengikuti Diklat Pim II dan III	40%	20%		20%		30%	-	20%		20%		100%		100%		-
				Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang telah mengikuti Diklat Pim IV	40%	20%		20%		60%	-	20%		20%		100%		100%		-
3	01	04	xx	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			350.500,00		994.000,00		1.018.850,00		2.038.181,00		1.693.181,00		1.693.181,00		7.787.893,00	
				Jumlah Pegawai ASN yang Mengikuti Diklat dan Bimtek Teknis/Fungsional	100%	100%		100%		100%	-	100%		100%		100%		100%		BKPSDM
3	01	05	xx	Program Pengembangan sistem inovasi daerah			-		188.352,33		193.061,14		226.600,00		249.260,00		274.186,00		1.131.459,47	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		0		-		25%	-	50%		75%		100%		100%		Bapedalibang
3	01	05	xx	Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK daerah			-		240.732,74		246.751,06		412.500,00		453.750,00		499.125,00		1.852.858,80	
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbang		0		15%		30%	-	45%		60%		100%		100%		Bapedalibang
3	01	05	xx	Program Peningkatan Kelembagaan dan			-		-		-		275.000,00		302.500,00		332.750,00		910.250,00	

1				2		3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Sumber Daya Kelitbangan		Persentase kerjasama yang dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian		0		20%		40%	-	60%		80%		100%		100%		Bapedalbang	
3	01	06	xx	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					2.465.204,11		250.017,72		256.268,16		262.674,87		269.241,74		275.972,78		3.779.379		
						Persentase OPD yang memiliki laporan keuangan pemerintah yang baik	90	90		90		90		90		90		100		100		INSPEKTORAT DAERAH	
						Persentase obrik bebas temuan material dan aset oleh BPK dan Inspektorat	90%	90%		90%		90%		90%		90%		100%		100%			
						Persentase OPD yang mendapat nilai kategori SAKIP minimal bernilai B	15%	15%		90		95		100		100		100		100%			
						Persentase Peluang mengikuti pendidikan formal, diklat kepemimpinan dan diklat teknis lainnya	60	60		65		70%		80%		90%		100%		100%			
						Persentase OPD yang mengimplementasikan SPIP	70	70		80		85		90		95		100		100.00			
						Persentase kasus ganti kerugian negara/daerah yang ditangani		90%		90%		90%	-	90%		90%		90%		90%		-	BPKD
						Persentase penyampaian perkembangan fisik dan keuangan OPD sesuai target dan tepat waktu		75%		75%		75%	-	75%		75%		75%		75%		-	Selda (Bagian Pembangunan)
						persentase fungsi staf ahli, asisten 1, 2, 3 yang dilaksanakan secara optimal		80%					-									-	selda
3	01	06	xx	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					253.791,50		328.489,00		336.701,23		345.118,76		353.746,72		362.590,39		1.980.437,60		
						Level kapabilitas APIP	2 dengan catatan	2 dengan catatan		Level 2		Level 3	-	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		-	INSPEKTORAT DAERAH
3	01	06	xx	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan					405.374,72		590.170,38		604.924,64		620.047,75		635.548,95		651.437,67		3.507.504		
						Persentase pevelangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku		92%		92%		95%		95%		95%		95%		95%			Selda (Bagian PBJ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE		20%		25%		30%		35%		40%		45%		45%		Selda (Bagian Pembangunan)		
5	01	01	XX	Program Pemantapan Otonomi Daerah		635.197,83		606.178,29		621.332,74		636.866,06		652.787,71		669.107,40		3.821.470,03		
		Persentase tahapan penegasan batas wilayah administratif pemerintahan		0%		0%		30%		35%		50%		75%		75%		-		
		Persentase tahapan pembakuan nama Rupa Bumi		0%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		-		
		Persentase nagari binaan perantau		0%		0%		17%		18%		20%		25%		25%		-		
		Persentase penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintah daerah		60%		65%		67%		66%		67%		70%		70%		-		
5	01	01	XX	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik				550.000,00		600.000,00		650.000,00		750.000,00		870.000,00		3.420.000,00		
		Tingkat kepuasan masyarakat				B		BB		BB		BB		A		A				
1	02	18	xx	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah		196.138,23		198.809,10		203.779,33		208.873,8		214.095,7		219.448,0		1.241.144,17		
		Jumlah dokumen /arsip daerah yang terselamatkan & terlestarikan		0 urusan pem-an		-		urusan pem-an		32 urusan pem-an		32 urusan pem-an		32 urusan pem-an		32 urusan pem-an		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
1	02	18	xx	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan							100.000		102.500		105.063		307.563			
		persentase OPD, Nagari telah melaksanakan sistem administrasi kearsipan (unit arsip)		0 unit		-		0		13,22		39,65		70,48		100		227,0	700.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	02	18	xx	Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana & prasarana kearsipan				39.328,00		40.311,20		41.318,98		42.351,95		43.410,75		700.000,00		
		persentase sarpras arsip kondisi baik		0		-		0		80%		85%		90%		90%		90%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	02	18	xx	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi				59.999,94		61.499,94		63.037,44		64.613,37		66.228,71		-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Peningkatan angka kunjungan ke galeri Pesisir Selatan (org/thn)		0		-		0		300 org		500 org		750 org		1000 org		-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran 1.2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik																				
		Indeks Kepuasan masyarakat		C		B		B		B		B		B		B		B		
		Umur Harapan Hidup		69,8		70		70,2		70,4		70,6		70,8		70,8		70,8		
		Rata-Rata Lama Sekolah		8,37		8,4		8,43		8,46		8,69		8,52		8,52		8,52		
		Harapan Lama Sekolah		13,34		13,4		13,46		13,52		13,58		13,64		13,64		13,64		
1	01	06	xx	Program pemberdayaan fakir miskin Komunitas		68.374,26		464.666,60		476.283,27		488.190,35		500.395,11		512.904,98		2.510.814,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Adat Terpencil (KAT) dan pe nyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	PMKS yang dapat diberdayakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan (%)	34%	43%		55%		57%		65%		70%		75%		75%		Dinsos, PP & PA
1	01	06	xx	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	182.912,83		419.691,42		430.183,71		440.938,30		451.961,76		463.260,80		2.388.948,81	Dinsos, PP & PA, Kecamatan, bag perekon
				Jumlah kasus permasalahan sosial yang mendapatkan penanganan	15/51		15/51		15/51	-	15/51		15/51		15/51		15/51	
				persentase nagari yang menyalurkan raskin tepat sasaran	80		85		90									Kecamatan
1	01	06	xx	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	135.962,98		471.981,43		483.780,97		529.387,98		598.424,00		665.799,00		2.885.336,36	Dinsos, PP & PA
				Jumlah anak panti yang mendapat pelayanan sosial (jiwa)	235		200		180		235		235		235		235	
1	01	06	xx	Program pembinaan lanjut usia terlantar	157.085,00				-		195.021,82		199.897,37		204.894,80		756.898,99	Dinsos, PP & PA
				Jumlah Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan sosial (jiwa)	-		80		-		90		85		75		75,00	
1	01	06	xx	Program pembinaan anak terlantar	69.106,88				-		104.682,47		107.299,53		109.982,02		391.070,90	Dinsos, PP & PA
				Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan dan bantuan (anak)			20		-		20		20		20		20	
1	01	06	xx	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	27.010,36		79.053,04		81.029,37		83.055,10		85.131,48		87.259,76		442.539,11	Dinsos, PP & PA
				Cakupan penyandang cacat berat yang memperoleh jaminan sosial (jiwa)	74		68		100		110		115		120		120	
1	01	06	xx	Program pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK dan Penyakit Sosial lainnya).	-		-		-		122.212,41		125.267,72		128.399,41		375.879,54	Dinsos, PP & PA
				Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelayanan, pelatihan dan bimbingan (orang)					10		10		10		10		10	
1	01	06	xx	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	194.115,90		2.168.918,28		2.223.141,24		273.784,97		309.488,00		344.333,00		5.513.781,39	Dinsos, PP & PA
				Jumlah LKKS dan TKSK yang meningkat kinerjanya	68		11		128		133		138		143		148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Persentase kepuasan terhadap pelayanan jemaah haji oleh Pemerintah Daerah				90												Bagian Kesra (Setda)		
1	02	06	xx	Program Penataan Administrasi Kependudukan			1.174.099,39		3.291.257,33		4.873.538,77		4.995.377,23		5.120.262		5.248.268,21	24.702.802,59	Dinas Adminduk Capil dan Kecamatan	
				1. Persentase peningkatan kepemilikan KTP elektronik	66%	70%		80%		83%		86%		89%		92%		0,85	Dinas Adminduk Capil	
				2. Persentase peningkatan kepemilikan Kartu Keluarga	90,00%	95,00%		96,54%		97,25%		97,97%		97,99%		98,69%		98,69%	Dinas Adminduk Capil	
				3. Persentase peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		0,00%		0,58%		17,27%		28,78%		40,30%		51,81%		51,81%	Dinas Adminduk Capil	
				4. Persentase peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-18th)				4		6				5		4		4,00	Dinas Adminduk Capil	
1	02	08	xx	Program Keluarga Berencana			420.527,70		519.963,65		532.962,74		2.500.000,00		2.550.000,00		2.600.000,00	9.123.454,09		
				Persentase yang mengikuti KB aktif	68,3%	68,3%		68,5%		68,7%		68,9%		70,1%		70,1%		70,1%		DPM DPP&KB, kecamatan
				Persentase KB Unmet Need	13,19	13,19		13,15		13,2		13,9		13,10		13,5		13,50		
1	02	08	xx	Program Pelayanan Keluarga Berencana							615.526,00		695.795,00		774.133,00		2.085.454,00			
				Persentase KB Pria	1,1						1,20		1,25		1,30		1,30			DPM DPP&KB,
				Persentase KB Wanita	67,10					67,70		67,90		1,10		1,10		1,10		
				Persentase yang mengikuti KB MKJP	17,50					18,00		1,10		1,10		1,10		1,10		
1	02	08	xx	Program Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pelayanan KB/BKR yang Mandiri					66.000,00		67.650,00		76.300,00		86.250,00		95.961,00	392.161,00		
				Jumlah BKB yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD, BKR dan BKL	71	71		73		75		78		80		82		82		DPM DPP&KB,
				Jumlah kelompok UP2KS (usaha Peningkatan Perekonomian Keluarga Sejahtera)	73	73		73		73		73		73		73		73,00		
1	02	08	xx	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat										992.152		1.103.856		2.096.008		
				Jumlah pelayanan informasi, promosi dan sosialisasi								24		24		24		24		DPM DPP&KB
1	02	08	xx	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			59.272,10											59.272,10		
				Jumlah Kelompok PIK remaja /Mahasiswa	26	26												26		DPM DPP&KB
1	02	08	xx	Program penguatan kelembagaan					155.877,75									155.877,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		persentase kelembagaan KB yang telah ada				10										10		DPM DPP&KB	
1	02	06	xx	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri							450.000,00		461.250,00		472.781,25		1.384.031,25		
				Peresentase lembaga KB yang aktif						80		90		100		100		DPM DPP&KB	
1	02	06	xx	Program kemitraan Keluarga Berencana					340.000,00		348.500,00		357.212,50		366.142,81		1.411.855,31		
				Persentase MKJP		18,80		18,83		18,85		18,88		18,91		18,93		DPM DPP&KB	
1	02	06	xx	Program pembinaan institusi peduli KKBP (Kependudukan KB dan pembangunan keluarga)					154.809,05								154.809,05		
				persentase kampung KB yang dibina				0,63									0,63	DPM DPP&KB	
1	01	01	xx	Program Pendidikan Anak Usia Dini		367.774,50			973.464,00		997.800,60		3.726.800,00		4.099.480,00		4.509.428,00		14.674.747,10
				PAUD PAUD (%)		62%		65%		68%		71%		74%		77%		78,7%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PAUD terakreditasi (lembaga)		0		30		60		90		-		150		182	182
1	01	01	xx	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		25.161.131,46			83.109.473,88		85.187.210,72		87.316.890,99		89.499.813,26		91.737.308,60		462.011.828,91
				APK SD / SDLB / Paket A (%)		114,22%		114,35%		114,48%		114,61%		114,74%		114,97%		115,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APM SD / SDLB (%)		99,12%		99,25%		99,38%		99,51%		99,64%		99,81%		99,90%	99,90%
				APK SMP / SMP / Paket B (%)		101,61%		102,30%		103,00%		103,70%		104,40%		105,10%		105,77%	105,77%
				APM SMP / SMP (%)		89,90%		90,03%		90,16%		90,29%		90,42%		90,55%		90,72%	90,72%
1	01	01	xx	Program Pendidikan Menengah		17.072.056,67											17.072.056,67		
				APK SMA / SMK / SMLB / Paket C (%)		#		92,72%											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APM SMA/SMK/SMLB (%)		#		77,92%											
				Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)		8,62%		8,65%											
1	01	01	xx	Manajemen Pelayanan Pendidikan		640.081,28			9.443.312,88		9.679.395,70		9.921.380,59		10.169.415,11		10.423.650,49		50.277.236,05
				Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B (%)		50%		55%		60%		65%		70%		75%		84,20%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase SMP/SMLB berakreditasi minimal B (%)		50%		55%		60%		65%		70%		75%		81%	81%

1			2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	01	01	xx	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1.511.903,22		3.025.391,45		3.101.026,24		3.178.551,90		3.258.015,69		3.339.466,09		17.414.354,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				Jumlah PTK PAUD profesional (sertifikasi) (%)	10%	15%		20%		25%		30%		35%		37%		37%				
				Persentase guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/ SMPPLB (%)	85%	86%		87%		89%		91%		93%		95%		95%				
				Persentase guru profesional di SMA dan SMK (%)	87%	88%																
				Persentase kepala sekolah profesional di SD (%) dan SMP (%)	10%	20%		40%		60%		80%		90%		95%		95%				
				Persentase pengawas profesional di SD (%), dan SMP (%)	0%	10%		30%		50%		70%		90%		95%		95%				
1	01	01	xx	Program Pendidikan Luar Biasa			72.490,30		97.791,10		100.235,88								270.517,28			
				Jumlah lomba yang diikuti	3 lomba	3 lomba																
1	01	01	xx	Program Pendidikan Non Formal			986.491,45		1.189.987,60		1.219.737,29		1.250.230,72		1.281.486,49		1.313.523,65		7.241.457,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				Angka Melek Aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 99,1%	98,12%	98,15%		98,30%		98,50%		98,70%		98,90%		99,10%		99,10%				
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.654.953,70		2.476.203,65		2.538.108,74		2.601.561,46		2.666.600,50		2.733.265,51		14.670.693,56			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			38.062,00		95.000,00		97.375,00		99.809,38		102.304,61		104.862,22		537.413,21			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			39.881,00		50.000,00		51.250,00		52.531,25		53.844,53		55.190,64		302.697,43			
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur							-											
1	01	02	xx	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			4.440.106,88		4.095.000,00		4.197.375,00		4.302.309,38		4.409.867,11		4.520.113,79		25.964.772,15	Dinkes		
				Terpenuhi kebutuhan obat- obatan pelayanan kesehatan dasar		78%		80%		82%	-	85%		90%		95%		95%				
1	01	02	xx	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			3.875.807,56		3.963.009,70		4.062.084,94		4.163.637,07		4.267.727,99		4.374.421,19		24.706.688,45	Dinkes		
				Visite Rate		2,34		2,38		2,42		2,46		2,48		2,5		#VALUE!			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		persentase penanganan pasien bermasalah		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	RSUD M. Zein	
1	01	02	xx	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		36.810,25		50.267,80		51.524,50		52.812,61		54.132,92		55.486,25		301.034,32	
				Persentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan		60%		65%		70%		75%		80%		85%		85%	Dinkes
1	01	02	xx	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Puskesmas/ Pustu/Rumah Sakit dan jaringannya		17.765.496,58		10.375.610,00		10.635.000,25		10.900.875,26		11.173.397,14		11.452.732,07		72.303.111,29	
				Persentase Puskesmas/Pustu yang memiliki sarana prasarana sesuai standar		15%		30%		50%		70%		90%		100%		100%	Dinkes
1	01	02	xx	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan masyarakat		312.207,24		694.593,20		711.958,03		729.756,98		748.000,91		766.700,93		3.963.217,28	
				Persentase Nagari Siaga Aktif		40%		45%		50%		55%		60%		65%		65%	Dinkes
				Persentase Rumah Tangga ber PHBS		35%		70%		75%		80%		85%		90%		90%	Dinkes
1	01	02	xx	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak		366.708,40		2.868.021,30		2.939.721,83		782.053,28		884.039,00		983.570,09		8.824.113,90	
				Menurunnya angka kematian ibu Maternal		66,3		66,3		66,3		66,3		66,3		55,2		33,2	Dinkes
				Menurunnya angka kematian Bayi		4,6		4,4		4,3		4,2		4,1		4,1		3,9	Dinkes
1	01	02	xx	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		19.395.658,39		33.708.357,81		34.551.066,76		35.414.843,43		36.300.214,51		37.207.719,87		196.577.860,76	
				Persentase penduduk yang memiliki JKN		70%		80%		85%		90%		95%		100%		100%	Dinkes
1	01	02	xx	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		258.713,00		344.924,95		353.548,07		362.386,78		371.446,44		380.732,61		2.071.751,85	
				Menurunnya prevalensi gizi kurang		4,8%		4,75%		4,65%		4,6%		4,55%		4,5%		4,5%	Dinkes
				Menurunnya prevalensi gizi buruk		4,8%		4,75%		4,65%		4,6%		4,55%		4,5%		4,5%	Dinkes
1	01	02	xx	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		413.852,94		2.069.948,40		2.121.697,11		596.171,28		673.916,00		749.790,65		6.625.376,38	
				Persentase puskesmas yang terakreditasi		20%		55%		85%		100%		100%		100%		100%	Dinkes
1	01	02	xx	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		792.735,94		893.746,70		916.090,37		938.992,63		962.467,44		986.529,13		5.490.562,20	
				Succes Rate TB		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%	Dinkes
				Succes Rate DBD		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinkes
				Sccues Rate Malaria		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinkes
1	01	02	xx	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		495.003,16		923.794,70		946.889,57		776.330,11		874.093,00		894.623,21		4.910.733,75	
				Persentase Nagari ODF (Open Defication Free)		8,6		21,5		43,01		69,89		75,27		97,85		97,85	Dinkes
1	01	02	xx	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular		111.365,50		402.984,40		413.059,01		423.385,49		433.970,12		444.819,38		2.229.583,89	
				Persentase Nagari dengan Posbindu PTM		20%		30%		40%		50%		60%		70%		70%	Dinkes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Persentase deteksi dini Kanker serviks		2%		4%		6%	-	8%		10%		12%		12%		Dinkes	
		Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa		80%		85%		90%	-	92%		95%		100%		100%		Dinkes	
1	01	02	xx	Program Pengadaaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit Paru -paru Rumah Sakit Mata		9.941.126,46		78.062.190,70		80.013.745,46		17.933.000,00		18.381.325,00		18.840.858,13		223.172.245,74	RSUD M. Zein
				Persentase pemenuhan cakupan layanan rumah sakit															RSUD M. Zein
1	01	02	xx	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		45.746.400,23		59.863.400,58		61.359.985,59		62.893.985,23		64.466.334,87		66.077.993,24		360.408.099,74	RSUD M. Zein
				Persentase kemampuan Rumah Sakit dalam pemenuhan kebutuhan operasional		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	RSUD M. Zein
1	01	02	xx	Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah sakit				6.712.396,50		6.880.206,41		7.052.211,57		7.228.516,86		7.409.229,78		35.282.561,13	Dinkes
				Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Rawat jalan dan Inap)		0%		80%		82.50%		85%		87.50%		90%		90%	Dinkes
1	01	02	xx	Program Pengawasan obat dan Makanan								200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		750.000.000,00	Dinkes
				Persentase makanan dan obat-obatan beredar sesuai standar kesehatan						75%		80		85%		85%		85%	Dinkes
MISI 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah																			
Tujuan : Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah																			
Sasaran 2.1: Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan																			
				Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik		24,90		25,90		26,90		27,90		28,90		29,90		29,90	
				Persentase jembatan kabupaten kondisi baik		66,74		71,23		75,37		80,22		84,72		89,21		89,21	
				Persentase Irigasi kondisi baik		47,14		49		52		54		57		60		60	
				Persentase pasar rakyat yang menuju kriteria SNI		0		10		18		27		36		45		45	
				Persentase Cakupan Layanan Komunikasi		0		30		40		50		50		60		60	
				6. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas		223		265		220		200		180		160		160	
1	01	03	xx	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan		89.977.884,34		77.066.757,34		78.993.426,27								246.038.067,95	Dinas Pekerjaan
				Persentase Kondisi Jalan Baik		24,9		25,9		26,9								29,9	Dinas Pekerjaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		Persentase kondisi jalan mantap (baik+sedang)		36,15%				37%			37,86%						40,43%	-	Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan (untuk tahun 2019 - 2021 nomenklatur Program disempurnakan menjadi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan)						
		Persentase jembatan kab. dalam kondisi baik		66,74				71,23			75,37						89,21	-							
		Panjang Jalan Strategis dan Jalan Non Status Terbangun (km)		20				20			20						60	-							
1	01	03	xx	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				9.776.696,51			4.269.682,56		4.376.424,62			7.585.835,24		10.875.481,12		14.247.368,15		51.131.488,20			
		Luas genangan yang dikeringkan (ha)		5,59				8,25			5,7		5,85			5,85		5,85				5,85		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan	
		Saluran drainase lingkungan kondisi baik (km)		5,42				5,42			2,44		38,34			30		14,55				96,17			
		persentase drainase jalan kondid baik (%)		40				43			45		52			54		55				55			
1	01	03	xx	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				5.924.837,98			3.795.381,64		3.890.266,18			3.987.522,84		4.087.210,91			4.189.391,18		25.874.610,72		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jalan kabupaten yang Terpelihara (km)		2333,18	240			240			250		267			333		400				1730			
		Persentase jembatan kabupaten Yang terpelihara (unit)		5,62	65,17			68,54			71,91		75,28			78,65		82,02				82,02			
1	01	03	xx	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan				56.399,75			5.805.908,78		5.951.056,50			6.099.832,91		6.252.328,73			6.408.636,95		30.574.163,62		Dinas PUPR dan BPBD
		Persentase kelengkapan sarana prasarana kebinarmargaan		45,75				48,60			51,40		71,00			62,90		71,40				71,40		-	
1	01	03	xx	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jar. Pengairan Lainnya				22.730.984,91			25.740.848,79		26.384.370,01			27.043.979,26		27.720.078,74			28.413.080,71		158.033.342,42		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase Irigasi kondisi baik (%)		51,82	48,12			49,02			51,64		54,27			56,99		59,72				59,72			
1	01	03	xx	Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air				246.662,40			206.340,60		211.499,12			216.786,59		222.206,26			227.761,41		1.331.256,38		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Volume air yang tertampung (m3)										35.600						40.100				75.700			
1	01	03	xx	Program Pengendalian Banjir				14.516.575,20			14.755.519,40		15.124.407,39			15.502.517,57		15.890.080,51			16.287.332,52		92.076.432,59		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Luas genangan yang dikeringkan (ha)		68,91				101,75			70,3		72,15			72,15		74				459,26			
		Panjang kerusakan sungai dan pantai yang tertangani (km)		1,9				1,2			1,2		8,6			9,66		10,72				33,28			
01	03	xx	Program Penataan Banunan dan					-			50.000,00		51.250,00			52.531,25		53.844,53			55.190,64		262.816,43		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Bangunan Lingkungan	Persentase Bangunan Pemerintah yang terbangun		13,33%		16,67%		16,67%		23,33%		20%		10%		100%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	
					Persentase bangunan Strategis yang terbangun		25%		25%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		100%			
1	01	03	xx	Program Pengaturan Jasa Konstruksi				17.966,00		25.532,10		26.170,40		26.824,66		27.495,28		28.182,66		152.171,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Persentase usaha jasa konstruksi yang memiliki izin (%)	102	98		96		85	-	85		85		85		85		534	
1	01	03	xx	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				1.034.621,20		453.998,04		465.347,99		476.981,69		488.906,23		501.128,88		3.420.984,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Persentase Kesesuaian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Tata Ruang		60%		65%		70%		75%		80%		80%		80%		80%	
1	02	05	xx	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				4.367.487,43		4.676.402,27		4.793.312,33		4.913.145,14		5.035.973,77		5.161.873,11		28.948.194,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	
					Persentase penduduk terlayani pengelolaan Persampahan		40		40		50		50		60		60		60		60	
					Persentase RT yang terlayani pengelolaan lumpur tinja		30		35		35		40		50		50		50		50	
1	02	05	xx	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				631.717,54		3.829.628,56		3.925.369,27		4.023.503,51		4.124.091,09		4.227.193,37		20.761.503,35		
					Pembangunan Jalan Desa (km)		15		15		20		20		25		25		25		25	perkimtan / PUPR
1	01	03	xx	Program Monitoring, evaluasi dan pelaporan				616.156,96		430.329,42		441.087,65		452.114,84		463.417,72		475.003,16		2.878.109,75		
					persentase kegiatan yang tidak bermasalah dalam pelaksanaannya		95		95		100	-	100		100		100		100		100	
1	01	03	xx	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				1.354.426,00		7.098.702,00		7.276.169,55		7.458.073,79		7.644.525,63		7.835.638,77		38.667.535,75		
					Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah strategis	25	27		37		40		43		46		50		50		50	
1	01	03	xx	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan										61.930.000		62.700.000		65.881.000		190.511.000		
					Persentase Kondisi Jalan Baik								27,90%		28,90%		29,90%		0,299			
					Persentase kondisi jalan mantap (baik+sedang)								38,72%		39,58%		40,43%		40,43%			
					Persentase jembatan kab.dalam kondisi baik								28,0%		84,72%		89,21%		89,21%			
					Panjang Jalan Strategis dan Jalan Non Status Terbangun (km)								20		20		20		60,00			
1	01	03	xx	Program Pembangunan sistem informasi / database jalan dan jembatan										350.000		450.000		550.000		1.350.000		
					Persentase database jalan dan jembatan yang valid								90%		95%		100%		1,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	01	03	xx	Program perencanaan tata ruang							1.800.000		1.800.000,00		1.800.000,00		5.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase kawasan strategis dan kawasan perkotaan yang memiliki Rencana detail tata ruang						40%		50%		60%		0,60			
1	01	03	xx	Program pemanfaatan ruang							100.000		110.000		120.000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				persentase kesesuaian pemanfaatan ruang						75%		80%		80%		80%			
1	01	03	xx	Program pembangunan sarana dan prasarana peribadatan							5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase sarana peribadatan kewenangan daerah kondisi baik						80%		85%		85%		85%			
1	01	03	xx	Program pembangunan turap/talud/bronjong							6.000.000		6.300.000		6.500.000		18.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase kerusakan sungai yang tertangani						30%		33%		36%		36%			
1	02	09	xx	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		1.015.590,92			2.668.695,61		2.735.413,00		925.000	948.125		971.828		9.264.653	Dinas Perhubungan
				Persentase sarana perhubungan yang terpenuhi (%)		8		11		11		14		14		14		75	
1	02	09	xx	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		389.893,72			162.635,42		166.701,31		600.000	800.000		800.000		2.919.230	Dinas Perhubungan
				Persentase alat keselamatan lalu lintas yang berfungsi baik		15,12		8,33		8,00		8,00		8,00		8,00		55,45	
				Persentase Prasarana Perhubungan dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik		65		70		75		80		85		90		90	
1	02	09	xx	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		439.340,45			322.935,32		9.500.000,00		9.737.500,00	9.980.937,50		10.230.460,94		40.211.174,20	Dinas Perhubungan
				Persentase pemenuhan sarana pengamanan lalu lintas		8		8		135 bh		3363 bh		3363 bh		3363 bh		3363 bh	
1	02	09	xx	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		532.638,69			751.191,69		769.971,48		789.221	808.951		829.175		4.481.149	Dinas Perhubungan
				Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi		40		45		50		55		60		65		65	
1	02	09	xx	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan							4.300.000		2.300.000		4.300.000		10.900.000	Dinas Perhubungan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Terbangun/Tersedia					5		5		5		6		22		
1	02	09	xx	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		693.809,20			393.643,88		403.484,98		470.000	470.000		470.000		2.900.938	Dinas Perhubungan
				Jumlah Kendaraan yang layak jalan		8895		350.000		72000		7200		8.200		87.000		533.295	
1	02	09	xx	Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran		270.188,05			154.456,30		158.317,71		590.000	590.000		590.000		2.352.962	Dinas Perhubungan
				persentase kenaikan retribusi parkir (%)		10		10		10		10		10		10		10	
1	02	10	xx	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		359.694,91			1.184.441,24		1.214.052,27		250.000	256.250		262.656		3.527.095	Dinas Kominfo
				Persentase program daerah yang dipublikasikan (%)		60		65		65		70		73		73		73	

1				2				3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	02	10	xx	Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi			373.129,00			80		85		88		382.457,23			90		90		95		95	755.586	Dinas Kominfo	
				Program Penyelenggaraan E-Government			2.263.334,30					98		100		2.319.917,66			100		100		100		100	45	15.083.252	
												98		100		100			100		100		100		100			
												100		100		100			100		100		100		100			
												16,48		41,21		74,18			87,91		100,00		100		100			
1	02	10	xx	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika			98.006,50					50		60		100.456,66			80		85		90		90	515.154	Dinas Kominfo	
												50		60		-			80		85		90		90			
1	02	10	xx	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa			1.549.201,41									1.746.932,00			2.575.000,00		2.639.375,00				2.705.359,38	13.006.473,08		
									25 Media Massa			27 Media Massa				27 Media Massa			27 Media Massa		27 Media Massa				160 Media Massa		Setda (Bagian Humas)	
2	01	04	xx	Program peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri			3.057.826,24					1		3		11.709.499,65			12.362.293,07		12.671.350,40				12.988.134,16	100%	64.791.340,65	Dinas KUPP
									0	0									5		7				9			
2	01	04	xx	Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan			-									-			22.000,00		230.000,00				240.000,00	0,80	492.000,00	
									0	0		0		0		-			10		20				30		60,00	Dinas KUPP
2	01	04	xx	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan			3.796.234,71			<9%		<9%		<9%		300.541,30			1.395.000,00		1.425.000,00				1.460.000,00		8.684.830,84	
									<14,2%	<14,2%		<13,8%		<13,4%					<13,0%		<12,5%				<12,0%			
									0	0		1		3					5		7				9		9	
Sasaran 2.2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial																												
										70		71		72		73			74		75			75				
										0		0		0		30			30		40			40				
										63,76		63,8		73,13		74,6800			75,16		75,29			69,95				

1				2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Persentase penduduk berakses air minum/bersih		85,37		89,29		91,02		92,47		96,16		97,71		97,71				
1	01	03	xx	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				48.301,40			2.172.648,20			2.226.964,41			2.282.638,52		2.339.704,48		2.398.197,09	11.468.454,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
					Persentase penduduk berakses air minum / air bersih			-	85,37		89,29		91,02		92,47		96,16		97,71		97,71		
					Persentase penduduk bersanitasi baik			-	63,76		63,80		64,63		65,77		67,85		69,95		69,95		
1	01	03	xx	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peribadatan										1.000.000		1.025.000,00		1.050.625,00		1.076.890,63		4.152.515,63	
					Persentase sarana peribadatan penda kondisi baik (%)									70		75		80		80,00			
1	01	03	xx	Program pembangunan sarana dan prasarana peribadatan												5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase sarana peribadatan kewenangan daerah kondisi baik									80%		85%		85%		85%			
1	01	04	xx	Program Pengembangan perumahan				122.181,75			3.142.839,45			3.221.410,44		3.301.945,70		3.384.494,34		3.469.106,70		16.641.978,37	Dinas Perumahan, Kawasan
					Persentase penurunan rumah tidak layak huni			8,33		8,33		9,09		10,00		11,11		12,5		12,5		71,43	(APBD+APBN+DLL)
1	01	04	xx	Program Lingkungan Sehat perumahan				3.329.033,07			8.118.874,70			8.321.846,57		8.529.893		8.743.140		8.961.719		46.004.505,67	Dinas Perumahan, Kawasan
					jumlah rumah yang memiliki air bersih dan sanitasi layak						500		500		500		500		500		2.000,00		
					jumlah perumahan yang memiliki PSU yang sesuai aturan						2		2		2		2		2		8,00		
1	01	04	xx	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporann							129.992,25			133.242,06								263.234,31	
					persentase penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu				80		85		-								85,00		-
1	01	04	xx	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan										-		150.000		150.000		150.000		450.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
					Persentase developer yang melaksanakan pembangunan PSU pada kawasan perumahan sesuai dengan aturan yang berlaku						20		20		20		20		20		80,00		-
					Persentase komunitas perumahan yang aktif						20		20		20		20		20		80,00		-
1	01	04	xx	Program pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman										-		7.200.000		21.510.000		21.620.000		50.330.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
					Persentase kawasan permukiman tertata									60%		65%		70%		70%			
1	01	05	xx	Program Kesiapsiagaan				392.561,40			292.596,97			299.911,89		307.409,69		315.094,93		322.972,31		1.930.547,20	
					Jumlah KSBS dibentuk (unit)			5		5		10		-	13		15		20		20		BPPD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Jumlah kelompok perempuan yang memahami resiko bencana	10	20		20		30	-	40		50		60		60			
1	01	05	xx	Program peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat dan pemangku lainnya dalam pengurangan bencana			97.497,60		107.601,80		110.291,85		113.049,14		115.875,37		118.772,25	663.088,01	BPBD
		Jumlah KSBN yang dibentuk	5	5		10		15		25		35		45					
1	01	05	xx	Program Penanganan langgap darurat			#		350.216,35		358.971,76		367.946,05		377.144,70		386.573,32	3.779.377,20	Satpol PP dan BPBD
		Persentase kejadian bencana diatasi	75%	80%		80%		80%	-	80%		80%		80%		80%			
1	01	05	xx	Program Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana			565.889,13		10.520.000,00		10.783.000,00		11.052.575,00		11.328.889,38		11.612.111,61	55.862.465,11	SATpol PP & BPBD
		persentase sarpras penanggulangan bencana kondisi baik (%)		73		75		78	-	80		85		90		90			
1	01	05	xx	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi			744.499,26		6.985.954,00		7.160.602,85		7.339.617,92		7.523.108,37		7.711.186,08	37.464.968,48	BPBD
		Panjang jalan dan jembatan pasca bencana yang direhabilitasi & direkonstruksi (m)	54/8	53/12		2500/104		2500/104	-	2500/104		2500/104		2500/104		2500/104			
1	01	05	xx	Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana			120.398,95		68.969,60		70.693,84		72.461,19		74.272,72		76.129,53	482.925,83	BPBD
		Persentase kejadian bencana yang terdata	65%	65%		70%		70%		70%		75%		80%		80%			
1	01	03	xx	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan			693.208		693.208		693.208		710.538,20		728.301,66		746.509,20	4.264.973,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		persentase taman kota kondisi baik (%)		63		65		70		80		90		100		100,00			
1	02	05	xx	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			2.219.171,28		1.377.016,69		1.411.442,11		1.446.728,16		1.482.896,37		1.519.968,78	9.457.223,40	Dinas LH
		Indeks Kualitas Air	67,5	67,5		67,5		67,5		67,5		67,5		67,5		67,5			
		Indeks Kualitas Udara	85	85		85		85		85		85		85		85			
		Indeks Tutupan Lahan	(n/a)	74,86		74,85		74,84		74,83		74,82		74,81		74,81			
1	02	05	xx	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			450.000,00		461.250,00		472.781,25		484.600,78		496.715,80		509.133,70	2.874.481,53	Dinas LH
		Jumlah kampung pro-iklim yang aktif (unit)		2		2		2		2		2		2		2			
		Calon penerima kalpataru (orang)		1		1		1		1		1		1		1			
1	02	05	xx	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan			352.114,60		588.352,06		603.060,86		618.137		633.591		649.431	3.444.686,30	Dinas LH, Dinas PUTR
		Persentase data lingkungan yang valid	30	35		40		45		50		55		60		60			
1	02	05	xx	Program peningkatan pengendalian polusi			60.000		60.000		61.500		63.038		64.613		66.229	375.380	Dinas LH, Dinas PUTR
		Pencapaian kualitas air		dibawah baku mutu		dibawah baku mutu		dibawah baku mutu		dibawah baku mutu		dibawah baku mutu		dibawah baku mutu		dibawah baku mutu			

1				2		3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	02	05	xx	Program pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten pesisir selatan									70.000									70.000,00	
												10									70		
2	01	06	xx	Program Pengembangan wilayah transmigrasi				1.051.769,18			759.059,84		778.036,34		865.224,67		978.056,00			1.088.172,79		5.520.318,81	
								50%		60%		70%		80%		90%				100%			
										60%		70%		80%		90%				100%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							40%	50%	-	60%		70%		80%	-	90%				100%		100%	
MISI 3: Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS- SBK																							
Tujuan : Mewujudkan perubahan sikap mental masyarakat, revitalisasi kelembagaan agama dan kelembagaan sosial kemasyarakatan sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal																							
Sasaran 3.1: Meningkatnya pengamatan nilai-nilai agama dan peran lembaga adat																							
								22,3		65,62		67,58		69,55		71,51		73,48		73,48			
								70		75		80		85		90		95		95			
								-		-		80		90		95		100		100			
1	02	16	xx	Program Peningkatan IMTAQ							217.366,60		222.800,77		2.235.000,00		2.270.000			2.270.000,00		7.215.167	
										90		100		100		100				100		100	
																						Bagian Kesra (Setda)	
1	02	16	xx	Program Pengembangan Nilai Budaya							1.932.376,60		1.980.686,02		2.395.800,00		2.635.380,00			2.898.918,00		11.843.160,62	
								66	66	-	67		68		69		70			71		71	
																						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	02	16	xx	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya							2.217.526,79		1.350.507,00		1.384.269,68		1.064.800,00		1.171.280,00		1.288.408,00		8.476.791,47
								0	0		1		2		4		5			6		6	
																						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	02	02	xx	Program Keserasian Kebijakan							143.270,35		146.852,11		150.523,41		154.286,50		158.143,66		162.097,25		915.173,28
															4,40		6,59			8,79		9	
																						Dinas Sosial	
																						Dinas Sosial	
1	02	02	xx	Program penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak									25.000,00		275.000,00		232.000,00			260.000,00		792.000,00	
															16,67		33,33			66,67		100,00	
																						Dinas Sosial	
1	02	02	xx	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan									82.034,56		84.085,42		86.187,56		88.342,25		90.550,80		349.166,04
																						Dinas Sosial	
1	02	02	xx	Program penguatan dan pembinaan							200.000		200.000		200.000		205.000,00		210.125,00		215.378,13		830.503,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		kelembagaan beserta jaringan dan penyusunan regulasi daerah	Perentase kelembagaan daerah yang responsif gender (%)		55		60		60		65		70		75		80		
1	02	02	xx	Program Perlindungan Anak		77.266,00		70.000,00		71.750,00		73.543,75		75.382,34		77.266,90		297.943,00	
					Perentase penurunan kasus kekerasan anak (%)	15		12		10		8		6		4		4	
1	02	02	xx	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/ Nagari		150.000		180.000		175.000		179.375,00		183.859,38		188.455,86		726.690,23	
					Perentase peningkatan perempuan di nagari dan kecamatan (%)														
2	01	02	xx	4 Program Peningkatan Peran Serta Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan		-			250.000,00		256.250,00		262.656,25		269.222,66		1.038.128,91		
					Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi	5		5		5		5		5		5		25	Dinas Sosial
MISI 4: Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan																			
Tujuan : Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing																			
Sasaran 4.1: Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan																			
					Nilai PDRB Sektor Pertanian	3,18		3,35		3,47		3,63		3,79		3,96		3,96	
					Skor pola pangan harapan	78		79		80		81		82		83		83	
1	02	03	xx	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		705.940,97		571.050,13		585.326,38		599.960		614.959		630.332		3.707.568	Dinas Pangan
					- Ketersediaan Pangan Utama (kg/Jiwa/Thn)	132,13		144,00		144,00		144,00		144,00		144,00		144,00	
					- Ketersediaan Energi (kcal/kap/hari)	3754		2400		2400		2400		2400		2400		2400	
					- Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	83,73		63		63		63		63		63		63	
					- Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen														
					1. Harga Gabah	4054		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP	
					2. Harga Beras	7848		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP	
					- Stabilitas Harga Pangan Pokok di Tingkat Konsumen	12,90		CV ≤ 5		CV ≤ 5		CV ≤ 5		CV ≤ 5		CV ≤ 5		CV ≤ 5	
					- Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	74,60		76		77		79		80		81		81	
1	02	03	xx	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		902.491,69		1.284.085,93		1.316.188,08		1.349.093		1.382.820		1.417.391		7.652.069	Dinas Pangan
					Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan :														
					Konsumsi Energi (kcal/kap/hari)	2320		2150		2150		2150		2150		2150		2150	
					Konsumsi protein (gram/kap/hari)	59,2		57		57		57		57		57		57	
2	01	03	xx	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		9.697.287,26		8.172.095,77		8.376.398,16		5.641.656		6.324.907		6.982.933		45.195.277	
					Jumlah Produksi Padi (Ton)	317.373		288.815		291.703		300.519		306.530		312.660		312.660	Distanhortbun
					Jumlah Produksi jagung (ton)	108.894		111.808		158.160		117.398		123.268		129.431		135.903	Distanhortbun
					Jumlah Produksi Cabe	2.584		2.713		2.849		2.991		3.141		3.298		3.463	Distanhortbun

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Jumlah Kelompok Tani yang menggunakan Teknologi Tepat Guna	120	120		120		123		123		123		123		123		-	Distanhortbun	
2	01	03	xx					170.827,40		227.581,95		233.271,49		2.371.539,00		2.413.798,00		2.460.283,00	7.877.301	
		Jumlah Gapoktan berprestasi	-	1		1		1		1		1		1		1		6		
		Jumlah Kelompok Tani berprestasi	2	3		0		1		-	1		1		1			7	Distanhortbun	
		Jumlah petani berprestasi	0	0		1		1		-	1		1		1			5		
2	01	03	xx					19.141,07		291.512,00		298.799,80		-		-		-	609.452,87	
		Jumlah asosiasi produk perkebunan yang aktif	1	1		1													1	Distanhortbun
2	01	03	xx					456.022,85		410.812,88		421.083,20		2.486.794,00		2.465.041,00		2.251.726,00	8.491.479,93	
		Jumlah diversifikasi hasil olahan tanaman pangan		2		2					3		4		5		6		6	
		Jumlah diversifikasi hasil olahan tanaman hortikultura		3		4					5		5		5		5		5,0	Distanhortbun
		Jumlah diversifikasi hasil olahan tanaman perkebunan		0		0					2		2		2		2		2	
2	01	03	xx					2.775.418,71		1.654.924,70		1.696.297,82		1.738.705,26		1.782.172,89		1.826.727,22	11.474.246,60	
		Jumlah Populasi ternak (ekor)																		
		- Sapi Potong	80.146	80.851						81.563		82.281		83.005		83.735		491.580		
		- Kerbau	8.271	8.336						8.401		8.466		8.532		8.599		50.604		
		- Kambing	41.669	41.711						41.752		41.794		41.836		41.878		250.640		
		- Ayam Buras	779.819	785.356						790.932		796.547		802.203		807.898		4.762.755		
		- Ayam Ras Petelur	85.300	89.565						94.043		98.745		103.683		108.667		580.203		
		- Ayam Ras Pedaging	552.500	690.625						863.281		1.079.102		1.348.877		1.686.096		6.220.481		
		- Itik	147.921	149.400						150.894		152.403		153.927		155.466		910.012		
		Jumlah Produksi Ternak (kg)																		
		- Daging Sapi Potong	1.173.571	1.205.295						1.241.454		1.278.697		1.317.058		1.356.570		7.572.646		
		- Daging Kerbau	46.204	47.542						48.968		50.437		51.950		53.509		298.610		
		- Daging Kambing	40.072	41.675						43.342		45.076		46.879		48.754		265.799		
		- Daging Ayam Buras	836.356	842.294						848.274		854.297		860.363		866.471		5.108.055		
		- Daging Ayam Ras Petelur	35.186	36.946						38.793		40.732		42.769		44.908		239.334		
		- Daging Ayam Ras Pedaging	442.138	552.673						690.841		863.551		1.079.439		1.349.298		4.977.940		
		- Daging Itik	61.017	61.628						62.244		62.866		63.495		64.130		375.380		
		- Telur Ayam Ras	542.508	569.633						598.115		628.021		659.422		692.393		3.690.092		
		- Telur Ayam Buras	327.524	329.849						332.191		334.550		336.925		339.317		2.000.357		
		- Telur Itik	674.520	681.265						688.078		694.958		701.908		708.927		4.149.656		
2	01	03	xx					333.362,77		679.072,13		696.048,93		713.450,15		731.286,41		749.568,57	3.902.788,95	
		Jumlah hewan ternak yang divaksinasi (ekor)	11.000	11.000						12.000		12.400		12.600		12.800		60.800		
		Jumlah Kandang yang di desinfeksi (unit)	1.200	480						480		480		480		480		2.400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		- Jumlah ternak yang divaksin SE (ekor)	5.500	5.500				6.000		6.200		6.300		6.400		30.400		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		-Jumlah hewan yang divaksin rabies (ekor)	5.500	5.500				6.000		6.200		6.300		6.400		30.400		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		- jumlah penanganan ternak yang mengalami gangguan reproduksi (ekor)						50		60		70		80		260			
2	01	03	xx	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan			238.855,28		330.724,26		338.992,37		344.368,26		386.405,05		436.795,02		2.076.140,23
		Jumlah Pasar ternak kondisi baik (unit)	1	1					-	1		1		1		1		1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Event Promosi yang diikuti (event)	3	3						4		3		4				17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	01	03	xx	Program Peningkatan Agribisnis peternakan			91.450.021,00		79.337,01		81.320,44		82.610,05		92.694,20		104.782,18		91.890.764,88
		Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan ternak (kelp)	4	4						4		4		4				20	Dinas Peternakan dan Keswan
2	01	03	xx	Program peningkatan sarana prasarana peternakan					89.438,80		91.674,77		93.128,59		104.496,73		118.123,85		496.862,74
		Persentase peningkatan Sarana prasarana Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4)	25,00	25						10		10		10				10	Dinas Peternakan dan Keswan
		Jumlah Sarana prasarana Puskesmas (unit)	77	20							2		2		2			2	Dinas Peternakan dan Keswan
		Persentase peningkatan Sarana prasarana pasar ternak dalam kondisi baik	0	0							1		1		1			1	Dinas Peternakan dan Keswan
		Jumlah Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	2	2					0		0		0		0			2	Dinas Peternakan dan Keswan
2	01	03	xx	Program Peningkatan penerapan teknologi Peternakan					173.871,28		178.218,06		181.044,32		203.144,2763		229.635,73		965.913,67
		Jumlah teknologi peternakan yang diterapkan pada kelompok (bh)	5	5						5		5		5				5	Dinas Peternakan dan Keswan
2	01	03	xx	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			215.746,47												215.746,47
		persentase pengurangan anjing liar pembawa rabies		12,34														12,34	Dinas Peternakan dan Keswan
2	01	01	xx	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap			886.532,48		2.966.880,00		3.041.052,00		3.053.216,21		3.065.429,07		3.077.690,79		16.090.801
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	37.909	34.440			36.940		39.440		41.940		44.440		46.940		46.940		Dinas Perikanan
		Jumlah Kelompok Usaha bersama (KUB) yang berkembang	70	70			75		80		85		90		95		95		
		Jumlah Koperasi nelayan yang berkembang	17	17			20		22		24		26		28		28		
2	01	01	xx	Program Peningkatan Daya Saing Produk			843.297,72		601.329,50		616.362,74		618.828		621.304		623.789		3.924.910,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Perikanan	Jumlah UPI Yang Menerapkan Cara Pengolahan Ikan Yang Baik (Orang / UPI)	3	3		6	9		12		15		18		18		Dinas Perikanan
			Jumlah kelompok pengolah dan pemasar	34	34		41	48		55		62		68		68		
2	01	01	xx	Program Pengembangan Budidaya Perikanan							2.901.550,00		3.267.852,50		3.430.937,50		9.600.340,00	
			Jumlah Produksi Budidaya perikanan(ton)	10327	12.210		13.431	14.505		15.666		16.763		17.936		17.936		Dinas Perikanan
			Jumlah Pembudidaya yang tersertifikasi CBIB (Orang)	17	17		37	62		92		122		162		162		
			Jumlah UPR yang tersertifikasi CPIB	2	2		3	5		6		8		9		9		
			Jumlah kelompok Perbudidaya Ikan (POKDAKAN)	60	60		70	75		80		85		90		90		
2	01	01	xx	Program pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil				292.826,95		-		-		-		-		292.826,95
			Jumlah kawasan konservasi laut daerah yang dikembangkan dan dimantapkan															Kewenangan pindah ke Provinsi
2	01	01	xx	Program Penagawasan sumberdaya kelautan dan perikanan				48.089,50		-		-		-		-		48.089,50
			Jumlah pengawasan kelautan yang dilakukan															Kewenangan pindah ke Provinsi
2	01	01	xx	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				1.159.172,70		2.607.529,43		2.672.717,67		-		-		6.439.419,80
			Jumlah Produksi Perikanan budidaya (ton)	10327	12.210		13431			-								
			Jumlah Pembudidaya yang tersertifikasi CBIB (Orang)	17	17		37	62		92		122		162		162		Dinas Perikanan
			Jumlah UPR yang tersertifikasi CPIB	2	2		3	5		6		8		9		9		
			Jumlah kelompok Perbudidaya Ikan (POKDAKAN)	60	60		70	75		80		85		90		90		
Sasaran 4.2: Meningkatnya peran pengolahan dan pemasaran terhadap ekonomi daerah																		
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasar atas harga konstan)		8,8		8,93	9,03		9,13		9,23		9,33		9,33		
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (harga konstan)		12,2		12,41	12,59		12,77		12,95		13,13		13,13		
1	02	11	xx	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				182.487,97		206.282,40		211.439,46		216.725,45		222.143,58		227.697,17
			Persentase koperasi aktif melaksanakan RAT		20		40	44		0	46		48		51		51	Dinas KUPP
			Persentase koperasi dengan jumlah modal > 5 Milyar		0		5	10		0	15		20		25		25	
1	02	11	xx	Program Pengembangan				385.583,56		242.596,00		248.660,90		1.384.000,00		1.516.000,00		1.638.000,00
																		5.414.840,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kebudayaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase peningkatan pemodalannya UMKM per tahun		≥ 5%		≥ 5%		≥ 5%	-	≥ 5%		≥ 5%		≥ 5%		≥ 5%	Dinas KUPP
1	02	11	xx	Program Peningkatan Penciptaan Iklim				41.894,00		42.941,35		175.000,00		190.000,00		200.000,00		649.835,35
				Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM yang mengkasas pemodalannya ke lembaga keuangan	300	300	300	-	300	300	300	300	300	300	1800		
2	01	04	xx	Program peningkatan Efisiensi		3.057.826,24		11.709.499,65		12.002.237,14		12.362.293,07		12.671.350,40		12.988.134,16	100%	64.791.340,65
				perdagangan dalam negeri	Jumlah pasar rakyat menuju kriteria SNI nomor 8152:2015	0	0	1	3	5	7	9	9	9	9	9		Dinas KUPP
2	01	04	xx	Program: Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan		-	-	-	-	10	20	30	30	30	60,00	0,80	492.000,00	
					cakupan bina kelompok pedagang (persen)	0	0	0	-	10	20	30	30	30	60,00	0,80	492.000,00	Dinas KUPP
2	01	04	xx	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		3.796.234,71		300.541,30		308.054,83		1.395.000,00		1.425.000,00		1.460.000,00		8.684.830,84
					Koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar waktu	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	
					Koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar kecamatan	<14,2%	<14,2%	<13,8%	<13,4%	<13,0%	<12,5%	<12,0%	<12,0%	<12,0%	<12,0%	<12,0%	<12,0%	Dinas KUPP
					Jumlah pasar yang merujuk pemenuhan syarat pengelolaan SNI nomor 8152:2015	0	0	1	3	5	7	9	9	9	9	9	9	
2	01	05	xx	Program pengembangan industri kecil dan menengah		577.342,55		639.544,05		655.532,65		671.920,97		688.718,99		705.936,97		3.938.996,18
					Jumlah fasilitasi legalitas produk IKM		10 Produk	40 produk	40 produk	40 produk	40 produk	40 produk	40 produk	40 produk	40 produk	40 produk	40 produk	
					Persentase peningkatan pemodalannya IKM	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Dinas KUPP
2	01	05	xx	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		54.199,05		625.127,25		640.755,43		696.774,32		673.193,67		690.023,52		3.340.073
					Jumlah peningkatan IKM menerapkan teknologi tepat guna		10	15	20	25	30	30	30	30	30	30	30	Dinas KUPP
2	01	05	xx	Program pengembangan sentra sentra industri potensial			89.218,90		1.091.449,37		1.118.735,61		1.146.704,00		1.175.371,60		4.621.479,47	
					Jumlah kelembagaan Sentra IKM	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	Dinas KUPP
2	01	02	xx	Program pengembangan ekonomi kreatif		401.978,79		727.655,00		745.846,38		748.829,76		751.825,08		754.832,38		4.130.967,38
					Jumlah kelompok ekonomi kreatif yang berkembang	2	2	4	6	8	10	12	12	12	12	12	12	Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga,
Sasaran 4.3: Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi Utama Wisata Bahari di Sumatera Barat																		
					Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara		2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara		1.680		1.750		1.800		1.850		1.900		2.000		2.000				
2	01	02	xx	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			1.047.285,54		5.508.171,45		5.645.875,74		5.668.459,24		5.691.133,08		5.713.897,61	29.274.822,65		
				jumlah destinasi wisata unggulan (Kawasan)	4	4		5		8	-	8		9		10		10	-	Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
2	01	02	xx	Program Pengembangan Pemasaran Wisata			1.200.402,47		3.252.555,23		3.333.869,11		3.347.204,59		3.360.593,41		3.374.035,78	17.868.660,58		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
				Angka kunjungan wisata		949.809		1.034.503		1.050.909		1.179.192		1.332.968		1.483.042		7.030.423		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
2	01	02	xx	Program Pengembangan Kemitraan					182.418,00		186.978,45		187.726,36		188.477,27		189.231,18	934.831,26		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
				Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	25	25		28		30		32		35		37		37		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
2	01	02	xx	Program Pengembangan SDM dan Kemiraan Pariwisata			628.968,90		-									628.968,90		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
				Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	25	25											25			Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
1	02	13	xx	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga			1.071.784,45		896.099,62		918.502,11		941.464,66		965.001,28		969.126,31	5.781.978,43		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
				Jumlah Klub olah raga yang berkembang di masyarakat	2	2		3		4	-	5		6			7,00	1.503.027		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga

MISI 5: Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang

Tujuan : Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan taat hukum

Sasaran 5.1: Terwujudnya peran pemerintah dan struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat

				Persentase kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparat	n/a	70		75		85		100		100		100		100			
				Persentase kasus Perda yang diselesaikan	70	75		80		85		90		90		95		95			
1	01	05	xx	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			312.000,92		1.160.194,79		1.189.199,65		1.218.930		1.249.403		1.280.638	6.410.366		Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran - Setda	
				Persentase kasus perda yang diselesaikan	70%	75%		76%		78%		79%		80%		81%		81%		Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, kesbang pol (setda)	
1	01	05	xx	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			536.424,98		1.152.922,08		1.181.745,13		1.211.289		1.241.571		1.272.610	6.596.562		Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	
				Persentase penurunan tingkat kriminalitas	3	3%		3%		3%		3%		3%		3%		15%			
				Persentase penurunan pungli di Kabupaten Pesisir Selatan		75%		80%		80%		85%		90%		95%		95%			
1	01	05	xx	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			436.975,30		312.751,70		320.570,49		328.584,75		336.799,37		345.219,36	2.080.900,98		Setda (Bagian Kesbangpol)	
				Persentase penurunan kasus narkoba tingkat pelajar		5%		5%		5%	-	5%		5%		5%		25%			
5	01	01	XX	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			636.877,11		696.760,46		714.179,47		732.033,96		750.334,81		769.093,18	4.299.278,98			
				Persentase rancangan produk hukum yang difasilitasi		85%		90%		90%		95%		95%		95%		95%		-	
				Persentase produk hukum yang dipublikasi		95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		-	Setda (Bagian Hukum)
5	01	01	XX	Program Advokasi Pemerintah Daerah			213.006,46		218.331,62		223.789,91		229.384,66		235.119,27		240.997,26	1.360.629,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase sengketa hukum yang difasilitasi		70%		75%		85%		90%		90%		100%		100%		-
1	01	06	xx	Program penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan		70.537,32		79.444,05		81.430,15		83.465,91		85.552,55		87.691,37		488.121,35
		Jumlah generasi muda yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan (orang)	100	100		100		100	-	100		100		100		100		Dinsos, PP & PA
5	01	01	XX	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		336.681,05		618.737,72		634.206,16		650.061		666.313		682.971		3.588.970
		Persentase peserta yang memahami penegathuan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara	70	70		75		80		85		90		95		95		-
																		Bag Kesbang & Kecamatan, hukum Bag Kesbang & Kecamatan
Sasaran 5.2: Meningkatkan kapasitas organisasi dan kelembagaan masyarakat																		
				Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif membina kelompok		51,50		56,45		65,05		70,43		75,81		81,18		86,56
				Jumlah Dasa Wisma Maju		-		470		545		645		720		870		870
1	02	02	xx	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/ Nagari		150.000		180.000		175.000		179.375,00		183.859,38		188.455,86		726.690,23
				Persentase peningkatan perempuan di nagari dan kecamatan (%)														
2	01	02	xx	4 Program Peningkatan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan		-		250.000,00		256.250,00		262.656,25		269.222,66		1.038.128,91		
				Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi		5		5		5		5		5		25		Dinas Sosial
1	02	07	xx	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari		799.161,73												799.162
				persentase nagari yang memiliki dokumen perencanaan yang baik		10		20										20
				persentase nagari yang dibina dan di monev				100										100
1	02	07	xx	Program Penataan Kelembagaan dan Kelatausahaan Pemda		34.754,12												34.754
				persentase praktek kerja lapangan yang difasilitasi		100		100										100
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pemerintahan Nagari		93.194,35												93.194
				Jumlah Ranperda dan Ranperbub tentang nagari				2										2
1	02	07	xx	Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa							1.117.354		1.263.065		1.405.270			3.785.689
				Persentase nagari dengan tata kelola keuangan yang baik		10		16,48		24,75		41,21		54,95		64,83		71,43
				Jumlah Desa Yang Maju dan mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan		1		1		2		2		3		4		5
																		DPM&DPPKB dan Kecamatan DPM&DPPKB

1				2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	02	07	xx	Program Pengembangan lembaga sosial perdesaan										806.978,00		912.214,00		1.014.917,00			2.734.109	
				Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang aktif (PKK, dan LPMN)			57,5%		65,5%		70,5%		76%		81%		84			84,00		DPM&DPPKB dan Kecamatan
				persentase KAN yang aktif		54,05	54,05		64,86		71,97		81,08		86,49		91,84			91,84		DPM&DPPKB
1	02	07	xx	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan										930.000,00		953.250,00		977.081,25			2.860.331,25	
				Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif		40%	40%		40,5%		41%		41,5%		42%		52,5%			52,50		DPM&DPPKB
1	02	07	xx	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari				102.333,65		177.622,46		182.063,02									462.019,13	
				Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan		10	70		75		85									85		DPM&DPPKB
1	02	07	xx	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa				247.085,48		326.750,00		334.918,75									908.754,23	
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Nagari		40	40		45		50									50		DPM&DPPKB
1	02	07	xx	Program pemberdayaan lembaga pemerintahan desa/nagari						257.027,15		1.236.000,00		1.266.900,00		1.298.572,50		1.331.036,81			5.389.536,46	
				persentase nagari memiliki lembaga pemerintahan aparat					43,96		60,44		71,43		93,41		100			100		DPM&DPPKB
1	02	07	xx	Program pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari						1.351.079,98		1.384.856,98									2.735.937	
				persentase PKK nagari yang aktif		60	60		65,00		70,00		-							70,00		DPM&DPPKB
				persentase KAN yang aktif		54,05	54,05		64,86		71,97		-						71,97			
				persentase LPM yang aktif membina kelompok		56,45	56,45		65,05		70,43		-						70,43			
6	01	01	xx	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan				669.517,72		1.594.419,60		1.634.280,09		1.675.137,09		1.717.015,52		1.759.940,91			9.050.310,9294	
				Terlaksananya Musrenbang Kecamatan (Kali)		1	1				1		1		1		1			6		
				Terlaksananya koordinasi dan pembinaan dengan muspika (kali)		4	4				4		4		4		4			24		
Total								614.829.672.166,00		619.182.571.989,00		568.942.506.359,00		581.347.402.431,00		594.268.952.789,00		605.634.937.375,00			3.584.206.043.109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 - 2021



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab-bab terdahulu, telah dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah secara hirarkhis ke dalam strategi, dan arah kebijakan pembangunan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Program-program tersebut, yang diklasifikasikan menurut bidang pembangunan, merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam implementasinya, secara operasional program-program tersebut harus dijabarkan sesuai urusan-urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan yang langsung pengaruhnya terhadap pencapaian visi, misi Bupati/Wakil Bupati.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama Perangkat Daerah dan disepakati bersama DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Pada target kinerja diperkirakan outcome yang akan dihasilkan dari program-program, sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta Perangkat Daerah penanggungjawab. Rincian program berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut.

Tabel. 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Pesisir Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Periode RPJMD		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1					368.041.777,14		648.223.547,01		665.429.135,69		771.148.167,52		854.284.030,79		926.497.393,31		4.233.624.051,46	
1	01				335.898.263,35		590.064.526,68		605.816.139,84		682.910.464,68		762.797.275,48		828.807.825,32		3.806.294.495,35	
1	01	01			50.217.105,33		105.704.555,16		108.347.169,03		113.759.902,65		116.883.410,21		120.112.956,47		615.025.098,84	
					3.476.015,50		4.107.798,85		4.210.493,82		4.315.756,16		4.423.650,07		4.534.241,32		25.067.955,72	
					627.293,15		3.584.209,00		3.673.814,23		3.765.659,58		3.859.801,07		3.956.296,10		19.467.073,12	
					301.867,80		270.917,50		277.690,44		284.632,70		291.748,52		299.042,23		1.725.899,18	
									-									
1	01	01	xx		367.774,50		973.464,00		997.800,60		3.726.800,00		4.099.480,00		4.509.428,00		14.674.747,10	
1	01	01	xx		25.161.131,46		83.109.473,88		85.187.210,72		87.316.890,99		89.499.813,26		91.737.308,60		462.011.828,91	
1	01	01	xx		17.072.056,67												17.072.056,67	

1				2		3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						APM SMA/SMK/SMLB (%)	77,82%	77,92%														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,62%	8,65%														
1	01	01	xx			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			640.081,28		9.443.312,88		9.679.395,70		9.921.380,59		10.169.415,11		10.423.650,49		50.277.236,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B (%)	50%	55%		60%		65%		70%		75%		84,20%		84,20%		
						Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B (%)	50%	55%		60%		65%		70%		75%		81%		81%		
1	01	01	xx			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1.511.903,22		3.025.391,45		3.101.026,24		3.178.551,90		3.258.015,69		3.339.466,09		17.414.354,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Angka kelulusan SD/MI (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
						Angka kelulusan SMP/MTS (%)	99%	99,25%		99,45%		99,65%		99,84%		100%		100%		100%		100%
1	01	01	xx			Program Pendidikan Luar Biasa			72.490,30				-								72.490,30	
						Jumlah lomba yang diikuti	3 lomba	3 lomba														
1	01	01	xx			Program Pendidikan Non Formal			986.491,45		1.189.987,60		1.219.737,29		1.250.230,72		1.281.486,49		1.313.523,65		7.241.457,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Angka Melek Aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun (%)	98,12%	98,15%		98,41%		98,71%		99,01%		99,30%		100,00%		100,00%		100,00%
1	01	02				KESEHATAN			105.684.889,22		207.649.450,39		212.840.686,65		350.076.653,16		404.052.198,95		458.038.638,68		1.738.342.517,04	
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.654.953,70		2.476.203,65		2.538.108,74		2.601.561,46		2.666.600,50		2.733.265,51		14.670.693,56	
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			38.062,00		95.000,00		97.375,00		99.809,38		102.304,61		104.862,22		537.413,21	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			39.881,00		50.000,00		51.250,00		52.531,25		53.844,53		55.190,64		302.697,43	
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur							-									
1	01	02	xx			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			4.440.106,88		4.095.000,00		4.197.375,00		4.302.309,38		4.409.867,11		4.520.113,79		25.964.772,15	Dinkes
						Terpenuhi kebutuhan obat- obatan pelayanan kesehatan dasar		78%		80%		82%	-	85%		90%		95%		95%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	01	02	xx	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			3.875.807,56		3.963.009,70		4.062.084,94		4.163.637,07		4.267.727,99		4.374.421,19	24.706.688,45	Dinkes	
				Visite Rate		2,34		2,38		2,42		2,46		2,48		2,5		#VALUE!	-	Dinkes
1	01	02	xx	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			36.810,25		50.267,80		51.524,50		52.812,61		54.132,92		55.486,25	301.034,32	Dinkes	
				Persentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan		60%		65%		70%		75%		80%		85%		85%		Dinkes
1	01	02	xx	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Puskesmas/ Pustu/Rumah Sakit dan jaringannya			17.765.496,58		10.375.610,00		10.635.000,25		10.900.875,26		11.173.397,14		11.452.732,07	72.303.111,29	Dinkes	
				Cakupan Puskesmas		2,35	2,34		2,38		2,40		2,45		2,50		2,50		2,50	Dinkes
				Persentase Puskesmas/Pustu yang memiliki sarana prasarana sesuai standar			15%		30%		50%		70%		90%		100%		100%	Dinkes
1	01	02	xx	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan masyarakat			312.207,24		694.593,20		711.958,03		729.756,98		748.000,91		766.700,93	3.963.217,28	Dinkes	
				Persentase Nagari Siaga Aktif			40%		45%		50%		55%		60%		65%		65%	Dinkes
				Persentase Rumah Tangga ber PHBS			35%		70%		75%		80%		85%		90%		90%	Dinkes
1	01	02	xx	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak			366.708,40		2.868.021,30		2.939.721,83		782.053,28		884.039,00		983.570,09	8.824.113,90	Dinkes	
				Menurunnya angka kematian Ibu Maternal (per 100.000 Kelahiran Hidup)		55	100		98		96		94		92		90		90	Dinkes
				Menurunnya angka kematian balita (Per 1000 Kelahiran hidup)		35	35		34		33		32		31		30		30	Dinkes
				Menurunnya angka kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup)		4,6	25		24		23		22		21		20		20	Dinkes
1	01	02	xx	Program Mitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			19.395.658,39		33.708.357,81		34.551.066,76		35.414.843,43		36.300.214,51		37.207.719,87	196.577.860,76	Dinkes	
				Persentase penduduk yang memiliki JKN			70%		80%		85%		90%		95%		100%		100%	Dinkes
1	01	02	xx	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			258.713,00		344.924,95		353.548,07		362.386,78		371.446,44		380.732,61	2.071.751,85	Dinkes	
				Menurunnya prevalensi balita gizi kurang		4,80	4,80		4,75		4,65		4,60		4,55		4,50		4,50	Dinkes
				Menurunnya persentase balita gizi buruk (%)		8,9	8,5		7,8		7,5		6,6		6,6		6,6		6,6	Dinkes
1	01	02	xx	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			413.852,94		2.069.948,40		2.121.697,11		596.171,28		673.916,00		749.790,65	6.625.376,38	Dinkes	
				Persentase puskesmas yang terakreditasi			20%		55%		85%		100%		100%		100%		100%	Dinkes
1	01	02	xx	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			792.735,94		893.746,70		916.090,37		938.992,63		962.467,44		986.529,13	5.490.562,20	Dinkes	
				Succes Rate TB		90%	90%		90%		92%		93%		94%		95%		95%	Dinkes
				Succes Rate DBD		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinkes
				Succes Rate Malaria		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinkes
1	01	02	xx	Program Peningkatan			495.003,16		923.794,70		946.889,57		776.330,11		874.093,00		894.623,21	4.910.733,75	Dinkes	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Lingkungan Sehat	Persentase Nagari ODF (Open Defecation Free)		8,6		21,5		43,01	-	69,89		75,27		97,85		97,85		Dinkes	
1	01	02	xx	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular				111.365,50		402.984,40		413.059,01		423.385,49		433.970,12		444.819,38	2.229.583,89
				Persentase Nagari dengan Posbindu PTM				20%		30%		40%		50%		60%		70%	70%
				Persentase deteksi dini Kanker serviks				2%		4%		6%		8%		10%		12%	12%
				Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa				80%		85%		90%		92%		95%		100%	100%
1	01	02	xx	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit Paru-paru Rumah Sakit Mata				9.941.126,46		78.062.190,70		80.013.745,46		17.933.000,00		18.381.325,00		18.840.858,13	223.172.245,74
				Persentase pemenuhan cakupan layanan rumah sakit				100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%
1	01	02	xx	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				45.746.400,23		59.863.400,58		61.359.985,59		62.893.985,23		64.466.334,87		66.077.993,24	360.408.099,74
				Persentase kemampuan Rumah Sakit dalam pemenuhan kebutuhan operasional				100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%
1	01	02	xx	Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah sakit						6.712.396,50		6.880.206,41		7.052.211,57		7.228.516,86		7.409.229,78	35.282.561,13
				Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Rawat jalan dan Inap)				0%		80%		82,50%		85%		87,50%		90%	90%
1	01	02	xx	Program Pengawasan obat dan Makanan								200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		750.000.000,00	
				Persentase makanan dan obat-obatan beredar sesuai standar kesehatan								75%		80		85%		85%	
1	01	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				166.425.919,89		181.352.443,24		186.886.254,32		113.690.148,75		119.632.402,47		125.723.212,53	893.474.385,93
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.280.250,00		2.424.374,98		2.484.984,35		2.547.108,96		2.610.786,69		2.676.056,35	14.023.561,34
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				13.764.972,67		28.350.788,56		29.059.558,28		29.786.047,24		30.530.698,42		31.293.965,88	162.786.031,04
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				49.769,60		160.450,00		164.461,25		168.572,78		172.787,10		177.106,78	893.147,51
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur				30.210,00		39.150,00		40.128,75		41.131,97		42.160,27		43.214,27	
1	01	03	xx	Program Pambanunan dan				89.977.884,34		77.066.757,34		78.993.426,27						246.038.067,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase Kondisi Jalan Baik	23,00	24,9		25,9		26,9								29,9		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (untuk tahun 2019 - 2021 nomenklatur Program disempurnakan menjadi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan)
		Persentase kondisi jalan mantap (baik+sedang)		36,15%		37%		37,86%								40,43%		
		Persentase jembatan kab.dalam kondisi baik		66,74		71,23		75,37								89,21		
		Panjang Jalan Strategis dan Jalan Non Status Terbangun (km)		20		20		20								60		
1	01	03	xx	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		9.776.696,51		4.269.682,56		4.376.424,62		7.585.835,24		10.875.481,12		14.247.368,15		51.131.488,20
				Persentase penurunan genangan air (%)		1,06		1,14		1,24		1,29		1,76		1,94		1,94
				Saluran drainase lingkungan kondisi baik (km)		5,42		5,42		2,44		38,34		30		14,55		96,17
				persentase drainase jalan kondisi baik (%)		40		43		45		52		54		55		55
1	01	03	xx	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		5.924.837,98		3.795.381,64		3.890.266,18		3.987.522,84		4.087.210,91		4.189.391,18		25.874.610,72
				Panjang jalan kabupaten yang Terpelihara (km)		2333,18		240		250		267		333		400		1730
				Persentase jembatan kabupaten Yang terpelihara (unit)		5,62		65,17		68,54		71,91		75,28		78,65		82,02
1	01	03	xx	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		56.399,75		5.805.908,78		5.951.056,50		6.099.832,91		6.252.328,73		6.408.636,95		30.574.163,62
				Persentase kelengkapan sarana prasarana kebinamargaan		45,75		48,60		51,40		71,00		62,90		71,40		71,40
1	01	03	xx	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jar. Pengairan Lainnya		22.730.984,91		25.740.848,79		26.384.370,01		27.043.979,26		27.720.078,74		28.413.080,71		158.033.342,42
				Persentase Irigasi kondisi baik (%)		46,42		47,14		49,02		51,64		54,27		56,99		59,72
1	01	03	xx	Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air		246.662,40		206.340,60		211.499,12		216.786,59		222.206,26		227.761,41		1.331.256,38
				Volume air yang tertampung (m3)		-		-		-		35.600		-		40.100		75.700
1	01	03	xx	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		48.301,40		2.172.648,20		2.226.964,41		2.282.638,52		2.339.704,48		2.398.197,09		11.468.454,09
				Persentase penduduk berakses air minum / air bersih		81,63		85,37		89,29		91,02		92,47		96,16		97,71
				Persentase penduduk bersanitasi baik		62,7		63,76		63,80		64,63		65,77		67,85		69,95
1	01	03	xx	Program Pengendalian Banjir		14.516.575,20		14.755.519,40		15.124.407,39		15.502.517,57		15.890.080,51		16.287.332,52		92.076.432,59
				Persentase penurunan genangan air		1,06		1,14		1,24		1,29		1,76		1,94		1,94

1				2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Persentase bantaran sungai dan pantai yang aman		7,25		8,63		10,01		12,02		13,69		15,29		15,29		Sumber Daya Air
	01	03	xx	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan						50.000,00		51.250,00		52.531,25		53.844,53		55.190,64		262.816,43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
					Persentase Bangunan Pemerintah yang terbangun		13,33%		16,67%		16,67%		23,33%		20%		10%		100%		
					Persentase bangunan Strategis yang terbangun		25%		25%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		100%		
1	01	03	xx	Program Pengaturan Jasa Konstruksi				17.966,00		25.532,10		26.170,40		26.824,66		27.495,28		28.182,66		152.171,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase usaha jasa konstruksi yang memiliki izin (%)		102	98	96		85	-	85		85		85		534		
1	01	03	xx	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				1.034.621,20		453.998,04		465.347,99		476.981,69		488.906,23		501.128,88		3.420.984,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase Kesesuaian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Tata Ruang		60%		65%		70%		75%		80%		80%		80%		
1	02	05	xx	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				4.367.487,43		4.676.402,27		4.793.312,33		4.913.145,14		5.035.973,77		5.161.873,11		28.948.194,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase penduduk terlayani pengelolaan Persampahan		40		40		50		50		60		60		60		
					Persentase RT yang terlayani pengelolaan lumpur tinja		30		35		35		40		50		50		50		
1	02	05	xx	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				631.717,54		3.829.628,56		3.925.369,27		4.023.503,51		4.124.091,09		4.227.193,37		20.761.503,35	
					Pembangunan Jalan Desa (km)		15		15		20		20		25		25		25		perkimtan / PUPR
1	01	03	xx	Program Monitoring, evaluasi dan pelaporan				616.156,96		430.329,42		441.087,65		452.114,84		463.417,72		475.003,16		2.878.109,75	
					persentase kegiatan yang tidak bermasalah dalam pelaksanaannya		95		95		100	-	100		100		100		100		
1	01	03	xx	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				1.354.426,00		7.098.702,00		7.276.169,55		7.458.073,79		7.644.525,63		7.835.638,77		38.667.535,75	
					Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah strategis		25	27	37		40		43		46		50		50		
1	01	03	xx	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peribadatan								1.000.000		1.025.000,00		1.050.625,00		1.076.890,63		4.152.515,63	
					Persentase sarana peribadatan pmda kondisi baik (%)								70		75		80		80,00		
1	01	03	xx	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan										61.930.000		62.700.000		65.881.000		190.511.000	
					Proposi Kondisi Jalan Baik								28,90%		29,90%		30,90%		30,9		
					Persentase kondisi jalan mantap (baik+sedang)								38,72%		39,58%		40,43%		40,43%		Dinas Pekerjaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Persentase jembatan kab.dalam kondisi baik								28,0%		84,72%		89,21%		89,21%		Umum dan Penataan Ruang	
		Panjang Jalan Strategis dan Jalan Non Status Terbangun (km)								20		20		20		60,00			
1	01	03	xx	Program Pembangunan sistem informasi / database jalan dan jembatan							350.000		450.000		550.000		1.350.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase database jalan dan jembatan yang valid						90%		95%		100%		1,00			
1	01	03	xx	Program perencanaan tata ruang							1.800.000		1.800.000,00		1.800.000,00		5.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase kawasan strategis dan kawasan perkotaan yang memiliki Rencana detail tata ruang						40%		50%		60%		0,60			
1	01	03	xx	Program pemanfaatan ruang							100.000		110.000		120.000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				persentase kesesuaian pemanfaatan ruang						75%		80%		80%		80%			
1	01	03	xx	Program pembangunan sarana dan prasarana peribadatan							5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase sarana peribadatan kewenangan daerah kondisi baik						80%		85%		85%		85%			
1	01	03	xx	Program pembangunan turapitalud/bronjong							6.000.000		6.300.000		6.500.000		18.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase kerusakan sungai yang tertangani						30%		33%		36%		36%			
1	01	03	xx	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan		693.208		693.208		693.208		710.538,20		728.301,66		746.509,20		4.264.973,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				persentase taman kota kondisi baik (%)		63		65		70		80		90		100		100,00	
1	01	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN															
						3.451.214,82		63.645.405,60		65.236.540,74		74.080.881,15		90.059.153,18		91.879.132,01		388.352.327,50	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.567.396,30		1.606.581,21		1.646.745,74		1.687.914,38		1.730.112,24		8.238.749,87	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.686.302,90		2.753.460,47		2.822.296,98		2.892.854,41		2.965.175,77		14.120.090,53	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				45.000.000,00		46.125.000,00		47.278.125,00		48.460.078,13		49.671.580,08		236.534.783,20	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur				3.000.000,00		3.075.000,00		3.151.875,00		3.230.671,88		3.311.438,67		15.768.985,55	
1	01	04	xx	Program Pengembangan perumahan		122.181,75		3.142.839,45		3.221.410,44		3.301.945,70		3.384.494,34		3.469.106,70		16.641.978,37	Dinas Perumahan, Kawasan
				Rasio rumah layak huni		-		0,2134		0,2178		0,2211		0,2233		0,2255		0,2255	(APBD+APBN+DLL)
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)				94,02		93,88		94,45		94,89		95,30		95,30	
1	01	04	xx	Program Lingkungan Sehat perumahan		3.329.033,07		8.118.874,70		8.321.846,57		8.529.893		8.743.140		8.961.719		46.004.505,67	Dinas Perumahan, Kawasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Rasio permukiman layak huni				96,80		96,82		96,95		97,09		97,25		97,25			
		Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)				0,0845		0,0824		0,0789		0,0754		0,0720		0,0720			
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU				5,88		11,76		17,65		18,45		19,59		19,59			
1	01	04	xx	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan				129.992,25		133.242,06							263.234,31		
				persentase penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu			80	85	-								85,00	-	
1	01	04	xx	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan						-	150.000		150.000		150.000		450.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
				Persentase permukiman tertata (%)			96,74	96,82	-	96,95		97,08		97,22		97,22	-		
1	01	04	xx	Program pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman						-	7.200.000		21.510.000		21.620.000		50.330.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
				Persentase kawasan permukiman tertata (%)			96,74	96,82	-	96,95		97,08		97,22		97,22%			
1	01	05		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		7.332.454,44		26.389.340,75		27.049.074,27		27.725.301,13		28.418.433,65		29.128.894,50		146.043.499	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.030.386,43		1.765.282,63		1.809.414,70		1.854.650,06		1.901.016,31		1.948.541,72		10.309.292	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		308.947,01		740.624,83		759.140,45		778.118,96		797.571,94		817.511,23		4.201.914	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur		115.929,15		203.619,60		208.710,09		213.927,84		219.276,04		224.757,94		1.186.221	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		221.827,01		110.839,20		113.610,18		116.450,43		119.361,70		122.345,74		804.434	
1	01	05	xx	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		312.000,92		1.160.194,79		1.189.199,65		1.218.930		1.249.403		1.280.638		6.410.366	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran ; Setda
				Persentase penegakan perda (%)	96	97	98	98	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, kesbang pol (setda)
1	01	05	xx	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		536.424,98		1.152.922,08		1.181.745,13		1.211.289		1.241.571		1.272.610		6.596.562	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
				Persentase penurunan tingkat kriminalitas	3	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	15%		
				Persentase penurunan pungli di Kabupaten Pesisir Selatan		75%	80%	80%	80%	85%	90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%		
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Kenyamanan, keindahan) %	95%	95%	95%	98%	98%	98%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%		
1	01	05	xx	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat		436.975,30		312.751,70		320.570,49		328.584,75		336.799,37		345.219,36		2.080.900,98	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				(pekat)	Persentase penurunan kasus narkoba tingkat pelajar		5%		5%		5%	-	5%		5%		5%		25%		Setda (Bagian Kesbangpol)	
1	01	05	xx	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran						2.198.871,61		2.253.843,40		2.310.189,49		2.367.944,22		2.427.142,83		11.557.991,55	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Setda	
					Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten	0,39	0,52		0,52		0,52	-	0,52		0,52		0,52		0,52			
1	01	05	xx	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	60,94	52,38	510.592,30	61,22	418.895,60	66	429.367,99	71,15	440.102,19	73,58	451.104,74	79,63	462.382,36	79,63	2.712.445,18	BPBD	
					Persentase perangkat daerah yang memahami tupoksi dalam penanggulangan bencana (%)	25%	25%		50%		65%	70%	80%		90%		90%		90%			
1	01	05	xx	Program Kesiapsiagaan				392.561,40		292.596,97		299.911,89		307.409,69		315.094,93		322.972,31		1.930.547,20	BPPD	
					Jumlah KSBS dibentuk (unit)	5	5		5		10	-	13		15		20		20			
					Jumlah kelompok perempuan yang memahami resiko bencana	10	20		20		30	-	40		50		60		60			
1	01	05	xx	Program peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat dan pemangku lainnya dalam pengurangan bencana				97.497,60		107.601,80		110.291,85		113.049,14		115.875,37		118.772,25		663.088,01	BPBD	
					Jumlah KSBN yang dibentuk	5	5		10		15		25		35		45					
1	01	05	xx	Program Penanganan tanggap darurat				1.938.525,01		350.216,35		358.971,76		367.946,05		377.144,70		386.573,32		3.779.377,20	Satpol PP dan BPBD	
					Persentase kejadian bencana diatasi	75%	80%		80%		80%	-	80%		80%		80%		80%			
1	01	05	xx	Program Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana				565.889,13		10.520.000,00		10.783.000,00		11.052.575,00		11.328.889,38		11.612.111,61		55.862.465,11	SATpol PP & BPBD	
					persentase sarpras penanggulangan bencana kondisi baik (%)		73		75		78	-	80		85		90		90			
1	01	05	xx	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi				744.499,26		6.985.954,00		7.160.602,85		7.339.617,92		7.523.108,37		7.711.186,08		37.464.968,48	BPBD	
					Panjang jalan dan jembatan pasca bencana yang direhabilitasi & direkonstruksi (m)	54/8	53/12		2500/104		2500/104	-	2500/104		2500/104		2500/104		2500/104			
1	01	05	xx	Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana				120.398,95		68.969,60		70.693,84		72.461,19		74.272,72		76.129,53		482.925,83	BPBD	
					Persentase kejadian bencana yang terdata	65%	65%		70%		70%		70%		75%		80%		80%			

1				2		3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKKS dan TKSK yang meningkat kinerjanya		68	11		128		133	-	138		143		148		148		Dinsos, PP & PA
1	01	06	xx	Program penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan	Jumlah generasi muda yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan (orang)				70.537,32		79.444,05		81.430,15		83.465,91		85.552,55		87.691,37		488.121,35	Dinsos, PP & PA
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					32.143.513,79		58.159.020,34		59.612.995,85		88.237.702,84		91.486.755,30		97.689.567,99		427.329.556,10	
1	02	01		TENAGA KERJA					508.932,88		1.716.675,75		1.759.592,64		4.038.291,60		4.139.248,89		4.242.730,11		16.405,472	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							678.601,00		695.566,03		712.955,18		730.779,06		749.048,53		3.566,950	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							481.284,30		493.316,41		505.649,32		518.290,55		531.247,81		2.529,788	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							45.000,00		46.125,00		47.278,13		48.460,08		49.671,58		236,535	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
1	02	01	xx	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (%)				400.538,48		236.487,00		242.399,18		248.459,15		254.670,63		261.037,40		1.643.591,84	Dinas Nakertrans
1	02	01	xx	Program peningkatan kesempatan kerja	Jumlah pencari kerja yang dilempakan (orang)				69.962,80		213.648,45		218.989,66		224.464,40		230.076,01		235.827,91		1.192.969,24	Dinas Nakertrans
					Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)		56,74	60,43		61,17		61,41		62,12		62,5		63		63		
1	02	01	xx	Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Angka sengketa pekerja dan pengusaha per tahun				38.431,60		61.655,00		63.196,38		64.776,28		66.395,69		68.055,58		362.510,53	Dinas Nakertrans
1	02	01	xx	Program Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)				-		-		-		2.234.709,14		2.290.576,87		2.347.841,29		6.873.127,30	Dinas Nakertrans
1	02	02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					570.536,35		678.886,67		956.358,84		1.229.642,81		1.210.508,88		1.262.971,60		5.908.905,14	
1	02	02	xx	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	persentase nagari layak anak				143.270,35		146.852,11		150.523,41		154.286,50		158.143,66		162.097,25		915.173,28	Dinas Sosial
														4,40		6,59		8,79		9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		persentase pemberitahuan dan pembinaan forum anak daerah di kecamatan				6,67		26,67		46,67		73,33		100,00		100		Dinas Sosial	
1	02	02	xx	Program penguatan Kelembagaan dan Penganutamaan Gender dan Anak	Patisipasi angkatan kerja perempuan (%)	-	71,60	72,10	72,90	25.000,00	73,40	275.000,00	74,20	232.000,00	75,10	260.000,00	75,10	792.000,00	
					persentase peningkatan peran perempuan dalam pembangunan				16,67		33,33		66,67		100,00			Dinas Sosial	
1	02	02	xx	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan					82.034,56		84.085,42		86.187,56		88.342,25		90.550,80		349.166,04
					Rasio KDRT (%)	-	0,210	0,210	0,018	-	0,015		0,014		0,010		0,010	-	Dinas Sosial
1	02	02	xx	Program penguatan dan pembangunan kelembagaan beserta jaringan dan penyusunan regulasi daerah			200.000		200.000		200.000		205.000,00		210.125,00		215.378,13		830.503,13
					Perentase kelembagaan daerah yang responsif gender (%)		55		60		65		70		75		80		
1	02	02	xx	Program Perlindungan Anak			77.266,00		70.000,00		71.750,00		73.543,75		75.382,34		77.266,90		297.943,00
					Persentase penurunan kasus kekerasan anak (%)		15		12		10		8		6		4		4
1	02	02	xx				150.000		180.000		175.000		179.375,00		183.859,38		188.455,86		726.690,23
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/ Nagari															
					Persentase peningkatan perempuan di nagari dan kecamatan (%)														
2	01	02	xx	4 Program Peningkatan Peran Serta Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah (%)	8,77	8,77	-	8,87	8,91	250.000,00	9,1	256.250,00	9,5	262.656,25	10	269.222,66	10	1.038.128,91
					Partisipasi perempuan dilembaga swasta (%)	-	0,19		2,89	3,91		5,31		5,35		5,50		5,50	Dinas Sosial
1	02	03		PANGAN			2.624.434,53		2.707.564,50		2.775.253,62		2.844.634,96		2.915.750,83		2.988.644,60		16.856.283
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			621.301,57		472.523,54		484.336,63		496.445,05		508.856,17		521.577,58		3.105,041
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			345.957,30		342.479,10		351.041,08		359.817,10		368.812,53		378.032,85		2.146.140
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			48.743,00		37.425,80		38.361,45		39.320,48		40.303,49		41.311,08		245.465
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
1	02	03	xx	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)			705.940,97		571.050,13		585.326,38		599.960		614.959		630.332		3.707.568
					- Ketersediaan Pangan Utama (kg/Jiwa/Thn)	112,93	132		135		137		139		142		144		144
					- Ketersediaan Energi (kcal/kap/hari)	3754	2400		2420		2440		2460		2480		2500		2500

1				2		3		4		5		6		7		8		9		8		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
						- Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	83,73	63			65			67			69			71			73			73													
						- Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen																																	
						1. Harga Gabah	4054	≥ HPP			≥ HPP			≥ HPP			≥ HPP			≥ HPP			≥ HPP			≥ HPP													
						2. Harga Beras	7848	≥ HPP			≥ HPP			≥ HPP			≥ HPP			≥ HPP			≥ HPP			≥ HPP													
						- Stabilitas Harga Pangan Pokok di Tingkat Konsumen	12,90	CV ≤ 5			CV ≤ 5			CV ≤ 5			CV ≤ 5			CV ≤ 5			CV ≤ 5			CV ≤ 5													
						- Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	74,60	76			77			78			79			80			81			81													
1	02	03	xx	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					902.491,69			1.284.085,93			1.316.188,08			1.349.093			1.382.820			1.417.391			7.652.069									Dinas Pangan			
						- Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan :																																	
						1. Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	2320	2150			2150			2150			2150			2150			2150			2150													
						2. Konsumsi protein (gram/kap/hari)	59,2	57			57			57			57			57			57			57													
1	02	04		PERTANAHAN					4.091.671,36			12.108.981,10			12.411.705,63			13.873.190,22			15.667.152,01			17.418.127,51			75.570.827,83												
1	02	04	xx	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan					62.582,46			108.706,40			111.424,06			114.209,66			117.065			119.991,53			633.979,01												
						Penyelesaian kasus tanah negara (kasus)	-	-			8			10			10			10			10			10											Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan BPKD		
1	02	04	xx	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah					4.029.088,90			11.936.987,48			12.235.412,17			13.728.980,56			15.519.337			17.266.617,23			74.716.423,45												
						Persentase luas tanah bersertifikasi (%)	-	-			46			49			53			57			62			62,00													
1	02	04	xx	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian								63.287,22			64.869,40			30.000,00			30.750			31.518,75			220.425,37												
						Jumlah sistem informasi yang ada					ada			ada			ada			ada			ada			ada											Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian		
1	02	05	xx	LINGKUNGAN HIDUP					3.895.293,93			3.521.757,95			3.679.801,90			3.700.046,95			3.792.548,12			3.887.361,83			22.476.810,69												
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				539.144,70			482.686,81			494.753,98			507.122,83			519.800,90			532.795,93			3.076.305,15											
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				226.032,45			517.452,39			530.388,70			543.648,42			557.239,63			571.170,62			2.945.932,20											
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				48.830,90			35.000,00			35.875,00			36.771,88			37.691,17			38.633,45			232.802,40											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
1	02	05	xx	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.219.171,28		1.377.016,69		1.411.442,11		1.446.728,16		1.482.896,37		1.519.968,78		9.457.223,40	Dinas LH	
				Indeks Kualitas Air	C Dan D (Tercemar Sedang)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	
				Indeks Kualitas Udara:	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	
				Indeks Tutupan Lahan	70,009	70,279	70,559	71,25	71,692	71,692	72,458	72,458	72,702	72,702	72,702	72,702	72,702	72,702	
1	02	05	xx	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	450.000,00		461.250,00		472.781,25		484.600,78		496.715,80		509.133,70		2.874.481,53	Dinas LH	
				Jumlah kampung pro-iklim yang aktif (unit)	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12		
				Calon penerima kalpataru (orang)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6		
1	02	05	xx	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan	352.114,60		588.352,06		603.060,86		618.137		633.591		649.431		3.444.686,30	Dinas LH, Dinas PUTR	
				Indeks Kualitas Air	C Dan D (Tercemar Sedang)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	
				Indeks Kualitas Udara:	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	
				Indeks Tutupan Lahan	70,009	70,279	70,559	71,25	71,692	71,692	72,458	72,458	72,702	72,702	72,702	72,702	72,702	72,702	
1	02	05	xx	Program peningkatan pengendalian polusi	60.000		60.000		61.500		63.038		64.613		66.229		375.380		
				Pencapaian kualitas air		dibawah baku mutu	dibawah baku mutu	dibawah baku mutu	dibawah baku mutu	dibawah baku mutu	dibawah baku mutu	dibawah baku mutu	dibawah baku mutu	dibawah baku mutu	dibawah baku mutu	dibawah baku mutu	dibawah baku mutu	dibawah baku mutu	
1	02	05	xx	Program pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten pesisir selatan					70.000								70.000,00		
				peningkatan luasan tutupan lahan (Ha)				10									70		
1	02	06	xx	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.121.127,54		4.840.521,58		6.461.534,62		6.623.072,99		6.788.649,81		6.958.366,06		33.793.272,60		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	563.434,90		670.720,30		687.488,31		704.675,52		722.292,40		740.349,71		4.088.961,14		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	334.370,15		828.543,95		849.257,55		870.488,99		892.251,21		914.557,49		4.689.469,34		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49.223,10		50.000,00		51.250,00		52.531,25		53.844,53		55.190,64		312.039,53		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
1	02	06	xx	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.174.099,39		3.291.257,33		4.873.538,77		4.995.377,23		5.120.262		5.248.268,21		24.702.802,59	Dinas Adminduk Capil dan Kecamatan	
				Rasio penduduk ber KTP bersatuan penduduk	0,66	0,85	0,86	0,88	0,91	0,91	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	Dinas Adminduk Capil	
				Persentase peningkatan kepemilikan Kartu Keluarga	1,66%	95,00%	96,54%	97,25%	97,97%	97,97%	97,99%	97,99%	98,69%	98,69%	98,69%	98,69%	98,69%	Dinas Adminduk Capil	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Persentase peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		0,00%		0,58%		17,27%		28,78%		40,30%		51,81%		51,81%		Dinas Admindak Capil	
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	224,46	368,44		381,28		457,57		594,79		684,79		820,81		820,81		Dinas Admindak Capil	
1	02	07	xx	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				2.138.638,49	3.343.381,71		4.399.513,42	5.414.448,54		5.752.648,35		6.086.990,69		27.135.621,20	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				791.714,16		994.219,06		1.019.074,54		1.044.551,40		1.070.665,19		1.097.431,82		6.017.656,17	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				45.795,00		30.000,00		30.750,00		31.518,75		32.306,72		33.114,39		203.484,86	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				24.600,00		39.145,86		40.124,50		41.127,62		42.155,81		43.209,70		230.363,48	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
1	02	07	xx	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari			799.161,73											799.162	BPM dan Kec
				Persentase nagari yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	10	20												20	
				persentase nagari yang dibina dan di monev		100												100	Bag Nagari Setda
1	02	07	xx	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda			34.754,12											34.754	Bag Nagari Setda
				Persentase praktek kerja lapangan yang difasilitasi	100	100												100	
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pemerintahan Nagari			93.194,35											93.194	
				Jumlah Ranperda dan Ranperbub tentang nagari		2												2	BAgian Nagari Setda
1	02	07	xx	Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa							1.117.354		1.263.065		1.405.270			3.785.689	
				Persentase nagari dengan tata kelola keuangan yang baik	10	16,48		24,75		41,21		54,95		64,83		71,43		71,43	DPM&DPPKB dan Kecamatan
				Jumlah Desa Yang Maju dan mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan	1	1		2		2		3		4		5		5	DPM&DPPKB
1	02	07	xx	Program Pengembangan lembaga sosial perdesaan		51,5	56,45	65,05		70,43		75,81	806.978,00	81,18	912.214,00	86,56	1.014.917,00	86,56	2.734.109
				Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif membina kelompok (%)															
				Persentase PKK aktif (%)	48	100		100		100		100		100		100		100	DPM&DPPKB dan Kecamatan
				persentase KAN yang aktif	54,05	54,05		64,86		71,97		81,08		86,49		91,84		91,84	DPM&DPPKB
1	02	07	xx	Program pengembangan lembaga ekonomi							930.000,00		953.250,00		977.081,25			2.860.331,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif	40%	40%		40,5%		41%		41,5%		42%		52,5%		52,50		DPM&DPPKB		
1	02	07	xx	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari		102.333,65		177.622,46		182.063,02							462.019,13			
				Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan		10		70		75							85		DPM&DPPKB	
1	02	07	xx	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa		247.085,48		326.750,00		334.918,75							908.754,23			
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Nagari		40		40		45							50		DPM&DPPKB	
1	02	07	xx	Program pemberdayaan lembaga pemerintahan desa/nagari				257.027,15		1.236.000,00		1.266.900,00		1.298.572,50		1.331.036,81		5.389.536,46		
				persentase nagari memiliki lembaga pemerintahan aparatur				43,96		60,44		71,43		93,41		100		100	DPM&DPPKB	
1	02	07	xx	Program pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari				1.351.079,98		1.384.856,98							2.735.937			
				Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif membina kelompok (%)		51,5		56,45		65,05		70,43		81,18		86,56		86,56	DPM&DPPKB	
				Persentase PKK aktif (%)		48		100		100		100		100		100		100	DPM&DPPKB	
				Jumlah Dasa Wisma Maju		-		-		470		545		645		720		870	DPM&DPPKB	
				persentase KAN yang aktif		54,05		54,05		64,86		71,97		81,08		86,49		91,84	DPM&DPPKB	
1	02	07	xx	Program pengembangan kawasan pedesaan				167.537,20		171.725,63		176.018,77		180.419,24		184.930		880.631		
				persentase kawasan pedesaan yang dikembangkan		10		15		20,00		25,00		-		30,00		35,00	40	40
1	02	08	xx	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.780.048,48		2.865.245,55		2.958.422,72		6.058.581,23		7.262.621,11		7.585.834,71		28.510.754
1	02	08	xx	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Pelayanan Keluarga Berencana			1.300.248,68		1.968.595,10		2.017.809,98		2.068.255,23		2.119.961,61		2.172.960,65		11.647.831,24	
				Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)		100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase klinik yang terpenuhi sarprasnya		70		70		72		74		-		76		78	80	80
1	02	08	xx	Program Keluarga Berencana			420.527,70		519.963,65		532.962,74		2.500.000,00		2.550.000,00		2.600.000,00		9.123.454,09	
				Rasio Apseptor KB (%)		70,72		71,15		71,26		71,40		71,50		71,60		71,60		DPM&DPPKB, kecamatan
				Persentase KB Unmet Need		18,50		18,60		18,65		18,70		18,75		18,80		18,80		DPM&DPPKB, kecamatan
1	02	08	xx	Program Pelayanan Keluarga Berencana								615.526,00		695.795,00		774.133,00		2.085.454,00		
				Persentase KB Pria		1,1						1,20		1,25		1,30		1,30		DPM&DPPKB, kecamatan
				Persentase KB Wanita		67,10						67,70		67,90		1,10		1,10		DPM&DPPKB, kecamatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Persentase yang mengikuti KB MKJP	20,00	20,50		20,55		20,60		20,65		20,70		20,70		20,70				
1	02	08	xx	Program Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pelayanan KB/BKR yang Mandiri					66.000,00		67.650,00		76.300,00		86.250,00		95.961,00	392.161,00		
				Jumlah BKB yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD, BKR dan BKL	71	71		73		75		78		80		82		82	DPM DPP&KB,	
				Jumlah kelompok LIP2KS (usaha Peningkatan Perekonomian Keluarga Sejahtera)	73	73		73		73		73		73		73		73,00		
1	02	08	xx	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat										992.152		1.103.856		2.096.008		
				Jumlah pelayanan informasi, promosi dan sosialisasi									24		24		24		DPM DPP&KB	
1	02	08	xx	Program Kesehatan Reproduksi Remaja					59.272,10									59.272,10		
				Jumlah Kelompok PIK remaja /Mahasiswa	26	26											26		DPM DPP&KB	
1	02	08	xx	Program penguatan kelembagaan					155.877,75									155.877,75		
				persentase kelembagaan KB yang telah ada				10									10		DPM DPP&KB	
1	02	08	xx	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri									450.000,00		461.250,00		472.781,25	1.384.031,25		
				Persentase lembaga KB yang aktif						80		90		100		100		100	DPM DPP&KB	
1	02	08	xx	Program kemitraan Keluarga Berencana							340.000,00		348.500,00		357.212,50		366.142,81	1.411.855,31		
				Persentase MKJP	20,00	20,50		20,55		20,60		20,65		20,70		20,70		20,70	DPM DPP&KB	
1	02	08	xx	Program pembinaan institusi peduli KKBP (Kependudukan KB dan pembangunan keluarga					154.809,05									154.809,05		
				persentase kampung KB yang dibina				0,63									0,63		DPM DPP&KB	
1	02	09	xx	PERHUBUNGAN					4.840.728,25		6.637.566,95		15.972.497,42		19.706.294,94		18.249.952,31	20.602.201,12	86.009.241	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					900.321,95		1.025.324,99		1.050.958,11		1.077.232,07		1.104.162,87		1.131.766,94	6.289.767
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					504.050,74		897.251,50		919.682,79		942.674,86		966.241,73		990.397,77	5.220.299
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					43.360,05		42.500,00		43.562,50		44.651,56		45.767,85		46.912,05	266.754
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur					103.883,80		106.480,90		109.142,92		111.871,49		114.668,28		116.668,28	546.047
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan					51.534,48		115.048,44		117.924,65		120.872,77		123.894,59		126.991,95	656.267

1				2				3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				Keuangan				Persentase kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana	100	100		100		100	-	100		100		100		100		100			
1	02	09	xx	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan							1.015.590,92				2.668.695,61				925.000		948.125		971.828		9.264.653	Dinas Perhubungan	
				Jumlah halte (unit)				25	25			25			28		30			33		35		35			
				Jumlah dermaga/tambatan kapal (unit)				1	1			1			2		3			4		5		5			
				Jumlah terminal (unit)				2	2			2			3		4			5		6		6			
				Persentase sarana perhubungan yang terpenuhi (%)						8			11		11		14			14		14		75			
1	02	09	xx	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ							389.893,72				162.635,42				600.000		800.000		800.000		2.919.230	Dinas Perhubungan	
				Persentase alat keselamatan lalu lintas yang berfungsi baik (%)				-	15,12			8,33			8,00		8,00			8,00		8,00		55,45			
				Persentase Prasarana Perhubungan dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik				-	65			70			75		80			85		90		90			
1	02	09	xx	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas							439.340,45				322.935,32				9.737.500,00		9.980.937,50		10.230.460,94		40.211.174,20	Dinas Perhubungan	
				Persentase pemenuhan sarana pengamanan lalu lintas					8			8			135 bh		3363 bh			3363 bh		3363 bh		3363 bh		-	Dinas Perhubungan
1	02	09	xx	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan							532.636,69				751.191,69				789.221		808.951		829.175		4.481.149	Dinas Perhubungan	
				Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)				30	30			30			30		30			30		30		30			
				Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi				-	40			45			50		55			60		65		65			
1	02	09	xx	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan															4.300.000		2.300.000		4.300.000		10.900.000	Dinas Perhubungan	
				Jumlah halte (unit)				25	25			25			28		30			33		35		35			
				Jumlah dermaga/tambatan				1	1			1			2		3			4		5		5			
				Jumlah terminal (unit)				2	2			2			3		4			5		6		6			
				Persentase sarana perhubungan yang terpenuhi (%)						8			11		11		14			14		14		75			
1	02	09	xx	Program Peningkatan Kelainan Pengoperasian Kendaraan Bermotor							693.809,20				393.643,88				470.000		470.000		470.000		2.900.938	Dinas Perhubungan	
				Jumlah Uji KIR angkutan umum (unit)				954	7.200			7.400			7.500		8.000			8.500		9.000					
				Jumlah Kendaraan yang layak jalan					8.895			350.000			72000		7200			8.200		87.000		533.295			
1	02	09	xx	Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpajakan							270.188,05				154.456,30				590.000		590.000		590.000		2.352.962	-	
				persentase kenaikan penerimaan dari retribusi parkir (%)					10			10			10		10			10		10		10			
1	02	10		KOMUNIKASI DAN INFORMASI							1.908.896,32				7.127.185,84				7.933.581,78		8.044.421,33		8.158.031,86		40.477.483		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						774.474,80		793.836,67		813.682,59		834.024,65		854.875,27		4.070.894		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						624.540,00		640.153,50		656.157,34		672.561,27		689.375,30		3.282.787		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						34.050,00		34.901,25		35.773,78		36.668,13		37.584,83		178.978		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100	28.278,00		28.984,95								57.263		
1	02	10	xx	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa			359.694,91		1.184.441,24		1.214.052,27		250.000		256.250		262.656		3.527.095
								60		65		65		70		73		73	Dinas Kominfo
1	02	10	xx	Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi					373.129,00		382.457,23								755.586
										40		50		60		70		80	
								80		85		88		90		95		95	Dinas Kominfo
1	02	10	xx	Program Penyelenggaraan E-Government					2.263.334,30		2.319.917,66		3.500.000		3.500.000		3.500.000	45	15.083.252
										98		100		100		100		100	
										98		100		100		100		100	
										100		100		100		100		100	
										16,48		41,21		74,18		87,91		100,00	100
1	02	10	xx	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika					96.006,50		100.456,66		102.968		105.542		108.181		515.154
								50		60		80		85		90		90	Dinas Kominfo
1	02	10	xx	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa			1.549.201,41		1.746.932,00		1.790.605,30		2.575.000,00		2.639.375,00		2.705.359,38		13.006.473,08
								25 Media Massa		27 Media Massa		27 Media Massa		27 Media Massa		27 Media Massa		160 Media Massa	Selda (Bagian Humas)
1	02	11		KOPERASI & UMKM			912.877,60		1.711.524,50		1.754.312,61		3.027.848,45		3.211.569,66		3.381.208,90		13.999.342
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			40.030,82		636.931,70		652.854,99		669.176,37		685.905,78		703.053,42		3.387.953
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			258.171,45		509.857,00		522.603,43		535.668,51		549.060,22		562.786,73		2.938.147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					46.603,80		45.000,00		46.125,00		47.278,13		48.460,08		49.671,58		283.139	
									-									-
							28.963,40		29.687,49									58.650,89
								100		100							100	
1	02	11	xx		182.487,97		206.282,40		211.439,46		216.725,45		222.143,58		227.697,17		1.266.776,03	
					36	37		43		45	0	47		49		51		51
					55	55		58		61		64		67		70		70
						0		5		10	0	15		20		25		25
1	02	11	xx		385.583,56		242.596,00		248.660,90		1.384.000,00		1.516.000,00		1.638.000,00		5.414.840,46	
					99,23	99,23		98,20		97,50		97,00		96,50		96,00		96,00
1	02	11	xx				41.894,00		42.941,35		175.000,00		190.000,00		200.000,00		649.835,35	
						300		300		300	-	300		300		300		1800
1	02	12			1.613.600,08		2.098.899,19		2.151.371,67		2.199.133,89		2.334.356,13		2.468.088,44		12.865.449	
					568.208,01		720.065,00		738.066,63		756.518,29		775.431,25		794.817,03		4.353.106	
					92.761,50		365.555,20		374.694,08		384.061,43		393.662,97		403.504,54		2.014.240	
					49.597,20		45.000,00		46.125,00		47.278,13		48.460,08		49.671,58		286.132	
									-									
1	02	12	xx		495.102,90		323.273,19		331.355,02		371.803,30		420.289		467.608,30		2.409.431,81	Dinas Penanaman Modal
					62,5	68		70		72		74		76		78		500,50
					33,5	34		35		35,5		36		36,5		37		37
1	02	12	xx		145.096,78		306.369,50		314.028,74		250.000		256.250		262.656		1.534.401	Dinas Penanaman Modal
					9	10		11		12		13		14		15		15
					0	0		1 MoU		1 MoU		1 MoU		1 MoU		1 MoU		5 MoU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	02	12	xx	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	262.833,70		338.636,30		347.102,21		389.472,74		440.263		489.830,74		2.268.138,43	Dinas Penanaman Modal
				Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	2500	2500		2500		3000		3000		3500		19.500,00	-	
1	02	13		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			1.881.280,70		2.544.067,37		2.607.669,05		2.672.861		2.739.682		15.253.735	
1	02	13	xx	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	620.916,50		636.439,41		652.350,40		668.659,16		685.375,64		702.510,03		3.966.251,13	
				peningkatan jumlah sarana olahraga (unit)	3	4		7		10		13		15		17		-
				Jumlah gedung olahraga (unit)	12	13		15		15		18		19		20		20,00
1	02	13	xx	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1.071.784,45		896.099,62		918.502,11		941.464,66		965.001,28		989.126,31		5.781.978,43	
				Jumlah Klub olah raga yang berkembang di masyarakat	2	2		3		4		5		6		7,00		1.503,027
1	02	13	xx	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	99,3	188.579,75		1.011.528,34		1.036.816,54		1.062.736,96		1.089.305,38		1.116.538,02		
				Peringkat pemuda pelopor		8 besar		8 besar		5 besar		5 besar		3 besar		3 besar		3 besar
1	02	13	xx	Program Pembinaan Olah Raga Berprestasi														
				Jumlah prestasi olah raga	5	6		8		10		13		15		20		77
				Jumlah atlet berprestasi (org)	20	25		30		35		40		45		50		50
1	02	14		STATISTIK			136.431,69		136.431,69		139.842,48		143.338,54		146.922,01		150.595,06	
1	02	14	xx	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	136.431,69		136.431,69		139.842,48		143.338,54		146.922,01		150.595,06		853.561,47	
				ketersediaan data statistik sektoral	0	1 dok		0		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
1	02	15		PERSANDIAAN			-		-		224.413,86		230.024,21		235.774,81		690.212,88	
1	02	15	xx	Proram Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah														
				Terlaksananya Pengamanan data Pemerintah Daerah	0	0 PD		0 PD		10 PD		15 PD		15 PD		5 PD		45 PD
1	02	16		KEBUDAYAAN			2.217.526,79		3.500.250,20		3.587.756,46		5.695.600,00		6.076.660,00		27.535.119,45	
1	02	16	xx	Program Pengembangan Nilai Budaya					1.932.376,60		1.980.686,02		2.395.800,00		2.635.380,00		11.843.160,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah Grup kesenian/sanggar budaya yang berkembang (unit)	66	66		67		68		69		70		71		71
1	02	16	xx	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			2.217.526,79		1.350.507,00		1.384.269,68		1.064.800,00		1.171.280,00		1.288.408,00	
				Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan	4	15		17		21		25		29		33		33
1	02	16	xx	Program Peningkatan IMTAQ					217.366,60		222.800,77		2.235.000,00		2.270.000,00		2.270.000,00	
				Peringkat MTQ Pesisir Selatan				8 besar		7 besar		5 besar		5 besar		5 besar		5 besar
1	02	17		KEPUSTAKAAN			233.369,12		1.127.190,94		1.155.370,71		1.184.255		1.213.861		1.244.208	
2	01	17	xx	Program Pengembangan Pustaka Baca dan	233.369,12		870.484,94		892.247,06		914.553,24		937.417,07		960.852,50		4.808.923,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan angka kunjungan ke perpustakaan umum daerah, puskel, OPD, Nagari, TBM dll (org/thn)	5.000	5.160		15.000	20.000		30.000		40.000		50.000		160.160		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	01	17	xx	Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					256.706,00		263.123,65		269.701,74		276.444,28		283.355,39	1.349.331,07	
				Persentase Jumlah Sekolah yang memiliki perpustakaan	55%	58%	61%	64%		67%		70%		75%		75%			
				Persentase jumlah Sekolah yang memiliki perpustakaan terakreditasi (%)	10%	10%	20%	30%		40%		50%		50%		50%			
1	02	18		KEARSIPAN					668.119,68		1.492.888,84		1.530.211,06		1.668.466,34		1.710.178,00	1.752.932,45	8.822.796
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					314.230,00		719.808,90		737.804,12		756.249,23		775.155,46	794.534,34	4.097.782
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					105.084,45		416.042,00		426.443,05		437.104,13		448.031,73	459.232,52	2.291.938
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					52.667,00		58.900,90		60.373,42		61.882,76		63.429,83	65.015,57	362.269,48
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
1	02	18	xx	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah					196.138,23		198.809,10		203.779,33		208.873,8		214.095,7	219.448,0	1.241.144,17
				Jumlah dokumen /arsip daerah yang terselamatkan & terlestarikan		0 urusan pem - an					32 urusan pem - an				32 urusan pem - an			32 urusan pem - an	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	02	18	xx	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan									100.000		102.500		105.063	307.563	
				persentase OPD, Nagari yang mengelola arsip secara baku (%)			2,22			13,33			18,89		23,67		28,89	28,9	700.000
1	02	18	xx	Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana & prasarana kearsipan					39.328,00		40.311,20		41.318,98		42.351,95		43.410,75	700.000,00	
				persentase sarpras arsip kondisi baik		0	0		80%		85%		90%		90%		90%		
1	02	18	xx	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi					59.999,94		61.499,94		63.037,44		64.613,37		66.228,71	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Peningkatan angka kunjungan ke galeri Pesisir Selatan (org/thn)		0	0		300 org		500 org		750 org		1000 org		-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					136.641.173,92		48.335.632,06		57.051.631,15		61.946.022		65.383.715	67.378.684	436.736.857,60
2	01	01		PERIKANAN					4.685.071,25		7.460.138,18		7.646.641,63		7.840.727,21		8.253.396,20	8.463.698,41	44.349.672,88
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					743.029,38		786.949,00		806.622,73		826.788,29		847.458,00	868.644,45	4.879.491,85
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					648.446,04		369.176,25		378.405,66		387.865,80		397.562,44	407.501,50	2.588.957,69
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					4.511,40		49.950,00		51.198,75		52.478,72		53.790,69	55.135,45	267.065,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			59.165,08		78.324,00		80.282,10									217.771,18
2	01	01	xx		886.532,48		2.966.880,00		3.041.052,00		3.053.216,21		3.065.429,07		3.077.690,79		16.090.801	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap																
2	01	01	xx		843.297,72		601.329,50		616.362,74		618.828		621.304		623.789		3.924.910,36	
		Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan																
2	01	01	xx		-		-		-		2.901.550,00		3.267.652,50		3.430.937,50		9.600.340,00	
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan																
2	01	01	xx		292.826,95		-		-		-		-		-		292.826,95	
		Program pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil																
2	01	01	xx		48.089,50		-		-		-		-		-		48.089,50	
		Program Penagawasan sumberdaya kelautan dan perikanan																
2	01	01	xx		1.159.172,70		2.607.529,43		2.672.717,67		-		-		-		6.439.419,80	
		Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Jumlah Pembudidaya yang tersertifikasi CBIB (Orang)	17	17		37		62	-	92		122		162		162		Dinas Perikanan		
		Jumlah UPR yang tersertifikasi CPIB (unit)	2	2		3		5	-	6		8		9		9				
		Jumlah kelompok Perbudidaya Ikan (POKDAKAN)	60	60		70		75	-	80		85		90		90				
2	01	02	PARIWISATA					4.212.287,38		10.748.231,91		11.016.937,71		11.084.197,19		11.152.305,50		11.221.280,53	59.435,240	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					700.294,43		667.422,23		684.107,79	-	701.210,48	-	718.740,74	-	736.709,26		4.208,485	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					209.043,15		370.010,00		379.260,25		388.741,76		398.460,30		408.421,81		2.153,937	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					24.314,10		40.000,00		41.000,00		42.025,00		43.075,63		44.152,52		234,567	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	-	
2	01	02	xx	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			1.047.285,54		5.508.171,45		5.645.875,74		5.668.459,24		5.691.133,08		5.713.897,61		29.274.822,65	
				jumlah destinasi wisata unggulan (Kawasan)	4	4			5		8	-	8		9		10		10	Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
2	01	02	xx	Program Pengembangan Pemasaran Wisata			1.200.402,47		3.252.555,23		3.333.869,11		3.347.204,59		3.360.593,41		3.374.035,78		17.868.660,58	
				Angka kurjungan wisata (org)	2.001.600	1.981.667			2.351.700		2.601.800		2.901.900		3.002.000		15.640.917			Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
2	01	02	xx	Program Pengembangan Kemitraan					182.418,00		186.978,45		187.726,36		188.477,27		189.231,18		934.831,26	
				Jumlah kelompok sadar wisata yang berkembang	25	25			28		30		32		35		37		37	Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
2	01	02	xx	Program pengembangan ekonomi kreatif			401.978,79		727.655,00		745.846,38		748.829,76		751.825,08		754.832,38		4.130.967,38	
				Jumlah kelompok ekonomi kreatif yang berkembang	2	2			4		6		8		10		12		12	Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
2	01	02	xx	Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Pariwisata			628.968,90		-										628.968,90	
				Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	25	25											25			Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
2	01	03	PERTANIAN					109.679.496,84		16.004.270,97		22.911.986,04		25.929.148,48		28.164.989,94		29.346.066,29	232.035,959	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.280.916,83		1.669.434,53		1.711.170,39		1.753.949,65		1.797.798,39		1.842.743,35		10.056,013	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			978.443,79		715.104,95		732.982,57		751.307,14		770.089,82		789.342,06		4.737,270	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			86.085,80		94.500,00		96.862,50		99.284,06		101.766,16		104.310,32		582,809	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
2	01	03	xx	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				9.697.287,26		8.172.095,77		8.376.398,16		5.641.656		6.324.907		6.982.933			45.195.277		
				Jumlah Produksi Padi (Ton)	317.373	288.815			291.703		296.078		300.519		306.530			312.660			312.660	Distanhortbun	
				Jumlah Produksi jagung (ton)	108.894	111.808			158.160		117.398		123.268		129.431			135.903			135.903	Distanhortbun	
				Jumlah Produksi Cabe	2.584	2.713			2.849		2.991		3.141		3.298			3.463			3.463	Distanhortbun	
				Jumlah produksi bawang merah,	242,7	245			248		250		253		255			258			258	Distanhortbun	
				Jumlah produksi Buah-buahan	28.840	29.128			29.418		29.713		30.012		30.313			30.618			30.618	Distanhortbun	
				Jumlah Produksi Kelapa Sawit	126.222	137.802			151.582		166.740		183.414		201.756			221.931			221.931	Distanhortbun	
				Jumlah Produksi Karet	10.641	10.747			10.855		10.963		11.073		11.184			11.296			11.296	Distanhortbun	
				Jumlah Produksi gambir	5.423	6.794			6.798		6.817		6.866		6.895			6.920			6.920	Distanhortbun	
				Jumlah Produksi Pala	171	182			263		288		315		335			400			400	Distanhortbun	
				Jumlah Produksi kakao	1.419	1.421			1.422		1.424		1.425		1.427			1.428			1.428	Distanhortbun	
				Jumlah Produksi Kopi	816	816			1.210		1.234		1.260		1.365			1.430			1.430	Distanhortbun	
				Jumlah Produksi Cengkeh	317	320			320		325		330		335			340			340	Distanhortbun	
2	01	03	xx	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan				404.645,88				6.507.608,30		5.734.000		6.245.800		6.870.380			25.762.434,18		
				persentase peningkatan Luas sawah beririgasi (%)		1,63			3,15		4,90		6,06		7,23		8,40			8,40		Distanhortbun	
				persentase peningkatan pembangunan prasarana pertanian (%)		3,20			6,40		6,40		9,60		9,60		9,60			9,60		Distanhortbun	
2	01	03	xx	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ perkebunan Lapangan				-		382.736,70		392.305,12		1.476.100		2.026.910		1.582.801			5.860.852,82		
				Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Tani	0,089	0,087			0,097		0,103		0,103		0,103		0,103			0,103		0,103	Distanhortbun
				Jumlah Penyuluh pertanian berprestasi	2	2			0		2		2		2		2			2		2	Distanhortbun
2	01	03	xx	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan				194.462,75													194.462,75	Distanhortbun	
				Jumlah Kelompok petani perkebunan yang memperoleh fasilitas (Kelompok)	2	2															2		
2	01	03	xx	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan				354.676,15													354.676,15	Distanhortbun	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Tercapainya swasembada dan Swasembada Pangan Berkelanjutan	100	100																
2	01	03	xx				1.023.582,84		1.033.124,03		1.058.952,13		2.461.212,00		2.718.680,00		2.995.915,00	11.291.466,00	Distanhortbun		
							Jumlah Kelompok Tani Pemamfaat Alsintan	3	1		22		24		27		27		27		
							Nilai PDRB sektor pertanian (trilyun Rp)	3,12	3,18		3,35		3,47		3,63		3,79		3,96		
							Jumlah Kelompok Tani yang menggunakan Tekhnologi Tepat Guna	120	120		120		123		123		123		123		Distanhortbun
2	01	03	xx				Program Peningkatan Kelembagaan Petani		170.827,40		227.581,95		233.271,49		2.371.539,00		2.413.798,00		2.460.283,00	7.877,301	
							Jumlah Capoktan berprestasi	-	1		1		1		1		1		1		6
							Jumlah Kelompok Tani berprestasi	2	3		0		1		-		1		1		7
							Jumlah petani berprestasi	0	0		1		1		-		1		1		5
2	01	03	xx				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian/Perkebunan		19.141,07		291.512,00		298.799,80		-		-		-	609.452,87	
							Jumlah asosiasi produk perkebunan yang aktif	1	1		1		1		1		1		1		1
2	01	03	xx				Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian /Perkebunan		456.022,85		410.812,88		421.083,20		2.486.794,00		2.465.041,00		2.251.726,00	8.491.479,93	
							Nilai PDRB sektor pertanian (trilyun Rp)	3,12	3,18		3,35		3,47		3,63		3,79		3,96		3,96
2	01	03	xx				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		2.775.418,71		1.654.924,70		1.696.297,82		1.738.705,26		1.782.172,89		1.826.727,22	11.474.246,60	
							Jumlah Populasi ternak (ekor)														
							- Sapi Potong	80.146	80.851		81.563		82.281		83.005		83.735		84.460		85.185
							- Kerbau	8.271	8.336		8.401		8.466		8.532		8.599		8.664		8.729
							- Kambing	41.669	41.711		41.752		41.794		41.836		41.878		41.920		41.962
							- Ayam Buras	779.819	785.356		790.932		796.547		802.203		807.898		813.545		819.191
							- Ayam Ras Petelur	85.300	89.565		94.043		98.745		103.683		108.867		114.051		119.235
							- Ayam Ras Pedaging	552.500	690.625		863.281		1.079.102		1.348.877		1.686.096		2.024.321		2.361.746
							- Itik	147.921	149.400		150.894		152.403		153.927		155.466		157.010		158.554
							Jumlah Produksi Ternak (kg)														
							- Daging Sapi Potong	1.173.571	1.205.295		1.241.454		1.278.697		1.317.058		1.356.570		1.396.081		1.435.592
							- Daging Kerbau	46.204	47.542		48.968		50.437		51.950		53.509		55.112		56.760
							- Daging Kambing	40.072	41.675		43.342		45.076		46.879		48.754		50.699		52.714
							- Daging Ayam Buras	836.356	842.294		848.274		854.297		860.363		866.471		872.614		878.792
							- Daging Ayam Ras Petelur	35.186	36.946		38.793		40.732		42.769		44.908		47.142		49.471
							- Daging Ayam Ras Pedaging	442.138	552.673		690.841		863.551		1.079.439		1.349.298		1.686.096		2.092.944
							- Daging Itik	61.017	61.628		62.244		62.866		63.495		64.130		64.771		65.417
							- Telur Ayam Ras	542.508	569.633		598.115		628.021		659.422		692.393		726.804		761.755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		- Telur Ayam Buras	327.524	329.849				332.191		334.550		336.925		339.317		2.000.357			
		- Telur Itik	674.520	681.265				688.078		694.958		701.908		708.927		4.149.656			
2	01	03	xx	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Temak			333.362,77		679.072,13		696.048,93		713.450,15		731.286,41		749.568,57	3.902.788,95	
				Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	n/a	n/a		5		5		5		5		20		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2	01	03	xx	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan			238.855,28		330.724,26		338.992,37		344.368,26		386.405,05		436.795,02	2.076.140,23	
				Jumlah Pasar temak kondisi baik (unit)	1	1		1		1		1		1		1		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				Jumlah Event Promosi yang diikuti (event)	3	3		4		3		3		4		17			
2	01	03	xx	Program Peningkatan Agribisnis peternakan			91.450.021,00		79.337,01		81.320,44		82.610,05		92.694,20		104.782,18	91.890.764,88	
				Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan ternak (kelp)	4	4		4		4		4		4		20		Dinas Peternakan dan Keswan	
2	01	03	xx	Program peningkatan sarana prasarana peternakan			-	89.438,80		91.674,77		93.128,59		104.496,73		118.123,85		496.862,74	
				Persentase peningkatan Sarana prasarana Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4)	25,00	25		-	10		10		10		10		10	Dinas Peternakan dan Keswan	
2	01	03	xx	Program Peningkatan penerapan teknologi Peternakan			-	173.871,28		178.218,06		181.044,32		203.144,2763		229.635,73		965.913,67	
				Jumlah teknologi peternakan yang diterapkan pada kelompok (bh)	5	5		5		5		5		5		5		Dinas Peternakan dan Keswan	
2	01	03	xx	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			215.746,47											215.746,47	
				persentase pengurangan anjing liar pembawa rabies		12,34										12,34		Dinas Peternakan dan Keswan	
				KEHUTANAN			1.274.737,12		-		-		-		-		1.274.737		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			535.677,67											535.678	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			417.629,46											417.629	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			83.191,56											83.192	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur														-	
				Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan			-	200	654.064,02								200	654.064	Kewenangan pindah Pindah ke Provinsi
				Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan			0 Ha	150	91.652,35								150	91.652	Kewenangan pindah Pindah ke Provinsi
				Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan			0,5	55%	234.353,95								55%	234.354	Kewenangan pindah ke Provinsi
				Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan			0,5	55%	294.666,80								55%	294.667	Kewenangan pindah Pindah ke Provinsi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			8.252.209,60												8.252.210		
		Program Pengembangan dan Penertiban Bidang Energi Baru dan Terbarukan	persentase pemanfaatan energi baru dan terbarukan	5%	169.566,65												5%	169.566,65	Kewenangan pindah ke Provinsi
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelenagalistik	Persentase masyarakat yang terlayani Listrik	50%	7.771.817,35												50%	7.771.817,35	Kewenangan pindah ke Provinsi
		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Terciptanya penambangan yang berwawasan lingkungan (unit lokasi)	54	46	310.825,60											46	310.825,60	Kewenangan pindah ke Provinsi
2 01	04	PERDAGANGAN			6.854.060,95		12.010.040,95		12.310.291,97		13.779.293,07		14.326.350,40		14.688.134,16		73.968.171		
2 01	04	xx	Program peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri		3.057.826,24		11.709.499,65		12.002.237,14		12.362.293,07		12.671.350,40		12.988.134,16		100%	64.791.340,65	
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB (%)	12,20	12,20	12,41	12,41	12,59	12,77	12,95	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	
			Jumlah pasar rakyat menuju kriteria SNI nomor 8152:2015	0	0	1	3	5	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Dinas KUPP
2 01	04	xx	Program: Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan		-		-		-		22.000,00		230.000,00		240.000,00		0,80	492.000,00	
			cakupan bina kelompok pedagang (persen)		2,4	1,84	2,95	10	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Dinas KUPP
2 01	04	xx	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		3.796.234,71		300.541,30		308.054,83		1.395.000,00		1.425.000,00		1.460.000,00			8.684.830,84	
			Koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar waktu		<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	Dinas KUPP
			Koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar kecamatan	<14,2%	<14,2%	<13,8%	<13,4%	<13,0%	<12,5%	<12,0%	<12,0%	<12,0%	<12,0%	<12,0%	<12,0%	<12,0%	<12,0%	<12,0%	Dinas KUPP
2 01	05	PERINDUSTRIAN			631.541,60		1.353.890,20		2.387.737,46		2.447.430,89		2.508.616,66		2.571.332,08		11.900.548,89		
2 01	05	xx	Program pengembangan industri kecil dan menengah		577.342,55		639.544,05		655.532,65		671.920,97		688.718,99		705.936,97			3.938.996,18	
			Pertumbuhan Industri (%)	1,90	1,90	2,02	2,02	2,21	2,39	2,59	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	Dinas KUPP
			Persentase peningkatan pemodal IKM (%)	-	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	25%	Dinas KUPP
2 01	05	xx	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		54.199,05		625.127,25		640.755,43		656.774,32		673.193,67		690.023,52			3.340.073	
			Produk IKM yang berkualitas (bersertifikat) (jenis produk)		6	8	10	12	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Dinas KUPP
2 01	05	xx	Program pengembangan sentra sentra industri potensial				89.218,90		1.091.449,37		1.118.735,61		1.146.704,00		1.175.371,60			4.621.479,47	
			Jumlah Sentra IKM (unit)	1	-	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	Dinas KUPP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
2	01	06					1.051.769,18		759.059,84		778.036,34		865.224,67		978.056,00		1.088.172,79	5.520.319						
2	01	06	xx				1.051.769,18		759.059,84		778.036,34		865.224,67		978.056,00		1.088.172,79	5.520.318,81						
								50%		60%		70%		80%		90%		100%		100%			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
								40%	50%		-	60%		70%		80%		90%		-	100%		100%	
3							30.295.591,23		43.623.982,59		44.714.582,16		40.893.469,11		41.250.914		42.254.527,90	243.033.067						
3	01	01	xx				8.581.534,26		8.413.791,95		8.624.136,75		5.914.322,96		5.812.021,03		5.975.408,06	43.321.215						
							862.667,41		1.059.411,18		1.085.896,46		1.113.043,87		1.140.869,97		1.169.391,72	6.431.281						
							588.038,23		760.438,35		779.449,31		798.935,55		818.908,93		839.381,66	4.585.152						
							63.143,80		133.368,50		136.702,71		140.120,28		143.623,29		147.213,87	764.172,45						
											-													
3	01	01	xx				136.431,69		187.842,77		192.538,84		150.000,00		150.000,00		150.000,00	966.813						
								80%	85%		90%		90%		95%		95%		95%		95%		Bapedalitbang	
3	01	01	xx				34.027,61											34.027,61						
							1 dok		1 dok									1 dok					Bapedalitbang	
3	01	01	xx				181.755,27		150.427,63		154.188,32		255.000,00		255.000,00		255.000,00	1.251.371						
								40%	50%		60%		70%		80%		90%		100%		100%		Bapedalitbang	
3	01	01	xx								-		150.000,00		150.000,00		150.000,00	450.000,00						
							50				50		-		50		50		250				Bapedalitbang	
3	01	01	xx				1.312.611,68		2.134.523,13		2.187.886,21		2.242.583		2.298.648		2.356.114	12.532.366						
							ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada		
							ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada		
							ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		25	33			66		100		100		100		100		100		Bapedalitbang	
3	01	01	xx	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			574.031,24		342.378,40		350.937,86		359.711,31		368.704,09		377.921,69	2.373.684,59	
		25	33			66		100		100		100		100		100		Bapedalitbang	
3	01	01	xx	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya			123.244,01		416.513,06		426.925,88		516.200,00		292.820,00		332.102,00	2.107.804,95	
		25	33			66		100		100		100		100		100		Bapedalitbang	
3	01	01	xx	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA			618.141,28		179.634,59		184.125,45		188.728,59		193.446,81		198.282,98	1.562.359,70	
		25	33			66		100		100		100		100		100		Bapedalitbang	
3	01	01	xx	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			4.087.442,04		3.049.254,34		3.125.485,69							10.262.182,07	Dinas PU TR
				Jumlah kawasan strategis yang dibangun		2 kawasan			2 kawasan										
3	01	02		KEUANGAN			12.700.015,15		26.410.027,03		27.070.277,71		24.482.333,02		25.036.681,10		25.613.394,39	141.312.728,41	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			560.234,16		6.287.399,14		6.444.584,12		6.605.698,72		6.770.841,19		6.940.112,22	33.608.870	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			926.588,26		6.287.399,14		6.444.584,12		6.605.698,72		6.770.841,19		6.940.112,22	33.975.224	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			109.093,27		159.500,00		163.487,50		167.574,69		171.764,05		176.058,16	947.478	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
3	01	02	xx	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	96,15		189.870,77		377.306,61		386.739,28		396.407,76		406.317,95		416.475,90	2.173.118	BPKD, BAPEN, seluruh PD,
				Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu		90%		90%	90%	-	90%		90%		90%		90%	-	
3	01	02	xx	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			3.757.839,97		4.510.374,40		4.623.133,76		1.578.249,74		1.578.249,74		1.578.249,74	17.626.097	
				Dokumen APBD dan P.APBD tepat waktu	ada	ada			ada		ada		ada		ada		ada		BPKD
				KUA dan PPAS APBD/P.APBD tepat waktu	ada	ada			ada		ada		ada		ada		ada		BPKD
				Persentase perangkat daerah yang tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)		75%		75%	75%	-	75%		75%		75%		75%		
				Persentase aset Setda yang dikelola dengan baik (%)		80%		80%	85%		85%		90%		100%		100%		Setda (Bagian Keuangan)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Realisasi PAD (Rp)		116.095.536.070		127.705.089.677		140.475.598.645		154.523.158.509		169.975.474.360		186.973.021.796		895.747.879.057		Badan Pendapatan, Kecamatan		
3	01	02	xx	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			227.689,93		586.245,15		600.901,28		587.649,78		592.649,78		599.114,78	3.194.251	BPKD	
				Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (%)			90%		90%		90%		90%		90%		90%	-		
3	01	02	xx	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari			287.340,73		244.356,73		250.465,65		252.110,00		249.850,00		254.700,00	1.538.823	BPKD dan kecamatan	
				Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Nagari			90%		90%		90%		90%		90%		90%	-		
3	01	02	xx	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari			7.946,75		67.910,00		69.607,75							145.464,50	Kecamatan	
				persentase nagari yang dibina dalam pengelolaan keuangan		50	70		75		80						80			
3	01	03		KEPEGAWAIAN			3.316.705,66		3.944.767,93		4.043.387,12		4.144.471,80		4.248.083,60		4.354.285,69	24.051.702		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			692.624,05		695.911,26		713.309,04		731.141,76		749.420,31		768.155,82	4.350.562		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			463.487,05		524.343,50		537.452,09		550.888,39		564.660,60		578.777,11	3.219.609		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			428.411,28		321.411,99		329.447,29		337.683,47		346.125,56		354.778,70	2.117.858		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur							-							-		
3	01	03	xx	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur			1.732.183,28		2.403.101,18		2.463.178,71		2.524.758,18		2.587.877,13		2.652.574,06	14.363.672,54	BKPSDM	
				Persentase tingkat kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Aspek Syarat dan Prosedur)		10%	10%		10%		15%		15%		15%		15%	80%		
				Pemeringkatan Kompetensi Camat		6 besar tk. Prop	6 besar tk. Prop		6 besar tk. Prop		6 besar tk. Prop		6 besar tk. Prop		6 besar tk. Prop		6 besar tk. Prop	6 besar tk. Prop	-	Setda (Bagian Pemerintahan)
3	01	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.613.828,07		2.317.984,30		2.375.933,91		3.223.181,00		2.878.181,00		2.878.181,00	15.287.289		
3	01	04	xx	Program Pendidikan Kedinasan			1.263.328,07		1.323.984,30		1.357.083,91		1.185.000,00		1.185.000,00		1.185.000,00	7.499.396,29	BKPSDM	
				Persentase Pejabat Struktural Eselon II dan III yang telah mengikuti Diklat Pim II dan III		40%	20%		20%		30%		20%		100%		100%	-		
				Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang telah mengikuti Diklat Pim IV		40%	20%		20%		60%		20%		100%		100%	-		
3	01	04	xx	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			350.500,00		994.000,00		1.018.850,00		2.038.181,00		1.693.181,00		1.693.181,00	7.787.893,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Daya Aparatur	Persentase Pegawai ASN yang Mengikuti Diklat dan Bimtek Teknis/Fungsional	100%	100%		100%		100%	-	100%		100%		100%		100%		BKPSDM
3	01	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			-	429.085,07		439.812,20		914.100,00		1.005.510,00		1.106.061,00		3.894.568,27	
3	01	05	xx	Program Pengembangan sistem inovasi daerah			188.352,33		193.061,14		226.600,00		249.260,00		274.186,00		1.131.459,47	Bapedalitbang
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	0			25%	-	50%		75%		100%		100%	-	Bapedalitbang
3	01	05	xx	Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK daerah			240.732,74		246.751,06		412.500,00		453.750,00		499.125,00		1.852.858,80	Bapedalitbang
				Persentase pemanfaatan hasil keilbangan	0			15%	30%	-	45%	60%		100%		100%	-	Bapedalitbang
3	01	05	xx	Program Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Keilbangan			-		-		275.000,00		302.500,00		332.750,00		910.250,00	Bapedalitbang
				Persentase kerjasama yang dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian (%)	0			20%	40%	-	60%	80%		100%		100%	-	Bapedalitbang
3	01	06	PENGAWASAN			4.083.508,08	2.108.326,31		2.161.034,47		2.215.060,33		2.270.436,84		2.327.197,76		15.165.563,79	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		554.309,55		626.744,22		642.412,82		658.473,14		674.934,97		691.808,34		3.848.683,04
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		346.653,00		262.905,00		269.477,63		276.214,57		283.119,93		290.197,93		1.728.568,05
				Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		33.605,20		50.000,00		51.250,00		52.531,25		53.844,53		55.190,64		296.421,63
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur		24.570,00				-		-		-		-		24.570,00
3	01	06	xx	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		2.465.204,11		250.017,72		256.268,16		262.674,87		269.241,74		275.972,78		3.779.379
				Persentase OPD yang memiliki laporan keuangan pemerintah yang baik (%)	90	90		90		90		90		100		100		INSPEKTORAT DAERAH
				Persentase obrak bebas temuan material dan aset oleh BPK dan Inspektorat (%)	90	90		90		90		90		100		100		INSPEKTORAT DAERAH
				Persentase OPD yang mendapat nilai kategori SAKIP minimal bernilai B (%)	15	15		90		95		100		100		100		INSPEKTORAT DAERAH
				Persentase Peluang mengikuti pendidikan formal, diklat kepemimpinan dan diklat teknis lainnya	60	60		65		70%		80%		90%		100%		INSPEKTORAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase OPD yang mengimplementasikan SPIP	70	70		80		85		90		95		100		100,00		
		Persentase kasus ganti kerugian negara/daerah yang ditangani		90%		90%		90%	-	90%		90%		90%		90%		BPKD
3	01	06	xx	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			253.791,50		328.489,00		336.701,23		345.118,76		353.746,72		362.590,39	1.980.437,60
				Level kapabilitas APIP	level 2 dengan catatan	level 2 dengan catatan			Level 2		Level 3	-	Level 3		Level 3		Level 3	
3	01	06	xx	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			405.374,72		590.170,38		604.924,64		620.047,75		635.548,95		651.437,67	3.507.504
				Persentase pelelangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku			92%		92%		95%		95%		95%		95%	Selda (Bagian PBJ)
				Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE			20%		25%		30%		35%		40%		45%	Selda (Bagian Pembangunan)
5				URUSAN PENDUKUNG			35.163.597,37		46.385.329,21		47.544.962,44		49.877.363,54		53.718.621,80		58.111.072,20	290.800.947
5	01			URUSAN PENDUKUNG			35.163.597,37		46.385.329,21		49.045.183,21		49.877.363,54		53.718.621,80		58.111.072,20	292.301.167
5	01	01		SEKRETARIAT DAERAH			12.309.155,36		18.057.064,31		18.570.990,92		18.864.395,79		19.524.005,68		20.129.605,83	107.455.218
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			90,62	3.302.619,06	6.413.166,65		6.573.495,82		6.737.833,21		6.906.279,04		7.078.936,02	37.012.329,80
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			95,16	3.129.749,81	3.143.810,40		3.222.405,66		3.302.965,80		3.385.539,95		3.470.178,45	19.654.650,06
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (KDH)			87,61	2.818.218,83	4.063.963,09		4.165.562,17		4.269.701,22		4.376.443,75		4.485.854,85	24.179.743,90
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur				265.538,33	289.031,40		296.257,19		303.663,61		311.255,20		319.036,59	1.784.782,32
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur			98	266.749,57										266.749,57
5	01	01	XX	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					362.755,41		371.824,30		150.000,00		153.750,00		157.593,75	1.195.923,46
				persentase aset setda yang dikelola dengan baik							85		90		100		100	
5	01	01	XX	Program Pematapan Otonomi Daerah			635.197,83		606.178,29		621.332,74		636.866,06		652.787,71		669.107,40	3.821.470,03
				Nilai LPPD	n/a	3.037		3.130		3.180		3.230		3.300		3.350		3.350
5	01	01	XX	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			636.877,11		696.760,46		714.179,47		732.033,96		750.334,81		769.093,18	4.299.278,98
				Persentase produk hukum yang difasilitasi %)			100		100		100		100		100		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	01	01	XX	Program Advokasi Pemerintah Daerah	213.006,46		218.331,62		223.789,91		229.384,66		235.119,27		240.997,26		1.360.629,18	Hukum)
				Persentase sengketa hukum yang difasilitasi	70%		75%		85%		90%		90%		100%		100%	-
5	01	01	XX	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	80.000,00		90.000,00		90.000,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00		545.000,00	Setda (Bagian Perekonomian)
				Persentase agen dan pangkalan BBM dan Gas sesuai HET (%)	70%		80%		80%		85%		85%		85%		85%	-
				Persentase peningkatan pengawasan terhadap energi baru dan terbarukan (%)	70%		75%		75%		80%		80%		85%		85%	-
5	01	01	XX	Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	160.039,00		460.000,00		500.000,00		535.000,00		655.000,00		690.000,00			
				Peningkatan Nilai AKIP			B		BB		BB		BB		A		A	-
5	01	01	XX	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik			550.000,00		600.000,00		650.000,00		750.000,00		870.000,00		3.420.000,00	
				Persentase rata-rata pelayanan publik OPD yang bernilai baik (%)	76		78		80		88		90		95			
				Tingkat kepuasan masyarakat			B		BB		BB		BB		A		A	
5	01	01	XX	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	336.681,05		618.737,72		634.206,16		650.061		666.313		682.971		3.588.970	Bag Kesbang & Kecamatan, hukum
				Persentase peserta yang memahami pengetahuan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara (%)	70	70	75		80		85		90		95		95	-
5	01	01	XX	Program Pendidikan politik masyarakat	121.220,50		192.490,00		197.302,25		202.234,81		207.290,68		212.472,94		1.133.011,18	Kesbang (Setda)
				Persentase ormas/LSM yang memenuhi syarat administrasi lengkap	80	80	80		80		85		90		95		95	-
5	01	01	XX	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	343.257,83		351.839,28		360.635,26		369.651,14		378.892,42		388.364,73		2.192.640,65	
				Persentase pengadaan barang/jasa secara elektronik (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-
5	01	02		KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	4.832.660,45		3.104.631,45		3.182.247,24		3.261.803,42		3.343.348,50		3.426.932,22		21.151.623,27	
				Program pelayanan administrasi perkantoran (KDH)	3.749.838,83		2.260.718,85		2.317.236,82		2.375.167,74		2.434.546,94		2.495.410,61		15.632.919,79	
5	01	02	xx	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	439.505,40		357.969,40		366.918,64		376.091,60		385.493,89		395.131,24		2.321.110,16	
				Persentase Falisitasi kegiatan kepala daerah oleh protokoler (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-
5	01	02	xx	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	643.316,22		485.943,20		498.091,78		510.544,07		523.307,68		536.390,37		3.197.593,32	

1				2		3		4		5		6		7		8		9		8		11		12		13		14		15		16		17		18		19		
				Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persenstase penyampaian perkembangan fisik dan keuangan OPD sesuai taregt dan tepat waktu (%)		75						75,00						75,00				75,00				75,00				75,00						75,00		-	Bag. AP. Setda
					persenstase kegiatan yang selesai tepat waktu (%)		90		90				91						92				93				94				95				95		-			
5	01	03		SEKRETARIAT DPRD									22.854.442,01						28.328.264,90				30.474.192,29				31.012.967,75				34.194.616,12				37.981.466,37				184.845.949,44	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									2.406.614,55						3.216.776,70				3.297.196,12				3.379.626,02				3.464.116,67				3.550.719,59				19.315.049,65	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									1.200.663,00						2.163.720,50				2.217.813,51				2.273.258,85				2.330.090,32				2.388.342,58				12.573.888,76	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									66.736,20						60.000,00				61.500,00				63.037,50				64.613,44				66.228,77				382.115,91	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur									330.660,00						482.850,00				494.921,25				507.294,28				519.976,64				532.976,05				2.868.678,22	
5	01	03	xx	Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									18.849.768,26						22.404.917,70				24.402.761,41				24.789.751				27.815.819,05				31.443.199				149.706.216,90	
					Jumlah Perda yang dinasikkan		200		15						15						15						15				15				90				Sekretariat DPRD	
6				KEWILAYAHAN									2.631.880,54						7.308.489,53				7.439.818,52				7.625.813,98				7.816.459,33				8.011.870,81				40.834.332,71	
6	01			KEWILAYAHAN									2.631.880,54						7.308.489,53				7.439.818,52				7.625.813,98				7.816.459,33				8.011.870,81				40.834.332,71	
6	01	01		KECAMATAN									2.631.880,54						7.308.489,53				7.439.818,52				7.625.813,98				7.816.459,33				8.011.870,81				40.834.332,71	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									1.378.138,00						3.411.406,15				3.496.691,31				3.584.108,59				3.673.711,30				3.765.554,09				19.309.609,43	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									563.724,83						2.113.553,78				2.166.392,62				2.220.552,44				2.276.066,25				2.332.967,90				11.673.257,81	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									20.500,00						138.980,00				142.454,50				146.015,86				149.666,26				153.407,92				751.024,5371	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur									-						50.130,00				-				-										50.130,00			
6	01	01	xx	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan									669.517,72						1.594.419,60				1.634.280,09				1.675.137,09				1.717.015,52				1.759.940,91				9.050.310,9294	
					Terlaksananya Musrenbang Kecamatan (Kali)		1		1										1				1				1				1				1				6	
					Terlaksananya koordinasi dan pembinaan dengan muspika (kali)		4		4										4				4				4				4				4				24	
					Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat (kali)		1		1										1				1				1				1				1				6	
7				KESATUAN POLITIK DAN BANGSA									1.145.000,00						1.380.000,00				1.495.000,00				1.625.000,00				1.775.000,00				1.775.000,00				9.195.000,00	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	01		KESATUAN POLITIK DAN BANGSA				1.145.000,00		1.380.000,00		1.495.000,00		1.625.000,00		1.775.000,00		1.775.000,00		9.195.000,00	
7	01	01	XX	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				600.000,00		700.000,00		750.000,00		810.000,00		890.000,00		890.000,00		4.640.000,00	
				Persentase penyelesaian kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparatur (%)	n/a	n/a			70		75		80		85		100		100		Setda (Bagian Kesbangpol)
7	01	01	XX	Program Pendidikan politik masyarakat				545.000,00		680.000,00		745.000,00		815.000,00		885.000,00		885.000,00		4.555.000,00	
				Persentase jumlah ormas/LSM yang memenuhi syarat administrasi yang lengkap (%)		80%			80%		80%		85%		90%		95%		95%		Setda (Bagian Kesbangpol)
Total								614.829.672.166,00		619.182.571.989,00		568.942.506.359,00		581.347.402.431,00		594.268.952.789,00		605.634.937.375,00		3.584.206.043.109	



PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 - 2021



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan yang disajikan dalam Tabel 8.1.

Tabel. 8.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016- 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun		Target Tahun			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Umur Harapan Hidup (tahun)	70,11	70,23	70,30	70,40	70,50	70,60
2	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,12	8,40	8,43	8,46	8,49	8,52
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,34	13,40	13,46	13,52	13,58	13,64
4	Penilaian Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	B	BB	BB	BB	A
6	Skor Nilai LPPD	3037	3130	3180	3230	3300	3350
7	Incremental Capital-Output Ratio	6,10	5,95	5,90	5,85	5,80	5,75
8	Gini Rasio	0,35	0,3	0,28	0,26	0,25	0,25
9	Persentase akses Sanitasi layak (%)	63,76	63,80	73,13	74,68	75,16	75,29
10	Persentase Penduduk berakses air minum/bersih (%)	85,37	89,29	91,02	92,47	96,16	97,71
11	Rasio rumah layak huni	-	0,2134	0,2173	0,2211	0,2233	0,2255
12	Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif	22,30	65,62	67,58	69,55	71,51	73,48
13	Persentase potensi zakat yang dikelola BAZ	70	75	80	85	90	95
14	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Gotong-Royong	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
15	Jumlah Kekayaan Budaya yang dilestarikan	0	1	2	4	5	6
16	Nilai PDRB Sektor Pertanian (trilyun Rp)	3,18	3,35	3,47	3,63	3,79	3,96

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun		Target Tahun			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
17	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB ADHK (%)	8,80	8,93	9,03	9,13	9,23	9,33
18	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK (%)	12,20	12,41	12,59	12,77	12,95	13,13
19	Jumlah kunjungan wisatawan	2.201.680	2.401.750	2.601.800	2.801.850	2.901.900	3.002.000
20	Lama tinggal wisatawan	-	1,25	1,25	1,3	1,3	1,3
21	Persentase penanganan kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparatur	70	75	85	100	100	100
22	Persentase kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan	75	80	85	90	95	95
23	Persentase Lembaga . Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	56,45	65,05	70,43	75,81	81,18	86,56
24	Jumlah Dasa Wisma Maju	-	470	545	645	720	870

8.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja daerah yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dalam hal ini, Indikator Kinerja Kunci lebih menggambarkan tujuan akhir otonomi daerah yang digunakan untuk mengevaluasi apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek-aspek tersebut meliputi : (1) aspek kesejahteraan masyarakat, dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, dan fokus seni budaya dan olah raga, (2) aspek pelayanan umum, dengan fokus layanan urusan wajib, dan fokus layanan urusan pilihan, serta (3) aspek daya saing daerah dengan fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia sebagaimana format lampiran pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penetapan target kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kunci, selain mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemampuan SDM, dan tingkat kinerja efektif, juga memasukkan semangat nilai-nilai gotong-royong dalam setiap

pelaksanaan kegiatan yang mendukung berbagai program guna tercapainya target kinerja sasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa tidaklah cukup upaya pencapaian target kinerja sasaran hanya disandarkan pada ketersediaan anggaran yang nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan banyaknya kegiatan yang perlu didanai dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai gotong-royong dalam pencapaian target kinerja selama lima tahun mendatang.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB (%)	5,73	5,33	5,42	5,47	5,50	5,50	5,59	5,59
2	Laju Inflasi (%)	4,0	4,2	3,8	4,5	4,1	3,8	3,2	3,2
2	PDRB Berlaku (Triliyun Rp)	9,94	10,68	11,66	12,82	14,05	15,36	16,71	16,71
3	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)	7,70	92,08	92,21	92,82	93,15	93,48	93,81	93,48
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	11,69	9,58	5,95	5,85	5,70	5,60	5,50	5,50
5	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	68,07	68,39	68,74	69,55	70,07	70,58	71,10	71,10
6	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,11	8,37	8,40	8,43	8,46	8,49	8,52	8,52
7	Angka Melek Huruf (%)	98,12	98,12	98,41	98,71	99,01	99,30	100,00	100,00
8	Angka usia harapan hidup (%)	69,96	70,11	70,23	70,30	70,40	70,50	70,60	70,60
9	Angka Harapan lama sekolah (%)	-	13,34	13,40	13,46	13,52	13,58	13,64	13,64
10	Persentase balita gizi buruk (%)	8,90	8,50	7,80	7,50	6,60	6,60	6,60	6,60
11	Prevelensi balita gizi buruk	4,8	4,8	4,75	4,65	4,6	4,55	4,5	4,5
12	Cakupan desa siaga aktif	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	56,74	60,43	61,17	61,14	62,12	62,50	62,50	62,50

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
18	Indeks kepuasan masyarakat	-	C	B	B	B	B	B	B
19	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) (%)	77,20	78	79	80	81	82	83	83
21	Penguatan cadangan pangan (Ton)	39,5	44,5	39,75	45,75	65,75	85,75	105,75	105,75
22	Penanganan daerah rawan pangan (kampung)	-	-	10	10	10	10	10	50
23	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	33,43	33,27	33,04	32,81	32,59	32,26	31,92	31,92
24	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	0,0664	0,0699	0,0745	0,0813	0,0890	0,0977	0,1078	0,1078
25	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	12,20	12,20	12,41	12,59	12,77	12,95	13,13	13,13
26	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	8,80	8,80	8,93	9,03	9,13	9,23	9,33	9,33
27	Pertumbuhan Industri (%)	n/a	32,82	6,08	6,68	7,35	8,09	8,90	8,90
B. ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
2	Level Maturitas SPIP	2	2	2	3	3	3	4	4
3	Indeks Kepuasan masyarakat	n/a	C	B	B	B	B	B	B
4	Pasar Rakyat yang menuju kriteria SNI 8152:2015 (unit)	0	0	1	1	1	1	1	5

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5	Persentase Cakupan Layanan Komunikasi (%)	0	0	30	40	50	50	60	60
6	Menurunya angka kecelakaan lalu lintas	n/a	223	265	220	200	180	160	160
7	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana (%)	n/a	70	71	72	73	74	75	n/a
8	Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif (%)	n/a	22,30	65,62	67,58	69,55	71,51	73,48	73,48
9	Persentase potensi zakat yang dikelola BAZ (%)	65	70	75	80	85	90	95	95
10	Persentase siswa yang melaksanakan sholat lima waktu (%)	n/a	n/a	n/a	80	90	95	100	100
11	Persentase kasus Perda yang diselesaikan (%)	70	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00
12	Persentase Lembaga . Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif membina kelompok (%)	51,5	56,45	65,05	70,43	75,81	81,18	86,56	86,56
13	Jumlah Dasa Wisma Maju	n/a	-	470	545	645	720	870	870
C. ASPEK PELAYANAN UMUM									
I.	PELAYANAN URUSAN WAJIB								
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1	Urusan Pendidikan								
a	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	45,20	45,29	45,38	45,47	45,56	45,65	45,75	45,75
b	Angka Melek huruf	98,12	98,12	98,41	98,71	99,01	99,30	100,00	100,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
c	Angka Partisipasi Kasar								
	- APK SD/MI/Paket A	124,22	124.22	122.00	120.00	118.00	116.00	115.00	115.00
	- APK SMP/MTs/Paket B	101,61	101.61	102.32	103.04	103.76	104.49	105.77	105.77
	- APK SMA/SMK/MA/Paket C	92,52	92.52	92.71	92.89	93.08	93.26	93.21	93.21
d	Angka Pendidikan yang di Tamatkan								
	- APT SD/MI/Paket A	-	10,160	10,262	10,364	10,468	10,573	10,678	10,678
	- APT SMP/MTs/Paket B	-	9,634	9,730	9,828	9,926	10,025	10,125	10,125
	- APT SMA/SMK/MA/Paket C	-	6,814	6,882	6,951	7,020	7,091	7,162	7,162
e	Angka Partisipasi Murni								
	- APM SD/MI/Paket A	99,12	99,22	99,38	99,51	99,64	99,81	99,90	99,90
	- APM SMP/MTs/Paket B	89,90	89,90	89,99	90,08	90,17	90,26	90,72	90,72
	- APM SMA/SMK/MA/Paket C	77,82	77,82	78,05	78,29	78,52	78,76	78,99	78,99
f	Angka Partisipasi Sekolah								
	- APS 7-12 Tahun	99,10*	99,50	99,70	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00
	- APS 13-15 Tahun	87,27*	87,89	88,06	88,24	88,41	88,59	88,77	88,77
g	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah (SD,SMP)	73.95*	74.12	74.27	74.42	74.57	74.72	74.87	74.87

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	- Rasio Guru Terhadap Murid	452.76*	453.21	454.12	455.03	455.94	456.85	457.76	457.76
	- Rasio Guru Terhadap Murid perkelas Rata-rata	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
h	Pendidikan Menengah								
	- APS 16-18 Tahun	73,38*	73,61	73,75	73,90	74,05	74,20	74,35	74,35
	- Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	22,75*	23,61	23,65	23,70	23,75	23,80	23,84	23,84
	- Rasio Guru Terhadap Murid	454.45*	454.90	455.81	456.73	457.64	458.55	459.47	459.47
	- Rasio Guru Terhadap Murid perkelas Rata-rata	0,72	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	- Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	98,08	98,28	98,47	98,67	98,87	99,06	100,00	100,00
i	Fasilitasi Pendidikan								
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	94,52	94,71	94,90	95,09	95,28	95,47	95,66	95,66
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	87,50	87,68	87,85	88,03	88,20	88,38	88,56	88,56
j	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	45,20	45,29	45,38	45,47	45,56	45,65	45,75	45,75
k	Angka Putus Sekolah								
	- Angka Putus Sekolah SD/MI	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	- Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	- Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Kelulusan								
	- Angka Kelulusan SD/MI	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	- Angka Kelulusan SMP/MTs	99.05	99.25	99.45	99.65	99.84	100.00	100.00	100.00
	- Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	- Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	96.45*	96.91	97.11	97.30	97.50	97.69	97.89	97.89
	- Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	91.82*	92.32	92.51	92.69	92.88	93.07	93.25	93.25
	- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	90.25	90.43	90.61	90.79	90.97	91.15	91.34	91.34
2	Urusan Kesehatan								
a	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4.6	25	24	23	22	21	20	20
b	Angka kelangsungan hidup bayi	0							0
c	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	35	35	34	33	32	31	30	30
d	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	25	25	24	23	22	21	20	20
e	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	55	100	98	96	94	92	90	90
f	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 68	1 : 68	1 : 68	1 : 50	1 : 50	1 : 50	1 : 50	1 : 50
g	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
h	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088
i	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
j	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
k	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	74,39	80	80	80	90	90	100	100
l	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	93,19	90	90	90	93	95	98	98
m	Cakupan desa/kelurahan universal child	86,01	86	8	90	92	94	95	95

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	immunization (UCI) (%)								
n	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
o	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum(standar yang digunakan Indonesia 2.100 kkal/kapita/hari)	0							0
p	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	80	80	85	90	95	100	100	100
q	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	2	2	2	2	2	2	2	2
r	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
s	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	833	833	843	923	1058	1058	1058	1058
t	Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	0,149	0,149	0,16	0,18	0,18	0,18	0,2	0,2
u	Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	16	16	18	18	18	18	18	18
v	Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	833	833	843	923	1058	1058	1058	1058
w	Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	94	94	96	97	96	96	96	96
x	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
y	Penderita diare yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
z	Angka kejadian malaria	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk
aa	Tingkat Kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	0	0
ab	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	0	0	0	0
ac	Proporsi Anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ad	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi	0	0	0	0	0	0	0	0
ae	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0	0	0	0	0	0	0	0
af	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
ag	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	65	65	60	50	40	30	20	20
ah	Cakupan kunjungan bayi (%)	84	84	85	86	87	88	89	89
ai	Cakupan Puskesmas (%)	2,34	2,34	2,38	2,4	2,45	2,5	2,5	2,5
aj	Cakupan Pembantu Puskesmas (%)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
ak	Cakupan kunjungan ibu hamil k4 (%)	76	76	79	82	85	87	90	90
al	Cakupan pelayanan nifas (%)	78	78	80	83	86	88	91	91
am	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	75	75	80	85	90	95	100	100
an	Cakupan pelayanan anak balita (%)	78	78	80	81	82	83	84	84
ao	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	20	20	21	22	23	24	25	25
ap	cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	60	60	65	70	100	100	100	100
aq	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
ar	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	78,7	78,7	80	82,5	85	87,5	90	90

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
as	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	90	90	90	95	95	95	100	100
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Pekerjaan Umum								
a	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	23,00	24,90	25,90	27,90	28,90	29,90	30,90	30,90
b	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase (%)	-	14,50	16,00	17,14	18,15	20,00	21,00	21,00
c	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	62,70	63,76	63,80	73,13	74,68	75,16	75,29	75,29
d	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	81,63	85,37	89,29	91,02	92,47	96,16	97,71	97,71
e	Persentase Akses Sanitasi Layak (%)	-	63,76	63,80	73,13	74,68	75,16	75,29	75,29
f	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	-	0,52	1,13	1,17	1,22	1,26	1,30	1,30
g	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	46,42	47,14	49,02	51,64	54,27	56,99	59,72	59,72
h	Rasio Jaringan Irigasi	-	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
i	Persentase Bantaran Sungai dan Pantai yang Aman (%)	-	7,25	8,63	10,01	12,02	13,59	15,12	15,12
j	Persentase Penurunan Genangan Air (%)	-	1,06	1,14	1,24	1,29	1,76	1,94	1,94

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.2	Penataan Ruang								
a	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Persatuan Luas Wilayah ber HPL/HBG	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
b	Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kaawasan perkotaan (Ha)	-	2023,27	2023,27	2347,57	2447,57	2671,87	2971,87	2671,87
c	Rasio Bangunan ber IMB Persatuan Bangunan	-	1,03	1,25	1,51	1,57	1,76	1,9	1,9
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman								
a	Rasio rumah layak huni (SPM)	-	-	0,2134	0,2178	0,2211	0,2233	0,2255	0,2255
b	Rasio Permukiman Layak Huni	-	-	96,80	96,82	96,95	97,09	97,25	97,25
c	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	-	-	94,02%	93,88%	94,45	94,89	95,30	95,30
d	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	-	-	2,19	32,05	35,38	50	100	100
e	Persentase Permukiman Tertata (%)	-	-	96,74	96,82	96,95	97,08	97,22	97,22
f	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	-	-	0,0845	0,0824	0,0789	0,0754	0,0720	0,0720
g	Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawan Perkotaan (%)	-	-	3,87	4,15	4,33	4,52	4,74	4,74
h	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%)	-	-	19,67	17,79	15,89	13,99	12,09	12,09
i	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	-	-	5,88	11,76	17,65	18,45	19,59	19,59
j	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	-	-	0,0845	0,0824	0,0789	0,0754	0,0720	0,0720
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Perlindungan Masyarakat								
a	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (%)	2,24	2,72	4,70	4,99	5,39	6,47	7,54	7,54
b	Cakupan Patroli petugas Satpol PP	1 kali sehari	1 kali sehari	2 kali sehari	2 kali sehari	2 kali sehari	2 kali sehari	2 kali sehari	2 kali sehari
c	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	95	95	95	98	98	99	99	99
d	Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) di Kabupaten (%)	-	0,21	0,21	0,26	0,30	0,35	0,35	0,65
f	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten (%)	0,39	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
g	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	60,94	52,38	61,22	66	71,15	73,58	79,63	79,63
i	Persentase Penegakan PERDA	96	97	98	98	98	99	99	99
6	Urusan Sosial								
a	PMKS yang memperoleh bantuan (Jiwa/KK)	12,271	12.271	15.540	18.950	20.650	23.720	25.850	25.850
b	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan /penanganan PMKS (Jiwa/KK)	12,271	12.271	15.540	18.950	20.650	23.720	25.850	25.850
c	Sarana sosial seperti Panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi	9 panti	9 panti	9 panti	9 panti	10 panti	10 panti	11 panti	11 panti
e	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	98	60	70	75	80	85	100	100
f	Persentase korban bencana yang terima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM) (%)	83	60	65	70	75	80	90	90
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
1	Urusan Tenaga kerja								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
a	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun (kasus)	-	2	2	2	2	2	2	12
b	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	56,74	60.43	61.17	61.41	62.12	62.50	63	63
c	Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	94	175	200	250	250	300	300	300
d	Keselamatan dan perlindungan (Perusahaan)		20	23	25 n	27	30	35	35
e	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	-	0	0	0	0	0	0	0
f	Besaran pencari kerja ymag terdaftar yang ditempatkan (%)	-	0,61	0,65	0,076	0,084	0,090	0,1	0,1
G	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	-	6	5	8,40	8	8,64	13,50	13,50
H	Besaran tenaga kera yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	-	0,76	0,80	8,48	8	11,52	13,53	
I	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	-	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	
J	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	-	5	6	7,5	8	8,5	9	9
K	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	-	7,6	8	8,5	9,5	10,5	11,5	11,5
L	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	-	1	1	0	1	2	3	3
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
A	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8.77	8.77	8.87	8.91	9.10	9.50	10.00	10.00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	71.68	2.19	2.89	3.91	5.31	5.35	5.50	5.50
C	Rasio KDRT (%)	0.0092	0.210	0.210	0.018	0.015	0.014	0.010	0.010
D	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	0,26	0.40	0.22	0.26	0.25	0.21	0.19	0.19
E	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	91.23	71.60	72.10	72.90	73.40	74.20	75.10	75.10
F	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (kasus)	100	86	87	88	89	90	91	91
G	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	-	-			100	100	100	100
3	Urusan Pangan								
A	Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	112,93	132	135	137	139	142	144	144
B	Ketersediaan energi(kkal/kap/hari)	3.754	2.400	2.420	2.440	2.460	2.480	2.500	2.500
C	Ketersediaan protein 9gram/kap/hari)	83,73	63	65	67	69	71	73	73
D	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	74,600	76	77	78	79	80	81	81
4	Pertanahan								
A	Pesentase luas lahan bersertifikasi (%)	-	-	46	49	53	57	62	62
B	Penyelesaian kasus tanah Negara	-	-	8	10	10	10	10	10
C	Penyelesaian izin lokasi (%)	-	-	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5	Urusan Lingkungan Hidup								
A	Cakupan pengawasan terhadap izin lingkungan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
B	Penegakan hukum lingkungan yang terfasilitasi (kasus)	5	5	5	5	5	5	5	5
C	Jumlah Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup (kasus)	8	8	7	7	7	7	7	7
D	Indeks Kualitas lingkungan Hidup:								
	- Indeks kualitas air	C Dan D (Tercemar Sedang)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)
	- Indeks kualitas Udara	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik
	-SO2	17,38 µ/NM ³	17,38 µ/NM ³	60 µ/NM ³	60 µ/NM ³	60 µ/NM ³	60 µ/NM ³	60 µ/NM ³	60 µ/NM ³
	-NO2	16,6 µ/NM	16,6 µ/NM ³	100 µ/NM ³	100 µ/NM ³	100 µ/NM ³	100 µ/NM ³	100 µ/NM ³	100 µ/NM ³
E	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	70,009	70,279	70,559	71,25	71,692	72,458	72,702	
F	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
G	Terintegrasi RPPLH dalam rencana pembangunan Kab/Kota	-	-	-	-	Ada	Ada	ada	ada
h	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi		Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
I	Penegakan hukum lingkungan yang terfasilitasi	5	5	5	5	5	5	5	5
j	Jumlah limbah B3 yang dikelola	-	2	1	1	2	2	2	2

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
k	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang diawasi ketatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota		5,8 %	11,70 %	29,40 %	33,30 %	33,30 %	44,40 %	45 %
l	Peningkatan Kapasitas Saarana dan Prasarana Pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di Kab/kota	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada	ada
m	Terfasilitasinya pendampingan kegiatan Proklim	2 kampung	2 kampung	2 kampung	2 kampung	2 kampung	2 kampung	2 kampung	12
n	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat			1		2			
o	Terlaksananya Pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	Ada Sekolah Adiwiyata GSB (Gerakan sumbar bersih)	Ada Sekolah Adiwiyata GSB (Gerakan Sumbar bersih) Adipura	Ada Sekolah Adiwiyata GSB (Gerakan Sumbar bersih) Adipura	Ada	Ada	Ada	
P	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	10 Pengaduan	7 Pengaduan	6 Pengaduan	5 Pengaduan				
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil								
a	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	0,66	0,85	0,86	0,88	0,91	0,93	0,95	0,95
b	Rasio Bayi berakte kelahiran	0,267	0,527	0,878	0,890	0,920	0,940	0,950	0,950
c	Kepemilikan KTP (%)	66	85	86	88	91	93	95	95
d	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	224,46	368,44	381,28	457,53	594,79	684,79	820,81	820,81

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
e	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK								
	- NIK pemutakhiran data penduduk	514.264	514.408	527.648	532.924	538.253	543.636	549.072	549.072
	- Penerbitan	257.739	278.250	279.933	293.930	308.626	324.057	340.260	340.260
	- Penerapan e-KTP	289,340	seumur hidup	seumur hidup	seumur hidup	seumur hidup	seumur hidup	seumur hidup	seumur hidup
g	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	66	85	86	88	91	92	95	95
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
a	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.56	0.61	0.66	0.71	0.81	0.86	0.86	0.86
b	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0.51	0.51	0.66	0.81	0.91	1.00	1.00	1.00
c	Persentase PKK Aktif (%)	0.48	100	100	100	100	100	100	1000
d	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	49.45	65.93	68.68	72.43	74.2	76.92	76.92	76.92
e	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik (%)	58,2	67,0	75,3	83, 5	91,2	94,5	100	100
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
a	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang)	1.94	1.93	1.78	1.78	1.68	1.68	1.68	1.68

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
b	Rasio Akseptor KB	70.72	71.15	71.26	71.40	71.50	71.60	71.60	71.60
c	Persentase Perangkat daerah yang dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (%)	33	33	33	33	33	33	33	33
d	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	26	26	26	26	26	26	26	26
e	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-19 tahun (%)	58.97	58.98	60	60.01	60.15	60.21	60.21	60.21
f	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (%)	69.00	69.01	69.01	69.02	69.03	69.03	69.03	69.03
g	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	18.50	18.60	18.65	18.70	18.75	18.80	18.80	18.80
h	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	20	20.50	20.55	20.60	20.65	20.70	20.70	20.70
i	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	13.19	13.18	13.17	13.16	13.15	13.14	13.14	13.14
j	Cakupan anggota Bina Keluarga Balitas (BKB) ber-KB (%)	38.70	22.60	23.90	39.90	38.70	38.70	38.70	8.70
k	Cakupan anggota Bina Keluarga remaja (BKR) ber-KB (%)	29.4	0	18.20	24.50	24.40	29.40	29.40	29.40
l	Cakupan anggota Bina Keluarga lansia (BKL) ber-KB (%)	22.20	0	19.20	23.50	22.20	22.20	22.20	22.20
m	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	2.33	2.67	3.00	3.33	3.67	4.00	4.00	4.00
n	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan		0.63	0.70	0.74	0.81	0.88	0.88	0.88

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	0.58							
0	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
P	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
q	Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes (%)	69.00	69.15	69.20	69.25	69.30	69.35	69.35	69.35
9	Urusan Perhubungan								
a	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	1,285,300	930,000	950,000	1,000,000	1.050,000	1,100,000	1,150,000	1,150,000
b	Jumlah uji KIR angkutan Umum (unit)	954	7.200	7.400	7.500	8.000	8.500	9.000	
c	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (angkutan umum) (unit)	3	3	3	4	5	6	7	7
d	Persentase layanan angkutan darat (%)		0	0	0	0	0	0	
e	Kepemilikan KIR angkutan umum	0	0	15,71	10	7,5	5	2,5	2,5
f	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Minit)	30	30	30	30	30	30	30	30
g	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	53,000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
h	Pemasangan rambu-rambu per tahun (unit)	765	142	0	0	100	100	100	1,207
i	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,060	0,059	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,053
j	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (or Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (orang)	-	930.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1,150,000

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
k	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (orang)	124,148	88.000	90.512	92.000	94.000	96.000	98.000	98,000
l	Jumlah halte (unit)	25	25	25	28	30	33	35	35
m	Jumlah dermaga/tambatan kapal (unit)	1	1	1	2	3	4	5	5
n	Jumlah terminal (unit)	2	2	2	3	4	5	6	6
10	Urusan Komunikasi dan Informatika								
a	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (Kim)			15	15	15	15	15	15
b	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)			40	50	60	70	80	80
c	Persentase Penduduk yang menggunakan hp/Telepon (%)			40	50	60	70	80	
d	Proporsi Rumah Tangga dengan akses Internet (%)			30	40	50	60	70	70
e	Proporsi Rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)			20	30	40	50	55	55
11	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
a	Jumlah Koperasi (unit)	299	329	349	369	389	409	419	419
b	Persentase koperasi aktif (%)	55.	55	58	61	64	67	70	70

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
c	persentase koperasi aktif yang melakukan RAT (%)	36	37	43	45	47	49	51	51
d	Persentase Usaha mikro dan kecil (%)	99.23	99.23	98.20	97.50	97.00	96.5	96.00	96.00
12	Urusan Penanaman Modal								
a	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (per tahun)	9	10	11	12	13	14	15	15
b	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)	62,500,000,000	68,000,000,000	70,000,000,000	72,000,000,000	74,000,000,000	76,000,000,000	78,000,000,000	78,000,000,000
c	Rasio daya serap tenaga kerja	33,5	34,0	35,0	35,5	36,0	36,5	37,0	37,0
d	kerjasama Investasi	- (-)	- (-)	(-)	(-)	(-)	1 MoU	(-)	1 MoU
e	(Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN)	(92)	(92)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(98)
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga								
a	Pesentase organisasi pemuda yang aktif (%)	10	25	30	35	40	45	50	50
b	Persentase wirausaha muda (%)	20	25	30	35	40	45	55	55
c	Jumlah atlet berprestasi (org)	20	25	30	35	40	45	50	50
d	Jumlah Prestasi Olah Raga	5	6	8	10	13	15	20	20
e	Jumlah organisasi Olah Raga	40	45	50	55	60	65	70	70
f	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	30	32	35	38	40	45	52	52
g	Gelandang/Balai Remaa(Selain milik swasta)	1	2	3	4	5	6	7	7

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
h	Jumlah Gedung Olah Raga	12	13	15	15	18	19	20	20
14	Urusan Statistik								
a	Data Statistik Pembangunan Daerah	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
b	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
15	Urusan Kebudayaan								
a	Jumlah Grup Kesenian	66	66	67	68	69	70	71	71
b	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	2	3	3	3	3
c	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (jumlah)	1	1	1	2	2	3	3	2
d	Benda, Situs dan kawasan cagar Budaya yang diletarikan (%)	-	15	17	21	25	29	33	33
e	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	0	1	2	2	3	3	3
f	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	1	2	2	3	3	4	4
16	Urusan Perpustakaan								
a	Jumlah Pengunjung Perpustakaan setahun	5.000	5.160	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	50.000
b	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan umum daerah	51,44	49,51	45,92	45,69	45,20	44,83	6,91	6,91
c	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	1,61	1,47	1,39	1,29	1,19	1,10	1,01	100
d	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/tahun	-	160	9,840	5.000	10,000	10,000	10,000	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
e	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	7,705	7,790	7,873	7,956	8,041	8,121	8,191	100
17	Urusan Kearsipan								
a	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	-	-	2,22	13,33	88,89	23,67	28,89	28,89
b	Peningkatan SDM pengelola kersipan	2	2	6	6	10	10	15	100
II.	LAYANAN URUSAN PILIHAN								
1	Urusan Pariwisata								
a	Kunjungan wisata								
	- wisatawan mancanegara (orang)	1.600	1.667	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000	10.917
	- wisatawan nusantara (orang)	2.000.000	1.980.000	2.350.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	15.630.000
b	-Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	n/a	n/a	1.25	1.25	1.3	1.3	1.3	1.3
	- wisatawan mancanegara (Hari)	n/a	n/a	1.25	1.25	1.3	1.3	1.3	1.3
	- wisatawan nusantara (Hari)	n/a	n/a	1.25	1.25	1.3	1.3	1.3	1.3
c	PAD Sektor Pariwisata (Rp/tahun)	1.793.500.000	1.239.500.000	1.217.820.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.750.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline 2015	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2	Urusan Pertanian								
a	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	33,43	33,27	33,04	32,81	32,59	32,26	31,92	31,92
b	Produktifitas padi per hektar (kw/ha)	50,92	50,89	51,17	51,27	51,52	51,65	51,76	51,76
c	Cakupan Bina Kelompok Pertanian(%)	30,33	33,54	40	45	52	60	65	65
d	Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	n/a	n/a	n/a	5	5	5	5	20
e	Cakupan Pengawasan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (%)	13,33	13,33	13,3	20	26,67	33,33	33,33	33,33
3	Urusan Kehutanan								
a	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	805.00	200	Kewenangan Provinsi					
b	Kerusakan Kawasan Hutan	0.03	0.20	Kewenangan Provinsi					
c	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	-	0.39	Kewenangan Provinsi					
4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
a	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,54	1,57	Kewenangan Provinsi					
5	Perdagangan								
a	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	12,20	12,20	12,41	12,59	12,77	12,95	13,13	13,13

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
b	Pasar Rakyat yang menuju kriteria SNI 8152:2015 (unit)	0	0	1	1	1	1	1	5
c	Cakupan bina kelompok pedagang (%)	0.00	2,40	1,84	2,95	10	20	30	30
6	Perindustrian								
a	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,80	8,80	8,93	9,03	9,13	9,23	9,33	9,33
b	Pertumbuhan Industri (%)	n/a	32,82	6,08	6,68	7,35	8,09	8,90	8,90
c	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	0.26	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
e	Persentase tenaga kerja sektor industri (%)	7.53	7.53	7.62	8.02	8.42	8.82	9.22	9.22
f	Jumlah sentra IKM (unit)	1	0	0	0	1	1	1	4
g	Produk IKM yang berkualitas (bersertifikat) (jenis produk)		6	8	10	12	15	20	20
7	Ketransmigrasian								
a	Persentase Transmigran swakarsa	21	-	-	-	-	-	-	-
8	Urusan Perikanan								
b	Produksi perikanan	46,713	46,660	50,371	53,945	57,606	61,203	64,876	64,876
	- Budidaya (ton)	10.327	12.210	13.431	14.505	15.666	16.763	17.936	17.936
	- Tangkap (ton)	37.909	34.440	36.940	39.440	41.940	44.440	46.940	46.940

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
c	Konsumsi Ikan (kg/org/kapita)	33.85	35	36	37	38	39	40	40
d	Cakupan bina kelompok nelayan (unit)	185	170	186	203	220	237	253	253
e	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	23.356	23.660	24.011	25.636	27.261	28.00	28.886	28.886
III.	PENUNJANG URUSAN								
1	Perencanaan Pembangunan								
a	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
b	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
c	Tersedianya dokumen perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
d	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
e	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	95	96	97	98	99	100	100	100
f	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (%)	95	96	96	98	100	100	100	100
g	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Keuangan								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
a	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
b	Peningkatan PAD	-	116.095.536.070)	(127.705.089.677)	(140.475.598.645)	(154.523.158.509)	(169.975.474.360)	(186.973.021796)	(186.973.021.796)
c	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	11.36	7.85	5.94	-	-	-	-	-
d	Persentase belanja pendidikan (20%) (%)	4.80	3.35	23.94	-	-	-	-	-
e	Persentase belanja kesehatan (10%) (%)	7.22	8.37	4.98	-	-	-	-	-
f	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tak langsung	1.52.31 2.64.42	1.44.76 2.75.15	1.40.64 2.59.30	-	-	-	-	-
g	Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa (%)	0,15	0,17	0,25	0,30	-	-	-	-
h	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
a	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	20	20	25	28,91	30	32	32	32
b	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	28	28	35	35	35	35	158	158
c	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	132	132	158	158	158	158	158	158
d	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	4790	4790	4800	4809	4900	4920	4920	4920
4	Penelitian dan Pengembangan								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
a	Persentase implementasi rencana kelitbangan								
b	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (5)	0	0	0	4.44	4.44	4.44	4.44	17.76
c	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	0	0	4.44	33.33	66.67	100	100	1000
d	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	0	0	2	2	2	2	2	10
5	Pengawasan								
a	Persentase tindak lanjut temuan (%)	-	85	87	87	89	91	93	95
b	Jumlah temuan BPK	-	20	20	17	16	15	14	13
c	Persentase pelanggaran pegawai (%)	-	0,036	0,036	0,069	0,5	0,4	0,3	0,2
6	Sekretariat Daerah								
a	Persentase rata-rata pelayanan publik OPD yang bernilai baik		76/ Baik	78/ Baik	80/ Baik	88/ Baik	90/ Sangat baik	95/ Baik	95/ Sangat baik
b	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi (%)		100	100	100	100	100	100	100
c	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan (%)		80	80	80	90	90	100	100
d	Persentase Layanan Pengadaan Ssecara Elektronik		100	100	100	100	100	100	100
e	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah		C	B	BB	BB	BB	BB	BB
f	Nilai LPPD		3037	3130	3180	3230	3300	3350	3350
g	Peringkat MTQ tingkat provinsi		7 besar	6 besar	5 besar	5 besar	5 besar	5 besar	5 besar
h	Persentase TPQ Aktif (%)		80	80	90	90	95	95	99

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun		Target Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
i	Jumlah struktur sosial aktif dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika (kelompok)		0	0	31	36	41	46	46
j	Persentase ormas yang terdaftar aktif sesuai ketentuan perundang-undangan (%)		80	80	90	95	95	100	100
7	Sekretariat DPRD								
a	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
b	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
c	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber data : Pembahasan bersama Perangkat Daerah



PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 - 2021



BAB IX

PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, yang berisikan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, peraturan perundang - undangan serta dokumen lainnya.

Penyusunan Perubahan RPJMD ini telah melalui pendekatan teknokratik, top-down, bottom-up, partisipatif, serta pendekatan politis, dengan melibatkan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Untuk menjamin pencapaian visi, misi, dan program yang telah disusun.

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI



PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 - 2021



Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan

Jl. Jendral Sudirman No. 532, Sago, Painan
Kecamatan IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan – Sumatera Barat
<http://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/>
email: bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id